

UNIVERSITAS TERBUKA

Dulu, Kini, dan Esok

20
tahun



Editor : EFFENDI WAHYONO, dkk



UNIVERSITAS TERBUKA

UNIVERSITAS TERBUKA

Dulu, Kini dan Esok



or : EFFENDI WAHYONO, dkk



UNIVERSITAS TERBUKA

Hak Penerbitan @ pada Pusat Penerbitan Universitas Terbuka
Departemen Pendidikan Nasional
Kotak Pos 6666 - Jakarta 10001
Indonesia

Dilarang mengutip sebagian atau pun seluruh buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin dari penerbit

Edisi Kesatu
Cetakan pertama, September 2004
Cetakan kedua, Juni 2005

*Editor Materi : Effendi Wahyono
Setijadi*

*Editor Bahasa : Asandhimitra
Zainuddin
Widyasari*

*Desain Sampul : Zulkarnaini
Tata Letak : Andy Sosiawan*

378.17509

DUA 20 tahun Universitas Terbuka: dulu, kini, dan esok/
Tim Penulis Universitas Terbuka; editor Effendi Wahyono.
- Cet. 1 -- Jakarta: Universitas Terbuka, 2004
450 p. ; 25 cm
ISBN: 979-689-690-7

1. Universitas Terbuka - Sejarah Pendidikan Jarak Jauh
- I. Tim Penulis Universitas Terbuka
- II. Wahyono, Effendi
- III. Setijadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PENDAHULUAN	vi
BAB I: SEJARAH DAN POSISI SISTEM PENDIDIKAN JARAK JAUH DALAM PENDIDIKAN NASIONAL	
Perkembangan dan Kontribusi Pendidikan Tinggi Jarak Jauh dalam Upaya Global Membangun Masyarakat Berbasis Pengetahuan <i>Aminudin Zuhairi</i>	3
Pengantar	3
Pengertian Pendidikan Jarak Jauh	7
Asal Usul dan Perkembangan Pendidikan Tinggi Jarak Jauh	12
Pemanfaatan Teknologi Baru dan PJJ Generasi Kelima	21
Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan Tinggi Jarak Jauh	29
Tuntutan Program PTJJ Berkualitas dari Pihak yang Berkepentingan	33
Paradigma Baru dan Prospek Masa Depan Pendidikan Tinggi Jarak Jauh	35
Simpulan	53
Daftar Pustaka	56

**Perkembangan dan Kontribusi Pendidikan Jarak Jauh
dalam Upaya Pembangunan Masyarakat Indonesia
Berbasis Pengetahuan** **62**

Aminudin Zuhairi dan Effendi Wahyono

Pengantar **62**

Akar Pertumbuhan, Konteks, dan Kebutuhan

Pendidikan Jarak Jauh **63**

Perkembangan dalam Penerapan Pendidikan Jarak
Jauh di Indonesia **70**

Penerapan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan
Dasar dan Menengah **76**

Penerapan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan
Tinggi **81**

Peningkatan Kualitas, Pemanfaatan Teknologi Baru
dan Pendirian Asosiasi Profesi **83**

Simpulan **87**

Daftar Pustaka **88**

**Arah Perkembangan Pendidikan Jarak Jauh di
Indonesia** **92**

Udin S. Winataputra

Pengantar **92**

Konteks Pendidikan Jarak Jauh di Indonesia **94**

Arah Perkembangan PJJ di Indonesia **95**

Simpulan **99**

Daftar Pustaka **99**

BAB II: SEJARAH PERKEMBANGAN UNIVERSITAS TERBUKA

Berdirinya Universitas Terbuka	103
<i>Effendi Wahyono dan Setijadi</i>	
Pengantar	103
Pembentukan Panitia	106
Empat Komponen Sistem Dasar	110
Bentuk Organisasi	112
Pengembangan Program Studi	116
Peresmian Universitas Terbuka	118
Visi, Misi, dan Kebijakan ke-1: Lahir dengan Selamat	119
Simpulan	127
Daftar Pustaka	127
 Universitas Terbuka Periode 1984-1992	 129
<i>Setijadi</i>	
Pengantar	129
Visi, Misi, dan Kebijakan ke-2: Pertahanan Hidup	130
Visi, Misi, dan Kebijakan ke-3: Konsolidasi	134
Perkembangan Sistem Universitas Terbuka	136
Antara Harapan dan Kenyataan	158
Kendala dan Pendukung Pelaksanaan Visi dan Misi	160
 Universitas Terbuka Periode 1992-1996	 162
<i>Benny Soeprapto</i>	
Pengantar	162
Kebijakan UT: Sasaran Layanan dan Kelembagaan	165
Beberapa Informasi Faktual Perkembangan UT	171
Harapan untuk Masa Depan UT	178
Kendala yang Dihadapi	183

Universitas Terbuka Periode 1996-2000	185
<i>Bambang Sutjiatmo</i>	
Pengantar	185
Visi, Misi, dan Kebijakan ke-4: Menjadi Pusat Unggulan	186
Peningkatan Mutu dan Potensi SDM	189
Peningkatan Mutu Proses Pendidikan	191
Peningkatan Mutu Program Pendidikan	198
Evaluasi Diri	199
Pengambilan Keputusan	203
Harapan dan Hambatan; Meningkatkan Apresiasi Masyarakat terhadap Pendidikan	205
Penutup	207

Bab III UNIVERSITAS TERBUKA DI MATA MAHASISWA, ALUMNI, KARYAWAN, DAN MASYARAKAT

Universitas Terbuka di Mata Mahasiswa dan Alumni	213
<i>Sri Suharmini Wahyuningsih dan Dewi Juliah Ratnaningsih</i>	
Pengantar	213
Universitas Terbuka di Mata Mahasiswa	214
Universitas Terbuka di Mata Alumni	217
Padangan Sejawat Mahasiswa dan Alumni terhadap UT	219
Simpulan	221
Universitas Terbuka dalam Pandangan Mitra Kerja	222
<i>Yulia Budiwati</i>	
Pengantar	222
Universitas Terbuka di Mata Pimpinan Departemen	223

Universitas Terbuka di Mata Perguruan Tinggi Lain	225
Universitas Terbuka di Mata Pengguna	236

Pandangan Karyawan Terhadap Universitas Terbuka 242
Sugilar dan Agus Saryadi

Pengantar	242
Metode Pengumpulan Data	244
Gambaran Keseluruhan	245
Kesejahteraan	249
Pengembangan Karier	253
Aktualisasi Diri	255
Lingkungan Kerja	257
Simpulan	258

Pandangan Masyarakat terhadap Universitas Terbuka 260
Effendi Wahyono

Pengantar	260
Masalah Pendidikan	262
Fenomena Pendidikan	266
Landasan Hukum Pendidikan Tinggi Jarak Jauh	269
Jaringan Kemitraan Pendidikan Tinggi Jarak Jauh	271
Babak Kompetisi	272
Peran UT di Masyarakat	275
Simpulan	277
Daftar Pustaka	278

BAB IV PERAN UNIVERSITAS TERBUKA DALAM PEMBANGUNAN

Peran UT Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 283

Durri Andriani

Pengantar 283

Standarisasi Bahan Ajar, Bahan Belajar, dan Bahan

Ujian 284

Peningkatan Kualitas 288

Pengembangan dan Penyelenggaraan Pelatihan 290

Pertemuan Ilmiah 291

Penerbitan Jurnal dan Buku Ilmiah 292

Pemanfaatan Produk Akademik 293

Simpulan 294

Peran Universitas Terbuka dalam Pendidikan Tinggi di Indonesia 296

Supartomo

Pengantar 296

Posisi Indonesia di Dunia 297

Profil SDM Indonesia 300

Pendidikan dalam Pengembangan SDM 301

Universitas Terbuka di lingkup Perguruan Tinggi

Negeri 303

Simpulan 305

Daftar Pustaka 308

Peran Universitas Terbuka Sebagai Wahana Pemersatu Bangsa	309
<i>Tina Ratnawati</i>	
Pengantar	309
Daya Jangkau	310
Pemerataan Kesempatan Belajar	312
Jaringan Kerja Sama	315
Simpulan	321

BAB V SISTEM OPERASI UNIVERSITAS TERBUKA

Pelaksanaan Sistem Operasi	325
Pengantar	325
Perkembangan Program Akademik	327
<i>Siti Julaeha</i>	
Sistem Pengembangan Program	327
Daftar Pustaka	331
Perkembangan Kurikulum dan Bahan Ajar	332
<i>Mohamad Yunus</i>	
Perkembangan Kurikulum	332
Perkembangan Bahan Ajar	337
Daftar Pustaka	341
Perkembangan Sistem Registrasi Mahasiswa	342
<i>Sulaiman</i>	
Sistem Registrasi Mahasiswa	342
Perkembangan Jumlah Mahasiswa	347
Perkembangan Distribusi Bahan Ajar	349
<i>A. Agung M. Sastrawan Putra</i>	
Sistem Distribusi Bahan Ajar	349

Tantangan ke Depan (2005-2010)	362
Daftar Pustaka	364
Perkembangan Sistem Layanan Bantuan Belajar	365
<i>Mohamad Yunus</i>	
Sistem Layanan Bantuan Belajar	365
Tutorial	370
Praktek dan Praktikum	375
Bimbingan Akademik	375
Daftar Pustaka	378
Perkembangan Sistem Evaluasi Hasil Belajar	380
<i>Siti Julaehta</i>	
Sistem Evaluasi Hasil Belajar	380
Pengembangan Soal dan Pengolahan Hasil Ujian	384
Simpulan	392

BAB VI PROSPEK UNIVERSITAS TERBUKA

Memasuki Sistem Jaminan Kualitas	395
<i>Mohamad Muzammil</i>	
Pengantar	395
UT Memasuki Era Kualitas	397
Simintas dan Kilas Baliknya	403
Simpulan	410
Daftar Pustaka	410
Universitas Terbuka Menuju Pusat Unggulan	412
<i>Atwi Suparman</i>	
Pengantar	412
UT di tengah Permasalahan Bangsa	415
Prinsip Penyelenggaraan UT	417

Pengembangan UT Memasuki Era Gelora Simintas	420
Profil UT Tahun 2010	423
Catatan Akhir	429
Biodata Penulis	439
Panitia	449

KATA PENGANTAR

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Dua puluh tahun yang lalu, dunia pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi dua masalah besar, yaitu rendahnya mutu pendidikan dan rendahnya daya tampung lembaga pendidikan. Kedua hal ini sebenarnya merupakan masalah yang kontradiktif antara satu dengan lainnya. Jika hanya mutu saja yang ditingkatkan, akan berdampak pada semakin rendahnya daya tampung. Sebaliknya, jika daya tampung ditingkatkan, akan berdampak pada menurunnya mutu pendidikan.

Kita mengetahui bahwa pada waktu itu jumlah tenaga dosen pada perguruan tinggi negeri hanya 50.000 orang untuk melayani 900.000 mahasiswa. Dari jumlah tersebut, hanya 10.000 orang yang menduduki pangkat yang memiliki kelayakan sebagai dosen mandiri (berpangkat Lektor ke atas), sedangkan selebihnya hanya memiliki syarat sebagai Asisten. Ditinjau dari segi distribusi wilayah, keadaan lebih memprihatinkan yaitu, 10.000 orang dosen yang berpangkat Lektor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa. Ternyata jumlah yang kecil tersebut pemanfaatannya belum optimal.

Dalam kondisi seperti itu, Pemerintah memutuskan untuk mendirikan Universitas Terbuka (UT) dengan harapan: pertama, UT dapat meningkatkan mutu guru dengan memberikan pendidikan lanjutan atau latihan tanpa harus meninggalkan tugasnya sebagai guru; kedua, UT dapat meningkatkan daya tampung pendidikan tinggi dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikannya pada tingkat pendidikan tinggi. Selanjutnya untuk pengembangan bahan ajar dan ujian, UT diharapkan dapat memanfaatkan tenaga ahli dari berbagai perguruan tinggi atau instansi lain. Apakah harapan pemerintah itu telah dipenuhi oleh UT dalam perjalanannya selama 20 tahun?

Kita dapat melihat bahwa sampai saat ini terdapat 472.458 guru sekolah dasar yang telah memiliki ijazah D-II Guru Sekolah Dasar dari UT; UT juga telah meluluskan 40.396 mahasiswa D-III untuk guru sekolah lanjutan pertama, dan 31.193 S1 guru sekolah lanjutan tingkat atas. Apakah setelah mengikuti pendidikan di UT mereka memiliki kemampuan dan keterampilan mengajar secara lebih baik yang dapat memberikan dampak pada peningkatan mutu pendidikan kita? Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Kelahiran UT ternyata telah mengubah pandangan masyarakat tentang pendidikan tinggi. Jika dulu semua orang Indonesia yang telah menyelesaikan sekolah pada umumnya ingin langsung melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, kemudian mencari pekerjaan, kini mereka berpikir lain. Karena berbagai hal, terutama masalah ekonomi yaitu tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi mereka memilih untuk bekerja, kemudian sambil bekerja mereka melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi seperti UT, sehingga tidak perlu meninggalkan pekerjaannya untuk belajar. Melihat kenyataan seperti ini, maka daya tampung bukan lagi menjadi masalah. Masalahnya kemudian adalah bagaimana perguruan tinggi seperti UT dapat memberikan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 107 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh. Dalam Keputusan itu, ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi perguruan tinggi yang akan membuka pendidikan jarak jauh. Jika syarat-syarat itu dipenuhi, diharapkan pendidikan tinggi jarak jauh dapat memberikan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat.

Selain itu, dengan keluarnya Surat Keputusan tersebut, perguruan tinggi lain juga dapat menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, asalkan syarat-syarat yang ditentukan dipenuhi. Dengan demikian,

pendidikan jarak jauh bukan monopoli UT. Dengan diundangkannya UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kedudukan pendidikan jarak jauh semakin jelas dan luas karena secara sistematis merupakan bagian dari keseluruhan sistem pendidikan nasional. Adanya pendidikan jarak jauh selain UT akan menimbulkan daya saing yang tinggi di lingkungan penyelenggara pendidikan tinggi jarak jauh, yang dapat memberikan dampak pada peningkatan kualitas layanannya. Meskipun demikian, harus diakui bahwa sampai saat ini UT memiliki infrastruktur yang paling memadai sebagai institusi pendidikan tinggi jarak jauh di Indonesia.

Karena UT telah memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan jarak jauh di Indonesia selama 20 tahun, buku *20 Tahun UT, Dulu, Kini, dan Esok* ini perlu dibaca dan dipelajari oleh mereka yang ingin mengetahui lebih banyak tentang pendidikan tinggi jarak jauh di Indonesia. Buku ini melengkapi buku-buku lain tentang pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh yang pernah diterbitkan oleh UT.

Bagi pembaca saya ucapkan selamat membaca, dan untuk UT saya ucapkan selamat memperingati hari jadinya yang ke-20 tahun, dengan harapan di masa mendatang UT lebih meningkatkan mutu dan kualitas layanannya kepada masyarakat, khususnya kepada mahasiswanya.

Jakarta, 4 September 2004

**Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

Satryo Soemantri Brodjonegoro

KATA PENGANTAR

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Dua puluh tahun yang lalu, tepatnya tanggal 4 September 1984 bertempat di Bina Graha, Presiden Suharto meresmikan berdirinya Universitas Terbuka (UT). Dalam acara peresmian itu diselenggarakan pula kuliah perdana UT yang diberikan oleh begawan ekonomi Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo. Upacara peresmian berdirinya UT ini dipancarluaskan ke seluruh wilayah Indonesia melalui siaran Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI). Kelahiran UT saat itu dibidani oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (kini Departemen Pendidikan Nasional) dalam masa persiapan yang hanya sekitar 10 bulan.

Pada tanggal 4 September 2004, UT memperingati hari jadinya yang ke-20. Dalam perjalannya selama 20 tahun, banyak hal yang telah dilalui. Memang banyak hal yang telah dikerjakan UT, tetapi masih banyak hal yang ingin dicapai UT dalam tahun-tahun mendatang. UT dapat terus berkembang hingga saat ini berkat dukungan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan bantuan seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Sampai saat ini UT merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan sistem jarak jauh. Sebagai satu-satunya penyelenggara pendidikan tinggi jarak jauh, keberadaan UT tampak di luar sistem yang ada. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi jarak jauh, UT memiliki sistem yang berbeda dengan sistem pendidikan tatap muka. Hal tersebut belum banyak diketahui masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat pendidikan.

Bab ketiga memberikan gambaran tentang UT di mata mahasiswa, alumni, karyawan, dan masyarakat. Keseluruhan bab ini berisi empat artikel, yang meliputi UT di mata mahasiswa dan alumni, UT di mata pimpinan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, UT di mata perguruan tinggi lain, dan UT di mata pengguna, serta UT di mata karyawan, dan akhirnya UT dalam pandangan masyarakat.

Bab keempat membicarakan peran UT dalam pembangunan. Bab ini terdiri atas tiga artikel yang masing-masing membahas peran UT dalam pembangunan SDM di Indonesia, peran UT dalam pendidikan tinggi, dan peran UT sebagai lembaga pemersatu bangsa.

Sistem operasi UT yang merupakan karakteristik dalam pendidikan jarak jauh dibahas secara tersendiri dalam **bab kelima**. Bab ini membahas pengembangan program akademik, kurikulum dan bahan ajar, sistem registrasi, distribusi bahan ajar, layanan bantuan belajar, dan sistem evaluasi hasil belajar.

Buku ini ditutup dengan **bab keenam**, yaitu uraian tentang prospek UT di masa mendatang. Visi UT dalam 10 tahun mendatang adalah menjadi pusat unggulan dalam penyelenggaraan, penelitian, dan penyebaran informasi pendidikan tinggi jarak jauh, baik di tingkat Asia maupun dunia. Dua artikel dalam bab ini membahas langkah-langkah UT dalam rangka mewujudkan visi tersebut.

Jakarta, 4 September 2004

Editor

memperingati hari jadi, buku ini ditulis dalam bentuk kumpulan artikel yang merupakan tinjauan kritis tentang perjalanan UT selama 20 tahun dari masing-masing penulis, serta pandangan masyarakat tentang UT. Meskipun buku yang terdiri atas enam bab ini ditulis oleh 20 orang staf UT dari berbagai latar belakang pendidikan, keutuhan gambaran tentang UT selama 20 tahun diusahakan tetap terjaga.

Secara umum buku ini terdiri atas lima bagian yang meliputi latar belakang pendidikan tinggi jarak jauh (PTJJ), sejarah perkembangan UT, sistem operasional UT, peran UT dalam masyarakat, dan prospek UT di masa depan. Kelima bagian ini kemudian diuraikan dalam enam bab. Setiap bab ditulis oleh beberapa orang penulis.

Bab pertama berisi tiga artikel yang membicarakan tentang latar belakang lahirnya institusi PTJJ dalam lingkup dunia, kemudian perjalanan PTJJ masuk ke Indonesia dengan berbagai kepentingannya, serta posisi UT dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Lahirnya institusi PTJJ pada awalnya didasarkan pada kebutuhan institusi perguruan tinggi sebagai pengembang dan garda ilmu pengetahuan untuk dapat menjangkau layanan kepada masyarakat secara lebih luas. Dalam bab pertama ini dapat ditelusuri perkembangan institusi PTJJ di Indonesia dan pelaksanaan peran UT dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Bab kedua memuat gambaran perjalanan UT selama 20 tahun. Bab ini memuat empat artikel. Artikel pertama menggambarkan latar belakang berdirinya UT, kemudian dilanjutkan dengan laporan tiga masa jabatan Rektor UT yang mengisahkan tentang masa-masa kepemimpinan mereka. Bab ini menarik karena ditulis oleh pelaku sejarah pemimpin UT meliputi apa yang pernah terjadi, apa yang diharapkan, dan bagaimana kemudian yang menjadi kenyataan.

Masalah yang dihadapi UT selama ini bukanlah dalam hal pengelolaan waktu, tetapi dalam hal operasional pembelajaran jarak jauh. Unit operasional utama adalah fakultas. Fakultas bertugas menyusun kurikulum dan menentukan standar mutu. Berdasarkan kurikulum, disusun garis besar program pengajaran (GBPP), kemudian dituangkan dalam penulisan bahan ajar yang disusun dalam bentuk modul. Bahan ajar ini digandakan, kemudian didistribusikan kepada mahasiswa UT yang telah melakukan registrasi, yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia (termasuk di beberapa negara di luar Indonesia) untuk dipelajari. Dalam waktu tertentu, diadakan evaluasi untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa setelah mereka mempelajari mata kuliah secara mandiri. Jaringan unit operasional ini meliputi unit utama yaitu fakultas, dengan berbagai unit pendukungnya yaitu pusat penerbitan bahan ajar, registrasi, pusat distribusi, pusat pengujian, dan pusat komputer.

Jaringan operasional tersebut sangat vital bagi kelangsungan perguruan tinggi jarak jauh seperti UT, tidak dikenal dalam perguruan tinggi tatap muka. Perguruan tinggi tatap muka mempunyai masalah dalam keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga pengajar; sedangkan UT mempunyai masalah dalam hal operasional. Demikianlah perbedaan antara UT dengan perguruan tinggi konvensional. Oleh karena itu, pendidikan tinggi jarak jauh seyogianya mempunyai landasan hukum dan peraturan tersendiri yang berbeda dengan perguruan tinggi tatap muka. Dengan adanya peraturan tersebut, pendidikan tinggi jarak jauh (PTJJ) akan memiliki pijakan yang jelas dalam mengembangkan institusinya, serta lebih mudah memberikan layanannya kepada mahasiswa.

Buku ini memberikan gambaran perjalanan panjang UT selama dua puluh tahun, yang menunjukkan perbedaan karakteristik antara perguruan tinggi tatap muka dengan perguruan tinggi jarak jauh. Berbeda dengan buku-buku sejenis yang ditulis dalam rangka

seminar yang jumlahnya di bawah 500 orang, digunakan aula yang bertempat di lantai 3 Gedung Umum. Keduanya, baik Gedung Serba Guna maupun aula Gedung Umum, dapat pula dimanfaatkan oleh pihak lain di luar UT. Di antara gedung-gedung UT terdapat tiga buah wisma yang juga dapat dimanfaatkan oleh pihak luar UT. Untuk menjaga agar karyawan UT tetap sehat dan kuat, UT memberikan layanan kesehatan serta menyediakan arena olah raga mulai dari tenis, tenis meja, bulu tangkis, voli, dan *fitnes*.

Untuk meningkatkan kenyamanan kerja dan mewujudkan visi dan misi UT, sejak tahun 2002-Agustus 2004 UT membangun beberapa gedung, yaitu (1) gedung Pusat Antar Universitas yang di dalamnya meliputi ruang Setijadi, Pusat Antar Universitas, Pusat Distribusi, Pusat Jaminan Kualitas (Pusmintas), Hubungan Masyarakat (Humas), dan ruang Dharma Wanita; (2) gedung Fakultas II, yang diperuntukkan bagi Pusat Penerbitan, sebagian ruang FKIP, Ruang Sidang, dan Laboratorium; (3) gedung Pelayanan Publik yang ditempati oleh Unit Pelayanan Mahasiswa (Pelma), Koperasi Karunika dan Bursa Buku, Bank BRI, Kantor Pos, dan Café. Seluruh gedung baru tersebut luasnya 5.291 M², dilengkapi dengan area parkir dan taman yang luasnya lebih dari 5.000 M².

Dalam bidang SDM, saat ini UT memiliki 1613 karyawan. Sebanyak 864 orang bekerja di UT Pusat, dan selebihnya bekerja di 35 UPBJJ (Unit Program Belajar Jarak Jauh) yang merupakan mata rantai jaringan layanan UT yang tersebar di 35 kota di seluruh wilayah Indonesia. Dari keseluruhan jumlah karyawan tersebut, UT memiliki kurang lebih 50 orang tenaga bergelar master dan doktor dalam bidang manajemen pendidikan jarak jauh. Mereka adalah wakil yang dikirim oleh UT antara tahun 1985-1990-an ke luar negeri untuk mengikuti pendidikan S-2 dan S-3 dalam bidang pendidikan jarak jauh.

adalah mahasiswa program penyetaraan D-II Guru Sekolah Dasar (D-II PGSD). Dalam perjalanannya selama 20 tahun, lebih dari satu juta warga negara Indonesia pernah tercatat sebagai mahasiswa UT, dan lebih dari setengah juta orang tercatat sebagai alumni UT. Karena jumlah yang besar ini, The Open University di Inggris memasukkan UT sebagai salah satu dari sebelas Mega Universities di dunia sebagaimana disebutkan dalam buku Johns Daniel, *The Mega Universities and Knowledge Media*.

Pengelolaan mahasiswa dalam jumlah besar tidak mungkin dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi konvensional (tatap muka). Dengan jumlah mahasiswa yang hampir mencapai 50 ribu orang, sebuah universitas konvensional tidak lagi mudah untuk dikelola, mulai dari mengatur jam perkuliahan dosen, ruang kuliah, penentuan mata kuliah dan sebagainya. Hal ini tidak terjadi dalam perkuliahan sistem jarak jauh. UT menawarkan kurang lebih 800 mata kuliah setiap semester yang dapat dipilih secara bebas oleh mahasiswa.

UT tidak mungkin dapat melayani mahasiswa yang demikian besar jumlahnya dengan keseluruhan jumlah mata kuliah lebih dari 1000 mata kuliah tanpa didukung oleh sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Di atas tanah yang luasnya kurang lebih 14 hektar di daerah Pondok Cabe, Pamulang, (Jakarta Selatan) berdiri 20 bangunan perkantoran UT. Bangunan itu meliputi antara lain Gedung Rektorat, Gedung Fakultas, Gedung Perpustakaan, Gedung Pusat Komputer, Gedung Pusat Pengolahan Pengujian, Gedung Pusat Produksi Multi Media, Gedung Pusat Distribusi, Gudang Bahan Ajar, dan Percetakan. Di samping itu terdapat pula Gedung Serba Guna yang dapat menampung 2000 orang. Gedung ini selain digunakan untuk acara wisuda UT yang diadakan empat kali dalam satu tahun, juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan orang banyak. Untuk keperluan rapat kerja atau

ganda. Sistem ini dilakukan pertama kali oleh University of London pada tahun 1830-an, ketika universitas itu memberikan kesempatan kepada masyarakat di luar London, bahkan di daerah-daerah koloni Inggris untuk mengikuti kuliah di University of London.

Universitas yang sejak berdirinya dirancang sebagai perguruan tinggi jarak jauh adalah University of South Africa (UNISA). Universitas ini didirikan pada tahun 1946 dengan memberikan layanan perkuliahan secara korespondensi. Kelahiran UNISA ini barangkali dapat disebut sebagai awal kelahiran pendidikan tinggi jarak jauh *modus tunggal*. Penyelenggaraan pendidikan tinggi sistem jarak jauh semakin berkembang setelah pemerintah Inggris mendirikan sebuah universitas modern dengan sistem terbuka dan jarak jauh yang bernama United Kingdom Open University (UKOU) pada tahun 1969. Kelahiran UKOU itu mendorong berbagai negara lainnya, termasuk Indonesia, mendirikan universitas sejenis karena layanan yang diberikan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas tanpa kendala ruang dan waktu.

Pemerintah Indonesia mendirikan Universitas Terbuka (UT) dilatarbelakangi oleh adanya dua masalah besar dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu rendahnya mutu pendidikan dan rendahnya daya tampung perguruan tinggi. Pendirian UT diharapkan dapat mengatasi dua masalah tersebut. Ketika UT berdiri pada tahun 1984, yaitu pada tanggal 4 September, peminat yang menyatakan tertarik mendaftar menjadi mahasiswa UT mencapai lebih dari 250 ribu orang. Ketika registrasi dibuka, terdapat sekitar 54 ribu orang yang secara resmi terdaftar sebagai mahasiswa. Jumlah ini untuk ukuran sebuah perguruan tinggi negeri yang baru berdiri merupakan hal yang luar biasa, melebihi jumlah mahasiswa di perguruan tinggi negeri yang paling besar sekalipun, seperti UI dan UGM. Dalam perkembangan 10 tahun kemudian, jumlah mahasiswa mencapai kurang lebih 400 ribu orang. Dari jumlah tersebut, sebagian besar

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan tinggi secara jarak jauh umumnya dilatarbelakangi oleh adanya keinginan sebuah perguruan tinggi untuk dapat melayani masyarakat secara lebih luas. Untuk dapat mewujudkan keinginan tersebut, perguruan tinggi sistem konvensional atau tatap muka menghadapi kendala ruang dan waktu. Mereka hanya dapat melayani masyarakat atau mahasiswa yang hadir ke kampus secara teratur. Dalam sistem ini, sering pula terjadi ketidakseimbangan antara jumlah mahasiswa yang harus dilayani dengan ruang yang tersedia, sehingga memerlukan pengaturan jadwal perkuliahan yang sangat ketat. Keinginan perguruan tinggi untuk memberikan pelayanan yang dapat melampaui kendala ruang dan waktu inilah yang memunculkan gagasan untuk memberikan layanan sistem jarak jauh, di samping sistem tatap muka yang telah mereka jalankan. Pemberian layanan melalui dua sistem (sistem tatap muka dan sistem jarak jauh) kemudian dikenal dengan *modus*

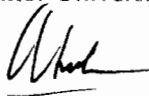
Sebagai upaya memperkenalkan sistem pendidikan tinggi jarak jauh, UT telah menerbitkan beberapa buku tentang pendidikan tinggi jarak jauh yang berisi paparan tentang konsep, teori, dan praktek penyelenggaraan pendidikan dengan sistem jarak jauh. Meskipun banyak publikasi tentang pendidikan jarak jauh telah diterbitkan UT, tetapi sebagai satu-satunya penyelenggara pendidikan tinggi jarak jauh, keberadaan UT masih belum banyak diketahui orang. Banyak orang berbicara mengenai pendidikan tinggi di Indonesia tanpa menyebut UT. Banyak masyarakat pendidikan di Indonesia yang belum mengetahui tentang sistem pendidikan jarak jauh.

Buku ini khusus membahas bagaimana perjalanan UT selama 20 tahun. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang UT. Buku ini sebenarnya juga merupakan pertanggungjawaban UT sebagai lembaga publik terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang dilayani UT.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim penulis, tim editor, dan terutama kepada Ketua Lembaga Penelitian UT yang memungkinkan terbitnya buku *20 Tahun UT: Dulu, Kini, dan Esok* ini. Para penulis telah diberikan otonomi secara penuh dalam menuangkan gagasan dan pemikirannya dalam buku ini. Kami percaya bahwa mereka menggunakan otonomi yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 4 September 2004

Rektor Universitas Terbuka



M. Atwi Suparman

BAB I

SEJARAH DAN POSISI SISTEM PENDIDIKAN JARAK JAUH DALAM PENDIDIKAN NASIONAL

PERKEMBANGAN DAN KONTRIBUSI PENDIDIKAN TINGGI JARAK JAUH DALAM UPAYA GLOBAL MEMBANGUN MASYARAKAT BERBASIS PENGETAHUAN

Aminudin Zubairi

Pengantar

Makalah ini mengulas perkembangan dan kontribusi pendidikan tinggi jarak jauh (PTJJ) dalam upaya pembangunan masyarakat global berbasis pengetahuan, mulai dari awal berdirinya hingga saat ini, serta prospek perkembangannya pada masa yang akan datang. Pembahasan dimulai dengan pengertian pendidikan jarak jauh dan uraian tentang asal-usul PTJJ, mulai dari era pendidikan korespondensi menjadi pendidikan berbasis multimedia, berbasis komputer dan teknologi digital, seiring dengan perkembangan PTJJ memasuki generasi kelima dalam pemanfaatan teknologi baru. PTJJ menghendaki jenis, kompetensi serta kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang beragam. Institusi PTJJ menghadapi tuntutan pihak yang berkepentingan untuk menyelenggara-

kan pendidikan berkualitas, memenuhi akuntabilitas publik, serta menerapkan manajemen yang terbuka dan transparan. Paradigma baru masyarakat berbasis pengetahuan dan arah perkembangan menuju masa mendatang menghendaki PTJJ untuk selalu meningkatkan kualitas, daya saing dan melakukan reformasi dalam paradigma penyelenggaraan PTJJ yang lebih berfokus pada kebutuhan pengguna jasa dan pengembangan kompetensi inti institusi. Perkembangan teknologi dan kecenderungan masa depan membawa konsekuensi suatu bangsa untuk terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan SDM nasional. Sejarah membuktikan bahwa institusi pendidikan berkualitas tetap lestari dan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan SDM nasional maupun internasional. Institusi PTJJ berkualitas yang masih berusia muda dituntut untuk mampu membuktikan manfaat keberadaannya dalam perjalanan panjang sejarahnya menembus waktu menuju masa mendatang.

Berbicara tentang perkembangan pendidikan tinggi jarak jauh (PTJJ), pengantar berikut ini sangat menarik untuk kita simak bersama yang menunjukkan paparan keterkaitan beberapa tokoh penting pemimpin dunia dengan PTJJ. Kita tentu mengenal atau pernah mendengar nama beberapa tokoh pemimpin kaliber internasional yang berasal dari berbagai belahan dunia yang berbeda, yaitu Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev, Robert Mugabe dan Harold Wilson. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka memiliki ideologi pemikiran serta filosofi politik dan ekonomi yang berbeda, keempat tokoh tersebut memiliki kesamaan dalam hal minat dan keterkaitan yang sangat kuat dengan PTJJ, yang berperan penting dalam kehidupan politik dan profesional mereka. Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev dan Robert Mugabe adalah tokoh yang terkait dengan PTJJ sebagai peserta didik. Sedangkan Harold Wilson adalah tokoh protagonis yang berperan sentral sebagai penggagas pendirian

universitas terbuka, sebuah sistem pendidikan tinggi yang kemudian diakui sebagai inovasi paling komprehensif dalam sejarah reformasi pendidikan tinggi modern sepanjang abad ke-20. Keempat tokoh tersebut adalah sekadar contoh ilustrasi yang sejauh ini diketahui keterkaitannya dengan PTJJ oleh penulis, dan mungkin masih banyak lagi tokoh internasional maupun nasional yang merupakan produk PTJJ yang sukses, sangat berpengaruh dan mampu memimpin perubahan global maupun regional dalam berbagai sektor kehidupan.

Keterkaitan keempat tokoh dunia tersebut dengan PTJJ dapat dijelaskan lebih rinci dalam ilustrasi sebagai berikut. Nelson Mandela adalah aktivis politik yang pada tahun 1940-an menyelesaikan program Bachelor of Arts melalui sistem belajar korespondensi dari University of Fort Hare di Afrika Selatan, sebelum kemudian menjadi Presiden Republik Afrika Selatan dan menerima Penghargaan Nobel Perdamaian (ANC, 2004). Mikhail Gorbachev mengikuti program ekonomi pertanian melalui sistem belajar jarak jauh pada Stavropol Agricultural Institute di ex-negara Uni Soviet (kini Rusia) mulai tahun 1962 dan selesai pada tahun 1967, sebelum kemudian naik menjadi pemimpin tertinggi ex-negara Uni Soviet dan juga menerima Penghargaan Nobel Perdamaian. Robert Mugabe, juga seorang aktivis politik, menempuh program belajar jarak jauh dalam bidang hukum pada University of London, yang memiliki kampus di Inggris, dari dalam penjara di Rhodesia (kini menjadi Zimbabwe) dalam dasawarsa 1960-an, sebelum kemudian menjadi Perdana Menteri Zimbabwe, salah satu negara di benua Afrika SubSahara. Pada tahun 1963, Harold Wilson menjadi sangat terkesan dan kemudian tertarik untuk memanfaatkan teknologi dalam pendidikan tinggi, menyusul kunjungan singkatnya ke ex-negara Uni Soviet. Ia segera menggagas konsep University of the Air, dan ketika kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris pada tahun

1964, ia terus bekerja keras mewujudkan gagasannya sehingga menjadi apa yang sekarang disebut sebagai The Open University of the United Kingdom, institusi pelopor PTJJ modern berbasis multi media yang didirikan pada tahun 1969 (Evans & Nation, 1989).

Di Indonesia, tanpa perlu menyebutkan nama dan kedudukan formal, beberapa tokoh pemimpin nasional dalam bidang bisnis, wirausaha, militer, politik dan pemerintahan adalah mereka yang pernah mengenyam pengalaman belajar sebagai peserta didik dalam program PTJJ yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka (UT). Sebagai sebuah institusi PTJJ nasional yang mulai beroperasi pada tahun 1984 dalam skala nasional, secara kumulatif sampai saat ini dalam kurun waktu 20 tahun, UT telah mengakomodasi lebih dari satu juta mahasiswa (tepatnya 1,095,440) dan mampu menghasilkan lebih dari setengah juta alumni (tepatnya 528,934), baik lulusan program diploma maupun sarjana, yang bekerja dalam berbagai bidang profesi dan tersebar di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Prestasi institusi PTJJ seperti UT dalam hal besarnya skala dan luasnya lingkup partisipasi mahasiswa yang bersifat nasional serta jumlah lulusan yang dihasilkan sangat sulit ditandingi oleh institusi pendidikan tinggi tatap muka manapun yang ada di Indonesia.

Kilasan sejarah di atas mengantarkan kita pada pembahasan kritis dan ringkas namun menyeluruh tentang perkembangan dan kontribusi PTJJ di berbagai belahan planet bumi sampai saat ini serta prospeknya pada masa datang. Sejarah berlanjut, dan perkembangan PTJJ pun bergulir yang diawali sebagai suatu rekayasa sosial, dan kemudian secara alamiah terus maju tanpa dapat dihentikan oleh siapapun. Kilasan sejarah tersebut menunjukkan pula bahwa PTJJ merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang muncul sebagai tanggapan konkret dan upaya konstruktif dalam menghadapi tantangan pengembangan sumber daya manusia berkualitas dan berkompotensi tinggi. Sejarah merupakan salah satu faktor yang

sangat penting dalam pembahasan tentang PTJJ masa kini dan perkembangannya menuju masa mendatang. Sebagai bagian terpadu dan menyeluruh dari sistem pendidikan tinggi, PTJJ menghadapi tantangan mengupayakan kelestarian institusi, memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan berbagai bidang kehidupan manusia, serta membangun sumber daya manusia yang tangguh dan memiliki daya saing kaliber global.

Pengertian Pendidikan Jarak Jauh

PTJJ memiliki perjalanan historis romantis yang berliku-liku, penuh kontroversi, dan bahkan pada awalnya sangat tidak populer di kalangan akademik. Kalangan akademik pada mulanya mempunyai kekhawatiran yang sangat berlebihan tentang dampak PTJJ yang bersifat negatif serta potensi buruknya yang dapat menyumbang pada penurunan standar kualitas pendidikan tinggi. Bermula dari suatu metode pendidikan yang menggunakan sistem korespondensi untuk berkomunikasi dengan mahasiswa, dalam perjalanan sejarahnya selama hampir dua abad, PTJJ telah berkembang pesat menggunakan beraneka ragam media dalam proses pembelajaran, serta mampu menunjukkan diri sebagai metode pendidikan yang efektif dan berkualitas. Spekulasi dan dugaan bahwa PTJJ menurunkan standar kualitas pendidikan tinggi kemudian terbukti sama sekali tidak benar. PTJJ berkembang menjadi metode pendidikan yang memiliki landasan teoretis yang kukuh, memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sumber daya manusia nasional maupun global, memberikan kesempatan luas bagi warga masyarakat untuk mengikuti pendidikan tinggi secara fleksibel, serta menyediakan layanan pendidikan tinggi berkualitas yang dapat terjangkau warga masyarakat.

Pengertian pendidikan jarak jauh (PJJ) dinyatakan oleh berbagai kalangan dari berbagai sudut pandang secara beraneka ragam (Keegan, 1990; Suparman & Zuhairi, 2004). Banyak peristilahan telah menyemarakkan dan menambah dinamika sistem pendidikan jarak jauh, seperti pendidikan korespondensi, pendidikan terbuka, belajar terbuka, belajar elektronik, belajar secara fleksibel, belajar sambil bergerak, serta belajar maya. Apa pun istilah yang dipergunakan pendidikan jarak jauh merupakan suatu proses pendidikan tanpa pembatas dinding-dinding sekolah. PJJ adalah suatu metode atau transaksi pendidikan yang memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) pemisahan pendidik dan peserta didik selama proses pembelajaran, (2) institusi pendidikan yang mempunyai peran penting dalam perencanaan dan pengembangan bahan pembelajaran, (3) penggunaan berbagai macam media pembelajaran, (4) tersedianya komunikasi dua arah yang tak langsung, yaitu melalui media, (5) terbatasnya frekuensi pembelajaran kelas atau kelompok, (6) adanya semacam bentuk industrialisasi pendidikan dalam pengembangan, pengadaan, dan pendistribusian bahan pembelajaran, dan (7) individualisasi proses pembelajaran. Definisi klasik dan karakteristik PJJ tersebut seolah tidak lekang oleh perkembangan zaman dan perubahan sosial, ekonomi dan teknologi sampai saat ini. Tinjauan mutakhir tentang definisi dan karakteristik PJJ makin memperkuat, memperkaya perdebatan intelektual dan wacana PJJ dewasa ini, memperkokoh kajian teoritik dan posisi PJJ, serta memperbaiki praktik terbaik PJJ secara lebih luas (Keegan, 1993; Saba, 2003).

Sistem PJJ terselenggara karena dilandasi tiga prinsip yang harus dipenuhi secara konsisten, yaitu otonomi dan kemandirian belajar; penerapan manajemen industri dalam pengembangan, pengadaan dan pendistribusian bahan pembelajaran; dan interaksi dan komunikasi melalui media (Sewart, Keegan & Holmberg, 1983;

Wedemeyer, 1971; Moore, 1983; Peters, 1983; Holmberg, 1983). Ketiga prinsip ini menentukan suatu sistem PJJ yang terencana dan berjalan dengan baik. Sampai saat ini ketiga prinsip tersebut masih tetap relevan untuk diterapkan dalam PJJ dan terus berkembang sesuai dengan penemuan riset terbaru dalam PJJ. Pemikiran dan penelitian yang kemudian dilakukan dalam PJJ semakin memperkuat landasan teori yang mendasari praktik PJJ dewasa ini maupun karakteristik PJJ sejalan perkembangan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan kebutuhan masyarakat (Holmberg, 2003; Peters, 2001; 2003; Anderson, 2003).

Secara singkat uraian tentang ketiga prinsip tersebut perlu disampaikan sebagai berikut. *Pertama*, otonomi belajar dan kemandirian belajar menekankan peran peserta didik untuk belajar secara mandiri, sehingga sangat mengurangi dan membatasi peran pendidik maupun institusi pendidikan dan memungkinkan kebebasan proses belajar peserta didik. Setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam belajar, dan tidak seorang pun tidak memperoleh kesempatan karena alasan seperti letak geografis, kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya (Wedemeyer, 1971; Moore, 1983). Tugas institusi dan pendidik menyediakan suasana yang kondusif bagi mahasiswa untuk belajar secara mandiri dan memungkinkan mahasiswa memiliki akses pada berbagai macam media dan sumber belajar.

Kedua, pendidikan jarak jauh memiliki persamaan yang mendasar dengan struktur manajemen industri dalam hal rasionalisasi, pembagian kerja, lini perakitan, produksi massa, persiapan kerja, perubahan, berorientasi pada tujuan, konsentrasi dan sentralisasi (Peters, 1983). Pendidikan jarak jauh merupakan metode rasional dalam menyediakan ilmu pengetahuan sebagai akibat dari penerapan prinsip-prinsip industri dan penggunaan teknologi. Pendidikan jarak jauh memungkinkan partisipasi peserta didik dalam

jumlah besar secara serentak tanpa dihambat oleh tempat tinggal, pekerjaan, dan sebagainya. Sebagai suatu bentuk manajemen industri pembelajaran, pendidikan jarak jauh secara struktural berbeda dengan pendidikan tatap muka. Teknologi dan perencanaan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pendidikan jarak jauh.

Ketiga, proses pembelajaran melibatkan interaksi dan komunikasi, yaitu peserta didik melakukan kontak yang menimbulkan reaksi dan respons orang lain (Holmberg, 1983). Bagi peserta didik, interaksi mencakup aktivitas belajar seperti mengkaji bahan belajar, mendengarkan siaran radio atau audiokaset, mengikuti siaran televisi, menggunakan komputer, mengerjakan latihan mandiri di rumah, dan sebagainya. Bagi penyelenggara pendidikan jarak jauh, interaksi mencakup hal-hal seperti memberikan bantuan belajar, bimbingan, tutorial, konseling, menghubungi mahasiswa, menyampaikan materi pelajaran, menggunakan media dan sarana telekomunikasi, dan sebagainya. Pendidikan jarak jauh merupakan suatu metode pembelajaran alamiah yang melibatkan komunikasi dua arah melalui media antara dosen dan mahasiswa, bilamana terdapat suatu jarak yang memisahkan mereka. Komunikasi dua arah ini sekali-sekali dapat dilakukan secara tatap muka di samping pada umumnya dilakukan melalui media komunikasi, dan bertujuan membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran.

Istilah “jarak jauh” tidak berkonotasi dengan jarak geografis, melainkan mengacu pada jarak transaksional dan metode pembelajaran yang digunakan. Oleh karena itu, PJJ bukan “pendidikan kelas jauh”. “Pendidikan kelas jauh” yang dipraktikkan oleh beberapa lembaga pendidikan tinggi di Indonesia adalah pendidikan tatap muka biasa yang diselenggarakan di berbagai ruang kelas yang terpisah dari kampus induknya. Dalam literatur, filosofi dan pemikiran pendidikan tinggi tidak dikenal istilah “pendidikan kelas jauh”.

Dalam konsep pendidikan tinggi tatap muka, proses pembelajaran diselenggarakan pada suatu kampus induk yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran, seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, kegiatan bimbingan terstruktur dan tutorial, ujian, dan sebagainya. Dalam program nontradisional, seperti kelas malam hari atau kelas ekstensi, kegiatan pembelajaran selalu diselenggarakan di kampus induk permanen yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang diperlukan.

"Pendidikan kelas jauh" tidak lazim dikenal dalam konsep pendidikan tinggi modern, karena praktik tersebut tidak mendukung suasana kondusif bagi terciptanya upaya dan proses berkelanjutan dalam pencarian, pengembangan, penciptaan dan penyebaran pengetahuan. Upaya dan proses tersebut hanya dapat terlaksana dengan adanya interaksi dan komunikasi yang intensif antara mahasiswa dan dosen, antara sesama mahasiswa, atau melalui kegiatan belajar mandiri mahasiswa dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang disediakan lembaga. Pendidikan kelas jauh menyediakan sarana ruang kelas dan dosen secara temporer, tidak sistemik, serta jauh dari norma dan standar kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pendidikan tinggi bukanlah sekadar upaya menanamkan pengetahuan tentang bidang ilmu tertentu saja kepada mahasiswa, melainkan suatu proses menyeluruh termasuk pembinaan sikap, tradisi dan nilai akademik melalui berbagai kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan fungsi dan misi pendidikan tinggi. Para mahasiswa berlatih melalui berbagai kegiatan tersebut sehingga, sebagai lulusan, mereka siap terjun dalam dunia kerja dan masyarakat untuk menjadi pemimpin profesional masa depan.

PJJ memiliki basis teoretik yang kuat serta teruji melalui praktik terbaik yang telah dilakukan oleh banyak institusi penyelenggara PJJ baik di negara maju maupun negara berkembang. PJJ pada perguruan tinggi dikembangkan untuk tujuan pemerataan akses dan kesempatan, dan bukan untuk tujuan komersial, agar supaya suatu institusi pendidikan tinggi mendapat keuntungan yang besar dalam penyelenggaraan program tersebut. PJJ mengacu pada transaksi pendidikan dengan menggunakan berbagai media karena adanya keterpisahan antara guru dan peserta didik. Media memegang peran kunci dalam PJJ. Keterpisahan dosen dengan mahasiswa menghendaki tersedianya bahan ajar cetak dan noncetak yang secara khusus dirancang untuk belajar mandiri.

Asal Usul dan Perkembangan Pendidikan Tinggi Jarak Jauh

Pendidikan tinggi jarak jauh (PTJJ) dibangun atas dasar pemikiran dan filosofi egaliter bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak dasar dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan tinggi yang diperlukan untuk mengembangkan diri, mampu bersaing dan meningkatkan kualitas hidup dalam era masyarakat modern berbasis pengetahuan. Tidak ada alasan yang dapat menghambat akses warga masyarakat untuk mengikuti pendidikan tinggi karena hal-hal seperti kondisi geografis, status sosial ekonomi, komitmen pekerjaan maupun keluarga. PTJJ berkembang melalui proses yang panjang, penuh tantangan, dan terkait dengan berbagai faktor, seperti perubahan sosial, kemampuan ekonomi pemerintah, tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, dan alternatif penyediaan pendidikan berkualitas yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. PTJJ disediakan bagi warga masyarakat yang tidak sanggup mengikuti sistem pendidikan tatap muka yang

mengharuskan peserta didik untuk hadir dan mengikuti program pembelajaran di kampus.

PTJJ lahir melalui proses rekayasa sosial, politik, ekonomi, kultural, teknologi, serta filosofi yang mendasarinya. Melalui perjalanan semacam inilah, PTJJ memiliki berbagai bentuk dan ragam seperti yang dapat dilihat sekarang ini. Sekalipun demikian, PTJJ memiliki cita-cita, visi dan misi yang sama, yaitu meningkatkan pemerataan kesempatan dan partisipasi pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, di manapun mereka bertempat tinggal. PTJJ terus dimanfaatkan dan berkembang secara optimal guna memenuhi berbagai ragam kebutuhan masyarakat dalam pendidikan tinggi. Perkembangan PTJJ ini sejalan dengan pemikiran tentang pendidikan untuk semua, belajar sepanjang hayat, serta upaya pembentukan masyarakat belajar yang menjadi cita-cita dan harapan bangsa manapun di planet bumi. Pendidikan tinggi dipandang sebagai instrumen perubahan yang fundamental dalam upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang berdaya saing global.

Istilah pendidikan tinggi bermakna luas, meliputi pendidikan setelah jenjang pendidikan sekolah, seperti akademi, institut, sekolah tinggi dan universitas. Secara historis, institusi pendidikan tinggi dalam peradaban Barat mulai berkembang pada abad ke-11 sebagai bentuk pertumbuhan dari institusi katedral dan sekolah-sekolah di daerah perkotaan. Kemudian, pada sekitar abad ke-11 dan 12 mulailah cikal bakal universitas modern sekarang, seperti *University of Bologna* di Italia, *University of Paris* di Perancis, dan *University of Oxford* di Inggris (Perkin, 1982). Dalam peradaban Islam, *Al-Azhar University* di Mesir, telah berusia lebih dari satu milenium atau seribu tahun. Institusi pendidikan tinggi di seluruh dunia kemudian berkembang terus dan berevolusi dalam bentuk, fungsi, metode pembelajaran, pemanfaatan teknologi, serta pendekatan manajemen, menyesuaikan

kan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Di Amerika Serikat, misalnya, universitas berkembang menjadi sistem multiversitas yang terdiri dari sekumpulan universitas mandiri dan otonom dengan kampus permanen yang tersebar di berbagai daerah atau kota yang di dalam wilayah suatu negara bagian.

Dalam perjalanannya yang panjang, fungsi dasar institusi pendidikan tinggi tidak berubah, yaitu melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Fungsi pendidikan dan pengajaran atau penyebaran ilmu pengetahuan secara historis sampai saat ini dan menuju masa mendatang sejauh yang dapat terlihat merupakan karakteristik dominan institusi pendidikan tinggi yang disebut universitas. Kemudian, sekalipun pada mulanya fungsi penelitian kurang menonjol, universitas masa kini menjalankan berbagai macam kegiatan yang terkait dengan fungsi pengembangan profesionalisme dan penelitian, yang bertujuan mengeksplorasi, mengembangkan, menemukan dan menyebarkan pengetahuan baru yang diperlukan masyarakat. Universitas masa kini menjadi semakin berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya penelitian dan pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu guna membantu memajukan masyarakat yang dilayaninya.

Sejarah PTJj boleh dikatakan relatif belum lama bila dibandingkan dengan sejarah pendidikan tinggi tatap muka, terutama pendidikan universitas, yang sudah berusia sekitar satu milenium. Pada umumnya institusi PTJj didirikan untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat, khususnya orang dewasa yang sudah bekerja, terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia. PTJj menjawab persoalan klasik elitisme pendidikan tinggi, yang sebelumnya hanya dapat menjangkau sebagian saja, dan bahkan di beberapa tempat di dunia sampai saat ini hanya memberikan kesempatan kepada sebagian

kecil saja dari warga masyarakat yang ada. Paradigma pendidikan tinggi terus bergeser dari elitis menjadi massal yang memungkinkan menampung banyak warga masyarakat dan kini menjadi universal sehingga semua warga masyarakat berkesempatan mengikuti pendidikan tinggi. Filosofi yang mendasari pendirian PTJJ sangat egaliter, yaitu bahwa setiap warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan tinggi. Pemikiran ini sejalan dengan prinsip pendidikan untuk semua dan pemikiran bahwa pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, adalah hak dasar setiap warga masyarakat.

Cikal bakal PTJJ baru diperkenalkan pada abad ke-19, tahun 1830, ketika *University of London* di Inggris didirikan sebagai institusi yang melaksanakan pengujian dan memberikan gelar, sementara proses pembelajaran dilaksanakan oleh institusi lainnya. Sesuai dengan konteks historis negara Inggris pada waktu itu yang memiliki banyak koloni, mahasiswa yang berada di Inggris maupun di koloni Inggris di seluruh dunia dapat menempuh ujian untuk mendapatkan gelar dari *University of London*, sedangkan proses pembelajaran mahasiswa dilakukan oleh institusi yang berada di tempat lain. Pada perempat terakhir abad ke-19, *University of Chicago* dan *Illinois Wesleyan College* di Amerika Serikat memperkenalkan program ekstensi sebagai suatu cara untuk menjangkau warga masyarakat yang tidak dapat mengikuti program tatap muka di kampus universitas yang bersangkutan.

Di Australia, PTJJ diterapkan untuk menjawab tantangan "kekuasaan absolut" jarak geografis dan kondisi geografis benua tersebut (*the tyranny of distance*). Pada awal abad ke-20, kuatnya tekanan politik waktu itu menghendaki *University of Queensland* yang baru didirikan menggunakan sistem belajar korespondensi terbimbing untuk memenuhi kebutuhan dan menjangkau mahasiswa, terutama para guru yang tinggal di daerah terpencil dan bermaksud mengikuti

program pelatihan guru dalam jabatan guna meningkatkan kualifikasi mereka. Hal serupa dilakukan pula oleh *University of Western Australia*. Penerapan PTJJ berkembang terus di Australia. Pada tahun 1950-an muncul kepeloporan *University of New England*, yang didirikan dengan misi menyelenggarakan program pendidikan tatap muka dan jarak jauh sekaligus, atau disebut sebagai institusi modus rangkap. Model penyelenggaraan ini kemudian banyak diikuti di berbagai negara yang jumlah penduduk serta sumber daya pendidikan tinggi yang dimilikinya relatif terbatas. Pada saat ini, sebagian besar universitas di Australia adalah institusi PTJJ modus rangkap yang menawarkan program pendidikan tatap muka maupun jarak jauh. Setiap institusi pendidikan tinggi tatap muka pada dasarnya memiliki prospek untuk dapat berkembang menjadi institusi PTJJ modus rangkap yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi berkualitas dengan menerapkan sistem PTJJ berbasis media dan teknologi tepat guna sehingga dapat menjangkau warga masyarakat luas yang tidak dapat mengikuti program pendidikan tinggi tatap muka. Institusi PTJJ modus rangkap kini menjadi suatu norma atau hal yang biasa dan bukan lagi menjadi kekecualian dalam sistem pendidikan tinggi di banyak negara.

Sejarah PTJJ terus berlanjut dengan pendirian institusi pelopor PTJJ modus tunggal pada sekitar pertengahan abad ke-20. *University of South Africa* (UNISA) didirikan di Afrika Selatan pada tahun 1946 sebagai universitas terbuka tertua di dunia berbasis korespondensi yang menyelenggarakan PTJJ dalam skala besar. Sejak tahun 1969, PTJJ membuat sejarah baru dengan didirikannya *United Kingdom Open University* (UKOU) di Inggris sebagai universitas terbuka modern pertama di dunia yang menggunakan bahan ajar multi media, baik media cetak maupun noncetak. UKOU banyak bekerja sama dengan *British Broadcasting Corporation* (BBC) dalam

produksi dan penyiaran program audiovisual untuk pembelajaran jarak jauh. UKOU dan UNISA hanya menyelenggarakan program PTJJ saja, atau disebut dengan istilah institusi modus tunggal. Model ini diikuti dengan pendirian sejumlah universitas terbuka lainnya di banyak negara di dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Sistem universitas terbuka berkembang pesat dalam hal pemanfaatan teknologi, akses oleh mahasiswa, dan jumlah mahasiswa.

Lembaga PTJJ modus tunggal berbentuk universitas terbuka bukan lagi sebagai “makhluk asing” dalam tatanan kelembagaan pendidikan tinggi yang ada di planet bumi. Banyak negara di dunia, khususnya yang memiliki jumlah penduduk besar, menerapkan sistem ini sebagai bagian dari upaya pemerintah negara yang bersangkutan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi. Beberapa negara yang memiliki jumlah penduduk besar, seperti Cina dan India, memiliki beberapa universitas terbuka, yang bersifat nasional dan regional dalam wilayah negara yang bersangkutan. Asosiasi Universitas Terbuka Asia (*Asian Association of Open Universities* atau *AAOU*) menghimpun sejumlah 32 institusi universitas terbuka sebagai anggota tetap yang berasal dari 23 negara Asia dan 28 institusi universitas terbuka sebagai anggota kehormatan dari seluruh penjuru dunia. Hal ini menunjukkan perkembangan pesat universitas terbuka yang memberikan layanan PTJJ kepada warga masyarakat menggunakan berbagai media dan teknologi tepat guna.

Beberapa dari universitas terbuka di dunia berkembang menjadi sangat besar dan menampung lebih dari 100.000 mahasiswa, dan bahkan ada yang melebihi 1 juta mahasiswa, seperti *China Central Radio and Television University* (CCRTVU) dan *Indira Gandhi National Open University*, sehingga disebut dengan istilah universitas-mega (*mega-university*). Universitas Terbuka (UT) di

Indonesia yang didirikan pada tahun 1984 termasuk dalam kelompok universitas-mega. Institusi universitas-mega ini menghendaki pendekatan manajemen dan metode PTJJ yang khas, serta strategi pemanfaatan teknologi yang jitu guna menjamin terselenggaranya PTJJ berkualitas yang dapat menjangkau mahasiswa dalam jumlah besar dan tersebar di berbagai penjuru negeri, bahkan di berbagai belahan planet bumi (Daniel, 1996). Sampai saat ini terdapat 17 universitas-mega di dunia yang menampung lebih dari 6 juta mahasiswa. Hal ini menunjukkan perkembangan PTJJ yang amat pesat serta keterandalan dan kemampuan sistem PTJJ dalam menjangkau dan memberikan layanan pendidikan tinggi berkualitas kepada masyarakat yang tidak dapat mengikuti program pendidikan tinggi tatap muka.

Sistem universitas-mega dapat dikatakan sebagai salah satu inovasi penting dalam sejarah modern perkembangan pendidikan tinggi pada abad ke-20 karena sistem tersebut menjawab tantangan akses dan kualitas sekaligus tanpa mengesampingkan tugas, fungsi dan tata nilai utama yang semestinya dipegang teguh dan diemban suatu universitas (Daniel & Mackintosh, 2003). Universitas-mega memiliki pengalaman dan permasalahan yang sama dalam menangani dan memberikan pelayanan kepada mahasiswa jarak jauh dalam jumlah yang sangat besar dan tersebar di seluruh pelosok negeri masing-masing. Oleh karena itu, suatu organisasi yang menghimpun 17 universitas-mega yang menjadi pendiri, termasuk salah satu di antaranya adalah Universitas Terbuka, Indonesia, didirikan pada bulan November tahun 2003 dengan nama *Global Mega-University Network (GMUNET)*, dengan anggota sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Universitas-Mega Anggota *Global Mega-University Network*, 2003

No	Nama Universitas-Mega	Negara	Tahun Berdiri	Jumlah Mahasiswa
1	China Central Radio and Television University	Cina	1979	2,000,000
2	Indira Gandhi National Open University	India	1985	1,000,000
3	Anadolu University	Turki	1958	800,000
4	Allama Iqbal Open University	Pakistan	1974	397,578
5	Universitas Terbuka	Indonesia	1984	220,000
6	Korea National Open University	Korea	1972	210,000
7	Universidad Nacional de Educacion a Distancia	Spanyol	1972	200,000
8	Sukhothai Thammathirat Open University	Thailand	1978	200,000
9	Open University	Inggris	1969	200,000
10	Sichuan Radio and Television University	Cina	1979	172,500
11	University of Phoenix Online	Amerika Serikat	1976	163,627
12	Jiangsu Radio and Television University	Cina	1979	160,000
13	University of South Africa	Afrika Selatan	1873	150,000
14	Henan Radio and Television University	Cina	1979	120,000
15	Payame Noor University	Iran	1978	110,000
16	The Madhya Pradesh Bhoj Open University	India	1991	108,000
17	Shanghai Television University	Cina	1960	105,000
	Jumlah Mahasiswa GMUNET			6,316,705

Sumber: GMUNET, 2003.

Pembahasan tentang pendidikan tinggi telah memunculkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana fungsi dan tujuan pendidikan tinggi tatap muka dan PTJJ memiliki kesamaan cita-cita, visi dan misi. Gagasan dasar suatu institusi pendidikan tinggi adalah menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas berbentuk apapun memiliki fungsi dan misi

yang sama. Teknologi pendidikan mengubah metode belajar dan pembelajaran dan memungkinkan berbagai macam inovasi dilakukan untuk menjalankan fungsi dan tujuan pendidikan tinggi melalui sistem PTJJ.

Perkembangan PTJJ menimbulkan pertanyaan lebih jauh tentang definisi universitas. Penyebaran pengetahuan melalui pengajaran mahasiswa dalam jumlah besar untuk menjangkau warga masyarakat dari berbagai lapisan dan mencapai efisiensi menjadi fungsi utama universitas terbuka. Ada kekhawatiran bahwa fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kurang mendapat perhatian pada universitas terbuka. Hal ini sebenarnya tidak demikian adanya. Banyak program PTJJ dalam berbagai bidang diselenggarakan mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, pascasarjana dan doktor. Institusi PTJJ, baik yang berbentuk universitas terbuka atau modus tunggal maupun universitas modus rangkap memberikan kesempatan luas kepada staf akademik untuk melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bahkan UKOU di Inggris termasuk dalam sepuluh universitas terbesar di Inggris dalam penerimaan dana hibah penelitian, serta memperoleh penghargaan *Investors in People* atas upaya dan kontribusi nyata dalam pengabdian kepada masyarakat melalui program-programnya yang berkualitas dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara luas.

Siaran pendidikan dan bahan ajar yang dapat diakses melalui internet yang disediakan oleh institusi PTJJ membawa dampak positif bagi pengembangan masyarakat belajar. Banyak warga masyarakat, sekalipun secara formal tidak terdaftar sebagai mahasiswa PTJJ mempunyai akses terhadap bahan ajar cetak maupun noncetak. Warga masyarakat dapat membeli bahan ajar yang dijual bebas, mengikuti siaran radio dan televisi, serta mengakses informasi melalui internet. UKOU dengan cepat berkembang menjadi salah

satu penerbit buku teks perguruan tinggi terbesar menandingi pesaing tradisionalnya, yaitu *Oxford University Press* atau *Cambridge University Press*. Demikian pula di Indonesia, UT dengan cepat berkembang menjadi penerbit buku teks perguruan tinggi terbesar, yang telah menerbitkan lebih dari 900 judul buku teks perguruan tinggi berupa modul, dan sebagian di antaranya dilengkapi dengan paket multimedia atau bahan noncetak. Dalam hal seperti ini PTJJ menjalankan fungsi pengabdian kepada masyarakat dengan baik melalui penyebaran sumber daya pengetahuan yang dimilikinya. PTJJ berkontribusi secara nyata dalam mengembangkan, menemukan, dan menyebarkan pengetahuan serta membangun masyarakat pengetahuan yang dicita-citakan setiap bangsa di planet bumi.

Pemanfaatan Teknologi Baru dan PJJ Generasi Kelima

Salah satu tonggak sejarah penting pada penghujung akhir milenium ke-3 atau pergantian abad ke-20 dan 21 adalah lenyapnya konsep jarak. Kemajuan dalam penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam berbagai bidang kehidupan menjadikan konsep jarak geografis menjadi tidak lagi penting bagi mereka yang memiliki akses terhadap TIK. Siapapun yang terhubung dengan TIK dapat mengakses informasi yang berada di manapun dan berkomunikasi dengan siapapun di manapun ia berada di planet ini dengan menggunakan internet. TIK mendorong perubahan mendasar dalam kehidupan sehari-hari manusia, termasuk dalam kegiatan belajar dan pembelajaran.

Peran media dan teknologi sangat dominan dalam PJJ karena ia menggantikan peran dan fungsi pendidik sebagaimana dalam pendidikan tatap muka. Berbagai macam media yang digunakan

seperti bahan cetak, audiovisual, dan berbasis komputer, masing-masing dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang berbeda. Perkembangan mutakhir dalam bidang TIK memberikan peluang dan tantangan bagi PJJ untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang beragam. Teknologi dimanfaatkan untuk meningkatkan akses, memperbaiki kualitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan efektivitas pendidikan tinggi. Bagi mahasiswa, pemanfaatan teknologi berdampak positif pada keluwesan dalam memilih metode belajar. Proses pembelajaran berbasis teknologi menghendaki dan sekaligus membantu mahasiswa mengenal dan memanfaatkan teknologi yang tersedia.

Dalam perkembangannya, khususnya di negara maju yang memiliki sarana dan prasarana TIK yang baik, perbedaan antara pendidikan jarak jauh dan tatap muka menjadi makin kabur. Metode pembelajaran jarak jauh dan TIK berbaur dengan strategi pembelajaran kelas sehingga menciptakan suatu lingkungan baru berupa sistem belajar yang fleksibel. Banyak universitas berupaya melembagakan program belajar yang fleksibel sebagai strategi pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Cepat atau lambat perubahan ini mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan tinggi di seluruh dunia, sehingga PJJ menjadi alternatif strategi pembelajaran baru untuk menjamin keberlanjutan suatu institusi pendidikan tinggi.

PJJ berkembang mulai dari berbasis korespondensi pada awal abad ke-19, kemudian mulai dasawarsa 1970-an memanfaatkan multi media, dan mulai dasawarsa 1990-an menggunakan teknologi digital, dan pada awal abad ini berkembang dengan makin maraknya penggunaan teknologi tanpa kabel. Perkembangan PJJ secara historis dapat digambarkan mulai dari belajar korespondensi → ke belajar jarak jauh → ke belajar elektronik → ke belajar sambil bergerak → serta belajar maya. Evolusi PJJ tersebut secara alfabetik berurutan dalam bahasa Inggris digambarkan mulai dari

c-learning (*correspondence learning*) ke *d-learning* (*distance learning*) ke *e-learning* (*electronic learning*) ke *m-learning* (*mobile learning*) serta *v-learning* (*virtual learning*) (Keegan, 2002). Tahap perkembangan PJJ ini seiring dengan pengaruh perubahan masyarakat, mulai dari revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19, revolusi elektronik dalam dasawarsa 1980, dan revolusi teknologi digital dan nirkabel pada penghujung terakhir abad ke-20.

Kemajuan dalam TIK dan bebasnya arus lalu lintas informasi memungkinkan penerapan konsep belajar sepanjang hayat yang fleksibel untuk menjamin pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif. TIK mengubah cara orang belajar, memanfaatkan teknologi, serta mengkonsepsikan belajar itu sendiri (Inggris, Ling & Josten, 2002). Konsep belajar elektronik diperkenalkan, dan media berfungsi untuk mendukung interaksi, selain sebagai alat komunikasi. Dalam belajar elektronik, konsepsi belajar berubah dari transfer pengetahuan, yang menggunakan media untuk mendukung komunikasi informasi, menjadi manajemen pengetahuan, yang menggunakan media untuk mendukung interaksi. Kemajuan dalam TIK memiliki dampak pada sistem PJJ yang mengalami transisi melalui penggunaan media digital sehingga memberikan peluang penyampaian materi belajar secara lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik.

Karena TIK tidak mengenal batas, sistem PJJ dapat memanfaatkannya untuk kepentingan institusi maupun mahasiswa. Institusi PJJ dikehendaki untuk mengembangkan produk dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam tanpa batas geografi. Dalam PJJ, TIK dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta didik, seperti akses bahan ajar berbasis jaringan, bantuan belajar melalui internet, ujian, manajemen institusi, serta akses mahasiswa terhadap berbagai informasi institusi maupun diri mahasiswa. Namun perlu diingat bahwa banyak negara berkembang

memiliki kendala dalam pemanfaatan TIK karena relatif masih rendahnya tingkat penetrasi, kualitas pelayanan, daya jangkauan dan ketersediaan sarana dan prasarana TIK.

PJJ dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan pengguna jasa, yang kondisi maupun paradigmanya berubah dari era industri menjadi era pengetahuan, yang ditandai dengan besarnya volume serta aksesibilitas informasi, serta pergeseran perekonomian global dari ketergantungan pada manufaktur menjadi lebih didorong oleh pengetahuan. Sistem PJJ memiliki potensi mendorong pertukaran dan diseminasi pengetahuan, karena sifat institusi pendidikan sebagai tempat terjadinya proses penciptaan, pertukaran dan penyebaran pengetahuan.

Teknologi belajar maupun kebutuhan belajar berubah cepat. Hal ini menuntut pendidik maupun institusi PJJ untuk cepat menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Teknologi berbasis cetak tetap penting dalam PJJ, sedangkan TIK memiliki prospek memfasilitasi akses dan proses belajar peserta didik. TIK memberikan fleksibilitas dan melengkapi pilihan bagi peserta didik serta memfasilitasi jaringan kemitraan antarinstitusi. Persoalannya adalah apakah peserta didik benar-benar memiliki akses dan bersedia menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bebas dari kecurangan, dan apakah institusi benar-benar mampu menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pemanfaatan TIK secara efektif. Sistem PJJ dituntut untuk mampu mengintegrasikan pemanfaatan TIK dalam program pembelajaran guna membantu proses belajar peserta didik. Dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, institusi PJJ ditantang untuk memberikan layanan berkualitas yang diperlukan pengguna. Dukungan pemerintah diperlukan dalam bentuk kebijakan yang jelas dalam hal penyediaan sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi.

Dua dasawarsa terakhir ini ditandai dengan perubahan yang pesat dalam bidang pemanfaatan TIK. Teknologi jaringan komputer menjadi barang pribadi yang mudah diperoleh dan dimanfaatkan oleh banyak orang. Internet menciptakan perubahan besar dalam menuntun gaya hidup, metode kerja dan gaya belajar setiap orang. Perkembangan mutakhir bergerak ke arah fleksibilitas dan mobilitas yang dimungkinkan oleh makin maju dan terjangkau teknologi komunikasi bergerak dan nirkabel. Perubahan pesat ini memberikan tantangan pada institusi PJJ untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap dinamika kemajuan TIK. Institusi PTJJ dituntut untuk bergerak cepat membangun inisiatif baru secara proaktif dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang berubah. Internet mengubah perilaku setiap orang dan institusi.

Institusi PJJ pada hakikatnya berada pada posisi pelopor dalam inovasi dan pemanfaatan teknologi baru. Taylor (2004) menggambarkan evolusi penyelenggaraan PJJ dari waktu ke waktu dalam lima generasi. Generasi pertama PJJ adalah model korespondensi yang didasarkan atas teknologi cetak. Generasi kedua PJJ adalah model multimedia yang didasarkan atas teknologi cetak, audio dan video. Generasi ketiga PJJ adalah model belajar jarak jauh yang didasarkan atas penerapan teknologi komunikasi untuk memberikan kesempatan komunikasi secara langsung. Generasi keempat PJJ adalah model belajar fleksibel yang didasarkan atas penyampaian bahan ajar melalui internet. Dan generasi kelima PJJ adalah model belajar yang cerdas, sebagai turunan dari generasi keempat, sekalipun sebenarnya banyak institusi PTJJ masih baru mulai memasuki generasi keempat. Karakteristik dari kelima model PJJ dari lima generasi tersebut dapat disarikan dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
 Kerangka konseptual model PJJ dari lima generasi

Model PJJ dan Teknologi Penyampaian yang Dipergunakan	Karakteristik Teknologi Penyampaian					
	Fleksibilitas			Bahan ajar dirancang bagus	Penyampaian interaktif tingkat lanjut	Biaya variabel institusi mendekati nol
	Waktu	Tempat	Langkah			
GENERASI PERTAMA - Model Korespondensi • Cetak	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
GENERASI KEDUA - Model Multimedia • Cetak	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
• Kaset audio	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
• Kaset video	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
• Belajar berbasis komputer	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
• Video interaktif	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
GENERASI KETIGA - Model Tele-belajar • Audiotelekonferensi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
• Videokonferensi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
• Komunikasi Audiografi	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak
• Siaran TV/Radio	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak
GENERASI KEEMPAT - Model Belajar Fleksibel • Multimedia interaktif online	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Model PJJ dan Teknologi Penyalpaian yang Dipergunakan	Karakteristik Teknologi Penyalpaian					
	Fleksibilitas			Bahan ajar dirancang bagus	Penyalpaian interaktif tingkat lanjut	Biaya variabel institusi mendekati nol
	Waktu	Tempat	Langkah			
<ul style="list-style-type: none"> Akses berbasis internet ke informasi jaringan 	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi melalui media komputer 	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
GENERASI KELIMA - Model Belajar Fleksibel yang Cerdas						
<ul style="list-style-type: none"> Multimedia interaktif online 	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
<ul style="list-style-type: none"> Akses berbasis internet ke informasi jaringan 	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi melalui media komputer, menggunakan sistem respons otomatis 	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
<ul style="list-style-type: none"> Akses portal kampus ke proses dan sumber daya institusi 	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Diadaptai dari: Taylor, 2004, hal. 8.

Bagi sebagian besar institusi PTJJ, perkembangan dari generasi ke generasi berikutnya merupakan suatu evolusi. PTJJ tidaklah secara tegas dapat dikelompokkan dalam salah satu kategori generasi tersebut. Sebagian besar institusi PTJJ, khususnya di negara berkembang, masih menggunakan bahan cetak dan sistem korespondensi sebagai metode penyampaian bahan ajar. Berbagai bentuk bantuan belajar bagi mahasiswa diberikan menggunakan teknologi generasi lebih lanjut, seperti generasi ketiga dan keempat. Sebagian kecil saja PTJJ di negara maju, misalnya *Universitat Oberta de Catalunya*, sebuah universitas modus tunggal di Spanyol, dan *University of Southern Queensland*, sebuah universitas modus rangkap di Australia, menerapkan PJJ teknologi generasi kelima dengan menyelenggarakan program belajar maya yang fleksibel dan cerdas, dan banyak memanfaatkan internet atau jaringan komputer.

Tidak mudah untuk menggolongkan secara tegas bahwa institusi PTJJ tertentu termasuk dalam kategori generasi tertentu dalam pemanfaatan teknologi. Namun demikian, kategorisasi tersebut membantu institusi PTJJ dalam melakukan baku mutu dirinya, mengevaluasi posisi diri saat ini, serta memproyeksikan diri arah perkembangan institusi pada masa mendatang. Satu hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah bahwa setiap institusi harus selalu berupaya sekuat tenaga untuk secara terus-menerus memperbaiki diri dan memperbaharui pemanfaatan teknologi sesuai dengan kebutuhan zaman dan kebutuhan pengguna. Tidak tertutup kemungkinan bahwa generasi penerus sebagai pengguna teknologi dalam PJJ akan berkembang terus, dan hal ini menjadi tantangan institusi PTJJ untuk selalu mengupayakan pemutakhiran teknologi yang digunakan.

Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan Tinggi Jarak Jauh

PTJJ memiliki kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang spesifik dan beragam kompetensinya. Sekalipun pengelompokan SDM PTJJ secara umum menjadi dosen dan staf administrasi dapat dilakukan, jenis dan ragam dua kelompok SDM dalam PTJJ lebih banyak lagi. Pada kelompok dosen, misalnya, PTJJ memiliki staf akademik, pengembang kurikulum, penulis bahan ajar, penulis soal, tutor, penguji, pengembang bahan ajar noncetak, dan penulis naskah. Di samping itu, PTJJ memiliki ahli atau spesialis media, sutradara, dan ahli evaluasi. Tenaga administratif memiliki berbagai bidang tugas yang berlainan sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan unit yang mendukung penyelenggaraan PTJJ baik di kantor pusat maupun di kantor regional atau balai belajar yang tersebar di berbagai wilayah. Institusi PTJJ mempekerjakan tenaga administrasi yang bekerja di bidang distribusi, pengujian, administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kemahasiswaan, dan administrasi registrasi, serta pelayanan mahasiswa.

SDM PTJJ dapat bekerja *penuh waktu* maupun *paruh waktu*. SDM *penuh waktu* adalah staf profesional dan staf pendukung yang menjalankan tugas sehari-hari hanya pada institusi PTJJ tersebut. Sedangkan SDM yang bekerja *paruh waktu* pada umumnya adalah para profesional di bidang masing-masing, dan SDM ini hanya bekerja sesuai dengan kebutuhan. Pada universitas modus rangkap, pada umumnya SDM bekerja *penuh waktu* untuk universitas tersebut. Di universitas modus tunggal seperti UKOU, pada umumnya SDM bekerja *penuh waktu*, sedangkan para tutor yang membantu proses belajar mahasiswa dan tersebar di berbagai wilayah pada umumnya adalah SDM yang bekerja *paruh waktu*. Sebagai contoh, UT memiliki SDM *penuh waktu*, yaitu staf

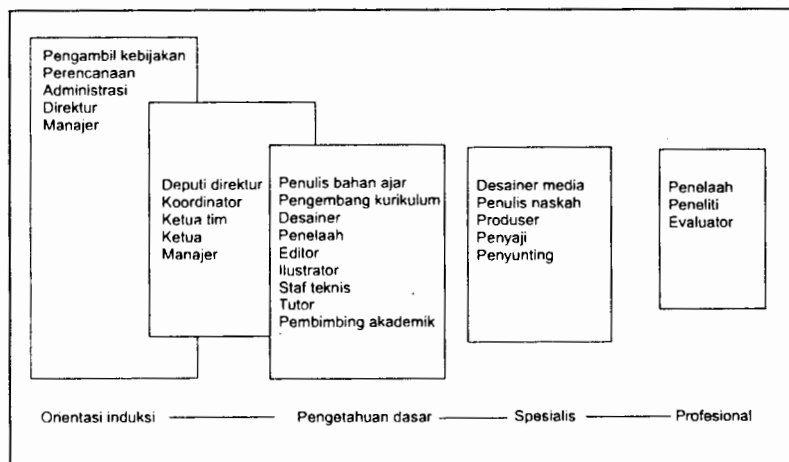
akademik, staf administratif, ahli media, ahli evaluasi dan pengelola. Sedangkan SDM *paruh waktu* yang bekerja sesuai dengan kebutuhan UT, adalah pengembang kurikulum, penulis bahan ajar, penulis soal, dan tutor yang tersebar di berbagai daerah. Ragam jenis SDM *penuh waktu* dan *paruh waktu* ini membawa implikasi pula pada sistem perekrutan, pelatihan dan pengembangan, pemberian penghargaan dan tatacara hubungan industrial SDM pada institusi PTJJ.

SDM PTJJ bekerja di kantor pusat institusi dan di berbagai pusat regional yang tersebar di berbagai daerah untuk memudahkan pelayanan kepada mahasiswa. Kebutuhan SDM di kantor pusat berbeda dengan kantor daerah, sesuai dengan fungsinya yang berbeda. Kantor pusat PTJJ lebih merupakan kantor yang berperan banyak dalam perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, penyusunan anggaran, dan pengaturan keseluruhan operasional sistem PTJJ. Sedangkan kantor daerah berperan penting sebagai pelaksana dalam pemberian layanan langsung kepada mahasiswa, seperti registrasi, pemberian bantuan belajar, dan pelaksanaan ujian.

Beragamnya jenis dan kompetensi SDM PTJJ menjadikan kebutuhan pengembangan staf sebagai masalah penting yang harus dikelola dengan baik. Pemanfaatan teknologi baru dalam PTJJ mengharuskan SDM PTJJ untuk selalu melatih dan dilatih ulang secara terus menerus agar tidak ketinggalan zaman. Institusi PTJJ harus terus menerus melakukan analisis kebutuhan organisasi, analisis kebutuhan jabatan, analisis kebutuhan pegawai, serta memberikan penghargaan dan melakukan pembinaan pegawai. Dengan demikian institusi PTJJ secara efektif dapat mencapai tujuannya dan menciptakan iklim organisasi yang sehat. Kompetensi, pengetahuan dan keterampilan SDM harus sesuai dengan standar, dan terus ditingkatkan untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian kinerja SDM secara individual maupun kinerja institusi secara

keseluruhan selalu dapat ditingkatkan. Model pengembangan SDM PTJJ dapat dilihat dalam Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1
Model pengembangan SDM PTJJ



Diadaptasi dari: McWilliams & Mugridge, 1998, hal. 55.

Kebutuhan pengembangan SDM PTJJ menghendaki desain pelatihan dan pengembangan SDM yang spesifik. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan SDM PTJJ meliputi pelatihan dalam bidang orientasi umum tentang sistem PTJJ, pengetahuan dasar pekerjaan masing-masing SDM, pengetahuan spesialis dan pengetahuan profesional. Upaya pengembangan SDM PTJJ hendaknya berorientasi pada terbentuknya SDM yang kompeten yang dapat mendesain, mengelola, menghasilkan produk berkualitas, dan memenuhi kebutuhan penggunaanya dengan sebaik-baiknya (Randell & Bitzer, 1998).

Pengembang kurikulum dan bahan ajar harus terlatih baik untuk mengembangkan program PTJJ yang dapat mendorong peserta didik untuk belajar mandiri. Para tutor dan pembimbing akademik harus mampu mengembangkan keterampilan hubungan antarpribadi dengan peserta didik, membantu memecahkan kesulitan peserta didik, dan mendukung proses belajar peserta didik. Para pengelola PTJJ harus terlatih untuk merancang, menyediakan dan memperbaiki sistem layanan pendukung peserta didik. Para penyunting harus terlatih baik dalam menyunting naskah bahan ajar cetak dan noncetak. Para ahli evaluasi harus terlatih baik dalam bidang profesional evaluasi pendidikan.

Pengembangan SDM PTJJ memiliki peran strategis karena tuntutan kompetensi dan profesi yang berkembang terus sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang berlangsung cepat. Mengasah kompetensi dan kemampuan profesional SDM harus terus dilakukan agar SDM mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan keunggulan suatu institusi PTJJ. Kompetensi SDM yang kadaluarsa dapat menghentikan perjalanan perkembangan institusi, menjadikan institusi tidak kompetitif, dan akhirnya menenggelamkan institusi PTJJ dalam kehancuran struktural. Perubahan metode dan paradigma PTJJ sejalan dengan perkembangan teknologi, dari berbasis korespondensi, ke berbasis media, dan kemudian berbasis TIK, menghendaki institusi PTJJ untuk selalu menyesuaikan diri dan mengembangkan SDM sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman. Oleh sebab itu, institusi PTJJ dituntut untuk mengelola SDM dengan baik, menyusun perencanaan SDM yang baik, memberikan perhatian yang memadai untuk pembinaan dan pengembangan SDM yang kompeten dan profesional, melakukan penilaian profesional yang adil dan objektif, menciptakan suasana hubungan antarmanusia yang baik, memberikan imbalan dan penghargaan yang sesuai, serta tanggap terhadap

berbagai perubahan internal maupun eksternal. SDM PTJJ yang berkualitas dan berkompetensi tinggi menjadi penggerak utama kinerja institusi dan berfungsi sebagai penjamin kelestarian institusi PTJJ yang makin berkualitas.

Tuntutan Program PTJJ Berkualitas dari Pihak yang Berkepentingan

Kualitas menjadi agenda utama pengambil kebijakan dan pihak yang berkepentingan karena tuntutan masyarakat makin meningkat terhadap kualitas pendidikan. Masyarakat memiliki keinginan dan harapan tersedianya layanan pendidikan berkualitas sebagai imbalan atas makin meningkatnya kontribusi mereka dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah juga menghendaki institusi pendidikan yang akuntabel karena sebagian sumber dana berasal dari masyarakat. Pihak yang berkepentingan memiliki kepedulian terhadap kualitas pendidikan guna memenuhi kebutuhan dan tantangan penyediaan SDM yang memiliki kompetensi tinggi untuk mampu berkarya dalam kancah kemitraan dan persaingan global. Dengan demikian institusi PTJJ ditantang untuk secara terus-menerus meningkatkan kualitas layanan pendidikannya.

Kualitas adalah konsep yang relatif dan dapat diartikan berbeda oleh pihak yang berkepentingan. Semenjak dasawarsa 1990-an, minat pada jaminan kualitas dalam PTJJ berkembang dan berbagai upaya konkret telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas seluruh aspek penyelenggaraan PTJJ (Zuhairi & Suparman, 2002; UT, 2002). Institusi PJJ yang tergabung dalam AAOU bersama-sama mengembangkan draf kerangka jaminan kualitas untuk dapat diadopsi oleh institusi anggotanya. Pengembangan kerangka dan kriteria bersama-sama ini membantu upaya mencapai standar kualitas bagi penyelenggaraan program, terlepas dari di manapun institusi

tersebut beroperasi. Makin meningkatnya tuntutan penyelenggaraan PTJJ berkualitas mendorong badan dunia dalam bidang PJJ, yaitu *International Council for Open and Distance Education* (ICDE) untuk mendirikan *ICDE Standard Agency* (ISA) yang memberikan layanan akreditasi dan sertifikasi kualitas internasional bagi institusi penyelenggara PJJ yang memerlukannya.

Jaminan kualitas merupakan upaya manajemen dan prosedur penilaian yang sistematis untuk memantau ketercapaian kinerja terhadap tujuan, dan menjamin tercapainya kualitas keluaran serta peningkatan kualitas. Jaminan kualitas memfasilitasi pengakuan standar gelar, memenuhi tujuan akuntabilitas publik, membantu memberikan pilihan kepada mahasiswa, memberikan kontribusi terhadap proses pembelajaran dan layanan administratif, serta membantu menyebarkan praktik terbaik sehingga dapat mewujudkan perbaikan sistem pendidikan tinggi secara keseluruhan.

Menerapkan jaminan kualitas dalam institusi PTJJ merupakan tugas dan inovasi yang luar biasa besar. Hal ini memerlukan upaya serius, kesabaran, perencanaan sistematis, sosialisasi dan pelatihan untuk menjamin bahwa inovasi yang dilakukan merupakan upaya produktif dan konstruktif bagi pengembangan institusi PTJJ. Sering terjadi dalam suatu institusi banyak orang berbicara tentang kualitas, namun banyak di antara mereka sebenarnya kurang mengetahui makna sebenarnya tentang bagaimana layanan kualitas disediakan, dipertahankan dan ditingkatkan secara terus-menerus. Mengubah pola pikir orang menjadi tugas paling berat dalam inovasi, dan hal ini menghendaki komitmen yang sungguh-sungguh dari pimpinan puncak institusi. Implementasi jaminan kualitas menghendaki perubahan budaya kerja SDM pada semua tingkatan sehingga setiap orang dalam suatu institusi selalu berpikir tentang peningkatan kualitas dan bertindak untuk meningkatkan kualitas. Merancang perubahan dan perbaikan organisasi mudah dilakukan di atas kertas,

namun memimpin dan mengarahkan SDM untuk mengalami perubahan mendasar menuju perbaikan menjadi upaya yang harus dilaksanakan secara hati-hati dan penuh tantangan. Banyak orang cenderung menolak perubahan karena lebih memilih keadaan nyaman tanpa perubahan, sekalipun upaya perubahan itu dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme.

Paradigma Baru dan Prospek Masa Depan Pendidikan Tinggi Jarak Jauh

Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara untuk mampu mengembangkan diri, hidup layak dan mampu bertahan hidup sebagai warga masyarakat pengetahuan (Brown, 2002). Paradigma pendidikan tinggi pun bergeser secara signifikan dari elitis menjadi massal dan kini berkembang menjadi universal. Kini pendidikan tinggi dipandang sebagai hak dasar, bukan lagi hak istimewa, setiap warga negara. Paradigma ini menghendaki setiap warga masyarakat, di manapun ia berada, memiliki akses terhadap pendidikan tinggi. PTJJ mengubah paradigma tentang universitas, yang semula diartikan sebagai padepokan tempat mahasiswa, yang berasal dari sekelompok kecil warga kalangan atas dari berbagai penjurur, bertemu dan berkumpul, mengkaji dan belajar berbagai macam pengetahuan, sebagaimana sebelumnya secara umum dikonsepsikan sampai dengan abad ke-19 (Newman, 1947).

Paradigma pendidikan tinggi bergeser secara dramatis dari elitis berkembang menjadi massal dan kini berubah menjadi universal (Trow, 1974), yang berarti bahwa pendidikan tinggi kini dipandang pula sebagai hak dasar setiap warga masyarakat. Semenjak pemikiran tentang paradigma perkembangan pendidikan tinggi dikemukakan pada dasawarsa 1970-an, angka partisipasi pendidikan tinggi di seluruh dunia terus meningkat, sekalipun di beberapa

negara yang paling tidak berkembang, angka partisipasi mahasiswa menunjukkan keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Dewasa ini angka partisipasi pendidikan tinggi di negara maju pada umumnya mencapai lebih dari 50%, yang berarti bahwa negara maju telah dapat memenuhi akses universal pada pendidikan tinggi bagi warga masyarakatnya. Sistem pendidikan tinggi massal dan universal menghendaki perubahan yang signifikan dalam hal diversifikasi institusi, kemampuan mengakomodasi populasi mahasiswa yang heterogen, perubahan karakteristik maupun pola profesi dan pekerjaan akademik, meningkatnya pengendalian manajemen institusi, dan berkembangnya penerapan sistem PTJJ (Altbach, 1999). PTJJ memberikan kesempatan luas dan memungkinkan metode belajar dan pembelajaran yang fleksibel, serta menyediakan, mendatangi dan menyampaikan pengetahuan kepada mahasiswa di manapun mereka bertempat tinggal, sehingga membantu mewujudkan akses universal pada pendidikan tinggi berkualitas.

Dalam konteks global, akses dan kebutuhan masyarakat akan PTJJ meningkat secara tajam, dari sekitar 6.5 juta pada tahun 1950 menjadi 88.2 juta pada tahun 1997 (Daniel & Mackintosh, 2003). Dalam dasawarsa 1990-an, PJJ berkembang pesat menjadi suatu fenomena yang dapat disebut sebagai teori ledakan dahsyat, yaitu suatu fenomena perkembangan yang bersifat eksponensial sebagai dampak dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (Hawkrigde, 1995). Sebagai produk tipikal masyarakat industri, PJJ mewakili fenomena masyarakat kontemporer modern masa kini (Jarvis, 1993). Namun demikian, dalam era masyarakat pasca industri, model tradisional PJJ boleh dikatakan kurang memadai. Oleh sebab itu, desain model baru PJJ yang memiliki tujuan dan sasaran yang lebih luas, relevan dan menyeluruh diperlukan, dan PJJ dalam era pasca industri ini lebih berfokus pada dorongan dari dalam diri peserta didik (Peters, 1993).

Perubahan kebutuhan masyarakat serta perkembangan TIK menimbulkan perubahan asumsi, sehingga model yang mendasari PJJ bukan semata-mata model industri atau ala proses produksi mobil Ford (*"Fordist"*), yang menekankan pada konsumsi atau penyediaan layanan pendidikan berskala besar, melainkan bergeser mendekati asumsi dari pasar pakaian jadi, yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan pengguna jasa yang berubah cepat (Walker, 1993). Dengan demikian institusi PTJJ, yang dibangun dengan kerangka pendekatan manajemen industrial perlu menilik kembali dengan saksama asumsi yang berlaku selama ini, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, serta mengembangkan visi, misi, serta strategi baru disesuaikan dengan perubahan kebutuhan peserta didik serta pihak yang berkepentingan guna menjamin kelangsungan hidup institusi PJJ tersebut. Perubahan mendasar ini melibatkan pula pembaharuan melalui pemanfaatan teknologi secara efektif dan tepat guna.

Memasuki abad ke-21 atau milenium ke-3, paradigma pemikiran masyarakat berkembang secara progresif sejalan dengan makin meningkatnya peran pengetahuan dalam kehidupan manusia. Kemajuan TIK mendorong perubahan sosial dan ekonomi menuju masyarakat pengetahuan. Institusi pendidikan tinggi, baik tatap muka maupun PTJJ, diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempersiapkan dan mengembangkan SDM nasional maupun global sesuai dengan pergeseran paradigma dari masyarakat industri menuju masyarakat berbasis pengetahuan. Institusi PTJJ ditantang untuk menerapkan sistem manajemen yang terbuka dan akuntabel, siap bekerja sama dan bermitra dengan institusi lain, mengutamakan kebutuhan pengguna, dan menjadi bagian dari jaringan kemitraan global, regional maupun nasional. Kualitas menjadi faktor yang sangat menentukan dan merupakan landasan menuju keberhasilan dan kelestarian institusi PTJJ.

Kemajuan TIK serta bebasnya arus informasi mendorong adanya kebutuhan belajar sepanjang hayat dan menuntut institusi untuk menjadi lebih progresif dan fleksibel dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perubahan sosial, ekonomi dan kemajuan teknologi yang bersifat global memberikan dampak mendasar terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi di belahan manapun di dunia. PTJJ kini secara mendasar berkembang peranan serta kontribusinya dalam meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi, serta membantu mewujudkan masyarakat modern berbasis pengetahuan. Berikut ini adalah beberapa kecenderungan dan tantangan yang saling terkait serta mengarahkan perkembangan PTJJ menuju masa depan, yaitu (1) kontribusi PTJJ dalam ekspansi pendidikan tinggi, (2) keterbatasan sistem multiversitas, (3) universitas-mega, (4) PTJJ dalam universitas modus rangkap, (5) universitas maya, (6) akses universal terhadap pendidikan tinggi, (7) akuntabilitas, keunggulan kompetitif dan kelestarian institusi PTJJ, (8) globalisasi dan transnasionalisasi pendidikan tinggi, (9) jaminan kualitas, (10) jaringan dan kemitraan PTJJ, dan (11) program pengembangan profesional berkelanjutan.

1. *Kontribusi PTJJ dalam ekspansi pendidikan tinggi.* Arah ke depan ekspansi pendidikan tinggi menuju pada penerapan sistem pendidikan jarak jauh skala besar pada institusi PTJJ (modus tunggal) serta pengembangan PTJJ pada institusi pendidikan tinggi tatap muka yang telah ada (modus rangkap). Gagasan pendidikan tinggi modern berubah terus dengan berkembangnya universitas yang semula berlingkup lokal dan berskala kecil menjadi berskala sangat besar dan bahkan berlingkup global dalam hal akses atau partisipasi mahasiswa. Institusi universitas tumbuh lebih lanjut dengan pembentukan sistem multiversitas (*multiversity*) dalam sistem pendidikan

tinggi tatap muka dan penerapan sistem pendidikan jarak jauh secara luas dan berskala besar pada jenjang pendidikan tinggi, serta terbentuknya universitas-mega. Ekspansi pendidikan tinggi terus diupayakan dalam rangka memenuhi kebutuhan universal warga masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Arah dan kecenderungan masa depan pendidikan tinggi sama sekali tidak mengarah pada penyelenggaraan kelas jauh. Pendidikan kelas jauh jelas sama sekali bukan penerapan gagasan multiversitas yang memiliki prasarana, sarana dan sumber daya pembelajaran yang lengkap dan bersifat permanen.

2. *Keterbatasan sistem multiversitas.* Gagasan dan praktik pengelolaan institusi pendidikan tinggi tatap muka berevolusi dan berkembang dari waktu ke waktu. Beberapa institusi universitas berkembang menjadi sistem multiversitas. Asal usul multiversitas dapat dijelaskan sebagai berikut. Secara historis, institusi universitas tertua di Inggris yang telah berusia ratusan tahun adalah pelopor multiversitas saat ini. Universitas *Oxford* dan *Cambridge*, dari awal berdirinya sampai saat ini terdiri dari beberapa *college* individual yang jumlahnya bertambah dalam kurun waktu yang sangat lama, selama beberapa ratus tahun. Masing-masing *college* merupakan institusi yang mandiri dan memerintah sendiri dalam merancang dan melaksanakan program akademik, pengelolaan, pendanaan, dan sumber daya manusia, namun merupakan elemen inti dan bagian terpadu dari suatu sistem universitas federal yang lebih besar. *Oxford University* dalam kurun waktu sekitar 900 tahun berkembang dari satu *college* menjadi 39 *colleges*, seperti *Merton College*, *Balliol College*, *Magdalen College*, *All Souls College*, dan sebagainya, yang secara terpadu membentuk elemen inti universitas tersebut.

Di Amerika Serikat, guna memenuhi kebutuhan akses universal masyarakat terhadap pendidikan tinggi, gagasan universitas berkembang menjadi multiversitas. Gagasan universitas yang mulanya terdiri dari satu kampus saja, yang menyelenggarakan pembelajaran bagi mahasiswa oleh dosen, berkembang menjadi sangat besar dan berubah bentuk sebagai multiversitas yang meliputi sejumlah besar komunitas akademik yang menyelenggarakan aktivitas yang sama, terikat oleh nama yang sama, dikelola oleh majelis yang sama, memiliki tujuan yang sama, dan tersebar di berbagai daerah atau kota yang berbeda (Kerr, 1977). Multiversitas merupakan semacam korporasi beberapa universitas mandiri dan otonom dengan ratusan ribu, dan bahkan jutaan, mahasiswa dan staf, menawarkan puluhan ribu mata kuliah dan program akademik maupun profesional dalam berbagai disiplin ilmu atau bidang studi.

The University of California System, universitas swasta terkemuka di Amerika Serikat, adalah satu contoh yang baik dalam penerapan gagasan multiversitas. *University of California System* sebagai sistem multiversitas merupakan suatu kesatuan institusi yang dikelola atau diperintah secara terpadu, namun memiliki beberapa kampus dengan prasarana dan sarana yang bersifat permanen di berbagai lokasi atau kota yang masing-masing berdiri sendiri sebagai universitas. Sebagai bagian dari multiversitas masing-masing universitas bersifat otonom, mandiri dan memerintah diri serta memiliki kampus, dosen, mahasiswa serta sarana dan prasarana pembelajaran yang diperlukan sesuai dengan standar dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi berkualitas. Oleh sebab itu dikenal beberapa nama kampus di berbagai tempat, seperti *University of California Los Angeles (UCLA)*, *University of California Berkeley (UCB)*, *University of California Riverside*, dan sebagainya. Sistem multiversitas jelas sama sekali bukan merupakan penyeleng-

garaan pendidikan tinggi dengan cara membentuk "kelas jauh" di berbagai lokasi yang berbeda.

Sistem multiversitas ini boleh dikatakan diterapkan di setiap negara bagian di Amerika Serikat karena negara semakmur Amerika Serikat tentu mampu membangun sarana dan prasarana serta memenuhi sumber daya yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi tatap muka berkualitas yang diperlukan warganya. Sebagai contoh, *California State University System*, universitas negeri yang dimiliki negara bagian *California* menerapkan sistem multiversitas, menampung sejumlah 409,000 mahasiswa, mempekerjakan 44,000 staf akademik dan administratif, dan memiliki 23 kampus universitas otonom dan mandiri di berbagai tempat di negara tersebut, seperti *California State University at Sacramento*, *California State University at Fullerton*, *California State University at Chico*, dan sebagainya. *State University of New York (SUNY) System* mempekerjakan lebih dari 28,000 staf akademik, mengakomodasi lebih dari 1.5 juta mahasiswa, yang terdiri dari 410,000 mahasiswa program akademik dan profesional serta 1.1 juta mahasiswa program pendidikan berkelanjutan, dan memiliki 64 kampus di seluruh negara bagian *New York*, seperti *SUNY at Binghamton*, *SUNY at Albany*, *SUNY at Oswego*, dan sebagainya.

Namun demikian bagi banyak negara lain di dunia, termasuk negara maju pada umumnya terutama negara berkembang, gagasan multiversitas ini tidak mudah untuk diwujudkan mengingat besarnya sumber daya fisik, nonfisik maupun manusia yang harus disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk membangun sistem multiversitas yang berkualitas. Sistem multiversitas bukan merupakan alternatif yang menjadi kecenderungan global, terutama bagi negara berkembang. Sebaliknya sistem PTJJ menjadi alternatif realistis yang dapat diterapkan di

banyak negara di mana warga masyarakatnya memiliki tingkat permintaan atau kebutuhan yang tinggi terhadap layanan pendidikan tinggi, sementara negara tersebut memiliki sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan warganya.

Satu perkembangan yang sangat menarik adalah bahwa masing-masing kampus mandiri pada sistem multiversitas berkembang fungsinya menjadi institusi modus rangkap yang menyelenggarakan program PTJJ secara *online*. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya permintaan masyarakat terhadap penyelenggaraan program PTJJ, bahkan bagi warga masyarakat pada sebuah negara yang makmur seperti Amerika Serikat. Tidak semua warga masyarakat berkesempatan mengikuti program pendidikan tinggi berbasis kelas di kampus karena komitmen pekerjaan, keluarga, atau karena hambatan lainnya.

3. *Universitas-mega*. Pendirian universitas terbuka berbasis multi media yang dimulai di Inggris pada tahun 1969 mengilhami banyak negara untuk mendirikan institusi serupa. Beberapa universitas terbuka, terutama yang beroperasi di negara dengan jumlah penduduk besar, berkembang menjadi universitas-mega yang memiliki jumlah mahasiswa besar melebihi 100,000 orang. Gagasan universitas-mega, yaitu universitas terbuka yang sangat besar yang dapat menjangkau mahasiswa yang tinggal di berbagai tempat di seluruh pelosok suatu negara dan bahkan penjuru dunia untuk mengikuti program PTJJ, berkembang menjadi gagasan yang diterima banyak negara di dunia untuk memenuhi kebutuhan akses universal masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Membangun universitas terbuka menjadi universitas-mega menjadi pilihan yang rasional, terutama negara berkembang dengan jumlah penduduk besar seperti Cina, India, Thailand, Afrika Selatan dan Indonesia, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki negara tersebut untuk menyeleng-

garakan pendidikan tinggi tatap muka berkualitas dalam jumlah yang memadai. Jumlah institusi universitas-mega berikut angka partisipasi mahasiswa dalam universitas-mega dari waktu ke waktu terus meningkat.

4. *PTJl dalam universitas modus rangkap.* Perkembangan TIK memberikan peluang dan bahkan mendorong institusi pendidikan tinggi tatap muka untuk menyelenggarakan program pendidikan jarak jauh sehingga secara alamiah tercipta konvergensi antara pendidikan tatap muka dan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh berkembang terus dengan diterapkannya sistem tersebut pada institusi pendidikan tinggi tatap muka dengan menggunakan berbagai media, terutama komputer, untuk menjangkau anggota masyarakat yang tidak dapat mengikuti sistem pendidikan tatap muka di kampus.

Institusi pendidikan tinggi tatap muka semakin banyak menerapkan sistem pendidikan jarak jauh sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, perubahan lingkungan sosial ekonomi dan perkembangan teknologi. Universitas tertua di negara tertentu, seperti *Oxford* dan *Cambridge* di Inggris atau *Sydney* dan *Melbourne* di Australia, yang secara historis pada mulanya bersikap menentang penerapan PTJl dan meremehkan potensi PTJl sebagai metode pendidikan tinggi yang efektif, dewasa ini bertindak cepat membangun sistem PTJl untuk menjangkau mahasiswa secara lebih luas melalui program belajar elektronik atau *online* berbasis jaringan. Bahkan *Massachusetts Institute of Technology (MIT)* di Amerika Serikat menaruh bahan ajarnya secara *online* pada situs jaringan sehingga memungkinkan masyarakat luas di seluruh dunia, sekalipun bukan sivitas akademika MIT, mengakses dan memanfaatkan bahan-bahan tersebut melalui internet tanpa harus membayar. Pengetahuan kini menjadi barang milik publik yang mudah diakses berkat

kemajuan TIK dan penerapannya dalam PTJJ. Program belajar *online* sebagai salah satu metode PTJJ kini diterapkan di berbagai universitas yang memiliki prasarana dan sarana TIK sehingga mudah menjangkau warga belajar di manapun mereka berada atau bertempat tinggal, melampaui batas geopolitik dan geografi suatu wilayah negara atau benua.

University of Maryland University College dan *University of Phoenix*, universitas konvensional berbasis kampus tatap muka di Amerika Serikat, secara dramatis mengubah kebijakan dan perencanaan strategis institusi dengan mengembangkan program PTJJ secara *online* berbasis teknologi baru, sehingga jumlah mahasiswanya meningkat secara tajam melebihi angka 100,000 mahasiswa jarak jauh. Pengembangan *University of Phoenix* menjadi *University of Phoenix Online* menjadikannya sebagai institusi pendidikan tinggi terbesar di Amerika Serikat dengan jumlah mahasiswa lebih dari 160,000 orang sehingga masuk dalam kategori universitas-mega. Hal ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan tatap muka yang secara sungguh-sungguh mengembangkan diri dan menangani program PTJJ menghasilkan program PTJJ berkualitas yang menjangkau dan diminati masyarakat luas. Pada masa mendatang, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah maupun masyarakat untuk membangun institusi pendidikan tinggi tatap muka, diperkirakan lebih banyak lagi universitas tatap muka yang secara sungguh-sungguh mengembangkan program PTJJ, mengikuti jejak *University of Phoenix Online* sehingga menambah jumlah anggota universitas-mega yang terdapat di dunia, serta secara nyata memberikan kontribusi dalam mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi.

Kecenderungan seperti tersebut di atas sampai saat ini belum diikuti oleh institusi pendidikan tinggi tatap muka di tanah air. Beberapa perguruan tinggi terkemuka di tanah air telah berupaya menyelenggarakan program PTJ dalam skala kecil agar dapat menjangkau mahasiswa secara lebih luas. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak institusi perguruan tinggi di tanah air yang lebih tertarik untuk menyelenggarakan "kelas jauh", yang sebenarnya secara ideologi dan filosofi pendidikan tinggi tidak dikenal, alih-alih menyelenggarakan pendidikan jarak jauh berkualitas yang berbasis teknologi tepat guna, sebagaimana telah dipraktikkan oleh banyak institusi pendidikan tinggi terkemuka di dunia. Hal ini menunjukkan adanya keraguan bagi kebanyakan institusi pendidikan tinggi tatap muka di tanah air, yang belum sepenuhnya siap dan mampu berinovasi dalam menyelenggarakan sistem pembelajaran yang progresif seperti sistem PTJ.

Barangkali pemerintah perlu mengambil kebijakan yang lebih tegas dan bersama-sama masyarakat mengupayakan pemberian insentif yang lebih baik dan adil kepada institusi penyelenggara PTJ, termasuk institusi perguruan tinggi tatap muka di tanah air yang menyelenggarakan PTJ, sehingga mereka sanggup bertindak inovatif dalam menjangkau masyarakat luas serta memberikan layanan pendidikan tinggi berkualitas melalui sistem PTJ. Pendidikan tinggi berkualitas memerlukan biaya yang tinggi, demikian pula PTJ berkualitas memerlukan biaya yang tidak murah. Institusi PTJ modus rangkap memiliki prospek perkembangan masa depan yang cerah seiring dengan kemajuan dan meningkatnya pemanfaatan TIK dalam pendidikan tinggi. Kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan institusi tersebut dalam menyelenggarakan program PTJ berkualitas yang kompetitif, terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. *Universitas maya*. Internet dan kemajuan TIK mengubah pola hidup manusia dan menawarkan alternatif metode pendidikan bagi mereka yang memiliki akses, terisolasi secara geografis dan tidak berkesempatan mengikuti sistem pendidikan tinggi konvensional tatap muka (Ryan, Scott, Freeman & Patel, 2000). Banyak orang menggambarkan perkembangan bentuk baru institusi universitas yang banyak menyelenggarakan program *online* atau program maya dengan istilah universitas maya (*virtual university*). Perkembangan semacam ini secara alamiah pada umumnya terjadi di negara maju atau negara yang memiliki prasarana, sarana dan jaringan TIK yang maju, memadai dan mudah dijangkau warga belajar. Di samping itu, budaya dan tingkat melek TIK telah berkembang secara mapan sehingga kehidupan sehari-hari warga belajar didukung atau berbasis TIK, baik di rumah, di tempat kerja maupun di berbagai sarana sumber belajar publik seperti perpustakaan. Di negara berkembang, termasuk Indonesia, universitas maya masih merupakan impian yang memerlukan waktu cukup lama untuk menjadi kenyataan.

Institusi universitas yang berkualitas memegang teguh tanggung jawab moral, akademik dan intelektual untuk tidak menyelenggarakan program belajar maya sebagai upaya mengikuti mode agar kelihatan maju dan modern sehingga menghasilkan proses belajar maya (*virtual learning*) yang semu yang seolah-olah berbasis teknologi baru, tetapi sebenarnya hanya menghasilkan gelar maya (*virtual degree*), yang tidak memiliki makna karena tidak mampu membangun kompetensi dan mengembangkan profesionalisme lulusannya. Hal ini penting untuk dikemukakan agar menjadi catatan kita semua sebagai teoris dan praktisi PTJJ.

Universitas maya telah dikembangkan di berbagai belahan planet bumi. *Universitat Oberta de Catalunya* di Spanyol dan

Universiti Tun Abdul Razak, sebuah universitas swasta di Malaysia, adalah dua contoh institusi PTJJ yang beroperasi sebagai universitas maya yang mengandalkan pemanfaatan TIK dalam pengelolaan, pelayanan dan pembelajaran mahasiswa. *African Virtual University*, yang berbasis di Kenya dan diprakarsai oleh Bank Dunia, kini dikembangkan dan dikelola oleh suatu konsorsium 17 negara Afrika dengan menjalin kemitraan dengan sejumlah universitas terkemuka di Afrika untuk memberikan kesempatan pendidikan tinggi secara jarak jauh melalui program belajar *online* kepada warga benua tersebut dengan menggunakan TIK. Sejalan dengan perkembangan, pemanfaatan dan akses yang lebih murah terhadap TIK, pada masa mendatang kita akan mendapati meningkatnya peran universitas maya yang makin terjangkau masyarakat luas dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan baik dalam skala nasional, regional maupun global.

6. *Akses universal pada pendidikan tinggi.* Penyediaan pendidikan tinggi secara universal telah menjadi agenda pokok banyak negara agar supaya suatu bangsa mampu bertahan dan berkembang terus menjadi bangsa berbasis pengetahuan yang cerdas, maju dan kompetitif. Institusi pendidikan tinggi diharapkan dapat membuka pintu akses selebar-lebarnya dalam menyiapkan SDM generasi penerus berkompetensi tinggi. Perkembangan mendatang pendidikan tinggi sepertinya bukan pada pembentukan sistem multiversitas sebagaimana yang terjadi pada negara yang kaya sumber daya seperti Amerika Serikat, melainkan pada makin meningkatnya penerapan PTJJ di berbagai negara. Universitas-mega adalah salah satu tanggapan yang positif dan konstruktif bagi banyak negara berjumlah penduduk besar. Universitas modus rangkap yang menawarkan program tatap muka dan jarak jauh sekaligus menjadi pilihan kebijakan banyak

negara dan institusi untuk membuka pintu akses yang lebih lebar. Universitas maya akan berkembang sesuai dengan kemajuan TIK dan kesiapan serta literasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK.

Universitas berbasis kampus yang telah ada merupakan institusi yang tetap lestari dengan fungsi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Akan tetapi upaya memperluas akses universal terhadap pendidikan tinggi pada masa mendatang tidak mengarah pada pendirian institusi pendidikan tinggi baru berbasis sistem pendidikan tatap muka dalam skala besar dengan membangun kampus baru, menyediakan sumber daya manusia serta prasarana dan sarana untuk kampus baru tersebut, karena hal ini akan memerlukan biaya yang amat besar yang belum tentu dapat ditanggung oleh negara atau masyarakat terutama di negara berkembang yang sumber dayanya terbatas. PTJJ diperlukan karena fleksibilitas dan kemudahan akses oleh masyarakat luas dari berbagai lapisan.

7. *Akuntabilitas, keunggulan kompetitif dan kelestarian institusi PTJJ.* Dalam masyarakat yang demokratis, institusi PTJJ dituntut untuk menerapkan manajemen terbuka dan memenuhi akuntabilitas publik. Dorongan perubahan iklim organisasi tersebut tidak hanya berasal dari kekuatan di luar institusi namun juga dari dalam institusi sendiri. Perubahan paradigma pendidikan sebagai hak dasar warga negara dan sebagai upaya yang semakin bertumpu pada kontribusi pengguna menghendaki terpenuhinya syarat tersebut. Praktik pemerintahan yang baik menjadi kekuatan pendorong utama tumbuhnya minat terhadap akuntabilitas publik institusi pendidikan serta upaya dalam meningkatkan kinerja institusi. Penerapan sistem jaminan kualitas dalam PTJJ menjadi alat sekaligus tujuan dalam upaya peningkatan kualitas proses, produk serta kinerja institusi secara

berkelanjutan. Kualitas, semangat kewirausahaan yang kreatif dan cerdas, akuntabilitas dan keunggulan kompetitif merupakan upaya nyata yang dapat dilakukan untuk menjamin kelestarian institusi dalam memberikan layanan pendidikan tinggi secara berkelanjutan kepada warga belajar.

Fokus pada kebutuhan pengguna menjadi strategi penting dalam upaya mempertahankan kelestarian institusi organisasi. Dalam konteks PTJJ, fokus pada pengguna berarti memahami masalah yang berkaitan dengan apa yang perlu mereka pelajari, bagaimana mereka belajar, dukungan belajar yang mereka perlukan, waktu yang mereka habiskan untuk belajar, media yang mereka gunakan, dan gaya belajar yang mereka miliki. Institusi PTJJ harus mampu menjawab persoalan tersebut untuk menjamin bahwa kebutuhan pengguna dipenuhi secara efektif. Pengguna jasa masa kini jauh lebih terdidik karena mereka memiliki akses yang mudah terhadap berbagai macam informasi. Pengguna jasa menjadi semakin kritis terhadap layanan yang diberikan institusi PTJJ, dan mereka memiliki fleksibilitas dalam memilih layanan terbaik yang mereka perlukan sesuai dengan kondisi, kemampuan dan kebutuhan mereka.

Pengembangan kompetensi inti institusi merupakan prasyarat pokok keberlanjutan suatu organisasi, termasuk institusi pendidikan tinggi (Prahalad & Hamel, 1990; Holmes & Hooper, 2000). Mengembangkan kompetensi inti menjadi sangat penting bagi institusi PTJJ untuk mampu bersaing dan mempertahankan kelestariannya. Bagi institusi PTJJ, yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kemampuan institusi dalam hal produk, pengguna dan aktifitas yang dilakukan, serta memenuhi kebutuhan pengguna berdasarkan kemampuan, keterampilan dan sumber daya yang dimilikinya. Institusi harus memiliki strategi jitu yang

dapat menjamin bahwa ia benar-benar memiliki kinerja yang lebih baik dari institusi lain yang bergerak dalam aktivitas bisnis yang sama.

8. *Globalisasi dan transnasionalisasi pendidikan tinggi.* Kecenderungan dalam globalisasi pendidikan dilandasi oleh beberapa alasan yang terkait dengan kemampuan ekonomi, kondisi sosial politik serta kemajuan teknologi (Mason, 1998). Lebih jauh lagi, globalisasi dan internasionalisasi telah menjadi fenomena penting dalam pendidikan tinggi karena makin meningkatnya konvergensi dan saling ketergantungan perekonomian dan masyarakat secara global (Van Fught, Van der Wende & Westerheijden, 2002). Institusi PTJJ juga ditantang untuk menjawab kecenderungan baru sebagai dampak globalisasi, internasionalisasi dan transnasionalisasi pendidikan. Kompetisi merupakan gejala alamiah masa kini, sehingga untuk menyiasatinya diperlukan solusi alamiah melalui pengembangan jaringan kemitraan dan kerjasama antarlembaga. Institusi PTJJ ditantang untuk menjalin jaringan kerja sama nasional maupun internasional melalui berbagai kegiatan seperti pengembangan program bersama, alih kredit, penawaran matakuliah bersama, dan sebagainya. Pengguna jasa PTJJ kini memiliki keleluasaan dalam memilih program PTJJ yang mereka inginkan, bagaimana mereka menempuhnya, memilih institusi yang menawarkan program PTJJ terbaik sesuai dengan kondisi dan kemampuan finansial mereka. PTJJ tidak mengenal batas geografis maupun geopolitik sehingga siapa saja dapat mengikuti program PTJJ yang diselenggarakan oleh institusi PTJJ nasional maupun internasional.
9. *Jaminan kualitas.* Kelestarian program dan institusi PTJJ sangat ditentukan oleh kualitas penyelenggaraannya, mulai dari bahan ajar, bantuan belajar, ujian dan seluruh layanan yang disediakan

untuk membantu mahasiswa mengikuti program PTJJ. Kualitas menjadi perhatian dan milik semua pihak yang berkepentingan dengan PTJJ, mulai dari mahasiswa, pemerintah, masyarakat pengguna, institusi yang bersangkutan, dan organisasi yang terkait dengan PTJJ. Institusi PTJJ harus mampu mengembangkan sistem jaminan kualitas internal yang sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan. Penilaian kualitas secara eksternal dapat dilakukan oleh lembaga akreditasi dan sertifikasi kualitas. Penilaian eksternal ini sangat penting agar institusi PTJJ dapat melakukan baku mutu dengan institusi lain baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam upaya peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Mekanisme penjaminan kualitas seperti ini diharapkan melindungi kepentingan pengguna jasa PTJJ sehingga mereka benar-benar memperoleh layanan berkualitas, menyelesaikan program PTJJ berkualitas, menjadi lulusan berkualitas, serta pada akhirnya mampu memberikan kontribusi yang berkualitas pula dalam kehidupan profesional mereka.

10. *Kerja sama dan kemitraan PTJJ.* Sistem PTJJ hendaknya mampu mengembangkan kemitraan dan kerja sama dengan berbagai institusi guna mendukung keberlangsungan operasionalnya secara efektif. Kemitraan dan kerja sama menjadi penting untuk memperkuat kompetensi inti institusi PTJJ serta meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi keragaman kebutuhan pengguna. Institusi PTJJ dan institusi pendidikan tinggi tatap muka seyogianya saling bekerja sama dan membangun kemitraan saling menguntungkan untuk menyelenggarakan program PTJJ berkualitas bersama-sama. Bentuk kerja sama dan kemitraan ini dapat bermacam-macam. Di Indonesia, misalnya, UT bermitra dengan berbagai institusi pendidikan tinggi tatap muka dalam pengembangan kurikulum, bahan ajar, bahan

ujian, penyelenggaraan tutorial, dan bahkan pengelolaan Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) yang tersebar di berbagai daerah. Di samping itu, pengakuan gelar dan alih kredit antara institusi, baik pada tingkat nasional maupun internasional, menjadi praktik yang semakin lumrah karena beragamnya kebutuhan pengguna jasa PTJJ dan tersedianya teknologi yang mudah dijangkau.

11. *Program pengembangan profesional berkelanjutan.* Kemajuan dalam berbagai bidang profesi kehidupan manusia, sosial, ekonomi, dan teknologi yang sangat cepat dan pesat menghendaki setiap orang untuk selalu mengasah dan memperbaharui pengetahuan, keterampilan dan kompetensi dalam profesi masing-masing. Hal ini menjadi tantangan dan peluang institusi pendidikan tinggi tatap muka maupun PTJJ. *State University of New York (SUNY) System*, misalnya, mengakomodasi sekitar 1.1 juta mahasiswa program pengembangan profesional atau sekitar tiga kali lipat jumlah mahasiswa program akademik konvensional. Hal ini memberikan ilustrasi yang sangat mengesankan tentang kecenderungan baru dalam hal program pengembangan profesional berkelanjutan. Institusi PTJJ perlu mengembangkan sayapnya secara lebih lebar dengan mengembangkan program pendidikan profesional berkelanjutan di samping program akademik yang telah ada saat ini.

Belajar sepanjang hayat menjadi kebutuhan sekaligus keharusan setiap orang untuk dapat bertahan hidup layak sebagai warga masyarakat berbasis pengetahuan. Institusi pendidikan tinggi tatap muka maupun PTJJ harus mampu cepat tanggap terhadap perubahan kebutuhan masyarakat yang berkembang amat pesat melalui penyelenggaraan program pengembangan profesional berkelanjutan dengan sistem jarak jauh, serta menciptakan program yang memberikan nilai tambah dan berfokus pada

kebutuhan mahasiswa dan pengguna (Rosenberg, 2001; Jongbloed, 2002). Masyarakat kini tidak hanya memerlukan program gelar, melainkan juga semakin banyak memerlukan program pengembangan profesional. Untuk menjadi profesional yang kompeten dan kompetitif, masyarakat perlu memperbaharui pengetahuan mereka secara terus menerus dalam berbagai bidang yang sangat spesifik, seperti akuntansi, komputer, teknologi informasi, desain grafis, aktuarial, dan sebagainya. Program pengembangan profesional berkelanjutan berjangka lebih singkat daripada program pendidikan akademik konvensional yang pada umumnya berlangsung lebih lama dan bertujuan akhir memperoleh suatu gelar akademik. Beberapa institusi PTJ di dunia, seperti UKOU dan *The Open University of Hong Kong*, secara khusus mengembangkan *Institute of Continuing Professional Education* dan memberikan prioritas pada penyelenggaraan program pengembangan profesional berkelanjutan dengan sistem jarak jauh yang dimaksudkan untuk membantu mempertahankan kekinian pengetahuan serta meningkatkan kompetensi kalangan profesional peserta program tersebut.

Simpulan

Perubahan sosial, ekonomi, politik dan teknologi berdampak pada perubahan kebutuhan, pola hidup dan gaya hidup masyarakat. Terlebih lagi, berbagai perubahan tersebut menuntut perubahan kompetensi profesional setiap warga masyarakat. Setiap warga masyarakat harus selalu meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kompetensinya dalam berbagai bidang. Pendidikan berubah menjadi lebih dari sekadar hak dasar warga masyarakat yang harus dipenuhi negara, melainkan menjadi kebutuhan sepanjang hayat

warga masyarakat itu sendiri agar dapat menjadi bagian dari masyarakat pengetahuan yang maju, memiliki kompetensi tinggi dan tangguh dalam kancah persaingan global.

PTJJ memiliki prospek dan peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengembangan kompetensi sepanjang hayat karena fleksibilitas dan keterbukaannya. Di banyak negara pada umumnya, PTJJ telah menjadi bagian dari strategi nasional yang terintegrasi dalam kebijakan nasional pendidikan masing-masing negara. Bagi sebagian warga masyarakat, PTJJ menjadi pilihan yang realistis untuk mengatasi berbagai hambatan mereka dalam mengikuti sistem pendidikan tatap muka.

Sejarah telah membuktikan bahwa institusi pendidikan yang berkualitas tetap lestari menembus masa dan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sumber daya manusia dalam lingkup nasional maupun internasional, sebagaimana telah ditunjukkan beberapa universitas tertua di dunia yang semakin tua menjadi semakin berkualitas dan dicari penggunaannya, seperti *Al-Azhar*, *Bologna*, *Paris*, *Oxford*, dan *Harvard*, yang telah berusia antara lebih dari 300 tahun hingga lebih dari 1,000 tahun. Di Indonesia, institusi universitas tertua pascakemerdekaan, seperti *Universitas Gajah Mada* dan *Universitas Indonesia*, baru berusia sedikit di atas 50 tahun.

Institusi PTJJ berkualitas yang relatif masih belum lama perjalanan sejarahnya dituntut untuk mampu berpartisipasi dalam upaya pengembangan SDM yang kompeten dalam perjalanan sejarahnya yang masih panjang menembus masa datang. Sejarah institusi PTJJ masih relatif sangat muda usianya, dibandingkan dengan institusi pendidikan tinggi tatap muka seperti yang telah disebutkan di atas. Program gelar eksternal *University of London* sebagai cikal bakal PTJJ modern baru diperkenalkan sekitar 170 tahun yang lalu.

Sebagian besar institusi PTJJ di dunia pada umumnya baru mulai berdiri dalam paruh terakhir abad ke-20. Universitas terbuka tertua di dunia yang berbasis korespondensi, yaitu *University of South Africa* di Afrika Selatan baru berusia kurang dari 50 tahun, sedangkan universitas terbuka modern tertua di dunia yang berbasis multimedia, yaitu *United Kingdom Open University* di Inggris baru berusia sekitar 30 tahun. *Universitas Terbuka* di negara kita berusia lebih muda lagi, baru memasuki usia 20 tahun pada tahun 2004 ini, usia yang masih sangat muda bagi perjalanan sejarah kelestarian suatu institusi PTJJ menuju masa datang. Namun demikian, institusi PTJJ telah membuktikan diri mampu menghasilkan SDM berkualitas dan berkaliber dunia, yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya perubahan mendasar yang signifikan dalam berbagai sektor pembangunan manusia baik di tingkat nasional maupun global, sebagaimana telah dipaparkan dalam kata pengiring makalah ini.

Kelestarian institusi pendidikan tinggi dapat diwujudkan melalui berbagai upaya seperti memikirkan dan menata kembali misi, struktur program, agenda penelitian serta tatanan kehidupan akademik (Corcoran & Wals, 2004). Dalam konteks perubahan pesat menuju masyarakat berbasis pengetahuan, institusi pendidikan tinggi harus mampu mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuan dalam konteks masyarakat global. Tidak diragukan lagi PTJJ kini menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem pendidikan tinggi nasional dan global. Pihak yang berkepentingan memiliki harapan besar dalam menggunakan sistem PTJJ untuk memperluas akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan tinggi berkualitas.

Pada usianya yang masih relatif muda, institusi PTJJ, baik modus tunggal maupun modus rangkap, makin menunjukkan kontribusi nyata, selalu mengupayakan peningkatan kualitas dari waktu ke

waktu, serta selalu meningkatkan diri guna menjaga prospek kelestariannya, seperti ditunjukkan oleh *University of South Africa* di Afrika Selatan, *United Kingdom Open University* di Inggris, *University of Southern Queensland* di Australia, *Sukhothai Thammathirat Open University* (STOU), di Thailand, atau *Universitas Terbuka* di Indonesia. Upaya melestarikan institusi PTJJ serta meningkatkan kualitas PTJJ menjadi tanggung jawab kita bersama, sebagai praktisi maupun sebagai teoris PTJJ, dan sama sekali bukan semata-mata bergantung pada tangan para pengambil kebijakan nasional atau pengguna jasa PTJJ itu sendiri. Institusi PTJJ harus mampu membuktikan keberadaan yang bermakna dan memberikan manfaat yang signifikan kepada pengguna serta pihak yang berkepentingan dengan cara memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya masyarakat berbasis pengetahuan yang sejahtera dan lestari.

Daftar Pustaka

- Altbach, P. G. 1999. 'The logic of mass higher education'. *Tertiary Education and Management*. 5:107-124.
- ANC (African National Congress). 2004. *Profile of Nelson Rolihlahla Mandela*. Tersedia melalui <http://www.anc.org.za/people.mandela/html>, tanggal 28 April 2004.
- Anderson, T. 2003. 'Modes of interaction in Distance Education: recent developments and research questions'. Dalam M. G. Moore & W. G. Anderson (eds.), *Handbook of Distance Education*, (hal. 129-145). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- Brown, K. 2002. *The Rights to Learn: Alternatives for a Learning Society*. London: Routledge Falmer.

- Corcoran, P. B. & Wals, A. E. J. (eds.). 2004. *Higher Education and the Challenge of Sustainability: Problematics, Promise, and Practice*. Dordrecht, Netherlands: Kluwer.
- Daniel, J. & Mackintosh, W. 2003. 'Leading open and distance learning futures in the eternal triangle: the mega-university response to the greatest moral challenge of our age'. Dalam M. G. Moore & W. G. Anderson (eds.), *Handbook of Distance Education*. (hal. 811-828). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- Daniel, J. 1996. *Mega-Universities and Knowledge Media Technology Strategies for Higher Education*. London: Kogan Page.
- Evans, T. & Nation, D. (eds.). 1989. *Critical Reflections on Distance Education*. London: The Falmer Press.
- GMUNET. 2003. *World Summit of Mega-Universities*. Shanghai: Global Mega-University Network (GMUNET) (CR-ROM).
- Hawkridge, D. 1995. 'The big bang theory in distance education', in Lockwood, F. (ed) *Open and Distance Learning Today*. (hal. 3-12). London: Routledge.
- Holmberg, B. 1983. 'Guided didactic conversation in distance education'. Dalam D. Sewart, D. Keegan & B. Holmberg (eds.), *Distance Education International Perspectives*. (hal. 114-122). London: Croom Helm.
- Holmberg, B. 2003. 'A theory of distance education based on empathy'. Dalam M. G. Moore & W. G. Anderson (eds.), *Handbook of Distance Education*. (hal. 79-86). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- Holmes, G. & Hooper, N. 2000. 'Core competence and education'. *Higher Education*. (40) 247-258.

- Inglis, A., Ling, P. & Joosten, V. 2002. *Delivering Digitally: Managing the Transition to knowledge media* (2nd ed.). London: Kogan Page.
- Jarvis, P. 1993. 'The education of adults and distance education in late modernity', in Keegan, D. (ed) *Theoretical Principles of Distance Education*. (hal. 166-174). London: Routledge.
- Jongbloed, B. 2002. 'Lifelong learning: implications for institutions'. *Higher Education*. 44:413-431.
- Keegan, D. (ed.). 1993. *Theoretical Principles of Distance Education*. New York: Routledge.
- Keegan, D. 1990. *The Foundations of Distance Education* (2nd ed.). London: Routledge.
- Keegan, D. 2002. *The Future of Learning: from e-Learning to mLearning*. Hagen: Zentrales Institut fur Fernstudienforschung, FernUniversitat.
- Kerr, C. 1977. *The Uses of the University with a Postscript – 1972*. Cambridge: Harvard University Press.
- Mason, R. 1998. *Globalising Education Trends and Applications*. London: Routledge.
- McWilliams, P. & Mugridge, I. 1998. 'Staff development for open and distance education: the case of the Commonwealth of Learning'. Dalam C. Latchem & F. Lockwood (eds.), *Staff Development in Open and Flexible Learning*. (hal. 54-62). London: Routledge.
- Moore, M. G. 1983. 'On a theory of independent study'. Dalam D. Stewart, D. Keegan & B. Holmberg (eds.), *Distance Education International Perspectives*. (hal. 68-94). London: Croom Helm.
- Newman, J. H. (Cardinal). 1947. *The Idea of a University*. New York: Longmans.

- Northcott, P. 1984. 'The tyranny of distance and proximity'. Dalam K. Smith (ed.), *Diversity Down Under in Distance Education*. (hal. 31-50). Toowoomba, Australia: Darling Downs Institute Press.
- Perkin, H. 1982. 'The historical perspective'. Dalam B. R. Clark (ed.), *Perspectives on Higher Education*. (hal. 17-55). Berkeley: University of California Press.
- Peters, O. 1983. 'Distance teaching and industrial production: a comparative interpretation outline'. Dalam D. Sewart, D. Keegan & B. Holmberg (eds.), *Distance Education International Perspectives*. (hal. 95-113). London: Croom Helm.
- Peters, O. 1993. 'Distance education in a post-industrial society', in Keegan, D. (ed), *Theoretical Principles of Distance Education*. (hal. 39-58). London: Routledge.
- Peters, O. 2001. *Learning and Teaching in Distance Education*. London: Kogan Page.
- Peters, O. 2003. 'Learning with new media in distance education'. Dalam M. G. Moore & W. G. Anderson (eds.), *Handbook of Distance Education*. (hal. 87-112). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- Prahalad, C. K. & Hamel, G. 1990. 'The core competence of the corporation'. *Harvard Business Review*, 68: hal 1-12.
- Randell, C. & Bitzer, E. 1998. 'Staff development in support of effective student learning in South African distance education'. Dalam C. Latchem & F. Lockwood (eds.), *Staff Development in Open and Flexible Learning*. (hal. 137-147). London: Routledge.
- Rosenberg, M. J. 2001. *E-learning Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age*. New York: McGraw-Hill.

- Ryan, S., Scott, B., Freeman, H. & Patel, D. 2000. *The Virtual University the Internet and Resource-based Learning*. London: Kogan Page.
- Saba, F. 2003. 'Distance education theory, methodology, and epistemology: a pragmatic paradigm'. Dalam M. G. Moore & W. G. Anderson (eds.), *Handbook of Distance Education*. (hal. 3-20). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- Sewart, D., Keegan, D. & Holmberg, B. (eds.). 1983. *Distance Education International Perspectives*. London: Croom Helm.
- Suparman, A. & Zuhairi, A. 2004. *Pendidikan Jarak Jauh: Teori dan Praktik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Taylor, J. 2004. *Fifth Generation Distance Education*. Tersedia melalui <http://www.icde.org>, 21 Januari 2004.
- Trow, M. 1974. 'Problems in the transition from elite to mass higher education'. *Policies for Higher Education*. (pp. 51-101). Paris: OECD.
- UT. 2002. *Sistem Jaminan Kualitas (SIMINTAS) Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Van Fught, F., Van der Wende, M. & Westerheijden, D. 2002. 'Globalization and internationalization: policy agendas compared', in J. Enders & O. Fulton (eds.), *Higher Education in a Globalizing World: International Trends and Mutual Observations* (pp. 1-17). Dordrecht: Kluwer.
- Walker, R. 1993. 'Open learning and the media: transformation of education in times of change', in Evans, T. and Nation, D. (eds), *Reforming Open and Distance Education*. (pp. 15-35). London: Kogan Page.
- Wedemeyer, C. A. 1971. 'Independent study: overview'. Dalam L. C. Deighton (ed.), *The Encyclopedia of Education*. New York: Macmillan.

Zuhairi, A & Suparman, A. 2002. 'Managing quality and accessibility in open and distance learning'. Dalam H. P. Dikshit, S. Garg, S. Panda & Vijayshri (eds.), *Access and Equity Challenges for Open and Distance Learning*. (hal. 252-263). India: Kogan Page.

PERKEMBANGAN DAN KONTRIBUSI PENDIDIKAN JARAK JAUH DALAM UPAYA PEMBANGUNAN MASYARAKAT INDONESIA BERBASIS PENGETAHUAN

Aminudin Zubairi dan Effendi Wahyono

Pengantar

Makalah ini membahas konteks, kebutuhan serta perkembangan dan kontribusi pendidikan jarak jauh (PJJ) dalam upaya pembangunan masyarakat modern Indonesia berbasis pengetahuan. Kondisi geografis, demografis, sosial ekonomi, teknologi dan budaya menjadikan PJJ sebagai suatu kebutuhan yang tidak dihindari dalam upaya meningkatkan partisipasi warga masyarakat untuk mengikuti pendidikan dalam berbagai jenjang, jalur dan jenis. PJJ di Indonesia telah diterapkan pada sektor pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal, maupun pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) berbagai organisasi yang ada di tanah air. PJJ di Indonesia menghadapi tantangan dalam pemanfaatan teknologi baru dalam masyarakat yang relatif masih rendah tingkat melek teknologi serta akses

terhadap teknologi itu sendiri. Penyelenggaraan PJJ di tanah air perlu mempertimbangkan teknologi tepat guna yang mudah terjangkau peserta didik yang tinggal di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kondisi yang berbeda. Pengguna layanan PJJ makin kritis terhadap kualitas layanan yang diberikan penyelenggara PJJ. PJJ di Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan dan kecenderungan mutakhir dalam praktik terbaik PJJ yang terjadi saat ini.

Akar Pertumbuhan, Konteks, dan Kebutuhan Pendidikan Jarak Jauh

Ketika Indonesia memproklamasikan diri sebagai bangsa merdeka pada tahun 1945, sebagian besar penduduk Indonesia masih buta huruf. Kondisi itu menyulitkan Pemerintah Indonesia dalam upaya membangun bangsa. Disadari bahwa pendidikan merupakan unsur yang sangat penting untuk membebaskan bangsa Indonesia dari kebodohan akibat penjajahan. Namun perang kemerdekaan yang berlangsung sekitar lima tahun menyebabkan pembangunan sektor pendidikan terabaikan. Pemerintah Republik Indonesia yang baru lahir disibukkan dengan mengatur strategi perang, baik melawan tentara Sekutu maupun Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, dan sekaligus mengupayakan tindakan nyata untuk membangun negara Republik Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan. Perang Kemerdekaan berakhir setelah Pemerintah Belanda memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Sejak saat itu, Pemerintah mulai memikirkan pembangunan pendidikan di Indonesia sebagai sarana untuk melepaskan bangsa Indonesia dari kebodohan.

Meskipun dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, namun harus diakui bahwa pembangunan pendidikan bagi warga Indonesia bukan hal yang mudah. Wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia begitu luas, sedangkan tenaga terdidik hanya ada di kota-kota besar. Pada waktu itu, mereka adalah golongan terdidik yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga administrasi pegawai kolonial, administrasi perdagangan dan perkebunan milik kalangan swasta kolonial. Sebagian dari mereka adalah lulusan sekolah swasta yang didirikan bagi golongan masyarakat yang tidak mau mengikuti pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial. Pada awal kemerdekaan, jumlah mereka sangat sedikit dan hanya berada di kota-kota besar. Sebagian besar rakyat Indonesia adalah golongan petani yang buta huruf.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu dicari langkah terobosan. Pemerintah perlu mendidik calon guru dalam jumlah besar yang disiapkan untuk mendidik rakyat Indonesia yang tersebar di berbagai pelosok tanah air. Karena keterbatasan dana dan tenaga, tidak semua calon guru dididik dengan sistem konvensional atau tatap muka. Sebagian dari mereka dididik melalui sistem korespondensi serta radio, yang kemudian dalam perkembangannya kini dikenal dengan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ).

Embrio PJJ di Indonesia diselenggarakan dalam bentuk sistem belajar korespondensi, sebagaimana halnya yang terjadi di beberapa negara lain di dunia. Meskipun demikian, secara resmi PJJ di Indonesia dimulai dengan didirikannya Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru (BKTPG) di Jl. Cipto No. 9 Bandung. Balai ini berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. F.503 tanggal 2 Juli 1950, dengan tugas menyelenggarakan kursus

tertulis bagi guru yang memiliki ijazah lebih rendah dari standar minimal persyaratan menjadi guru dan berminat meningkatkan kompetensinya untuk mencapai ijazah pendidikan guru seperti Sekolah Guru Bawah (SGB), Sekolah Guru Atas (SGA), Kursus B1, atau B2. Setelah lembaga pendidikan guru melalui jalur pendidikan formal dianggap memadai secara kuantitas di berbagai daerah di Indonesia, BKTPG kemudian dijadikan pusat pengembangan penataran guru jarak jauh dengan sistem belajar mandiri. Lembaga ini telah beberapa kali mengalami perubahan nama dan status. Pada tahun 1967 BKTPG diubah namanya menjadi Pusat Penelitian Kurikulum, Metodik, dan Didaktik (PPKMD). Dengan perubahan nama itu, tugas dan fungsi lembaga ini mengalami perubahan pula. Lembaga ini tidak lagi menangani kursus tertulis bagi guru-guru, tetapi menyelenggarakan penelitian sesuai dengan namanya. Pada tahun 1970 PPKMD dikembalikan lagi fungsinya sebagai lembaga pendidikan guru, yang berada di bawah Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menyelenggarakan kursus-kursus tertulis bagi guru sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.

Sesuai dengan fungsinya, pada tahun 1977 PPKMD berubah nama menjadi Balai Penataran Guru Nasional Tetulis (BPGNT), dengan tugas utama menyelenggarakan penataran penyegaran guru sekolah menengah pertama dan atas. Dua tahun kemudian namanya berubah lagi menjadi Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis (PPPG). Tugas pokok lembaga ini adalah menyelenggarakan penataran teknis pendidikan secara tertulis bagi guru di lingkungan pendidikan dasar dan menengah dengan mengembangkan materi serta cara penyajian untuk berbagai mata pelajaran sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Suwondo, 2003).

Keberadaan PPPG Tertulis dilatarbelakangi oleh kenyataan luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam wilayahnya yang luas itu, banyak daerah terpencil tempat para guru mendedikasikan dirinya untuk kemajuan bangsa. Mereka tidak semua berasal dari sekolah guru. Sebagian dari mereka bahkan hanya memiliki latar belakang pendidikan yang sangat rendah dan tidak memiliki keterampilan serta kompetensi sebagai guru. Karena dedikasinya yang tinggi, mereka berhak untuk memperoleh kesempatan meningkatkan keterampilan dan profesionalismenya sebagai guru. Tetapi, mereka memiliki kesulitan untuk dapat mengikuti pendidikan formal sebagai guru karena kendala geografis, sosial, dan ekonomi. Secara geografis, mereka tidak mempunyai banyak kesempatan untuk mengikuti pendidikan tatap muka dengan meninggalkan tempatnya mengajar di daerah terpencil. Sedangkan secara ekonomis, pengiriman para guru dari daerah terpencil ke tempat penataran tatap muka yang umumnya terdapat di kota besar di Indonesia akan memakan biaya yang besar (Suwondo, 2003). Karena itulah pemerintah membentuk lembaga yang diberi tugas menyelenggarakan kursus tertulis bagi mereka yang tidak dapat dijangkau melalui sistem pendidikan tatap muka.

Di samping PPPG Tertulis, pada tahun 1952 pemerintah mendirikan Radio Siaran Pendidikan (SRP). SRP didirikan karena adanya kebutuhan untuk penyelenggaraan pendidikan, terutama bagi anggota ex-tentara pelajar yang selama perang kemerdekaan meninggalkan bangku sekolahnya karena berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari Pemerintah Belanda, mereka berminat untuk kembali ke bangku sekolah. Mereka tidak mungkin kembali ke sekolah reguler, karena usianya sudah jauh di atas rata-rata murid yang tidak masuk kesatuan tentara pelajar. Pada umumnya mereka terlambat sekitar empat sampai lima tahun. Untuk menampung kebutuhan pendidikan

mereka, pada tahun 1952 Jawatan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan pendidikan melalui sistem siaran radio yang menyajikan pelajaran dengan sasaran utama bagi mereka yang tinggal di Jakarta. Sayangnya, sistem siaran ini berakhir begitu saja setelah diadakan pemusatan pendidikan bagi ex-tentara pelajar di kota Malang. Sejak tahun 1969 RSP kemudian difungsikan sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan guru. Media radio ini dipilih karena media ini mampu menjangkau populasi pendengar yang lebih banyak secara jarak jauh dengan waktu yang lebih cepat (Habib, 1999). Selain itu, pengembangan program untuk media radio dan audio lebih murah bila dibandingkan dengan media lain, terutama televisi. Dari segi aksesibilitas, radio lebih aksesibel, karena warga negara Indonesia waktu itu lebih banyak yang memiliki radio dibandingkan dengan televisi. Di samping itu, program siaran radio secara eksperimental juga pernah diselenggarakan untuk menatar guru sekolah dasar di Jawa Tengah untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Seni Suara selama tahun 1973-1976. Ketiga mata pelajaran itu kemudian diajarkan secara jarak jauh melalui siaran radio kepada siswa sekolah dasar di Yogyakarta.

Pada awal tahun 1980-an, sebuah lembaga swasta di Jakarta, yaitu Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LPPM) menyelenggarakan kursus/pelatihan dan pendidikan manajemen dengan sistem jarak jauh. Pelajaran yang diberikan kepada peserta kursus disampaikan secara tertulis (tercetak) dengan sistem moduler. Program-program yang ditawarkan lembaga ini banyak menarik kalangan swasta. PJJ terus tumbuh dengan pesat di berbagai sektor pendidikan. Di samping diterapkan pada sektor pendidikan formal, PJJ juga digunakan dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan (Budimulia, Suparman & Romiszowsky, 1992).

Sejak tahun 1989, UT juga menyelenggarakan program pengembangan profesional berkelanjutan pada jenjang sertifikat, misalnya, program Bahasa Inggris yang bekerja sama dengan *Cambridge University*. Program-program pendidikan berkelanjutan ini terus dikembangkan, khususnya melalui kerja sama UT dengan berbagai instansi dan departemen pemerintah, maupun dengan pihak swasta. Perkembangan PJJ di tanah air telah diuraikan dalam beberapa publikasi selama beberapa tahun terakhir ini (Setijadi, 1987; Suparman, 1992; Siahaan, 1999; Pustekkom, 1999; Belawati, dkk., 1999; Suparman & Zuhairi, 2004; Asandhimitra, dkk., 2004). Secara lebih khusus berbagai perkembangan mutakhir PJJ di Indonesia diuraikan dalam bagian lain dalam makalah ini.

Konteks perkembangan PJJ di Indonesia tidak terpisahkan dari upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan nasional serta dipengaruhi oleh berbagai kecenderungan perkembangan global dalam penerapan sistem PJJ dalam berbagai sektor pendidikan. PJJ di Indonesia memiliki sejarah panjang, dalam pengertian boleh dikatakan hampir sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu sendiri. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 13.000 pulau dan keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi dan transportasi, Indonesia menghadapi tantangan nyata untuk membangun sumber daya manusia (SDM) nasional berkualitas, berkompetensi tinggi, serta upaya konkret untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi lebih dari 220 juta warga negaranya.

Kondisi geografi, demografi, sosial ekonomi, ketersediaan teknologi tepat guna, serta budaya masyarakat telah mendorong penggunaan sistem PJJ dalam upaya meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan pendidikan dalam berbagai jenjang, jalur, dan jenis. PJJ di Indonesia telah digunakan baik dalam pendidikan formal dan nonformal, pendidikan akademik maupun profesional, dan dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah maupun

pendidikan tinggi, serta pendidikan nonformal. PJJ di Indonesia pun berkembang mengikuti zaman, mulai dari menggunakan bahan ajar cetak yang dikirimkan dengan sistem korespondensi kemudian diperkaya dengan pemanfaatan berbagai macam media dan kemudian akhir-akhir ini disemarakkan dengan teknologi baru berbantuan komputer.

Sejalan dengan perkembangan zaman, perubahan sosial, ekonomi dan teknologi yang amat pesat, paradigma pendidikan nasional bergeser secara progresif yang mengarah pada terciptanya sistem pendidikan nasional yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, akuntabilitas serta pemerataan kesempatan bagi seluruh warga negara NKRI dalam rangka menuju masyarakat belajar (Sidi, 2001). Pada jenjang pendidikan tinggi, semangat, visi, misi, kebijakan dan strategi pengembangan pendidikan tinggi menuju pada cita-cita yang sama untuk meningkatkan daya saing bangsa dengan menciptakan sistem pendidikan tinggi yang sehat, berkualitas, otonom, merata dan terjangkau warga belajar (Brojonegoro, 2003). Seiring dengan hakikat pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara, sistem pendidikan nasional dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan belajar dan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan secara adil dan berkelanjutan. PJJ berkembang terus dan merupakan upaya konkret pengambil kebijakan nasional, kalangan profesi dan praktisi pendidikan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia modern berbasis pengetahuan sebagaimana diamanatkan oleh cita-cita kemerdekaan NKRI dan secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Perkembangan dalam Penerapan Pendidikan Jarak Jauh di Indonesia

Penerapan PJJ di berbagai sektor pendidikan ini menunjukkan fleksibilitas, daya tahan, serta prospek kelestarian sistem PJJ dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis program pendidikan dalam berbagai jalur dan jenjang. Bagi pemerintah, PJJ dipandang sebagai metode yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pendidikan, menjangkau warga masyarakat di berbagai pelosok tanah air, serta menyediakan pendidikan berkualitas secara efisien bagi seluruh warga negara Indonesia di mana pun mereka berada. Bagi peserta didik, terutama orang dewasa yang sudah bekerja dan siapa saja yang tidak berkesempatan untuk mengikuti program pendidikan tatap muka karena berbagai alasan, PJJ memberikan kesempatan luas karena fleksibilitas yang ditawarkannya.

Kepercayaan masyarakat, keyakinan pemerintah, dan pembuat undang-undang tentang manfaat dan kontribusi nyata PJJ dalam membantu mencerdaskan bangsa dinyatakan secara eksplisit dalam perundang-undangan yang baru saja selesai disusun, yaitu *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*. Hal ini merupakan yang pertama kali terjadi dalam sejarah perundang-undangan sistem pendidikan nasional, karena sebelumnya PJJ hanya disebut dalam salah satu ayat secara singkat dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Ini berarti bahwa dalam 14 tahun terakhir ini PJJ menunjukkan perkembangan yang pesat dalam teori, praktik, kredibilitas maupun fondasi legalitas. Bagian Kesepuluh Pasal 31 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* secara khusus berkaitan dengan PJJ. Mengutip Undang-Undang tersebut,

terdapat 4 ayat dalam Pasal 31 yang secara spesifik mengakomodasi PJJ, yaitu sebagai berikut.

- a. Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- b. Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
- c. Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- d. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Rumusan tentang PJJ secara khusus dan eksplisit dalam *Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional* memperkuat landasan hukum dan perundang-undangan yang mengatur PJJ, mengingat hal tersebut belum pernah tertera secara lengkap dalam undang-undang sebelumnya berikut peraturan pemerintah yang menyertainya. Sebagai tindak lanjut dari pasal 31 tersebut, pemerintah sedang menyusun *Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Jarak Jauh*, sehingga kedudukan PJJ menjadi semakin kokoh, kepercayaan masyarakat makin meningkat, dan kepentingan pengguna serta pihak terkait dapat dilindungi dengan sebaik-baiknya. Peraturan Pemerintah ini diharapkan secara lebih rinci mengatur pelaksanaan PJJ dalam berbagai sektor pendidikan sehingga layanan PJJ yang berkualitas dapat disediakan oleh institusi yang menyelenggarakannya. Bagi penyelenggara PJJ, keberadaan Peraturan Pemerintah yang tegas, kokoh dan yang kemudian dijabarkan dalam berbagai Keputusan Menteri terkait secara konkret memberikan kepastian

hukum serta memudahkan operasionalisasinya sehingga institusi penyelenggara PJJ dapat mengembangkan program PJJ berkualitas sesuai dengan rambu-rambu yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan Pemerintah tentang PJJ ini hendaknya memperhatikan pula perkembangan yang terkait dengan globalisasi dan transnasionalisasi pendidikan, serta praktik institusi penyelenggara PJJ di luar negeri yang menyediakan layanan belajar melalui sistem PJJ bagi warga negara Indonesia.

Kelahiran PJJ didorong oleh adanya kesenjangan antara tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan dan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Kesenjangan itu dalam berbagai hal diatasi dengan penyelenggaraan PJJ yang secara umum disebut pula belajar terbuka, pendidikan terbuka, pendidikan korespondensi, atau pendidikan melalui udara. Meskipun demikian, dalam berbagai hal sistem PJJ berkembang karena didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam bentuk tradisional, belajar jarak jauh diselenggarakan dengan sistem yang sederhana melalui surat menyurat atau bahan-bahan tercetak yang dikirim kepada mahasiswa. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dimungkinkan karena adanya teknologi percetakan. Dalam bentuknya yang modern, perkembangan PJJ didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. PJJ terbukti berperan nyata dalam upaya pengembangan manusia Indonesia yang cerdas dan berpengetahuan. PJJ telah dipraktikkan dalam berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan di Indonesia, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal, serta pelatihan dan pengembangan SDM.

Sekalipun PJJ di Indonesia telah ada sepanjang sejarah modern Indonesia pascakemerdekaan, penerapan PJJ secara lebih intensif terlaksana semenjak tahun 1970-an, ketika NKRI mendapatkan rejeki besar dari minyak bumi sehingga mampu membiayai pembangunan

dalam bidang pendidikan dalam skala besar. Dengan demikian, pemerintah Indonesia dapat mendanai berbagai inovasi dalam bidang PJJ, siaran pendidikan dan pengembangan bahan ajar cetak untuk belajar mandiri pada tingkat sekolah dasar (Setijadi, 1987). Pada tahun 1973-1976, Indonesia dengan bantuan UNESCO menyelenggarakan eksperimentasi program radio untuk menatar guru sekolah dasar di Jawa Tengah dalam Bahasa Indonesia, IPS dan Seni Suara dan mengajarkan mata pelajaran tersebut kepada siswa sekolah dasar di Yogyakarta. Kemudian, penataran guru melalui radio diperluas ke sebelas propinsi termasuk Jawa Tengah dan Yogyakarta sejak 1976. Masih dalam dasawarsa 1970-an, pada tingkat sekolah dasar dikembangkan sistem PAMONG (Pendidikan Anak oleh Masyarakat, Orangtua, dan Guru) untuk anak-anak yang putus sekolah dasar atau anak-anak usia sekolah dasar yang tidak tertampung di sekolah dasar biasa. Selanjutnya, penggunaan satelit domestik untuk komunikasi semenjak tahun 1974 berdampak positif pada pembangunan bidang pendidikan. Misalnya, pada tahun 1978, pemerintah mendirikan Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan (PUSTEKKOM) dan lima buah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terbuka guna memberikan kesempatan luas kepada mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan menengah secara tatap muka.

Pada dasawarsa 1970-an, kebutuhan untuk meningkatkan mutu guru sangat tinggi, sementara mereka tidak dapat meninggalkan pekerjaannya sebagai guru yang jumlahnya waktu itu masih sangat kecil. Siaran radio mengambil peran sebagai medium peningkatan kualitas guru. Melalui siaran radio ini diharapkan ada pemerataan mutu guru, baik yang di kota-kota maupun di daerah terpencil. Pada tahun 1973 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan meresmikan sistem siaran radio pendidikan untuk penataran guru SD. Kemudian Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Pustekkom juga menyelenggarakan SMP Terbuka.

Sejatinya kontribusi PJJ dalam pendidikan guru dalam jabatan di Indonesia sangat penting dari dulu sampai saat ini dan pada masa mendatang. Pendidikan guru dalam jabatan memiliki peran strategis, mengingat guru selalu berperan sebagai garda terdepan dalam pengembangan manusia seutuhnya. Sejarah dan cikal bakal PJJ tidak dapat dipisahkan dari pendidikan guru karena PJJ didorong oleh kebutuhan peningkatan kualifikasi guru dalam jabatan yang bekerja di berbagai jenjang pendidikan dan tersebar di seluruh penjuru tanah air. Sejarah pendidikan guru dalam jabatan dengan sistem jarak jauh sudah berlangsung lama dan merupakan cikal bakal PJJ di Indonesia. Pada tahun 1955, program pendidikan dengan sistem korespondensi dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi guru. Program ini bersifat teoretis sehingga dimungkinkan menggunakan bahan-bahan korespondensi dan ujian tertulis. Keluaran program ini adalah setingkat diploma yang dapat digunakan para guru untuk meningkatkan karier atau profesi keguruan mereka. Namun demikian program ini tidak berlangsung lama (Setijadi, 1987).

Pada tahun 1976, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia membentuk Tim Eksekutif Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan dengan tugas antara lain menyelenggarakan siaran radio pendidikan untuk peningkatan kualitas guru, dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dibantu oleh Kepala Balai Produksi Media Radio di Semarang, Kepala Balai Produksi Media Radio di Yogyakarta, dan Balai Produksi Media Televisi di Surabaya. Di samping itu, Kepala Pustekkom dibantu oleh Seksi Produksi dan Distribusi, Subseksi Penelitian dan Pengembangan, serta Subseksi Evaluasi dan Sanggar. Penemuan penelitian menunjukkan bahwa PJJ bagi guru dalam jabatan merupakan cara yang efisien bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas angkatan kerja guru (Nielsen & Tatto, 1993).

Di samping program-program yang ditawarkan lembaga-lembaga pendidikan formal seperti yang disebutkan di atas, di Indonesia telah berkembang pula program-program PJJ, misalnya Kursus Manajemen Multimedia oleh Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (LPPM –sejak 1979), program perbankan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) yang sekarang menjadi Institut Bankir Indonesia (IBI –sejak 1985), program Bina Keluarga Balita oleh Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, (sejak 1987), program penataran petugas lapangan keluarga berencana oleh BKKBN (sejak 1987), program-program untuk karyawan Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel –sejak 1990), dan program Penyetaraan DII Guru Agama oleh Departemen Agama (juga sejak 1990). Program PJJ lembaga-lembaga tersebut menggunakan media cetak dan kaset audio. Beberapa lembaga lain berupaya mempersiapkan pelaksanaan PJJ, antara lain PT Pos Indonesia dan Departemen Kesehatan.

PJJ banyak diterapkan oleh instansi pemerintah, terutama beberapa departemen pemerintah yang memiliki pusat pendidikan dan pelatihan pegawai, untuk melatih, mengembangkan dan meningkatkan kompetensi SDM-nya. Beberapa departemen yang dimaksud adalah Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Departemen Agama, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, dan sebagainya (Pustekkom, 1999a).

PJJ di Indonesia mengalami perkembangan yang menggembirakan dengan berbagai inovasi, prakarsa serta praktek pendidikan yang membuahkan hasil konkret dalam upaya membangun SDM nasional. Sekalipun demikian, pendokumentasian perkembangan PJJ di tanah air masih kurang menggembirakan sampai dengan penghujung akhir abad ke-20, karena terbatasnya forum publikasi yang

mendokumentasikan hasil penelitian, inovasi maupun praktek terbaik PJJ di tanah air. Hal ini terlihat nyata dari terbatasnya publikasi dan diseminasi informasi tentang PJJ di tanah air. Akan tetapi, mulai awal abad ke-21, diseminasi informasi tentang PJJ mendapatkan semangat baru dengan makin maraknya forum dan publikasi ilmiah dalam PJJ.

Universitas Terbuka (UT) sebagai pusat unggulan PJJ, khususnya dalam jenjang pendidikan tinggi, memberikan banyak kontribusi dalam hal ini, dengan dirintisnya penerbitan *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh* mulai tahun 2000. Jurnal yang diterbitkan dua kali setahun ini menyebarkan informasi hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan PJJ di Indonesia. Sebelumnya, penerbitan buku tentang PJJ telah dirintis sejak tahun 1999 (Belawati, dkk, 1999). Dan selanjutnya UT terus mengambil tindakan nyata dalam publikasi tentang PJJ melalui penerbitan buku setiap tahun secara teratur yang secara khusus menyajikan temuan penelitian, inovasi, gagasan baru, serta praktik terbaik dalam PJJ (Suparman & Zuhairi, 2004; Asandhimitra, dkk, 2004). Forum seminar nasional teknologi pembelajaran memperkaya pula khasanah dan wacana PJJ (Padmo, dkk, 2003). Semakin banyaknya publikasi tentang PJJ ini merupakan hal yang sangat positif dalam membantu mendokumentasikan perkembangan, wacana teori serta praktik PJJ dan membantu para peneliti dan pemerhati PJJ dalam mengarahkan dan memimpin perkembangan PJJ ke depan.

Penerapan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Dasar dan Menengah

Pada tingkat sekolah dasar, dikembangkan sistem PAMONG (Pendidikan Anak oleh Masyarakat, Orangtua, dan Guru) untuk anak-anak

yang putus sekolah dasar atau anak-anak usia sekolah dasar yang tidak tertampung di sekolah dasar biasa. Sistem PAMONG adalah salah satu contoh penerapan PJJ pada jenjang pendidikan dasar. Dalam sistem ini, para peserta didik setelah Kelas IV SD belajar secara mandiri dari paket bahan ajar yang disediakan pemerintah. Sistem ini menghendaki keterlibatan orang tua dan masyarakat sebagai sumber belajar dalam membantu proses belajar peserta didik. Di samping itu, Program Paket A pada tingkat Sekolah Dasar telah lama diselenggarakan dengan menerapkan sistem PJJ.

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Terbuka memberikan kontribusi besar dalam memperluas akses pada pendidikan menengah bagi siswa yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan menengah tatap muka. Gagasan SLTP Terbuka dikumandangkan pada tahun 1977, kemudian proyek percobaan baru dimulai pada tahun 1979 (Siahaan, 1999). SLTP Terbuka ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan luas kepada lulusan Sekolah Dasar yang tidak dapat mengikuti pendidikan menengah tatap muka karena hambatan geografis dan sosial ekonomis. Di samping itu, Program Paket B pada tingkat Sekolah Menengah Pertama telah lama diselenggarakan dengan menerapkan sistem PJJ.

Tercapainya pendidikan dasar universal dan pernyataan kebijakan wajib belajar sembilan tahun pada tahun 1994 membawa dampak positif pada penerapan PJJ pada tingkat pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. SLTP Terbuka yang sebelumnya bersifat eksperimental berubah menjadi pilihan utama untuk mendukung implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun. Dengan demikian, pemerataan kesempatan dan akses pada SLTP meningkat tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran (Pustekkom, 1999).

SLTP Terbuka dirancang untuk memenuhi kebutuhan para lulusan sekolah dasar yang kurang beruntung, karena kendala geografis

maupun sosial ekonomi, sehingga tidak memiliki akses pada SLTP tatap muka. SLTP Terbuka dapat menjangkau siswa yang tinggal di daerah pedesaan maupun perkotaan karena sistem pembelajaran dirancang untuk menyediakan fleksibilitas bagi siswa. Sistem ini memungkinkan pula pemanfaatan secara efektif sumber daya pembelajaran yang tersedia di masing-masing daerah, termasuk sarana dan prasarana sekolah, SDM, serta sumber belajar lainnya.

Sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pendidikan dasar dan menengah nasional, SLTP Terbuka mengikuti kurikulum dan kriteria penilaian yang sama dengan SLTP reguler tatap muka. Namun demikian, sesuai dengan kaidah dan metode PJJ, SLTP banyak menggunakan bahan ajar cetak mandiri, didukung oleh media audiovisual seperti kaset audio, siaran radio, *slide* serta program video dan siaran televisi. Bantuan belajar diberikan oleh Guru Bina dan Guru Pamong. Guru Bina adalah guru ahli dalam bidang studi masing-masing, sedangkan Guru Pamong berperan sebagai fasilitator yang membantu mengorganisasi kegiatan pembelajaran siswa di lokasi masing-masing. Siswa SLTP Terbuka belajar secara mandiri selama paling sedikit 3 jam sehari di sekolah atau sarana umum yang ada di dekat tempat tinggal mereka. Seminggu sekali Guru Bina mengadakan pertemuan tatap muka dengan para siswa SLTP Terbuka di SLTP reguler tempat Guru Bina sehari-hari mengajar (Pustekkom, 1999).

SMP Terbuka dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan menengah formal pertama di Indonesia yang menerapkan sistem PJJ. SMP Terbuka diselenggarakan karena adanya ledakan lulusan SD Inpres yang dibuka pada tahun 1973/1974. Angka buta huruf waktu itu masih sangat tinggi, sedangkan kesempatan mengikuti pendidikan bagi anak usia sekolah masih sangat terbatas. Perluasan kesempatan belajar sebagaimana diamanatkan UUD 1945 telah mendorong pemerintah memperluas daya tampung sekolah dasar dengan

mengeluarkan kebijakan SD Inpres. Dampak kebijakan tersebut adalah meledaknya lulusan sekolah dasar pada awal Pelita III yang besarnya mencapai 2.546.000 orang siswa. Hal itu menimbulkan masalah baru dalam pemberian kesempatan belajar bagi warga negara untuk mengikuti pendidikan di tingkat SLTP, mengingat daya tampung SLTP yang ada hanya sekitar 71,1 persen. Pemerintah tidak mempunyai dana yang cukup untuk memperluas daya tampung dengan menggunakan sistem belajar kelas, baik untuk menyediakan ruang-ruang kelas, fasilitas belajar, maupun tenaga pengajarnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, didirikanlah SMP Terbuka.

Pendirian SMP Terbuka diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih besar terhadap lulusan sekolah dasar dan lulusan madrasah ibtidaiyah yang tidak dapat memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikannya pada sekolah menengah pertama tatap muka karena alasan sosial, ekonomi, dan geografis. Sistem pendidikan ini diselenggarakan dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia seperti guru, ruang belajar, dan fasilitas belajar. Karena itu SMP Terbuka dapat dikembangkan relatif lebih cepat tanpa menuntut ketersediaan guru dan ruang kelas baru.

Karena sifatnya memanfaatkan sumber yang tersedia, SMP Terbuka didirikan dengan memanfaatkan gedung dan tenaga pengajar yang terdapat pada salah satu SLTP Negeri yang disebut sebagai sekolah induk. Setiap SMP Terbuka memiliki beberapa Tempat Kegiatan Belajar (TKB). Kepala Sekolah SMP Terbuka adalah dari Kepala Sekolah dari SMP induknya, demikian juga wakil kepala sekolahnya. Dalam struktur SMP Terbuka, selain kepala dan wakil kepala sekolah, juga ada guru bina, guru pamong, guru pamong khusus, guru bimbingan dan penyuluhan, dan tenaga administrasi. Guru bina, guru bimbingan dan penyuluhan, dan tenaga administrasi diambil dari guru sekolah induk, sedangkan guru pamong diambil dari guru sekolah dasar atau tokoh masyarakat yang bertugas

membantu guru bina dalam pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di tempat kegiatan belajar. Guru pamong khusus adalah anggota masyarakat yang memiliki keterampilan khusus, keahlian, atau pengetahuan yang tidak terdapat dalam kurikulum, tetapi dianggap bermanfaat bagi siswa.

Pada awalnya SMP Terbuka diselenggarakan di lima wilayah, yang disebut dengan:

- SMP Terbuka Kalianda, Lampung Selatan, Propinsi Lampung
- SMP Terbuka Plumbon, Cirebon, Propinsi Jawa Barat
- SMP Terbuka Adiwerna, Tegal, Propinsi Jawa Tengah
- SMP Terbuka Kalisat, Jember, Propinsi Jawa Timur, dan
- SMP Terbuka Terara, Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Penyelenggaraan SMP Terbuka di lima wilayah itu dianggap berhasil sehingga dalam rangka pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang mulai dicanangkan pada tahun 1994. Pemerintah kemudian mendirikan SMP terbuka di hampir seluruh propinsi di Indonesia. Pada tahun 1999, jumlah SMP Terbuka di seluruh Indonesia yang telah berdiri mencapai 3773 lokasi dengan 9721 tempat kegiatan belajar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Almunawar, 1999).

PJJ juga diterapkan dalam konteks pendidikan keagamaan dengan pendirian Madrasah Tsanawiyah Terbuka untuk menampung para santri pada berbagai pondok pesantren tatap muka. Sistem pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Terbuka memungkinkan para santri tetap menuntut ilmu agama pada pesantren tatap muka dan belajar pengetahuan umum melalui Madrasah tersebut dengan memanfaatkan sumber belajar dan tokoh masyarakat setempat sebagai fasilitator. Statistik menunjukkan bahwa di Indonesia tercatat 8.991 Pondok Pesantren dengan jumlah peserta didik sekitar 2 juta

santri, 70% di antaranya berada dalam kelompok usia 13-15 tahun (Pustekkom, 1999).

Inovasi dalam PJJ untuk tingkat pendidikan menengah tingkat atas telah dirintis sejak tahun 1999 (Ibrahim, 2003). SMU Terbuka dipandang sebagai sebuah alternatif layanan pendidikan umum untuk memberikan kesempatan bagi para lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama yang tidak dapat mengikuti program pendidikan tatap muka. Uji coba perintisan SMU Terbuka dilakukan mulai tahun 2002 pada tujuh SMU sebagai berikut, (1) SMU Negeri 1 Leuwiliang, Jawa Barat, (2) SMU Negeri 1 Moga, Jawa Tengah, (3) SMU Negeri Rupert, Riau, (4) SMU Negeri 9 Samarinda, Kalimantan Timur, (5) SMU Negeri 1 Bungoro, Sulawesi Selatan, (6) SMU Negeri 19 Surabaya, Jawa Timur, dan (7) SMU Negeri Kepanjen, Jawa Timur (Ibrahim, 2003). Di samping itu, Program Paket C pada tingkat Sekolah Menengah Umum telah lama diselenggarakan dengan menerapkan sistem PJJ. Inovasi dalam penyelenggaraan SMU Terbuka ini masih perlu terus dievaluasi efektivitasnya, sekalipun pengalaman negara lain menunjukkan bahwa sistem ini dapat diterapkan secara efektif bagi para peserta didik yang tinggal di daerah terpencil dan sulit menjangkau sistem persekolahan tatap muka.

Penerapan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi

Pada tahun 1980, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menyelenggarakan *sistem PJJ melalui satelit* (Sisdiksat) untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Indonesia Timur. Sisdiksat diharapkan dapat mengatasi kelangkaan tenaga pengajar dan bahan perkuliahan yang berkualitas di wilayah Kalimantan,

Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Sisdiksat diselenggarakan melalui jaringan komunikasi satelit dan papan tulis tele sehingga pengajar yang berada di suatu tempat (Dikti) dapat mengirim tulisan dan berbicara timbal balik dengan dosen atau mahasiswa yang tersebar di universitas/institut di wilayah Indonesia Timur tersebut. Mata kuliah yang diajarkan melalui Sisdiksat adalah mata kuliah yang langka tenaga pengajarnya dan umumnya dalam bidang pertanian (Suparman & Zuhairi, 2004). Dengan sistem PJJ ini, dosen atau narasumber dari Jakarta dapat berkomunikasi secara interaktif dengan dosen-dosen lain per kelas di beberapa wilayah di Indonesia Timur. Setelah UT berdiri, fasilitas Sisdiksat juga dimanfaatkan oleh UT untuk sarana tutorial bagi mahasiswa UT yang berada di Indonesia Timur.

Pada tahun 1981, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan program PJJ D-II Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Program ini diperuntukkan guru SLTP yang telah mempunyai ijazah D-I atau PGSM. Tenaga pendidik sekolah tingkat lanjutan pertama itu awalnya direkrut dari guru-guru yang berpendidikan sangat minim sehingga perlu ditingkatkan pendidikannya bagi mereka yang telah mengajar paling sedikit tiga tahun, ke tingkat yang lebih tinggi, setingkat D-II. Pada waktu itu masalah yang dihadapi untuk mendidik guru-guru tersebut adalah tidak ada guru pengganti yang menggantikan posisi mereka mengajar, jika mereka mengikuti pendidikan lanjutan. Karena itulah mereka kemudian dididik dengan sistem jarak jauh yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Akan tetapi, PJJ untuk guru sekolah lanjutan tingkat pertama itu tidak menginduk pada salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Pendidikan tersebut langsung diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai proyek Direktorat Jenderal itu.

Hal yang hampir sama juga terjadi pada pendidikan Akta Mengajar V. Pada tahun 1982 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan PJJ untuk Akta V. Pendidikan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mengajar dosen-dosen di perguruan tinggi. Pendidikan Akta V inipun tidak menginduk kepada salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia waktu itu, tetapi diselenggarakan sebagai proyek Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kondisi seperti itu ikut mendorong pemerintah mendirikan UT. Setelah UT berdiri, kedua proyek PJJ yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi itu dialihkan ke UT.

Peningkatan Kualitas, Pemanfaatan Teknologi Baru dan Pendirian Asosiasi Profesi

Penerapan sistem jaminan kualitas dalam PJJ sejalan dengan makin meningkatnya kecenderungan global dan kepedulian terhadap kualitas dari kalangan pengguna jasa dan pihak yang berkepentingan. Kualitas sudah menjadi perhatian masyarakat pendidikan nasional sejak lama, boleh jadi semenjak sistem pendidikan modern diperkenalkan di negeri ini, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional berkualitas yang mampu menghasilkan lulusan yang profesional dan berkompetensi tinggi sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Kualitas telah menjadi agenda, visi maupun misi sistem pendidikan nasional. Namun demikian, upaya konkret penerapan sistem jaminan kualitas modern sebagaimana telah diterapkan di berbagai kalangan industri dan jasa baru akhir-akhir ini mendapat perhatian serius dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan pendidikan di tanah air. Pada tahun 2003, pemerintah Republik Indonesia

melalui Departemen Pendidikan Nasional mendirikan Lembaga Penjamin Kualitas Pendidikan (LPMP) di setiap propinsi yang ada di tanah air, Institusi PJJ dapat menerapkan prinsip jaminan kualitas ISO (*International Standard Organisation*) sebagaimana dipraktikkan kalangan industri dengan menerapkan sistem seperti ISO 9000, ISO 14000. Dalam konteks nasional, institusi PJJ dapat mengundang lembaga akreditasi nasional sebagai penilai eksternal, seperti LPMP atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Selain itu, institusi PJJ dapat pula mendapatkan sertifikasi kualitas dan akreditasi dari lembaga pendidikan jarak jauh internasional seperti *International Council for Open and Distance Education (ICDE)*.

Dalam PJJ, karena terbatasnya jumlah, jenis dan jenjang institusi yang menerapkan sistem PJJ, tidak banyak hal yang dapat dilaporkan dalam penerapan sistem PJJ. Namun demikian, UT sebagai institusi pendidikan tinggi jarak jauh telah banyak memberikan kepeloporan dalam penerapan sistem jaminan kualitas dalam PJJ. Jaminan kualitas menganut prinsip perbaikan berkelanjutan sehingga upaya peningkatan kualitas dilakukan secara terus menerus. Kualitas sudah semestinya menjadi budaya kerja SDM dan institusi PJJ di tanah air sehingga institusi dapat memberikan layanan berkualitas dan pada akhirnya menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu bersaing dalam kancah global.

Perhatian terhadap kualitas PJJ telah dirintis UT dengan penerapan sistem jaminan kualitas (SIMINTAS) sebagai upaya perbaikan kualitas layanan dan penyelenggaraan PJJ secara menyeluruh pada institusi tersebut (UT, 2002). Kebijakan kualitas dilandasi oleh Rencana Operasional yang secara eksplisit menyatakan kualitas sebagai pijakan dan fokus arah pergerakan institusi ke depan sehingga sumber daya yang terdapat pada institusi PJJ tersebut dikerahkan untuk meningkatkan kualitas (UT, 2001). Rencana Operasional ini merupakan operasionalisasi visi dan misi institusi

yang juga secara tegas dan eksplisit mengutamakan prioritas dan fokus pengembangan pada kualitas akademik, kualitas partisipasi mahasiswa dan kualitas manajemen internal.

Pemanfaatan teknologi baru dalam PJJ di Indonesia terkait dengan kemajuan pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta prospek dan potensi pemanfaatannya di Indonesia. PJJ melibatkan pemanfaatan media tepat guna secara substansial karena terpisahnya jarak antara pendidik dan peserta didik menghendaki peran sentral media dalam menyampaikan bahan ajar. Teknologi dan media yang dimanfaatkan PJJ di Indonesia berkembang, sejalan pula dengan perkembangan teknologi tersebut, mulai dari berbasis korespondensi, berbasis media, kemudian berbasis TIK. PJJ yang dimulai pada tahun 1950-an banyak tergantung pada pemanfaatan media korespondensi atau tertulis sehingga hal ini tercermin dalam nama institusi penyelenggaranya, yang disebut dengan Badan atau Pusat Pengembangan dan Penataran Guru Tertulis. Sekalipun demikian siaran radio telah banyak dimanfaatkan pula. Dasawarsa 1970-an ditandai dengan peningkatan penggunaan PJJ berbasis aneka media atau multi media dengan memanfaatkan siaran radio, pita rekam, dan siaran televisi.

Kondisi geografis dan demografis Indonesia mendorong pemanfaatan teknologi dan media secara intensif, sekalipun pemanfaatan teknologi baru masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini terkait dengan masalah ketersediaan prasarana dan sarana, akses serta tingkat literasi peserta didik PJJ. Dalam dasawarsa 1990-an, gagasan pengembangan dan penerapan teknologi baru dalam PJJ, terutama pada pendidikan tinggi, dipelopori dengan pengembangan prasarana informasi akademik di tanah air (Purbo, Soegijoko, Ahmad & Merati, 1998). Kemudian, mulai dasawarsa 2000-an, beberapa inovasi pemanfaatan teknologi dalam PJJ pada jenjang pendidikan tinggi di tanah air dilakukan dengan melibatkan pemanfaatan jaringan untuk

membantu proses belajar, menciptakan lingkungan belajar berbantuan komputer, serta menggunakan program televisi melalui satelit siaran langsung bagi dosen perguruan tinggi di Indonesia (Belawati, 2000; Padmo, Huda & Belawati, 2000; Suradijono, Nazief, Subagdja & Moningga, 2000). Pemanfaatan TIK dalam PJJ terus dikembangkan dengan eksplorasi dan penerapan sistem manajemen dan pembelajaran berbasis internet sebagaimana telah dirintis oleh UT dan beberapa perguruan tinggi di tanah air (Anggoro, Hardhono, Belawati & Damayanti, 2001; Andriani, dkk., 2003; Anggoro, 2004).

Negara sebesar Indonesia dengan penerapan PJJ dalam skala besar sewajarnya memiliki organisasi dan institusi yang kokoh dalam PJJ. Pembentukan organisasi nasional dalam PJJ telah dirintis semenjak tahun 1993 dengan pendirian *Indonesian Distance Learning Network (IDLN)*. Organisasi ini menghimpun anggota dari berbagai sektor, instansi pemerintah maupun pihak swasta yang memiliki kepentingan dalam menerapkan dan memajukan PJJ di tanah air untuk mengembangkan SDM yang dimilikinya (Pustekkom, 1999).

SDM merupakan bagian terpenting dalam setiap inovasi dan kelestarian suatu institusi PJJ. Institusi PJJ yang baik memberikan perhatian dan prioritas tinggi terhadap pengembangan dan pembinaan SDM. Pada institusi PJJ yang relatif sudah mapan, berbagai upaya konkret telah dilakukan untuk mengembangkan SDM PJJ yang kompeten dan berkualifikasi tinggi. Terlebih lagi dalam PJJ, kompetensi, kategori dan jenis SDM sangat beragam. Karena sifat PJJ yang umumnya menghendaki terbinanya jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak, SDM PJJ pun ada yang bekerja penuh waktu dan paruh waktu.

Pengembangan dan pembinaan SDM PJJ telah dilakukan secara terus menerus melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dan nonformal, serta melalui berbagai forum seminar, diskusi dan

tukar pikiran ilmiah. Satu perkembangan penting dalam pembinaan profesi PJJ baru-baru ini adalah pembentukan Asosiasi Profesi Pendidikan Jarak Jauh Indonesia (APPJJI) pada tanggal 30 Maret 2004. Asosiasi profesi seperti ini diharapkan banyak berperan dalam membina dan mengembangkan profesi PJJ, dan secara lebih luas lagi memajukan PJJ di tanah air. APPJJI didirikan dengan landasan pemikiran bahwa tindakan konkret perlu dilakukan untuk lebih memasyarakatkan PJJ di tanah air, meningkatkan sinergi kalangan profesional dan lembaga penyelenggara PJJ, meningkatkan serta menjaga standar mutu pendidikan. Asosiasi ini diharapkan mampu berperan aktif dalam pengembangan PJJ melalui berbagai kegiatan penelitian, pendidikan dan pelatihan dan diseminasi informasi tentang PJJ di tanah air.

Simpulan

PJJ di Indonesia berkembang pesat sejalan dengan meningkatnya layanan pendidikan berkualitas yang diperlukan masyarakat. PJJ berkembang dari segi kuantitas dan kualitas peserta didik maupun institusi penyelenggara. PJJ dalam pendidikan formal semakin banyak digunakan untuk menjangkau peserta didik yang tidak dapat mengikuti sistem pendidikan tatap muka. Dalam pendidikan non-formal, semakin banyak jenis program dan institusi yang menyelenggarakan PJJ, misalnya dalam bentuk program pengembangan profesional.

Sejalan dengan perubahan sosial yang mengarah pada pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan, pemenuhan kebutuhan belajar sepanjang hayat, serta tuntutan akses universal terhadap pendidikan pada berbagai jenjang, jalur dan jenis, PJJ memiliki peran strategis untuk memberikan respons terhadap berbagai tantangan yang saling terkait tersebut. Pemerintah dan pihak yang berkepentingan tidak

dapat memandang sebelah mata potensi PJJ dalam membantu memenuhi kebutuhan pendidikan warga masyarakat dan mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan.

PJJ merupakan upaya pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM yang berkembang secara dinamis di tanah air. Jumlah institusi, peserta didik serta ragam program PJJ yang ditawarkan berkembang dan bertambah terus sejalan dengan kebutuhan warga masyarakatnya. PJJ tidak lagi dipandang sebagai upaya sampingan yang dilakukan sambil lalu untuk meningkatkan pemasukan finansial institusi guna menutup anggaran pengeluaran institusi penyelenggaranya. PJJ memiliki kedudukan yang kukuh secara legal sebagaimana dinyatakan secara jelas dan tegas dalam bagian kesepuluh Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. PJJ merupakan sistem pendidikan yang memiliki landasan teoretik, empiris, serta pengalaman praktik terbaik yang teruji di seluruh dunia. Profesi dalam PJJ di tanah air merupakan profesi yang bergengsi, yang memerlukan keahlian yang sangat spesifik, kompetensi yang khusus, memberikan imbalan yang wajar, serta memiliki prospek perkembangan masa depan yang cerah baik bagi praktisi maupun teoris. □

Daftar Pustaka

- Almunawar, M. 1999. 'Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Terbuka (SLTP Terbuka): alternatif pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (Wajar Diknas)'. Dalam Belawati, T. *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Andriani, D., dkk. (ed.). 2003. *Cakrawala Pendidikan: E-learning*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Anggoro, M. T. 2004. 'Teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan tinggi jarak jauh'. Dalam Asandhimitra, (ed.). *Pendidikan Tinggi Jarak Jauh*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Anggoro, M. T., Hardhono, A. P., Belawati, T. & Damayanti, T. 2001. 'Tutorial elektronik melalui internet dan fax-internet'. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, 2(1):60-77.
- Asandhimitra, (ed.). 2004. *Pendidikan Tinggi Jarak Jauh*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Belawati, T. 2000. 'Enhancing learning in distance education through the world wide web'. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, 1(1):1-12.
- Belawati, T., dkk. (ed.). 1999. *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Brojonegoro, S. S. 2003. *Higher education long term strategy 2003 – 2010*. Jakarta: Directorate General of Higher Education, Ministry of National Education.
- Brotosiswoyo, B. S. 1996. *Catatan Akhir 4 Tahun Masa Bakti Rektor Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Habib, Z. 1999. 'Siaran radio pendidikan: embrio pendidikan terbuka di Indonesia'. Dalam T. Belawati, dkk. (ed.) *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Ibrahim, N. 2003. 'SMU Terbuka: sebuah alternatif layanan pendidikan tingkat sekolah menengah umum'. Dalam D. Padmo, dkk. (ed.). *Teknologi Pembelajaran Upaya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Nielsen, H. D. & Totto, M. T. 1993. 'Teacher upgrading in Sri Lanka and Indonesia'. Dalam H. Perraton (ed.), *Distance Education for Teacher Training*. London: Routledge.
- Padmo, D., dkk. (ed.). 2003. *Teknologi Pembelajaran Upaya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Padmo, D., Huda, N. & Belawati, T. 2000. 'Pemanfaatan program televisi melalui satelit siaran langsung (TV-SSL) di Indonesia: persepsi dan kesediaan dosen perguruan tinggi negeri/swasta'. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, 1(1):58-67.
- Purbo, O. W., Soegijoko, S., Ahmad, I. & Merati, W. 1998. 'Indonesian academic information infrastructure'. *Jurnal Studi Indonesia*, 8(1): 14-35.
- Pustekkom. 1999. *Distance Learning for Basic Education in Indonesia*. Jakarta: Pustekkom.
- Pustekkom. 1999a. *Jaringan Sistem Belajar Jarak Jauh Indonesia*. Jakarta: Pustekkom.
- Setijadi. 1987. 'Distance education in Indonesia'. Dalam ADB (ed.), *Distance education in Asia and the Pacific*. Manila: Asian Development Bank (ADB).
- Siahaan, S. 1999. 'Open and distance education in Indonesia'. Paper presented at the Third SEAMOLEC GB Meeting. Tersedia melalui <http://www.seamolec.or.id> pada 1 March 2004.
- Sidi, I. D. 2001. *Menuju Masyarakat Belajar Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Jakarta: Paramadina.
- Suparman, A. 1992. *Pendidikan Jarak Jauh*. Jakarta: PAU-PPAI Universitas Terbuka.

- Suparman, A. & Zuhairi, A. 2004. *Pendidikan Jarak Jauh: Teori dan Praktik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Suradijono, S. H., Nazief, B., Subagdja, B. & Moningga, J. 2000. 'Developing individual and collaborative learning environment: Melati's experience'. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, 1(1):68-82.
- Suwondo. 2003. 'PPPG Tertulis Bandung'. Dalam D. Supriyadi (ed.), *Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan, dan Perjuang-annya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan.
- Universitas Terbuka. 2000. *Evaluasi Diri Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka. 2001. *Rencana operasional Universitas Terbuka, 2001-2005*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka. 2002. *Sistem Jaminan Kualitas (SIMINTAS) Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka.

ARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN JARAK JAUH DI INDONESIA

Udin S. Winataputra

Pengantar

K eberadaan pendidikan jarak jauh (PJJ) di Indonesia tidaklah dapat dipisahkan dari gagasan, instrumentasi, dan praksis pendidikan nasional Indonesia secara keseluruhan. Walaupun secara makro nasional dan konstitusional PJJ disebut secara formal dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas (UU Sisdiknas), sesungguhnya secara operasional PJJ telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, dalam melihat prospek PJJ, kita harus menempatkannya dalam konteks sistem pendidikan nasional secara keseluruhan, dan dalam konteks makro kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia, serta konteks kehidupan masyarakat global.

Dalam konstelasi kehidupan berbangsa dan bernegara, secara yuridis formal pendidikan merupakan salah satu wahana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Alinea 4 Pembukaan UUD 1945).

Oleh karena itu secara normatif Pasal 31 UUD 1945 menggariskan bahwa (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; dan (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Norma dasar tersebut kemudian secara instrumental dijabarkan dalam UU Sisdiknas. Di dalam Pasal 3, dengan tegas digariskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jika dianalisis dari kandungan substansi dan semangat konstitusional yang terkandung di dalamnya, fungsi-fungsi pendidikan nasional tersebut, yakni mengembangkan kemampuan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, tampaknya merupakan wahana untuk mewujudkan komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu misi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Dalam konteks pendidikan nasional, UU Sisdiknas (Pasal 31) menggariskan bahwa: (1) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler; (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin

mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Semua imperatif konstitusional tersebut mengokohkan argumen bahwa pendidikan jarak jauh memang merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Dengan asumsi bahwa ketentuan normatif-konstitusional dapat berfungsi sebagai faktor yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya wahana kehidupan, maka secara hipotetis pendidikan jarak jauh di Indonesia mempunyai prospek cerah dan akan semakin berkembang, sejalan dengan dinamika interaksi kebutuhan nasional dengan kebijakan publik untuk mewujudkan pendidikan nasional sebagaimana dipesankan oleh UU Sisdiknas. Hal itu secara kontekstual juga akan diperkuat oleh berkembangnya wacana, instrumentasi, dan praksis pendidikan jarak jauh di dunia.

Konteks Pendidikan Jarak Jauh di Indonesia

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai dengan saat ini, secara sporadis PJJ sudah menjadi bagian dari instrumentasi dan praksis pendidikan nasional dalam berbagai bentuk, antara lain sebagai program pendidikan guru dalam jabatan, Kursus Tertulis B1 (setara Sarjana Muda Pendidikan) dan Kursus B2 (setara Sarjana Pendidikan) yang diselenggarakan oleh Balai Penataran Guru Tertulis (BPGT) Bandung pada tahun 1950-1960an; pendidikan dan pelatihan profesional dalam bidang manajemen, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Manajemen (LPM) Jakarta (mulai tahun 70-an), pendidikan formal dalam Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terbuka yang diselenggarakan oleh Ditjen Dikdasmen bekerjasama dengan Pustekkom Depdiknas, sejak tahun 1980an; pendidikan

tinggi jarak jauh yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka, sejak tahun 1984; dan program pendidikan tinggi berbasis jaringan yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Nusantara (UBINUS) Jakarta. Dengan adanya UU Sisdiknas, sebagaimana telah disinggung pada awal tulisan ini, maka PJJ di Indonesia masa mendatang akan menjadi instrumentasi dan praksis pendidikan yang sistemik dalam konteks sistem pendidikan nasional. Yang sudah tersedia sekarang merupakan modal dasar bagi pengembangan PJJ secara nasional.

Masalah yang muncul bagi kita sekarang adalah bagaimana mendorong terwujudnya PJJ yang sistemik dalam konstelasi sistem pendidikan nasional dan *kongruen* dengan perkembangan pendidikan dalam konteks global. Untuk menjawab persoalan tersebut, perlu dianalisis hal-hal yang memberi arah perkembangan PJJ dan strategi yang dikembangkan untuk mendorong pengembangan PJJ di Indonesia.

Arah Perkembangan PJJ di Indonesia

Arah perkembangan PJJ di Indonesia dapat dilihat dari koridor konstitusional yang tersedia, dalam hal ini UU Sisdiknas serta berbagai gagasan yang muncul dalam berbagai diskusi tentang wacana akademik peraturan pemerintah untuk menjalankan UU tersebut.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana termaktub dalam UU Sisdiknas Pasal 4 ayat (1) yakni demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, memberikan landasan konseptual yang kuat tentang perlunya pemberian kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada seluruh warga

negara tanpa kecuali, untuk memperoleh pendidikan. Hal tersebut secara rinci dirumuskan dalam Pasal 5, yang menggariskan bahwa: (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus; (3) warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus; (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus; (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Untuk memenuhi tuntutan normatif tersebut, dalam hal ini pendidikan yang bermutu, pendidikan khusus bagi warga negara yang memiliki kelainan sosial, pendidikan layanan khusus bagi warga negara di daerah terpencil, dan lebih-lebih pendidikan sepanjang hayat bagi seluruh warga negara untuk meningkatkan kualitas hidup, PJJ dalam berbagai bentuk dan cakupan sangat potensial untuk diperankan sebagai alternatif layanan pendidikan yang lebih fleksibel pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Pada jalur pendidikan formal, PJJ dapat diselenggarakan pada semua jenjang, yakni jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Pasal 14). Pada jalur pendidikan nonformal, PJJ dapat diselenggarakan pada lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis (Pasal 26 ayat 4). Sedangkan pada jalur pendidikan informal, PJJ dapat dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan belajar mandiri oleh keluarga dan lingkungan (Pasal 27). Terbukanya koridor konstitusional bagi PJJ untuk semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, menunjukkan bahwa PJJ sebagai subsistem pendidikan nasional mempunyai prospek yang luas untuk memberikan kontribusi sistemik dalam

perwujudan prinsip pendidikan yang demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan lainnya, yakni yang termaktub dalam Pasal 4 ayat 2 menggariskan bahwa Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Selanjutnya yang dimaksud dengan sistem terbuka dan multi makna di dalam penjelasan pasal tersebut adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry multi exit system*). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengikuti program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda, secara terpadu dan berkelanjutan, melalui pembelajaran tatap muka dan jarak jauh. Prinsip pendidikan dengan sistem terbuka sebagaimana dimaksudkan tersebut, jelas membuka koridor PJJ sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang berkedudukan dan berperan sama dengan pendidikan tatap muka.

Selain dari perspektif konstitusional, arah perkembangan PJJ juga dapat dilihat dari perspektif makro pendidikan nasional. Sampai saat ini pendidikan Indonesia ditengarai masih mengalami masalah kronis, antara lain masalah pemerataan pendidikan yang bermutu, relevansi pendidikan dengan tuntutan dunia kerja dan perkembangan ilmu, teknologi dan seni serta masyarakat, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu fenomena dari masalah pemerataan pendidikan yang bermutu adalah adanya kesenjangan mutu pendidikan antarsekolah, antara sekolah-sekolah di pedesaan dan perkotaan (Suparman dan Zuhairi, 2004:168). Kasus aktual tentang kesenjangan mutu dapat dilihat dari hasil UAN tahun 2003 pada 21 ribu SLTP (Negeri dan swasta) tahun 2003, ternyata hanya 6 SLTP yang memperoleh nilai rata-rata $> 7,5$; 370 SLTP rata-rata 6,5-7,4; 4000 SLTP rata-rata 5,5-6,4; 13.000 SLTP rata-rata 4,5-5,4; dan

2000 SLTP rata-rata < 4 . (Djalil:2004). Sementara itu, fenomena dari masalah relevansi dan efisiensi pendidikan antara lain makin meningkatnya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi. Dalam konteks masalah pendidikan tersebut, PJJ dapat membuka akses bagi para guru untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya, sebagaimana telah dilakukan oleh UT bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) yang dalam 10 tahun terakhir telah meluluskan lebih dari 300.000 Diploma II PGSD dan lebih dari 50.000 Diploma III guru SLTP/SMU. Para guru yang telah meningkat kualifikasinya itu, diharapkan secara bertahap mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolahnya dan meningkatkan hasil belajar lulusannya. Melalui PJJ, ternyata peningkatan mutu guru dapat dilakukan relevan dengan kebutuhan tugasnya dan efisien.

Dari perspektif perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, PJJ di Indonesia akan semakin berkembang sejalan dengan meningkatnya perluasan jaringan telekomunikasi seperti Warnet, media massa elektronik seperti televisi, dan makin maraknya tradisi masyarakat untuk menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan melalui *handphone*. Kondisi tersebut secara berangsur akan dapat membangun tradisi komunikasi jarak jauh di seluruh lapisan masyarakat. Tradisi seperti ini merupakan modal psikologis-sosial bagi tumbuhnya tradisi pemanfaatan sarana komunikasi jarak jauh dalam rangka meningkatkan kemampuan dan belajar lebih jauh. Berbagai rintisan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam memperkuat tradisi belajar mandiri dan memperluas akses layanan pendidikan yang bermutu, seperti *program Wide Area Network* (WAN) Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) untuk siswa SMK, program SMA Terbuka Pustekkom-Dikdasmen, Program Studi Online UBINUS, dan UT Online

Universitas Terbuka, merupakan langkah yang menjanjikan bagi pengembangan PJJ di Indonesia.

Simpulan

Pendidikan jarak jauh di Indonesia mempunyai prospek cerah dan akan semakin berkembang, sejalan dengan dinamika interaksi kebutuhan nasional dengan kebijakan publik untuk mewujudkan pendidikan nasional sebagaimana dipesankan oleh UU Sisdiknas yang diperkuat oleh berkembangnya wacana, instrumentasi, dan praksis pendidikan jarak jauh di dunia.

Terbukanya koridor konstitusional bagi PJJ untuk semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, telah menempatkan PJJ sebagai sub-sistem pendidikan nasional mempunyai prospek yang luas untuk memberikan kontribusi sistemik dalam perwujudan prinsip pendidikan yang demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif.

Berbagai rintisan PJJ selama ini secara berangsur akan dapat menumbuhkan tradisi komunikasi jarak jauh di seluruh lapisan masyarakat. Tradisi seperti ini merupakan modal psikologis-sosial bagi tumbuhnya tradisi pemanfaatan sarana komunikasi jarak jauh dalam rangka meningkatkan kemampuan dan belajar lebih jauh. □

Daftar Pustaka

- Djalil, A. 2004. 'Memperkokoh pendidikan guru', Jakarta (makalah yang tidak diterbitkan)
- Republik Indonesia 2003. *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta

- _____. 2003. *Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Suparman, A. dan Zuhairi, A. 2004. *Pendidikan Jarak Jauh: Teori dan Praktek*. Jakarta: Pusbit, Universitas Terbuka.
- Winataputra, U.S. 1999. Aspek-aspek inovatif dalam pendidikan guru dengan sistem belajar jarak jauh, dalam Tian Belawati dkk. *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Jakarta: Universitas Terbuka.

BAB II

SEJARAH PERKEMBANGAN UNIVERSITAS TERBUKA

BERDIRINYA UNIVERSITAS TERBUKA

Effendi Wahyono dan Setiyadi

Pengantar

Pendidikan jarak jauh pada tingkat pendidikan tinggi secara formal dimulai dengan berdirinya Universitas Terbuka (UT) pada 4 September 1984. Pembukaan UT dilatarbelakangi oleh adanya dua isu besar dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu rendahnya mutu atau kualitas guru dan terbatasnya daya tampung pendidikan tinggi. Pada akhir dasawarsa tahun 1970-an banyak guru SLTP dan SLTA yang dididik secara darurat dalam bentuk program singkat, sehingga belum memenuhi standar kemampuan yang disyaratkan untuk mengajar di sekolah-sekolah pada tingkat pendidikan tersebut. Upaya untuk meningkatkan pendidikan guru (D-II untuk SLTP dan S-1 untuk SLTA) setelah mereka bekerja ternyata tidak mudah karena adanya kendala biaya dan waktu. Mereka harus meninggalkan tugas mengajarnya. Pada tahun 1981 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melaksanakan program pendidikan jarak jauh PGSLP D-II bagi guru sekolah

lanjutan tingkat pertama (SLP) yang telah memiliki ijazah D-I dan PGSLP. Program ini diberi nama Program Belajar Jarak Jauh Proyek Pengembangan Pendidikan Diploma Kependidikan. Proyek ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Untuk menyelenggarakan proses pendidikannya, dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Belajar Jarak Jauh di 12 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), yang meliputi:

1. IKIP Medan
2. IKIP Padang
3. Universitas Sriwijaya
4. IKIP Jakarta
5. IKIP Bandung
6. IKIP Semarang
7. Universitas Sebelas Maret
8. IKIP Yogyakarta
9. IKIP Surabaya
10. Universitas Udayana
11. IKIP Ujung Pandang
12. IKIP Malang

Pelaksanaan program belajar jarak jauh D-II untuk lulusan D-I dan PGSLP itu dimulai tahun ajaran 1982/1983. Pada tahun ini ditargetkan sekitar 2000 guru SLP dapat mengikuti pendidikan ke tingkat D-II dengan sistem belajar jarak jauh. Pelaksanaan pendidikan dilakukan dengan sistem rayonisasi. Pengembangan mata kuliah dilakukan menurut keunggulan masing-masing LPTK. Misalnya IKIP Medan sebagai UPR I yang mendapat tugas pengembangan program belajar jarak jauh bidang studi Olah Raga dan Kesehatan (Orkes) dan Pendidikan Keterampilan Keluarga (PKK) menggunakan mata kuliah matematika yang dikembangkan IKIP Yogyakarta, Bahasa Indonesia yang dikembangkan IKIP Padang, dan Bahasa Inggris yang dikem-

bangkan oleh IKIP Semarang. Bahan ajar untuk setiap mata kuliah dikembangkan secara moduler. Bantuan belajar atau tutorial diberikan di beberapa lokasi, umumnya di kota kabupaten atau propinsi. Tutor direkrut dari dosen LPTK dan guru-guru SLTA.

Tahun 1982 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga menyelenggarakan pendidikan jarak jauh Akta Mengajar V untuk meningkatkan kemampuan mengajar dosen perguruan tinggi. Pendidikan ini juga tidak menginduk pada salah satu perguruan tinggi, tetapi merupakan proyek Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Masalah lain adalah terdapat ledakan lulusan SLTA pada akhir Pelita IV yang besarnya mencapai 1,5 juta lulusan, sementara itu daya tampung perguruan tinggi negeri yang ada hanya sekitar 400 ribu. Dengan kondisi tersebut, diperkirakan terdapat sekitar 700 ribu lulusan SLTA yang tidak mendapatkan kesempatan belajar di perguruan tinggi. Untuk dapat menampung lulusan SLTA itu, perlu dibuat perencanaan daya tampung perguruan tinggi sampai 1,5 juta mahasiswa, dengan asumsi bahwa semua lulusan SLTA ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Penambahan daya tampung yang besar itu, di samping memerlukan ruangan yang cukup besar dengan dana yang tidak sedikit, akan menimbulkan masalah baru, yaitu penambahan tenaga pengajar yang diperkirakan akan mencapai 80.000 – 90.000 orang. Meskipun dana yang diperlukan untuk pengembangan dapat disediakan, penambahan 80.000 dosen sampai akhir Pelita IV (selama 5 tahun) tidak mungkin dapat dicapai (Direktorat Pembinaan Sarana Akademik, 1982: 6)

Pembentukan Panitia

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah memutuskan membuka sebuah universitas negeri yang sifatnya terbuka dengan sistem belajar jarak jauh. Keputusan itu diambil karena beberapa pertimbangan: *Pertama*, pendidikan jarak jauh tidak memerlukan dosen tetap dengan jumlah yang banyak. *Kedua*, sumber daya pendidikan tinggi yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk membantu penyelenggaraan sistem belajar jarak jauh tanpa mengganggu tugas pokok mereka. *Ketiga*, pendidikan jarak jauh tidak memerlukan banyak ruangan. *Keempat*, biaya pendidikan relatif lebih murah bila dibandingkan dengan pendidikan sistem tatap muka. *Kelima*, pendidikan jarak jauh dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi pendidikan. Melalui teknologi pendidikan, penyampaian pendidikan dapat dirancang dengan sedikit mungkin sumber daya manusia, tetapi dapat mengakibatkan terjadinya suasana dan kemauan belajar mahasiswa sehingga dapat mengakibatkan pula terjadinya suatu perubahan perilaku pada mahasiswa. Dengan demikian, melalui pemanfaatan media pendidikan, sistem belajar jarak jauh tidak berbeda kualitasnya dengan sistem belajar tatap muka. Kelebihannya, dengan menggunakan media cetak maupun elektronik (audio/video) sistem belajar jarak jauh dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa dengan pelibatan staf pengajar yang jauh lebih sedikit karena dimensi ruang dan waktu tidak lagi menjadi penentu.

Atas dasar pertimbangan itu, pada akhir tahun 1981 pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan mendirikan sebuah universitas yang nonkonvensional dengan sistem terbuka yang diberi nama Universitas Terbuka Indonesia (*Indonesian Open University-IOU*) yang kemudian berubah namanya menjadi Universitas Terbuka (UT). Pelaksanaan perintisan pendirian UT ini dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari para ahli pendidikan

yang dipimpin oleh Prof. Dr. Setijadi yang waktu itu menjadi Pembantu Dekan II Fakultas Pascasarjana IKIP Jakarta (kini Universitas Negeri Jakarta). Pada bulan Oktober 1981 Draft Rencana Pembukaan UT selesai disusun. (Vahidi, 1982). Draft tersebut kemudian direvisi Juni 1982. Dalam rancangan itu, pada bulan Juni 1984 UT harus berdiri (Direktorat Pembinaan Sarana Akademik, 1982).

Populasi yang hendak dijangkau oleh UT adalah lulusan SLTA, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Dengan demikian, mahasiswa UT secara umum dapat dikelompokkan menjadi:

1. Mahasiswa penuh, yaitu mereka yang kegiatan utamanya adalah belajar sebagai mahasiswa Universitas Terbuka.
2. Mahasiswa sampingan, yaitu mereka yang mempunyai pola kerja (sudah bekerja) disertai kuliah di Universitas Terbuka.
3. Mahasiswa sisipan, yaitu mereka yang telah menjadi mahasiswa pada lembaga pendidikan lain, tetapi untuk maksud-maksud tertentu menempuh satu atau beberapa mata kuliah pada Universitas Terbuka.

Tim perintis berdirinya UT sudah bekerja keras, tetapi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu memutuskan untuk menunda pembukaan UT. Dengan keputusan Menteri itu, nasib tim perintis tidak tentu. Tahun 1983 terjadi pergantian Kabinet Pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Pemilu 1982. Seperti halnya yang terjadi pada departemen lainnya, pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terjadi pergantian menteri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, Prof. Dr. Nugroho setelah mempelajari tim perintisan pendirian UT, memutuskan untuk tetap meneruskan rencana Pendirian UT. Pada Oktober tahun 1983, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto secara resmi membentuk sebuah Panitia Persiapan Pendirian UT dengan susunan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Dodi A. Tisna Amidjaja, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai Pengarah
2. Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pengarah
3. Prof. Ir. S. Pramoetadi, Direktur Pembinaan Sarana Akademik sebagai Pengarah
4. Dr. Sunarjo, Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai Konsultan
5. Ir. Willy Moenandir Mangoendiprodjo, Direktur Utama Perusahaan Umum Telekomunikasi sebagai Konsultan
6. Drs. Hamdan Mansoer, Kepala Sub Direktorat Pembinaan Pengelolaan Kurikulum dan Perlengkapan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai Konsultan
7. Prof. Dr. Setijadi, Pembantu Dekan II Pascasarjana IKIP Jakarta sebagai Ketua
8. Prof. Dr. Sigit Moerjono, Pemimpin Proyek Pengembangan Institusi Pendidikan Tinggi sebagai Wakil Ketua
9. Dr. Moegiadi, M.A. Deputy Director Seameo sebagai Wakil Ketua
10. Prof. Dr. Sumadi Suryabrata, M.A., Ed.S., Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengujian Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Wakil Ketua.

Pada akhir November 1983 Menteri Pendidikan memanggil panitia untuk mendapatkan laporan perkembangan persiapan pendirian UT. Karena waktunya yang sempit, panitia mengajukan dua usulan: (a) menunda pembukaan UT selama satu tahun, atau (b) tetap membuka pada tahun ajaran 1984/1985 dengan segala kekurang-

annya. Jawaban Menteri atas usulan itu adalah tetap membuka UT pada tahun 1984/1985, dengan alasan, secara politis penundaan tersebut dapat merugikan citra pemerintah. Jika dalam pelaksanaannya terjadi kekurangan, dapat diperbaiki selama proses berlangsung.

Tujuan pemerintah mendirikan UT sebagaimana dirumuskan Tim Perintis Pendirian UT adalah memberikan kesempatan kepada para lulusan SLTA yang belum atau yang sudah bekerja, untuk mengikuti pelajaran pada tingkat pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Tujuan ini sesuai dengan asas belajar sepanjang hayat. Selain itu, UT juga diharapkan dapat menjadi wahana untuk mempertinggi mutu proses belajar-mengajar pada perguruan tinggi dengan jalan menggunakan bahan instruksional yang dikembangkan oleh UT dengan memanfaatkan dosen-dosen terbaik dari seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dengan demikian, UT dapat dijadikan forum komunikasi dan pengembangan bahan instruksional yang baik, yang dapat dipergunakan oleh perguruan tinggi (Direktorat Pembinaan Sarana Akademis, 1982, 9-10).

Mempersiapkan sebuah universitas dengan sistem belajar jarak jauh ternyata bukan hal mudah. Panitia tidak memiliki pengalaman dalam pengelolaan pendidikan jarak jauh. Bagi dunia pendidikan di Indonesia, sistem pendidikan jarak jauh yang akan diselenggarakan UT merupakan hal yang baru. Studi ke berbagai universitas terbuka di luar negeri memang dilakukan. Sistem budaya dan kondisi geografi Indonesia yang berbeda membuat panitia tidak dapat mengadopsi begitu saja sistem belajar jarak jauh yang telah muncul lebih dulu di luar negeri, seperti Inggris. Padahal waktu yang diberikan panitia untuk mempersiapkan berdirinya UT tidak lama, hanya 10 bulan. Dalam waktu yang pendek itulah UT harus berdiri dan menerima mahasiswa baru.

Empat Komponen Sistem Dasar

Guna mendukung program kerjanya, panitia diberi kewenangan penuh untuk merekrut staf dan pegawai yang diperlukan. Perekrutan tenaga ahli dilakukan dengan memindahkan 80 orang dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, beberapa tenaga senior dari IKIP Jakarta dan UI. Perekrutan tenaga baru dilakukan melalui proses seleksi yang dilakukan secara bertahap, sehingga pada waktu diresmikan, UT telah memiliki 127 orang staf. Selain itu, panitia merasa perlu mengundang tim ahli dari lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan jarak jauh di beberapa negara untuk membantu menyusun perencanaan pengelolaan UT ke depan. Perencanaan UT yang meliputi susunan kampus, peralatan, program studi yang perlu dikembangkan, struktur organisasi UT, jumlah mahasiswa maksimal yang dapat dikelola, kebutuhan sumber daya manusia (kualifikasi dan keterampilannya) dilakukan dengan bantuan USAID dengan mengundang delapan tenaga ahli dari tiga negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Iran. CIDA dari Kanada juga mengirimkan tenaga ahlinya untuk membantu rencana pengembangan UT. Dengan bantuan tenaga ahli itulah berhasil disusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) UT yang ternyata dalam pelaksanaannya tidak dapat berfungsi sebagai rencana induk, tetapi hanya menjadi sumber ide pimpinan UT.

Nama "Universitas Terbuka" diinspirasi oleh *The Open University* di Inggris dan negara-negara lain yang mendirikan universitas sejenis. Istilah *terbuka* dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat lebih luas yang ingin melanjutkan pendidikannya pada tingkat pendidikan tinggi, karena salah satu ciri utama dari UT adalah keluwesannya. Tingkat keluwesan (fleksibilitas) yang disajikan oleh UT bukan hanya dalam hal sebaran tempat tinggal para mahasiswanya, tetapi juga terhadap latar

belakang pendidikan sebelumnya, terhadap rentang usia, terhadap pemilihan mata kuliah dan program studi, terhadap cara menjalani proses pembelajarannya, dan terhadap sasaran penyelesaian studinya. Namun, dalam masa persiapan, karena keterbatasan waktu dan sumber daya, panitia hanya menyiapkan sistem dasar operasional pendidikan jarak jauh yang meliputi empat komponen utama yaitu pengembangan bahan ajar dan ujian, pemberian bantuan belajar, pendistribusian bahan ajar, dan administrasi mahasiswa dalam jumlah besar.

Pengembangan bahan ajar dilakukan dengan sistem moduler. Setiap modul berisi materi pembelajaran (tercetak) dengan jumlah halaman antara 30-50 halaman, dilengkapi dengan buku kerja dengan berbagai latihan (termasuk bahan belajar suplemen), tes mandiri, latihan, panduan belajar, paket audio atau audio-visual, tes akhir mata kuliah, dan formulir umpan balik untuk evaluasi mahasiswa. Bahan ajar cetak yang moduler itu dibuat sedemikian rupa sehingga mudah untuk dipelajari secara mandiri (modul instruksional mandiri). Bahan ajar cetak itu disusun secara terpadu dengan program audio-visual, program tatap muka serta program praktikum. Dengan demikian, paket bahan ajar perlu dibuat oleh sebuah tim yang anggotanya terdiri atas dosen ahli materi bidang studi/ilmu, ahli instruksional, ahli media, ahli evaluasi, previewer materi, ahli bahasa, dan penyunting.

Selain tugas-tugas mandiri dan latihan sebagaimana yang disusun menyatu dengan bahan ajar moduler, UT dirancang juga untuk dapat mengadakan tes sumatif, ujian akhir semester, praktikum/pengalaman lapangan, dan ujian komprehensif. Ujian, baik ujian akhir semester maupun ujian komprehensif, didesain untuk dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa secara serempak di seluruh wilayah.

Disadari bahwa belajar mandiri bukan merupakan hal yang mudah. Dalam proses mempelajari bahan ajar, tentu terdapat mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk memahami materi yang ada. Atas dasar pertimbangan itu, mahasiswa UT perlu diberi kesempatan secara tatap muka untuk memperoleh penjelasan langsung dari pembimbing (tutor). Pertemuan dapat dilakukan di kampus atau ditempat lain yang disepakati bersama oleh mahasiswa dan tutornya. Di samping tatap muka dengan tutor, UT memfasilitasi pertemuan antara mahasiswa dan dosen pembina sekali atau dua kali setelah mahasiswa mempelajari bahan ajar.

Registrasi atau penerimaan mahasiswa UT dapat dilakukan secara bersama-sama dan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pengadministrasian mahasiswa dalam jumlah besar tidak mungkin dilakukan secara manual, tetapi harus dibantu dengan komputer. Karena itu infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan registrasi mahasiswa dalam jumlah yang besar harus diadakan. Karena mahasiswa UT akan tersebar di seluruh wilayah, perlu juga disediakan infrastruktur untuk mendistribusikan bahan ajar kepada mahasiswa, baik membangun unit sendiri maupun bekerja sama dengan lembaga yang sudah ada.

Bentuk Organisasi

Untuk mendukung sistem tersebut dilakukan kerja sama dengan berbagai lembaga. Kerja sama dengan kantor pos dilakukan untuk melayani registrasi, distribusi bahan ajar, dan surat-menyurat antara mahasiswa dengan UT. Kerja sama dengan UI dilakukan untuk mengembangkan sistem pengelolaan registrasi dan ujian dengan komputer. Kerja sama dengan semua perguruan tinggi negeri dilakukan untuk mengembangkan cabang-cabang UT di daerah. Setiap perguruan tinggi negeri diminta menyediakan ruangan untuk

kantor UPBJJ dan menunjuk stafnya untuk menjadi kepala UPBJJ. Perguruan tinggi negeri setempat bertindak sebagai pembina UPBJJ. Ketiga jenis kerja sama itu sepenuhnya didukung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Berkat dukungan itu, kerja sama dapat berjalan dengan lancar.

Dengan melihat jaringan kerja sama seperti itu, organisasi UT sebagaimana dirumuskan Tim Perintis, harus merupakan jaringan kerja sama antara Pusat dan perguruan tinggi negeri penyelenggara di daerah. Organisasi di Pusat adalah unit pengelola umum, yang dipimpin oleh Rektor dan para Pembantu Rektor, yang fungsinya sama dengan fungsi Rektor dan Pembantu Rektor sebagaimana ditetapkan untuk perguruan tinggi konvensional. Demikian pula struktur organisasi di bawahnya, yaitu Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, dan Biro Administrasi Umum. Organisasi lainnya di bawah Rektor perlu disesuaikan dengan karakteristik sistem pendidikan jarak jauh, sehingga diperlukan unit-unit sebagai berikut:

- Bagian perencanaan dan pengembangan bahan ajar
- Bagian pembinaan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar
- Bagian produksi dan distribusi bahan ajar
- Bagian penelitian dan evaluasi
- Bagian administrasi

Bagian perencanaan dan pengembangan bahan ajar bertugas mengkoordinasi penjabaran kurikulum sampai pada penulisan naskah dan pembuatan media lainnya yang siap diproduksi. Bagian pembinaan kegiatan belajar-mengajar bertugas menentukan perguruan tinggi yang akan melaksanakan kegiatan serta tenaga pelaksanaannya yang akan membantu pelaksanaan di lapangan. Bagian produksi dan distribusi bertanggung jawab pada pelaksanaan produksi dan

distribusi paket bahan ajar, sehingga dapat sampai di tempat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Bagian ini juga bertugas menyediakan peralatan kegiatan belajar dan mengajar, termasuk buku-buku untuk perpustakaan di Pusat dan di perguruan tinggi penyelenggara (yang selanjutnya disebut Unit Program Belajar Jarak Jauh disingkat UPBJJ). Bagian penelitian dan evaluasi bertugas mengusahakan standarisasi evaluasi hasil belajar, mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi, menganalisis kebutuhan dan kemungkinan dibukanya program studi baru, dan melaksanakan uji coba paket bahan ajar. Bagian administrasi bertugas mengkoordinasi pelaksanaan registrasi, pelayanan staf di bidang administrasi umum dan administrasi akademik. Dalam struktur organisasi seperti ini fakultas tidak ada. Padahal, pada perguruan tinggi konvensional, fakultas merupakan komponen penting dalam perguruan tinggi.

UT Pusat adalah lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan kualitas bahan ajar dan kegiatan belajar-mengajar yang diselenggarakan melalui sistem terbuka. UT Pusat juga diberi wewenang menentukan arah dan target pengembangan mahasiswa, dan pemberian ijazah.

Selain organisasi di Pusat, perlu pula disusun organisasi di perguruan tinggi penyelenggara di daerah. Unit-unit yang diperlukan pada organisasi UT di daerah adalah unit akademik, pelayanan, dan administrasi. Ketiga unit itu dapat digabung dalam sebuah Unit Pelaksana Teknis Belajar Jarak Jauh (UPT-BJJ), yang kemudian berubah menjadi Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ). Model organisasi seperti ini sebenarnya hampir sama dengan model pelaksanaan Belajar Jarak Jauh Proyek Pendidikan Tenaga Kependidikan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan pada 12 LPTK.

Struktur organisasi seperti itu ternyata tidak sesuai dengan acuan hukum yang ada, yang berlaku untuk perguruan tinggi konvensional. Di beberapa negara seperti Inggris dan Thailand, universitas terbuka didirikan dengan landasan hukum yang sangat tinggi, yaitu Undang-undang. Karena dasar hukumnya Undang-undang, struktur universitas terbuka di kedua negara itu tidak terikat oleh ketentuan yang berlaku dalam perguruan tinggi konvensional. Di Indonesia, perguruan tinggi negeri tidak dapat berdiri tanpa Keputusan Presiden. Meskipun Presiden telah menyetujui rencana pendirian UT, namun pelaksanaan teknis Keputusan Presiden harus dilaksanakan melalui Menteri Penertiban Aparatur Negara (Menpan) dan Sekretariat Negara (Setneg). Karena produk hukum yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah tentang pendidikan tinggi yang ada hanya untuk perguruan tinggi konvensional, sulit dirumuskan bentuk organisasi khusus, yang dapat mendukung organisasi dan operasi UT. Waktu yang terlalu pendek tidak memungkinkan panitia mengusulkan sebuah Peraturan Pemerintah yang khusus untuk UT. Karena tidak ada acuan hukum yang khusus untuk UT, struktur organisasi UT didasarkan pada Peraturan Pemerintah untuk perguruan tinggi konvensional. Karena itulah dalam Keputusan Presiden No. 41 tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka pasal I ayat 2, struktur organisasi UT tidak didasarkan oleh struktur yang disusun panitia, tetapi susunannya adalah sebagai berikut:

- Rektor dan Pembantu Rektor
- Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
- Biro Administrasi Umum
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Fakultas Ekonomi
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- Pusat Produksi Media Pendidikan, Informatika, dan Pengolahan Data
- Pusat Pengolahan Pengujian
- Unit Program Belajar Jarak Jauh.

Pengembangan Program Studi

Pengembangan program studi dilakukan melalui konsultasi dengan berbagai konsorsium pendidikan tinggi. Pemilihan program studi diprioritaskan yang memenuhi kebutuhan pembangunan, dan tidak memerlukan peralatan dan supervisi khusus yang sulit dilaksanakan dalam sistem belajar jarak jauh. Oleh karena, itu pembukaan program studi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan dan kemampuan UT. Panitia membuat rencana pembukaan program studi untuk delapan tahun berikutnya, sampai tahun 1991. Rencana pembukaan program studi dapat dilihat dalam tabel 1 (Universitas Terbuka, 1984)

Tabel 1

Rencana Pengembangan Program Studi Universitas Terbuka selama delapan tahun

1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Administrasi Negara	Manajemen	Penyelidikan Operasional	Hubungan Masyarakat	Pendidikan Anak	Geologi	Pertanian	Ilmu Tanah
Administrasi Niaga	Manajemen Industri	Psikologi Perkembangan	Sosiologi	Sejarah Indonesia	Biologi	Perikanan	Agronomi
Ekonomi Pembangunan	Akuntansi	Psikologi Sosial	Kesejahteraan Sosial	Hubungan Internasional	Fisika	Kehutanan	Kesehatan Lingkungan
Statistik	Administrasi Pembangunan	Psikologi Industri dan Organisasi	Ilmu Politik	Bahasa Indonesia	Kimia	Peternakan	Kesehatan Masyarakat
	Perpajakan	Administrasi dan Supervisi Pendidikan	Hukum	Bahasa Inggris		Teknik Sipil	Farmasi
	Matematika Terapan	Teknologi Pendidikan	Pendidikan Bisnis	Komunikasi		Teknik Kimia	Kedokteran Gigi
	Perpustakaan	Komputer	Bimbingan dan Penyuluhan	Psikologi Pendidikan		Teknik Elektronika	Kedokteran Hewan
	Ekonomi Pertanian	Arsitektur					

Sesuai dengan rencana, pada tahun pertama dibuka empat program studi S1, yaitu administrasi negara, administrasi niaga, ekonomi dan studi pembangunan, dan statistika. Jenis program studi lainnya, yaitu program pendidikan merupakan pengambilalihan tugas Proyek Pendidikan Guru melalui Belajar Jarak Jauh dengan kurikulum dan bahan ajar yang disusun baru. Demikian pula dengan program Akta V yang diambil alih dari proyek yang sudah ada. Proses pengembangan program studi dimulai dengan penyusunan kurikulum yang mengacu pada kurikulum inti, kemudian dilanjutkan dengan penulisan bahan ajar. Berbagai ahli dari berbagai perguruan tinggi negeri seperti UI, ITB, UGM, Undip, IKIP Jakarta, dan IKIP Bandung dilibatkan dalam proses penulisan bahan ajar.

Peresmian Universitas Terbuka

Sejak awal kegiatan menyiapkan pembukaan, proses penerimaan mahasiswa, hingga peresmian berdirinya, UT tidak memiliki kantor sendiri secara permanen. Untuk mendapatkan ruangan yang layak untuk bekerja, Panitia mengadakan negosiasi dengan pihak IKIP Jakarta sehingga UT berhasil mendapatkan pinjaman dua lantai dari gedung Pusat Sumber Belajar milik IKIP Jakarta yang terletak di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur. Gedung inilah yang dijadikan kantor sementara kegiatan UT. Namun, karena gedung ini tidak dapat menampung seluruh kegiatan UT, beberapa unit ditiptkan di beberapa kantor pemerintah lainnya, seperti Distribusi bahan ajar ditiptkan pada kantor Pusat Pembinaan Bahasa yang terletak tidak jauh dari kantor UT Pusat sementara, dan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bekerja pada sebuah ruangan kantor milik Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang terletak di Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan.

Selain fasilitas fisik, masalah lain yang dihadapi Panitia adalah anggaran. Karena pembentukan Panitia pendirian UT di tengah-tengah tahun anggaran, kegiatan persiapan berdirinya UT tidak dianggarkan dalam APBN. Berkat dukungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan BAPPENAS, sejumlah anggaran dapat disisihkan untuk UT. Meskipun menghadapi berbagai masalah, Panitia tetap bekerja keras hingga lahirlah UT dengan selamat.

Pada tanggal 4 September 1984, UT resmi berdiri. Peresmian berdirinya UT dilakukan oleh Presiden Suharto di Bina Graha. Dalam acara peresmian itu, diselenggarakan pula kuliah perdana yang diberikan oleh Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Kuliah perdana ini dipancarkan ke seluruh penjuru Tanah Air melalui TVRI dan RRI. Hari berikutnya bertempat di kantor Pendidikan dan Kebudayaan Senayan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto melantik Rektor UT, Prof. Dr. Setijadi.

Visi, Misi dan Kebijakan ke-1: Lahir dengan Selamat

Visi dan misi Rektor pendiri, sejak menjadi Ketua Panitia Pelaksana Berdirinya UT adalah sama dengan yang tercantum pada Keputusan Presiden, yaitu melahirkan suatu Perguruan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) yang dapat menampung para lulusan SLTA, yang jumlahnya sangat banyak, yang tidak dapat diterima di perguruan tinggi konvensional. Kecuali itu UT juga dimaksudkan untuk mendidik guru dan pekerja lainnya yang perlu ditingkatkan kemampuannya. Dengan mendirikan PTJJ, maka (a) tidak diperlukan dosen tetap dalam jumlah yang banyak, (b) tidak diperlukan kampus baru kecuali untuk para pengelolanya, (c) fasilitas perguruan tinggi yang tersedia dapat digunakan tanpa mengganggu tugas pokoknya, (d) dapat ditampung

mahasiswa dalam jumlah yang banyak, dan (e) relatif murah biayanya, baik bagi pemerintah maupun bagi mahasiswanya.

Dengan demikian, visi dan misi itu ditekankan kepada lahirnya sebuah PTJJ yang dapat menampung banyak mahasiswa dengan selamat. Apapun kekurangan-kekurangannya dapat diisi selama proses berlangsung. Yang penting PTJJ tersebut mendapatkan mahasiswa, dapat menyelenggarakan pendidikan jarak jauh dan dapat menyelenggarakan ujian.

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, dibuatlah berbagai kebijakan sebagai berikut.

1. *Merancang sistem operasi yang sangat sederhana sehingga dapat dilaksanakan oleh staf yang ada.*

Kebijakan ini ditempuh karena bila sistem operasi terlalu rumit, dengan kemampuan UT yang belum teruji pada saat UT baru berdiri dan dengan segala kekurangannya, UT jelas tidak dapat berfungsi. Apalagi pada tahun pertama saja UT sudah menampung sekitar 54.000 mahasiswa. Jadi pada saat berdirinya, UT sudah menjadi perguruan tinggi terbesar, ditinjau dari segi jumlah mahasiswanya, dibandingkan dengan perguruan tinggi di Indonesia lainnya. Sistem operasi ini meliputi unsur-unsur registrasi, pembayaran SPP, distribusi bahan ajar, tutorial dan ujian.

Registrasi, pembayaran SPP, dan distribusi dilakukan melalui kantor pos. Karena kurikulum dirancang tanpa pilihan (dalam bentuk paket), pada setiap semester sejumlah tertentu bahan ajar sudah dapat dibungkus (dipak) dan disimpan di berbagai kantor pos di seluruh Indonesia. Paket bahan ajar itu dapat langsung diberikan kepada mahasiswa setelah mereka mengisi formulir registrasi dan membayar SPP. Dengan demikian mahasiswa, dengan sekali, atau paling banyak dua kali pergi ke kantor pos,

semua keperluan registrasi, pembayaran SPP dan bahan ajar, sudah dapat terpenuhi.

Tutorial hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu yang tersedia tutornya. Hal ini memang sangat membatasi pelayanan tutorial kepada mahasiswa, namun pada waktu itu tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh mengingat terbatasnya tutor yang berkualitas, terutama di daerah.

Ujian dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru) yang sudah dikenal oleh sebagian staf UT, terutama mereka yang berada di UPBJJ setempat.

2. *Meminta berbagai lembaga yang dapat mendukung terlaksananya misi UT.*

Lembaga-lembaga yang diminta kerja sama dan perannya dalam mengembangkan UT adalah sebagai berikut.

a. *Universitas Indonesia*

Pusat Ilmu Komputer (Pusilkom) Universitas Indonesia adalah lembaga yang sangat menentukan dalam membantu sistem operasi UT. Lembaga tersebut memberikan pelayanan komputer mini untuk semua keperluan pencatatan data mahasiswa, sebelum UT mempunyai sendiri komputer yang memadai. Pusilkom juga membantu UT dalam mendesain perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan UT, membantu dengan latihan-latihan yang diperlukan, dan membantu dalam mendapatkan akses data Sipenmaru untuk merekrut mahasiswa UT. Tanpa bantuan Pusilkom UI, UT tidak akan dapat menampung begitu banyak mahasiswa pada tahun pertama.

b. *Perguruan Tinggi lainnya*

Semua perguruan tinggi negeri, kecuali satu, memberikan bantuan kepada UT dalam menyediakan tempat dan memberikan staf untuk keperluan kantor UPBJJ. Tanpa bantuan ini, jangkauan UT pada tahun-tahun pertama akan sangat terbatas. Para Rektor perguruan tinggi tersebut juga menjadi Pembina UPBJJ, suatu tugas yang pelaksanaannya kadang-kadang kurang dimengerti.

Beberapa perguruan tinggi negeri yang terbaik juga meminjamkan staf pengajarnya yang terpilih untuk menulis bahan ajar UT, dan untuk menduduki beberapa jabatan pimpinan (Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan) di UT.

c. *Perum Pos dan Giro*

Tugas-tugas Kantor Pos untuk membantu UT ialah: (a) melayani pendaftaran mahasiswa dengan menjual formulir pendaftaran untuk kemudian mengirimkan formulir yang sudah diisi ke UT Pusat; (b) mendistribusikan bahan ajar mahasiswa dengan cara, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran, mengambil bahan ajar di kantor pos yang ditunjuk; (c) melayani pembayaran SPP dan melaporkannya ke UT pusat; dan (d) melayani segala jenis surat-menyurat antara mahasiswa dan UT. Tugas-tugas tersebut dapat dijalankan dengan baik.

d. *Lembaga Kemasyarakatan*

Lembaga kemasyarakatan yang mampu diajak membantu mendirikan pusat-pusat tutorial bagi mahasiswa UT. Pada permulaannya banyak perguruan tinggi swasta yang kecil, mendaftarkan mahasiswanya ke UT, sehingga bila lulus dari UT, mahasiswa tersebut mendapatkan ijazah rangkap, dari perguruan tinggi mereka sendiri dan dari UT. Daya tarik

untuk mendapatkan ijazah dari UT cukup besar, karena ijazah tersebut adalah ijazah negeri yang diakui oleh negara, sedangkan ijazah perguruan tinggi swasta yang belum terkenal, apalagi belum mendapatkan pengakuan dari Ditjen Dikti, sulit untuk memperoleh pengakuan, baik oleh lembaga swasta maupun oleh pemerintah. Kemudian beberapa lembaga swasta mendirikan pusat studi (tutorial) yang memberikan berbagai layanan kepada mahasiswa UT, terutama layanan tutorial. Sungguh disayangkan, pusat-pusat ini kemudian berhenti karena tidak laku atau merugi.

e. *Lembaga Siaran*

Siaran perkuliahan UT melalui televisi dapat berjalan melalui kerja sama dengan TVRI dengan jam siaran dua kali dalam sebulan. Penambahan jam siaran tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, TVRI sulit memberikan tambahan jam siaran, karena permintaan yang banyak dari instansi-instansi lain, yang perlu juga dipenuhi. *Kedua*, UT tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk memproduksi lebih dari dua kali sebulan. Di kemudian hari kerja sama juga ditambah dengan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang memberi kesempatan kepada UT untuk menyiarkan kuliahnya melalui TPI. Kerja sama ini sangat menguntungkan UT karena produksi program sebagian terbesar dibiayai oleh TPI. Tanpa subsidi dari TPI atau Pemerintah, anggaran UT tidak akan mampu mendukung produksi program televisi lebih dari dua kali sebulan. Produksi program televisi untuk TPI dibuat dua kali 25 menit per minggu. Pada waktu itu ada harapan bahwa frekuensi siaran akan ditambah di masa mendatang. Untuk itu sebuah Pusat Produksi Media dibangun lengkap dengan gedung studio dan peralatannya. Akan tetapi bagaimana-

pun, siaran televisi sangat mahal, sehingga tanpa subsidi yang cukup besar, tidak mungkin UT menyelenggarakan siaran televisi untuk menyampaikan bahan ajarnya. Yang paling mungkin adalah menyelenggarakan siaran televisi sebagai iklan bahwa ada PTJJ yang bernama UT, dan bahwa UT membuka diri bagi pendidikan jarak jauh bagi siapa saja yang memerlukannya. Yang dapat dikembangkan dengan lebih leluasa adalah program siaran radio, yang disiarkan melalui RRI Pusat dan daerah maupun melalui siaran radio swasta setempat. Sayangnya, sampai kini rencana pemerintah untuk membangun studio siaran khusus bagi pendidikan belum juga terlaksana

3. *Merancang program studi yang terbatas dan kurikulum yang seragam, untuk setiap program studi, tanpa memberi pilihan mata kuliah yang berbeda.*

Untuk tahap awal, yang dirancang hanyalah empat program studi S1 nonkependidikan, yaitu

- a. Administrasi Negara;
- b. Administrasi Niaga;
- c. Ekonomi dan Studi Pembangunan; dan
- d. Statistika Terapan.

Rancangan kurikulumnya dibuat sederhana, dengan mengutip dan mengubah sedikit kurikulum yang ada, kemudian menyusun Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) nya. GBPP ini kemudian dipergunakan sebagai arahan penulis modul. Kurikulum seragam ini sangat memudahkan sistem pencatatan dan operasi UT. Pada tahap ini tidak ada pilihan mata kuliah dan setiap mahasiswa harus mengambil kurikulum yang sama untuk setiap program studi.

4. *Merekrut mahasiswa berdasarkan data Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru*

Pendaftaran dilakukan melalui dua jalur, yaitu (1) mendaftar langsung ke UT bagi mereka yang tidak lagi memiliki kesempatan mengikuti Sipenmaru, dan (2) mendaftar melalui Sipenmaru. Daftar calon mahasiswa yang mengikuti Sipenmaru, yang tidak diterima di perguruan tinggi negeri, dapat dengan mudah diperoleh dari Universitas Indonesia. Terdapat sekitar 120.000 nama yang terseleksi untuk kemudian dipanggil 65.000 orang untuk mendaftar di UT. Pada akhirnya sekitar 54.000 orang mendaftar menjadi mahasiswa UT.

5. *Memakai perangkat lunak Sipenmaru untuk registrasi mahasiswa.*

Perangkat lunak Sipenmaru yang dibuat oleh Pusat Ilmu Komputer UI dapat dipergunakan pula untuk registrasi mahasiswa UT. Dengan bantuan kepala dan staf Pusikom-UI, staf UT diperkenalkan dan dilatih untuk menggunakan sendiri perangkat lunak tersebut. Setelah kurikulum tidak lagi dibuat seragam, perangkat lunak tersebut disesuaikan dengan kebutuhan baru UT. Tanpa bantuan dari Pusat Komputer UI, UT akan sukar untuk melaksanakan registrasi sejumlah besar mahasiswa yang mendaftar pada tahun-tahun permulaan berdirinya UT.

6. *Meminjam komputer Universitas Indonesia untuk memproses data mahasiswa UT, sebelum UT dapat membeli sendiri komputer mini yang diperlukan.*

Karena UT pada tahun-tahun pertama belum mempunyai komputer yang sesuai (komputer mini), maka dengan bekerja sama dengan UI yang sangat baik, UT diperbolehkan memproses data mahasiswanya di Pusikom-UI. Baru pada tahun

ketiga, UT dapat membeli sendiri komputer mini yang kemudian dikembangkan dengan bimbingan Pusilkom-UI.

7. *Mengembangkan UT sebagai universitas pengelola.*

Mencari dosen yang sudah mempunyai kemampuan untuk menjadi pengampu mata kuliah dari enam program studi yang dibuka pada saat UT berdiri sangat sulit, karena hal itu berarti harus memindahkan kedudukannya dari perguruan tinggi yang ada, dan sudah lebih terkenal, ke UT. Karena itulah UT dikembangkan menjadi perguruan tinggi pengelola, artinya UT harus pandai mengelola tenaga akademik dari perguruan tinggi lain untuk dapat menulis bahan ajar dan bahan ujian bagi UT. (Peminjaman tenaga akademik ke perguruan tinggi lain hingga sekarang masih berlanjut).

Kebijakan ini mempunyai konsekuensi yang cukup berat bagi sebagian staf pengajar UT. Banyak di antara mereka yang mendapatkan pendidikan dan latihan lanjutan yang tidak pada bidang studi S-1-nya, akan tetapi pada bidang studi yang berkaitan dengan PTJJ dan pengelolaan PTJJ. Hal ini berarti bahwa mereka harus meninggalkan bidang studi semula untuk memperdalam bidang yang baru. Kenaikan pangkat mereka terganggu bilamana mereka tetap bekerja pada fakultas di luar FKIP. Hal ini disebabkan aturan kenaikan pangkat mengikuti aturan perguruan tinggi konvensional. Baru kemudian UT diperbolehkan membuat aturan tersendiri bagi kenaikan staf akademiknya, itupun masih dibatasi aturan umum yang masih menyulitkan staf akademik di luar FKIP.

Simpulan

Secara resmi, Panitia Berdirinya UT terbentuk pada bulan Oktober 1983 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0464/P/1983 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Universitas Terbuka. Pada tanggal 4 September 1984, UT diresmikan oleh Presiden Suharto di Bina Graha. UT berdiri berdasarkan Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka. Karena persiapannya yang hanya kurang lebih 10 bulan, dalam perjalanannya pada tahun pertama UT menghadapi berbagai masalah, terutama disebabkan oleh struktur organisasinya yang mengacu pada perguruan tinggi konvensional dan tidak sesuai dengan karakteristik pendidikan jarak jauh. UT perlu dikembangkan dengan struktur organisasi yang sesuai dengan karakteristik pendidikan jarak jauh. Mengacu pada Undang-undang Pendidikan Nasional pasal 31 ayat 4, perlu diadakan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang berbeda dengan pendidikan konvensional. □

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 1984. 'Proceeding of the seminar on Indonesiaan Open University (January 16th, 1984)'. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 1983. 'Laporan penyelenggaraan program belajar jarak jauh di 12 LPTK'. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Direktorat Pembinaan Sarana Akademis, 1982. 'Konsep rancangan Universitas Terbuka' (draft tidak diterbitkan). Jakarta: Direktorat Pembinaan Sarana Akademis.

- Suparman, A., 1989. *Pendidikan Jarak Jauh: Konsep dan Peranannya dalam Memecahkan Masalah Pendidikan* (Pidato ilmiah disampaikan dalam rapat Senat terbuka pada upacara lustrum I dan wisuda Universitas Terbuka), Jakarta: Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka, 2000. *Laporan Evaluasi Diri Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka, 1984. *Universitas Terbuka: initial planning considerations*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka, 1989. *Lima Tahun Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka, 1994. *Universitas Terbuka: Sebuah Inovasi dalam Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka, 1999. *Lima belas tahun Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Vahidi, B. 1982. 'Operational planning for the Indonesian Open University (an open-ended report)'. Jakarta: Consultant of the Educational Communication Development Project.

UNIVERSITAS TERBUKA PERIODE 1984-1992

Setipadi

Pengantar

Saya sudah terlibat sejak gagasan perguruan tinggi jarak jauh mulai digarap melalui berbagai pertemuan sampai gagasan tersebut menjadi rancangan umum UT yang diajukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu. Keikutsertaan saya dilanjutkan dengan keanggotaan saya dalam Panitia Persiapan Berdirinya Universitas Terbuka sebagai ketua. Sesudah Universitas Terbuka diresmikan oleh Presiden Suharto, saya dilantik menjadi rektor pertama UT, untuk kemudian dipilih kembali sebagai rektor. Jadi tulisan pertama di bawah ini meliputi dua masa jabatan rektor.

Artikel sebelum ini telah menguraikan tentang berdirinya Universitas Terbuka, serta visi, misi dan kebijakan yang dilaksanakan pada waktu UT berdiri hingga akhir tahun pertama. Tulisan di bawah ini melengkapi tulisan tersebut.

Visi, Misi dan Kebijakan ke-2: Pertahanan Hidup

Setelah UT berjalan satu tahun, kurikulum seragam tidak lagi dapat dipertahankan, karena kecepatan belajar mahasiswa sudah terlihat berbeda. Lagi pula dengan kurikulum seragam, mahasiswa yang tertinggal sulit untuk mengejar ketinggalannya. Pada saat itu diputuskan supaya kurikulum dibuat lebih fleksibel sehingga setiap mahasiswa dapat memilih sendiri kecepatan belajarnya, dan juga memilih sendiri mata kuliah yang hendak diregistrasikan setiap semester. Perubahan ini menyangkut sistem operasi UT. Pada tahun kedua, sistem operasi baru UT dirancang, dan pada tahun ketiga sistem tersebut dilaksanakan. Pelaksanaannya jauh dari harapan sehingga banyak mahasiswa mengeluh karena pelayanan UT yang tidak memadai.

Tidak mengherankan apabila pada semester ketiga tahun ketiga mahasiswa yang mendaftar hanya 16.364. Hal ini juga disebabkan pendaftaran dilakukan sepanjang tahun, dan ujian dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun, sehingga mereka menunggu hasil ujian sebelum mendaftar kembali. Setelah mendaftar kembali, mereka masih menunggu datangnya bahan belajar sebelum mulai belajar. Masa dua kali menunggu ini menyebabkan pendaftaran menjadi lebih panjang. Bagi administrasi registrasi, pendaftaran sepanjang tahun juga menimbulkan masalah karena tidak dapat dengan jelas ditentukan, siapa yang akan mengikuti ujian, dan kapan waktu ujiannya. Karena ujian dilaksanakan tiga kali setahun, maka tahun ajaran 1986/1987 dibagi menjadi tiga semester (dapat juga dikatakan, bahwa tahun 1986/1987 dan tahun 1987/1988 dibagi menjadi lima semester).

Visi dan misi UT pada waktu itu harus diubah, bilamana UT tidak menghendaki ditinggalkan mahasiswanya karena perubahan sistem

operasi tersebut. Visi dan misi UT berubah menjadi visi dan misi yang mementingkan pertahanan hidup. Dengan mahasiswa yang jumlahnya kurang dari 20.000, UT tidak lagi merupakan PTJJ yang dapat bertahan hidup. Mahasiswa harus bertambah dan mencapai setidaknya 60.000 supaya UT dapat berlangsung hidup.

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, dibuatlah berbagai kebijakan sebagai berikut.

1. *Mengusahakan penambahan mahasiswa dari luar SIPENMARU.*

Kebijakan ini ditandai dengan usaha untuk mencari tambahan jumlah mahasiswa melalui lembaga Perumtel (PT Telkom) dan Perum Pos dan Giro. Dua lembaga tersebut menyekolahkan stafnya di UT atas biaya dari lembaga masing-masing. Kecuali mereka yang mendapatkan beasiswa, anggota staf kedua lembaga yang tidak menerima beasiswa juga dianjurkan untuk mengikuti pelajaran di UT.

Perekrutan mahasiswa melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah berhasil dengan sangat baik. Meskipun ada yang meragukan kemampuan UT untuk menyelenggarakan pendidikan penyetaraan guru SD (PGSD) setingkat D-II, tidak ada alternatif lain untuk mendidik guru SD, yang jumlahnya lebih dari satu juta orang, kecuali dengan jalan pendidikan jarak jauh. Dalam hal ini, UT perlu dibantu oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah beserta aparatnya di daerah. Karena keraguan dalam mengambil keputusan, instruksi resmi untuk mempersiapkan PGSD datang terlambat, yaitu melewati pertengahan tahun ajaran 1989/1990. Tetapi karena UT sudah mengadakan persiapan jauh sebelumnya, instruksi untuk memulai program PGSD pada tahun 1990/1991 dapat dilaksanakan, meskipun di sana-sini terjadi beberapa keterlambatan.

Setelah itu perekrutan melalui lembaga menjadi bagian integral dari perekrutan mahasiswa.

2. *Memperbaiki kinerja organisasi untuk melayani mahasiswa.*

Setelah sistem operasi diubah, banyak kendala yang timbul. Sistem operasi baru belum dipikirkan dengan sangat masak dan belum pernah diujicobakan. Staf belum siap untuk berubah dari sistem operasi yang sederhana menjadi sistem yang sangat kompleks. Keresahan di kalangan mahasiswa sangat besar. Koran-koran nasional hampir setiap minggu mericantumkan berita Surat Pembaca dari mahasiswa UT yang tidak puas dengan pelayanan UT. Citra UT di mata masyarakat menjadi sangat rendah. Sudah jelas keadaan semacam ini harus segera diubah.

Memperbaiki pelayanan mahasiswa ini memakan waktu yang cukup lama, dari tahun ketiga sampai pertengahan tahun keempat. Baru pada akhir tahun keempat kepercayaan mahasiswa kepada UT kembali pulih, dan jumlah mahasiswa mulai meningkat.

3. *Meningkatkan keterampilan staf untuk menjalankan berbagai tugas di UT*

Bantuan CIDA untuk kerja sama antara UT dan OLA tahap III sudah efektif pada tahun kedua. Sebelas orang dikirim ke University of Victoria, Canada, untuk pendidikan S-2 dan seorang untuk pendidikan S-3. Dalam rangka PAU-PPAI, UT juga telah mengirim sejumlah staf ke luar negeri untuk penataran, pendidikan S-2 dan S-3. Selain dari sumber CIDA dan PAU-PPAI, UT juga mengirimkan berbagai staf untuk penataran, S-2, dan S-3.

Pengiriman staf ke luar negeri dengan bantuan CIDA, dan PAU-PPAI dilanjutkan. Begitu pula pengiriman staf untuk

melanjutkan ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Anggota staf UT bertambah lagi, jumlahnya mencapai 606 orang. Yang dikirim ke luar negeri tahun ke tiga juga bertambah lagi dengan sekitar 14 orang untuk studi tingkat Magister dan Doktor.

Pengembangan staf tahun ketiga mulai menerapkan penelitian magang, staf pengajar senior disertai tugas membantu staf yunior untuk mengadakan penelitian. Dengan anggaran minim, penelitian ini menghasilkan keterampilan meneliti dan angka kredit untuk kenaikan pangkat. Hampir semua topik penelitian diambil dari masalah-masalah yang ada di UT. Meskipun banyak kendalanya, terutama karena kesibukan peneliti maupun supervisornya, penelitian magang ini sampai akhir periode ini tetap berjalan.

4. *Meningkatkan kesejahteraan staf.*

Sejak semula UT sudah mulai meningkatkan kesejahteraan stafnya. Dimulai dengan mengusahakan perumahan dengan mencilil, tambahan gaji, koperasi, pelayanan kesehatan dan bantuan wirausaha bagi keluarganya. Setelah UT mempunyai pendapatan yang lebih baik karena pertambahan mahasiswa, maka tambahan pendapatan diperbesar, dan pelayanan kesehatan diperluas, termasuk pelayanan kesehatan gigi dan pemeriksaan kesehatan setahun sekali bagi karyawan yang berusia lebih dari 40 tahun.

Sekolah-sekolah, taman kanak-kanak dan sekolah dasar, didirikan untuk menampung anak-anak karyawan dengan biaya murah. Kesejahteraan ini diberikan sebagai penghargaan terhadap dedikasi staf yang telah bekerja keras.

5. *Mengubah berbagai prosedur operasi baku yang menimbulkan kesulitan pelaksanaan.*

Berbagai operasi baku yang dipergunakan menimbulkan kesulitan. Misalnya pendaftaran sepanjang tahun yang menimbulkan banyak masalah kemudian diganti dengan pendaftaran yang mempunyai batas waktu tertentu.

6. *Meningkatkan sarana dan prasarana kerja.*

Setelah UT mendapatkan modal dasar tanah dan tiga gedung dari Ditjen Dikti sebagai limpahan dari Pusat Penelitian Perguruan Tinggi yang tidak jadi didirikan, maka UT terus mendapatkan anggaran untuk membangun gedung baru. Dengan bantuan seorang arsitek Inggris yang didatangkan dengan bantuan British Council, UT membuat rancangan mula kampusnya, yang kemudian diselesaikan oleh Tim Pengembangan Kampus dari Ditjen Dikti. UT juga memperluas tanahnya dengan membeli tanah-tanah di sekitarnya yang dijual oleh penduduk sehingga luas tanah meningkat dari 6,5 HA menjadi sekitar 12 HA. Perluasan kampus ini berjalan lancar sekali.

Visi, Misi dan Kebijakan ke-3: Konsolidasi

Selama ini, pimpinan UT hanya sibuk mengendalikan UT supaya menjadi mapan secepat-cepatnya. Mengingat pengalaman pasang-surutnya pengembangan, maka keputusan-keputusan harus diambil secara cepat, sehingga tidak banyak waktu untuk berkonsultasi atau memberikan penjelasan kepada semua anggota staf tentang kebijaksanaan dan tindakannya.

Setelah UT mantap dan berjalan cukup lancar, visi dan misi UT beralih ke konsolidasi ke dalam. Salah satu sarana konsolidasi adalah manajemen yang transparan. Hal ini sudah dimulai dengan penerbitan majalah internal *Suara Terbuka* dan sidang mingguan untuk mengkoordinasikan tindakan.

1. *Meningkatkan Transparansi Manajemen*

Pada waktu itu dirasakan perlunya sarana untuk berkomunikasi antaranggota staf pada berbagai tingkatan birokrasi yang tidak mengenal hierarki, sehingga terjalin rasa persatuan di antara semua anggota staf, baik di pusat maupun di daerah. Sarana tersebut harus pula dapat menyuarakan kekurangan-kekurangan yang terdapat di UT dan saran-saran pemecahannya, meskipun keikutsertaan menulis masih sangat terbatas. Suara Terbuka, majalah yang menjadi sarana komunikasi antarsemua anggota staf UT, membantu keakraban dan transparansi pengambilan keputusan di UT. Dalam Suara Terbuka, rektor diharapkan menulis pada setiap penerbitannya yang sebulan sekali itu.

2. *Meningkatkan Komunikasi Vertikal .*

Transparansi manajemen komunikasi horizontal sudah diusahakan diperbaiki, tetapi yang tidak kalah penting adalah komunikasi vertikal yang sangat diperlukan untuk kerja sama antarunit yang efektif. Komunikasi ke unit lain tidak harus selalu melalui atasan yang membawahi unitnya. Hanya mengenai masalah-masalah yang di luar rutin, maka sebaiknya kepala unitnya mengetahuinya.

3. *Memberi Peran Lebih Besar kepada UPBJJ untuk Mengelola UT*

Pada permulaan tahun 1987, pelayanan tersentralisasi diubah menjadi pelayanan yang sebagian dilakukan oleh UPBJJ. Hanya pengembangan program, penulisan modul, penulisan serta pemeriksaan ujian tetap dilakukan oleh UT Pusat. Pelayanan registrasi dan pembelian modul yang menjadi kesulitan dalam sistem sebelumnya, dilaksanakan oleh UPBJJ. Dengan perubahan sistem pelayanan ke bentuk desentralisasi ini, maka penyelesaian registrasi dan pembelian modul dapat dilaksanakan dalam waktu beberapa hari.

4. *Memantapkan Prosedur Operasi Baku.*

Satu tim khusus dibentuk untuk mengkodifikasi prosedur operasi baku sampai setiap anggota staf mengetahui dengan jelas tugas dan prosedur baku untuk menjalankan tugasnya. Hal ini tidak hanya perlu untuk tugas-tugas administratif, tetapi perlu pula untuk tugas-tugas pengelolaan akademik yang rutin sifatnya. Dengan adanya prosedur baku yang jelas maka kesalahan rutin akan banyak dihindari. Sebuah manual yang komprehensif telah diterbitkan yang memuat semua prosedur operasional baku yang diperlukan UT.

5. *Memperancar Saluran Interaksi UT dengan Mahasiswanya*

UT mencoba untuk membuat saluran interaksi antara anggota staf dengan mahasiswanya dan antarmahasiswa itu sendiri. Mengembangkan majalah atau koran untuk tujuan tersebut tidak berhasil. Setelah beberapa kali gagal untuk membina komunikasi dengan mahasiswa melalui majalah atau koran untuk seluruh Indonesia, maka dengan Mitra Desa, sebuah koran mingguan dari Pikiran Rakyat Group di Bandung, UT dapat menjalin kerja sama untuk menyalurkan bahan ajar dan berbagai berita ke mahasiswanya. Mitra Desa dipakai pula untuk komunikasi dua arah yaitu, UT dengan mahasiswa, dan komunikasi antarsesama mahasiswa.

Perkembangan Sistem Universitas Terbuka

Ada pasang dan ada surut dalam perkembangan UT, terutama karena pada tahun ketiga sistem operasinya diubah. Sistem perlu diubah karena sistem operasi mula, yang sangat sederhana itu, tidak dapat dipertahankan karena kebutuhan proses belajar mahasiswa yang lebih bervariasi. Setelah semester satu berjalan, terlihat bahwa banyak mahasiswa yang tidak lulus dan harus mengulang. Namun,

karena kurikulumnya seragam, mahasiswa yang ketinggalan makin lama makin sulit untuk mengejar ketinggalan tersebut.

Sistem Operasi Mula

Karena singkatnya waktu persiapan maka dipilih sistem operasi yang paling sederhana, sehingga dapat dengan relatif mudah dilaksanakan. Asumsinya adalah bahwa mahasiswa akan maju dengan waktu belajar yang sama, mereka memilih program studi yang tidak ada praktikumnya, anggaran dicukupi oleh pemerintah dengan tambahan yang minimal dari Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP), mahasiswa berdiam di dekat kota yang ada perguruan tinggi dan kantor pos cabang, dan mahasiswa dapat datang pada tempat-tempat ujian yang ditunjuk oleh UT.

Bila semua asumsi itu dapat dipertahankan, maka sistem sederhana itu dapat dipertahankan dalam waktu yang agak lama. Akan tetapi satu hal yang segera tampak, yaitu bahwa setelah satu tahun, perbedaan kemajuan antarmahasiswa sudah sangat menonjol. Banyak yang dapat lulus semua mata kuliah dalam waktu yang ditentukan, tetapi banyak pula yang ketinggalan dalam menyelesaikan matakuliahnya. Dengan demikian kurikulum seragam tidak lagi dapat diterapkan pada tahun ketiga.

Sistem sederhana yang dimaksudkan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- kurikulum seragam untuk setiap program studi;
- program studi yang ada tidak memerlukan praktikum;
- mahasiswa hanya membayar SPP untuk semua keperluan belajarnya (registrasi, ujian, bahan belajar, tutorial, distribusi bahan ajar, dan pelayanan lainnya);

- pembelian formulir registrasi, distribusi bahan ajar, dan surat menyurat dilakukan melalui kantor pos (mahasiswa harus mengambil bahan ajar sendiri di kantor pos);
- ujian dilakukan serentak dengan mengikuti model seleksi penerimaan mahasiswa baru (SIPENMARU) dan terbatas pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh UT;
- registrasi juga menggunakan model SIPENMARU, termasuk penggunaan komputernya;
- tutorial hanya dilaksanakan di tempat yang ada tutornya;
- unit belajar jarak jauh (UPBJJ) UT didirikan di perguruan tinggi negeri.

Sistem Operasi Kemudian

Sistem sederhana yang dikembangkan ternyata dapat berjalan sesuai dengan harapan. Tingkat kesalahan masih dapat diterima, meskipun bagi mahasiswa yang terkena, kesalahan tersebut cukup memukul. Kelambatan pemrosesan menjadi halangan utama karena kerap kali UT harus menunggu giliran jatah waktu komputer yang disediakan UI. Tidak ada jalan lain kecuali membeli komputer sendiri, meskipun uang yang dapat disediakan hanya mampu untuk membeli komputer mini jenis yang terkecil, yang mempunyai kemampuan jauh di bawah standar yang diperlukan.

1. Mahasiswa

Pada tahun pertama, UT mendapatkan lamaran dari 270.000 calon mahasiswa. Banyak di antara calon tersebut berasal dari mereka yang juga melamar masuk perguruan tinggi melalui SIPENMARU. Karena banyaknya pelamar tersebut, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menaikkan jumlah yang harus diterima UT menjadi 65.000 dari rencana 25.000. Akhirnya yang meregistrasi berjumlah sekitar 54.000. Dana untuk mendukungnya diberikan oleh Pemerintah dalam jumlah yang

cukup memadai, sehingga kampus UT dapat dibangun lebih cepat lagi. Jatah pegawai juga diberikan dalam jumlah yang mencukupi, sehingga UT tidak kekurangan tenaga. Hanya keterampilan mereka yang masih banyak memerlukan peningkatan karena pada umumnya staf baru UT adalah lulusan SMTA dan Perguruan Tinggi yang masih kurang berpengalaman kerja dan yang berusia muda.

Pada tahun kedua, calon mahasiswa yang mengikuti SIPENMARU yang memilih UT hanya sekitar 2.500 orang. Setelah diadakan seleksi oleh SIPENMARU, di antara yang ingin mendaftar ke UT hanya sekitar 1.100 orang yang tidak diterima oleh perguruan tinggi negeri lainnya, sehingga hanya sejumlah itulah yang akhirnya masuk ke UT. Padahal, di antara mahasiswa yang ditolak oleh SIPENMARU, masih banyak yang kemudian ingin mendaftar juga ke UT, akan tetapi karena waktu registrasi sudah tinggal beberapa hari lagi, banyak yang tidak dapat diterima UT. Namun demikian, jumlah seluruh lamaran pada tahun kedua mencapai lebih dari 150.000, sehingga Pemerintah sekali lagi menginstruksikan kepada UT untuk menerima lebih dari yang direncanakan. Instruksi Menteri adalah untuk menerima 100.000 orang dari rencana 70.000 orang. Sebanyak 125.000 orang dipanggil, tetapi pada akhirnya hanya 75.000 yang meregistrasi, termasuk mereka yang meregistrasi ulang.

Lima tahun setelah UT berdiri, jumlah mahasiswa UT mengalami kenaikan yang cukup banyak. Kenaikan ini sebenarnya sudah terlihat pada semester terakhir tahun keempat. Alasannya jelas karena UT sudah mendesentralisasikan registrasi dan penjualan modul. Registrasi tidak lagi dilaksanakan sepanjang tahun, tetapi hanya tiga bulan pada setiap permulaan semester. Ujian pun hanya dilakukan dua kali dalam satu tahun. Pelayan-

an UT menjadi lebih dapat diandalkan. Keteraturan dan kecepatan pelayanan inilah yang menyebabkan jumlah mahasiswa naik cukup tajam. Kenaikan ini, meskipun belum menyamai jumlah mahasiswa tahun pertama dan tahun kedua, merupakan awal perkembangan yang kokoh dan menanjak.

Tahun ketujuh ditandai dengan kenaikan jumlah mahasiswa secara drastis, berkat adanya PGSD penyetaraan, yang pada tahun pertama saja sudah menambah mahasiswa dengan sekitar 18.000 orang. Hal ini karena 15.000 guru SD mendapatkan beasiswa dan sekitar 3.000 mahasiswa di kota Bandung membayar sendiri. UT juga memberikan beasiswa kepada semua guru SD yang terdapat di sekitar UT. Maksud pemberian beasiswa ini adalah sebagai pengabdian kepada masyarakat; dan bagi staf UT, untuk mendapatkan pengalaman lapangan dalam mengelola dan memberikan pelayanan akademik kepada mahasiswa PGSD.

Tahun kedelapan ditandai dengan perluasan PGSD swadana, karena penyelesaian studi pendidikan penyetaraan untuk semua guru SD, jika hanya mengandalkan beasiswa, akan berlangsung terlalu lama. Pengalaman di Bandung dan di Pondok Cabe memberikan masukan yang cukup baik bagi penyelenggaraan PGSD di seluruh Indonesia. Pengumuman UT untuk membuka PGSD swadana agak terlambat, sehingga banyak daerah yang belum mengetahui adanya program ini.

2. *Program Studi dan Bahan Ajar*

Pada tahun pertama diputuskan bahwa modul yang digunakan ditulis sendiri oleh penulis-penulis yang direkrut oleh UT, dan bukan menggunakan buku yang tersedia di pasaran. Keputusan ini berakibat cukup penting dalam perkembangan selanjutnya, sehingga UT menjadi penerbit terbesar buku teks perguruan tinggi di Indonesia. Penulisan oleh UT sendiri ini juga

memungkinkan UT mengatur sistem penyajian bagi modul-modulnya.

Penulisan modul berjalan cukup lancar, namun karena waktu penulisan yang sangat mendesak, hasil penulisan tidak sempat ditelaah dengan baik, sehingga terjadi berbagai kesalahan. Kesalahan-kesalahan tersebut ditemukan dalam penggunaan modul pada semester pertama oleh Tim Evaluasi Modul. Pada cetakan berikut kesalahan-kesalahan tadi sudah diperbaiki. Pada kesempatan yang sama, terjadi penyempurnaan penulisan modul, yaitu modul-modul yang kurang dapat dimengerti oleh para mahasiswa.

Bahan belajar untuk satu semester dikirim dua kali, untuk memberi kesempatan kepada penulis modul yang tidak dapat menyelesaikan semua draft pada waktunya. Pencetakan juga sangat ketat waktunya, sehingga pengiriman dua kali setahun adalah satu-satunya alternatif yang dapat dilaksanakan pada saat itu.

Sejak mula pencetakan bahan ajar dapat diselesaikan dalam waktu dua minggu karena naskah siap cetak sudah dapat diproduksi oleh UT sendiri dengan jalan menggunakan komputer mikro sebagai pemroses dan pencetak kata.

Distribusi bahan ajar dalam sistem baru dilangsungkan ke alamat masing-masing mahasiswa. Perum Pos dan Giro tidak melihat permasalahan dalam hal ini, tetapi kenyataannya masih terdapat kelambatan-kelambatan yang disebabkan oleh layanan pos. Hal ini tidak berarti bahwa layanan pos menurun, bahkan sebaliknya, layanan pos untuk UT meningkat dalam mutu maupun jumlahnya. Sayangnya, distribusi paket bahan ajar ke alamat mahasiswa kadang-kadang tidak jelas; dalam jumlah yang besar, memang suatu hal yang tidak mudah dilaksanakan.

Bahan belajar UT yang berupa modul juga mulai dikenal oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta. Penilaian mereka terhadap modul UT cukup baik. Hal ini terbukti dari penggunaan modul UT yang makin lama makin banyak. Bagaimanapun, modul tersebut ditulis oleh dosen yang terpilih, sehingga kualitasnya relatif lebih baik dari penerbitan Bahasa Indonesia yang beredar di perguruan tinggi pada waktu itu. Waktu untuk menulis masih juga pendek dan selalu berkejaran dengan waktu penerbitannya, tetapi modul yang telah selesai sempat banyak yang mengalami revisi, sehingga kualitasnya menjadi semakin baik.

Penulisan modul hingga akhir masa jabatan rektor pertama masih berjalan dengan cukup baik, meskipun kejar-mengejar dengan waktu masih cukup terasa. Waktu yang semakin longgar bagi penulisan dihambat oleh langkanya penulis untuk tingkat-tingkat lanjut. Sangat jarang dosen yang sanggup menulis bahan belajar tingkat tiga dan tingkat empat, yang masih mempunyai waktu untuk menulis.

Selain itu, UT juga melakukan penajagan kerja sama dengan Departemen Pertanian untuk membuka program studi Penyuluhan Pertanian Lapangan. Persiapan pelaksanaannya berlangsung tiga tahun karena hambatan-hambatan birokrasi.

3. *Proses Belajar*

Perkembangan yang menggembirakan adalah tumbuhnya kelompok belajar. Kelompok belajar tumbuh dengan pesat mulai tahun ke dua. Pertumbuhan ini sejajar dengan pengurangan kehadiran dalam tutorial. Rupa-rupanya, kebanyakan mahasiswa lebih cenderung menggunakan kelompok belajar sebagai sarana untuk memecahkan kesulitan belajar. Kelompok belajar yang relatif kaya, kadang-kadang juga mengundang tutor yang mereka sukai.

Bersamaan dengan itu, UT memulai kerja sama dengan para investor untuk menyelenggarakan praktikum komputer. Usaha ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga setelah dua tahun berjalan, para investor tersebut menarik diri. Kemungkinan besar, sebabnya adalah biaya praktikum yang dirasakan terlalu tinggi bagi mahasiswa UT yang pada umumnya adalah pegawai golongan bawah dan menengah.

Pada tahun keempat dimulai penyelenggaraan kuliah-kuliah umum dari para tokoh masyarakat untuk para mahasiswa dan staf UT. Kuliah umum ini kemudian disiarkan melalui TVRI untuk diketahui oleh mahasiswa yang tidak sempat mengahadirinya, dan masyarakat luas. Kuliah umum disiarkan dalam beberapa kali siaran 25 menit, melalui jatah siaran yang diberikan TVRI kepada UT. Kuliah umum ini menghidupkan kembali usaha yang sudah dimulai pada waktu UT berdiri, yaitu kuliah umum dari Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo.

Sudah beberapa waktu lamanya, UT mempunyai sebuah Pusat Pengembangan Alat Pengajaran Sains, yang dilaksanakan oleh para dosen ITB. Alat pengajaran sains yang berupa kit beserta manual-manualnya pada mulanya dikembangkan untuk pendidikan guru SMP tingkat II, yang belum mempunyai sertifikat PKG. Sejak tahun keenam, dikembangkan kit sains untuk PGSD penyetaraan.

4. *Bantuan Belajar*

Pada tahun pertama, tutorial berjalan dengan cukup lancar karena tutorial yang diperlukan sebagian besar masih mata kuliah yang umum (MKDU), sedangkan mata kuliah khusus (MKDK) masih jarang diberikan. Kehadiran dalam tutorial juga masih cukup tinggi, kadang-kadang hingga 80% dari jumlah mahasiswa yang terdaftar dalam mata kuliah tersebut.

Pada akhir tahun pertama dan permulaan tahun kedua sudah terlihat gejala menurunnya jumlah mahasiswa yang menghadiri tutorial. Jika pada permulaan tahun pertama tutorial masih dihadiri sekitar 80% mahasiswa, pada akhir tahun kedua jumlah tersebut menurun menjadi rata-rata 25%. Jumlah tersebut cocok dengan pengalaman di negara lain (Inggris dan Thailand). Persentase dalam tutorial ini mempunyai variasi yang cukup besar. Tutor yang populer dan mata kuliah yang sukar, dihadiri oleh sekitar 65% mahasiswanya. Sebaliknya, tutor yang tidak disukai atau mata kuliahnya dianggap mudah, hampir tidak dihadiri mahasiswa.

Kualitas tutor memang berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari tutor yang satu ke tutor yang lain. Tutor hanya dibekali dengan buku pedoman, karena biaya penataran tutor tidak tersedia. Penataran jarak jauh dilakukan melalui Sistem Pendidikan Melalui Satelit dari Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia Bagian Timur (Sisdiksat-BKS-INTIM), akan tetapi yang dapat memanfaatkan itu hanya dosen-dosen dari Indonesia Bagian Timur.

Tahun kedua juga memperlihatkan pertumbuhan tutorial swasta. Terdapat dugaan bahwa beberapa perguruan tinggi swasta yang baru berdiri, kenyataannya juga merupakan tempat tutorial intensif dari UT karena kuliahnya menggunakan modul UT dan mahasiswanya juga terdaftar sebagai mahasiswa UT. Seberapa luas perkembangan keadaan ini, baru terlihat di kemudian hari.

Kehadiran tutorial UT makin berkurang. Pada tahun keempat terdapat 287 matakuliah yang seharusnya sudah diberikan tutorialnya oleh UT. Tidak mudah untuk mencari tutor bagi mata kuliah sebanyak itu, terutama di kota-kota kecil, demikian pula untuk mata kuliah tingkat yang lebih tinggi dan sulit. Tingkat kehadiran mahasiswa pada tutorial kemudian lebih

merosot lagi, hingga rata-rata hanya 15% yang hadir. Hal ini menyebabkan UT harus mencari penyelesaian dengan jalan lain. Namun, cara penyelesaian baru yang dipikirkan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, karena harus dilaksanakan dengan menyediakan Pusat Sumber Belajar di banyak tempat. Pusat-pusat yang didukung oleh bahan pendukung belajar ini dapat mengganti fungsi tutorial sampai batas tertentu. Pelayanan tutor masih tetap harus diberikan, namun jumlahnya menjadi jauh berkurang. Penggunaan Sisdiksat untuk latihan tutor yang dimulai sejak akhir tahun ke tiga ternyata tidak dapat terlaksana dengan baik, karena masalah-masalah penjadwalan, kualitas suara, dan terutama gambar, yang tidak memenuhi persyaratan.

Pelaksanaan perintisan tutorial melalui radio *single side band* (SSB) yang dapat berkomunikasi dua arah, yang juga dimulai pada sekitar akhir tahun ke tiga, pada mulanya juga berjalan dengan baik. Akhirnya minat mahasiswa untuk mengikuti tutorial ini merosot karena kesulitan mendapatkan tutor yang baik, dan karena penjadwalan yang kurang cocok. Tutorial dilakukan pada malam hari, sedangkan saat itu mahasiswa sudah lelah setelah seharian bekerja di kantor. Masalah-masalah teknis, seperti pemeliharaan pesawat pemancar radio, dan tempat berkumpul juga merupakan kendala yang menyebabkan berakhirnya usaha ini.

Salah satu pengeluaran yang cukup besar adalah biaya tutorial, maka mulai tahun ke lima biaya tutorial tatap muka dikeluarkan dari SPP. Bila seorang mahasiswa menghendaki tutorial, ia harus membayarnya secara khusus untuk mendapatkan tutorial tatap muka. Biaya tutorial di luar SPP tidak terlalu dipermasalahkan mahasiswa karena tutorial memang jarang dilakukan; dan walaupun dilaksanakan yang menghadirinya juga sangat terbatas.

Sehubungan dengan pemisahan pembiayaan tutorial tatap muka dari SPP, pihak swasta, yang mengetahuinya, mulai mengembangkan usaha untuk memberikan pelayanan akademik atau belajar kepada para mahasiswa UT. Usaha ini juga disebabkan usaha mendirikan perguruan tinggi swasta tidak mudah lagi untuk dilaksanakan. Pihak swasta, yang mendirikan bimbingan belajar UT ini tidak bekerja sama dengan UT karena UT tidak diperbolehkan memberikan ijin berdirinya usaha semacam itu. Mereka juga tidak diperkenankan untuk menggunakan logo UT. Usaha-usaha ini kemudian terkenal dengan nama UT-Kampus.

5. *Pengujian*

Ujian dilaksanakan pada akhir setiap semester pada waktu yang sudah direncanakan. Karena sifat ujian adalah massal, satu-satunya bentuk ujian yang dapat dilaksanakan adalah dalam format yang dapat langsung dibaca oleh alat pembaca optik yang langsung dihubungkan dengan komputer, serupa dengan ujian SIPENMARU.

Pada mulanya pemrosesan ujian cukup lambat karena UT masih meminjam alat pemrosesan, dan tenaga pemrosesnya pun belum terlatih. Mahasiswa mendapatkan hasil ujian setelah hampir tiga bulan.

Pada tahun ke dua, pengujian masih mengalami kesulitan yang sama. Meskipun komputer sudah dimiliki oleh UT, namun alat pembaca optik masih tergantung pada PUSILKOM-UI. Tenaga UT juga masih belum cukup terdidik dalam pemrosesan ujian dan registrasi. Apalagi setelah pindah ke Pondok Cabe, bimbingan dari PUSILKOM-UI praktis sudah tidak ada lagi, karena letak yang sangat berjauhan. Tenaga muda UT harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri.

Penyelenggaraan ujian pertama dengan sistem operasional baru berjalan dengan relatif aman, meskipun jauh lebih rumit.

Kecepatan pemrosesan ujian juga mengalami kemajuan. Hasil ujian dapat diumumkan dalam waktu dua bulan setelah ujian dilaksanakan.

Pada akhir tahun akademik keempat, UT mulai melaksanakan Ujian Komprehensif Tertulis (UKT) sebagai usaha terakhir untuk menguji pengetahuan mahasiswa dalam bidang studi yang dipelajarinya. Ujian komprehensif ini berbentuk ujian uraian, karena Ujian Akhir Semester (UAS) pada umumnya berbentuk pilihan ganda. Alasan mengadakan UKT ialah, untuk mendapatkan kepastian sekali lagi, apakah mahasiswa yang sudah lulus UAS-nya cukup menguasai pengetahuan di bidangnya, sehingga ia mampu menguraikan jawabannya dalam bentuk kalimat tertulis.

Pada tahun itu juga KOPERTIS wilayah DKI Jakarta meminta UT untuk menyelenggarakan ujian negara mata kuliah Pancasila. Ujian ini berlangsung sampai tahun 1991. Tahun-tahun berikutnya, KOPERTIS sudah mampu melaksanakannya sendiri.

Tugas menyelenggarakan ujian juga bertambah berat dengan 4 kali ujian setahun, lagi pula lokasi ujian bertambah dari 81 tempat sampai menjadi lebih dari 125 tempat. Dengan tambahan tugas yang begitu banyak; UT berusaha untuk menambah produktivitas kerjanya, tanpa banyak menambah staf pengelolanya. Suatu tim "budaya kerja" di UT dibentuk, untuk mencari jalan ke arah peningkatan produktivitas dan kegembiraan kerja.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam suatu keputusan telah menginstruksikan kepada UT untuk menerima sekitar 500 orang mantan guru SPG dan SGO untuk dijadikan tenaga pengajar di UT. Meskipun dalam jangka panjang keputusan itu menguntungkan UT, karena UT mempunyai tutor tetap yang profesional, akan tetapi dalam waktu pendek beban untuk mengurus administrasi kepindahannya, mempersiapkan mereka

menjadi tutor yang baik, dan kemungkinan relokasinya di kemudian hari, menghabiskan waktu dan tenaga staf di UT. Dalam hal ini bantuan dari Biro Kepegawaian Depdikbud untuk mengurus administrasinya, dan subsidi Ditjen Dikti untuk penatarannya, sangat membantu. Proses alih tugas berlangsung lebih dari setahun.

Pelaksanaan ujian PGSD yang pertama tertunda sebulan karena kelambatan pengiriman bahan ajar. Kelambatan pengiriman bahan ajar antara lain disebabkan oleh keterlambatan pencetakannya, keterlambatan pengiriman, serta kekurangjelasan alamat pengiriman. Ujian pertama PGSD berjalan dengan baik, kecuali terjadi kecurangan di beberapa tempat.

6. *Lulusan*

Pada akhir masa jabatan rektor pertama, yang menjabat dua masa jabatan, belum banyak penelitian tentang kinerja lulusan UT. Jumlah lulusan pun belum begitu banyak. Dari beberapa kasus di mana tutorial dapat dilaksanakan dengan intensif, dapat diketahui bahwa lulusan UT ternyata tidak kalah kinerjanya dengan lulusan perguruan tinggi konvensional yang baik. Misalnya, pegawai Perum Pos dan Giro yang mendapatkan tutorial intensif, dan yang, setelah lulus S-1 UT, kemudian melamar masuk ke program pascasarjana di Universitas Gajah Mada, sebagian besar diterima setelah menjalani ujian masuk.

7. *Manajemen dan Administrasi*

Sistem registrasi yang mula masih dipergunakan untuk beberapa tahun kemudian, yaitu dua kali dalam satu tahun, selama satu setengah bulan untuk masing-masing registrasi. Cara ini kelihatannya mempunyai banyak kelemahan karena registrasi hanya dapat dilakukan di kantor pos tertentu di 32 kota. Registrasi ini kemudian harus dikonfirmasi ke UPBJJ. Karena komunikasi ke daerah-daerah di luar 32 tempat tersebut lambat, calon

belum mempunyai cukup uang untuk membayar SPP dan bahan belajar, tempat mereka cukup jauh letaknya dari 32 tempat itu, maka pada setiap pendaftaran selalu ada yang terlambat dan meminta supaya waktu pendaftaran diperpanjang. Perpanjangan waktu yang kemudian diberikan oleh UT pada akhirnya menyebabkan kelambatan-kelambatan pengiriman dan kesimpangsiuran administrasi.

Distribusi bahan menjadi lambat dan daftar mahasiswa menjadi tidak teratur, disebabkan kedatangan formulir registrasi mahasiswa yang tidak beraturan. Namun demikian, untuk sebagian besar mahasiswa tidak bermasalah, sehingga semuanya akhirnya berjalan seperti biasa.

Yang menjadi masalah adalah para mahasiswa yang rumahnya jauh dari UPBJJ, sedangkan komunikasi melalui pos lebih cepat ke Jakarta daripada ke kota UPBJJ. Mereka ini masih tetap diperbolehkan mendaftar langsung ke UT Pusat, tetapi, waktu yang diperlukan untuk melayani mereka lebih dari sebulan. Hal ini perlu diperhitungkan oleh mahasiswa yang meregistrasi langsung ke UT Pusat (dalam tahun ke delapan, registrasi ke UT Pusat dihapus sama sekali dan semua registrasi harus dilakukan di UPBJJ).

Kecuali itu, UT sendiri mendirikan tiga yayasan untuk kepentingan sendiri. Pelaksanaan kerja yayasan-yayasan tersebut ternyata kemudian tidak sebaik yang diperkirakan, sehingga pada tahun 1992, satu yayasan dibubarkan. Sebuah yayasan lain baru dilepaskan pada tahun 1996. Hanya satu yayasan, yaitu Yayasan Pembina UT, yang masih ada hingga buku ini diterbitkan.

Pada tahun keempat UT, melalui Yayasan Lembaga Pengembangan Program Pengajaran Bahasa (LP3B) mengembangkan program studi Bahasa Inggris, dimulai dengan tingkat pemula.

Karena karakteristik yang berbeda, LP3B mengembangkan sendiri sistem registrasi, pembayaran SPP dan bahan belajar. Bentuk modulnya juga berbeda dari modul-modul UT pada umumnya karena menggunakan bahan belajar yang asli dikembangkan di Inggris, sedangkan modulnya hanya berisi pokok-pokok yang difokuskan, dan bagaimana mahasiswa dapat mempelajari bahan-bahan belajar tersebut secara mandiri. Perkembangan program studi itu sendiri berjalan dengan pesat, namun pada tahun 1992, terjadi kesulitan keuangan dengan partner UT yang bersama-sama mendirikan yayasan tersebut, sehingga yayasan tersebut dibubarkan pada tahun 1996.

Pada tahun 1992 didirikan *Asian Association of Open Universities (AAOU)* di Bangkok dan Tokyo oleh sembilan universitas terbuka termasuk UT. Hingga sekarang aktivitas AAOU masih terbatas pada pertemuan dan seminar tahunan, serta pendirian *Distance Education Resource and Clearinghouse Centre (DERCC)*. DERCC belum banyak digunakan oleh para anggotanya. Hasil lain dari AAOU ini adalah adanya saling kunjung di antara staf dan mahasiswa para anggota AAOU, namun aktivitasnya masih sangat jarang dilakukan.

Negosiasi dengan *Canadian International Development Aid (CIDA)* dan *Open Learning Agency (OLA)* untuk memperpanjang pemberian bantuan kepada UT mendekati tahap penyelesaian. Bantuan tahap ke tiga (tahap I: 1985; tahap II: 1986-1988; tahap III: 1989-1994) adalah bantuan terbesar dengan kurun waktu terpanjang.

Tahun 1989 ditandai dengan wisuda pertama untuk tingkat sarjana yang dilakukan secara terpusat di Jakarta. Sebelumnya wisuda tingkat Diploma II dilakukan di daerah, bersamaan dengan upacara wisuda perguruan tinggi negeri setempat. Hymne UT lahir pada tahun ini.

Tahun itu UT melaksanakan lustrum pertama yang diselenggarakan bersama dengan wisuda para sarjana dan diploma dari semua fakultas. Wisuda kedua ini diselenggarakan secara megah di Balai Sidang Senayan. Untuk selanjutnya, sampai akhir periode ini, wisuda diselenggarakan dua kali setahun di Jakarta.

Tugas penyelenggaraan tutorial, pengawasan praktikum, dan pengawasan pemantapan pengalaman lapangan (PPL) menjadi bertambah berat dengan adanya PGSD. Meskipun semua pelayanan itu pengelolaannya sudah menjadi tanggung jawab Ditjen Dikdasmen dengan aparatnya di daerah, tetapi kenyataannya UT pusat dan UPBJJ masih harus banyak terlibat. Komunikasi antara UT pusat dan Ditjen Dikdasmen sudah berjalan dengan cukup lancar, namun komunikasi di daerah antara Kanwil dan Kandlep di satu pihak dan UPBJJ di lain pihak masih perlu ditingkatkan.

Ternyata PGSD membawa pengaruh terhadap sistem operasi yang agak menyimpang dari sistem operasi UT. *Pertama*, registrasi tidak dilakukan di Kantor Pos dan Giro, tetapi dilakukan di BRI. Hal ini disebabkan dalam perjanjian kerja sama BRI menyediakan kemudahan-kemudahan, seperti kredit kepada mahasiswa dan administrasi keuangan, yang lebih baik dari Kantor Pos dan Giro. *Kedua*, ujian dilaksanakan pada waktu yang berbeda dari waktu ujian reguler UT. *Ketiga*, registrasi dilakukan satu tahun sekali dan mahasiswa membayar SPP lebih ringan, tetapi wajib mengikuti tutorial dan membeli modul. *Keempat*, kurikulum per semester adalah sama bagi semua mahasiswa. Sistem operasi ini kemudian juga diberlakukan bagi program PGSMP penyetaraan.

Tahun terakhir dari masa jabatan rektor pertama periode ke dua ini juga ditandai dengan usaha mengatur kembali kebijaksanaan yang selama ini diputuskan, dan kemudian menerbitkannya.

Kebijaksanaan yang sudah mantap sedapat mungkin ditingkatkan menjadi Keputusan Rektor. Untuk menyelesaikan ini, Senat UT dikerahkan sehingga selama satu tahun Senat UT bersidang hampir setiap minggu.

Banyak keputusan atau draft keputusan yang telah dihasilkan Senat UT. Yang pertama adalah sebuah draft Keputusan Menteri tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh, yang kemudian menjadi Kepmendikbud No. 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh.

Hasil Senat yang kedua adalah sebuah draft Statuta UT yang didasarkan kepada Kepmendikbud tersebut. Draft tersebut sudah menjadi Keputusan Menteri No. 0470/1992, dan sudah memuat organisasi UT sebagaimana dikehendaki oleh suatu Perguruan Tinggi Jarak Jauh. Namun karena adanya suatu keputusan birokratis di Ditjen Dikti, diterbitkan lagi Keputusan Menteri tentang organisasi UT, yang struktur organisasinya mirip dengan universitas konvensional. Hal ini berdampak pada UPT-UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang diperlukan kembali terhapus sebagai UPT resmi dan harus diberikan Keputusan Rektor berikut untuk menjadikannya resmi. Sejak berdiri, UT mendapat kesulitan mengatur struktur organisasinya, karena menurut peraturan harus disamakan dengan universitas konvensional. Namun dalam kenyataannya, UT berjalan dengan struktur organisasi tambahannya sendiri untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Hasil ketiga adalah Garis Besar Rencana Induk Pengembangan UT (GBRIP-UT) 1992-2000. Garis besar rencana pengembangan UT delapan tahun ini didasarkan pada landasan hukum yang lebih mantap (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Mendikbud yang memang sesuai dengan misi UT),

dan pengalaman tentang faktor-faktor yang dapat diperhitungkan dalam pengembangan UT.

Hasil Senat UT yang berupa Keputusan Rektor juga cukup banyak. Keputusan-keputusan rektor tersebut mengenai persiapan pembentukan unit-unit baru dan kesejahteraan pegawai.

UT adalah suatu jaringan kerja sama. Rekanan yang dapat diajak bekerja sama ini sangat menentukan apa yang dapat dicapai oleh UT. Pada tahun-tahun terakhir ini makin berkembang berbagai alternatif kerja sama dengan rekanan baru yang tadinya belum diperhitungkan. Rekanan baru tersebut adalah Ditjen Dikdasmen dan Departemen Pertanian (yang sudah disebut lebih dahulu), BUMN, BKKBN, ABRI, Perwakilan RI di luar Negeri, Departemen Transmigrasi, Perpustakaan Nasional, Departemen Agama dan, mungkin yang terpenting untuk pengembangan UT lebih lanjut, Pemerintah Daerah Tingkat II di luar Jawa. Jaringan yang sangat diperluas ini memungkinkan UT untuk melebarkan sayapnya dan sekaligus mendapatkan bantuan dalam memberikan pelayanan akademik dengan kualitas yang cukup baik.

Penataan kembali ini termasuk pula usaha-usaha untuk menghemat pengeluaran. Usaha yang dilaksanakan adalah untuk mengetahui biaya satuan setiap kegiatan beserta harga komponen-komponennya. Bila ini diketahui, dapat diadakan usaha untuk mengurangi biaya satuan kegiatan.

Yang jelas terlihat adalah pengeluaran untuk komputer mini UT. Biaya pemeliharaan dua komputer mini itu cukup untuk membeli 50 komputer mikro yang cukup canggih. Biaya pemeliharaan ini akan naik karena usia komputer mini tersebut makin tua, dan makin banyak kerusakan yang terjadi. Oleh sebab itu, pada tahun 1991 UT mulai melaksanakan pengalihan pemrosesan data dan informasi ke komputer mikro. Pengecilan

alat ini bukan berarti pengecilan kemampuan pemrosesan, melainkan penataan pendistribusian pemrosesan. Kebijakan ini juga terkait dengan kebijakan pendistribusian pemrosesan registrasi.

Peningkatan produktivitas juga banyak tergantung pada kesejahteraan stafnya. Jadi, pada tahun 1991 ini diusahakan ada kenaikan insentif bulanan, dan pembakuan beberapa usaha kesejahteraan lain dengan Keputusan Rektor. Usaha besar tahun ini adalah untuk membangun rumah sebanyak lebih dari 200 kaveling perumahan staf. Tanah sekitar 6 HA sudah dibeli dan sudah terbagi.

Semua ini terjadi di UT Pusat dan UPBJJ Jakarta, yang pengelolaannya langsung di bawah pusat. Di UPBJJ lain berlaku otonomi pengelolaan keuangan, sehingga kesejahteraan staf harus pula diurus oleh masing-masing UPBJJ. Kebijaksanaan ini dipertegas dengan peraturan yang menentukan pembagian anggaran yang berasal dari SPP. Sekitar 31% dari hasil SPP dikembalikan ke UPBJJ sesuai dengan jumlah mahasiswa pada masing-masing UPBJJ, ditambah dengan keperluan komunikasi untuk daerah-daerah sulit.

8. *Pengembangan Staf*

Pekerjaan tersulit adalah merekrut staf. Panitia yang awalnya diminta membantu persiapan, kemudian diminta meneruskan tugasnya sebagai staf tetap UT. Menteri hanya menunjuk para pengarah, penasihat, ketua, dan tiga orang wakil ketua (dua di antaranya tidak dapat bekerja penuh). Menteri menugaskan Ketua Panitia untuk menunjuk anggota dan sekretariat. Tenaga ahli yang berpengalaman untuk membantu UT secara penuh-waktu sulit dicari, padahal bantuan penuh-waktu tersebut sangat penting bagi terlaksananya instruksi Pemerintah untuk membuka UT dengan waktu persiapan hanya 10 bulan. Secara resmi

anggota-anggota Panitia Pelaksana Persiapan baru dapat ditetapkan pada bulan Maret 1984.

Pada saat yang bersamaan, Balitbang Dikbud mengadakan reorganisasi sehingga perlu mengurangi stafnya. Secara berangsur sekitar 80 orang dari Balitbang Dikbud, yaitu dari mereka yang sudah bergelar doktor hingga mereka yang lulus SD, pindah bekerja ke UT. Tanpa masukan yang begitu besar dari Balitbang Dikbud, perjalanan UT pasti akan mengalami kesulitan. Tenaga senior lain didapatkan dari IKIP Jakarta dan Universitas Indonesia, sebagai tenaga paruh waktu. Hanya beberapa orang yang kemudian pindah sebagai tenaga tetap UT.

Perekrutan tenaga muda tak begitu mengalami kesulitan karena sumber tenaga muda lulusan perguruan tinggi, sekolah menengah dan sekolah dasar, cukup banyak terdapat di pasaran bebas. Mula-mula perekrutan dilaksanakan melalui kenalan, baru kemudian dengan pengumuman terbuka, dan melalui proses seleksi.

Perekrutan anggota staf muda baru dilaksanakan menjelang kepindahan ke Pondok Cabe, sehingga pada akhir tahun akademik pertama UT mempunyai staf sekitar 300 orang.

Penambahan jumlah staf juga berkembang pesat pada tahun kedua. Pada akhir tahun akademik kedua, UT telah mempunyai sekitar 500 orang karyawan. Sebagian besar adalah karyawan muda yang baru saja lulus perguruan tinggi atau SMTA. Hingga saat ini UT masih sangat sulit mencari tenaga senior tetap yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan pimpinan.

Perkembangan lain di UT adalah dilantiknya Dewan Penyantun dan Pembantu Rektor IV, serta didirikannya Pusat Studi Indonesia dan Tim Wirausaha UT.

Sementara itu staf UT perlu diusahakan untuk menjadi lebih efisien. Usaha-usaha ini dilakukan dengan penataran dan pendidikan, serta perbaikan prosedur operasional baku.

Penataran dan pendidikan terus-menerus dilakukan. Pada tahun 1992 lebih dari 10 orang direncanakan mengikuti pendidikan S2 di dalam dan di luar negeri, dan lebih dari 440 orang direncanakan mengikuti penataran tutor tetap UT.

9. *Sarana dan Prasarana*

Dalam tahun pertama ini, pembangunan kampus UT sudah dimulai. UT mendapatkan hibah dari Ditjen Dikti berupa tanah dan biaya tiga bangunan, yang tadinya disediakan untuk suatu Pusat Penelitian. Pada pertengahan tahun 1985, tiga gedung pertama di Pondok Cabe tersebut sudah dapat ditempati, sehingga sebagian besar karyawan yang tersebar di berbagai tempat sudah mulai menempati gedung baru tersebut. Pada tahun anggaran berikutnya dapat diselesaikan beberapa gedung lain yang dananya berasal dari anggaran pembangunan UT. Perabot gedung serta peralatan yang diperlukan dapat pula dibeli dengan anggaran tersebut.

Fasilitas perkantoran dan peralatan yang diperlukan bertambah banyak pada tahun kedua ini. Menjelang akhir tahun kedua, tujuh gedung beserta prasarana jalan sudah dapat diselesaikan, sehingga ruang gerak UT cukup luas, kecuali untuk gudang. Gudang yang telah selesai dibangun masih terlalu kecil. Dalam perencanaan, gudang tersebut harus seluas 5.000 m² untuk dapat mencukupi keperluan UT sampai lima tahun mendatang.

Fasilitas UT dalam tahun 1988 bertambah dengan satu gedung untuk Pusat Antar Universitas UT, karena UT diberi tugas untuk mengelola Pusat Antar Universitas dalam bidang Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (PAU-PPAI).

Selain itu, ada beberapa gedung UT yang dibangun pada tahun ke empat ini yaitu:

1. Gedung Distribusi tahap II;
2. Gedung Pos dan Giro;
3. Gedung Generator Listrik;
4. Taman Kanak-kanak.

Fasilitas di UT bertambah pula dengan percetakan kecil yang dapat melayani pencetakan naskah ujian. Sebelumnya, pencetakan naskah ujian dilaksanakan di percetakan luar, sehingga sulit mencegah kebocoran ujian.

Penerbitan dengan Komputer Mikro yang teknologinya sudah tersedia di Indonesia mulai digunakan oleh UT. Untuk itu tiga petugas dikirim ke Vancouver, untuk mempelajari cara-cara baru tersebut dengan perangkat lunak yang paling mutakhir saat itu.

Usaha UT untuk membangun gedung serbaguna dan gedung pusat produksi media disetujui Pemerintah, namun baru setengah anggaran yang diberikan.

Mesjid yang dibangun dengan dana bantuan Presiden, dan gedung BRI diselesaikan pada tahun 1988. Kemudian UT membeli beberapa mesin cetak kecil untuk menambah kemampuan cetaknya.

10. Anggaran

Masalah anggaran yang dapat digunakan UT merupakan kesulitan tersendiri dalam persiapan berdirinya UT karena APBN tahun 1983/1984 tidak menyediakan anggaran untuk UT. Pada waktu anggaran disusun, kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan lama untuk menunda persiapan UT menyebabkan terhapusnya anggaran tersebut. Berkat dukungan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Setjen Depdikbud dan BAPPENAS maka

sejumlah anggaran dapat disisihkan untuk UT. Baru pada tahun anggaran 1984/1985 UT mendapatkan anggarannya sendiri.

Pada mulanya anggaran UT mencukupi untuk mendukung operasi UT, sehingga SPP ditentukan cukup rendah dibandingkan dengan SPP mahasiswa universitas negeri konvensional. Lama kelamaan anggaran belanja UT yang didapatkan dari pemerintah menurun sehingga biaya operasi UT tidak mencukupi, sedangkan SPP tidak boleh dinaikkan. Semula SPP, dengan subsidi pemerintah, sudah mencukupi untuk membiayai tutorial, bahan ajar, dan ujian. Setelah anggaran tidak mencukupi lagi, bahan belajar dijual tersendiri kepada mahasiswa, meskipun mereka tidak wajib membelinya. Begitu pula tutorial, dan ujian, yang harus dibayar oleh mahasiswa selain kewajiban membayar SPP.

Kecuali itu, berbagai penghematan pengeluaran dilakukan, seperti penghentian penerbitan majalah untuk mahasiswa, ditambah dengan pelaksanaan aktivitas secara lebih efisien.

Antara Harapan dan Kenyataan

Tiga buah visi dan misi yang berkembang selama UT berjalan delapan tahun pertama tidak seluruhnya dapat dicapai. Visi dan misi tahap pertama, yaitu melahirkan sebuah PTJJ dengan tugas tertentu, dapat diselesaikan dengan baik, meskipun kemudian ternyata, bahwa UT lebih banyak menampung orang yang sudah bekerja, daripada menampung lulusan baru SMA yang tidak tertampung di perguruan tinggi konvensional. UT berkembang menjadi sebuah PT raksasa, yang sejak lahir sudah merupakan PT di Indonesia dengan jumlah mahasiswa yang terbanyak.

Pada tahap berikutnya, UT mengalami kekacauan karena perubahan sistem operasi yang tidak dapat dipersiapkan dengan baik. Visi dan

misi pada waktu itu segera berubah menjadi visi dan misi yang mementingkan kelangsungan hidup UT. Masa-masa itu adalah masa-masa yang tersulit dari kehidupan UT. Namun berkat kesungguhan dari staf dan peminat UT yang mendukungnya, pada saat-saat yang suram itu, UT dapat kembali mendapatkan kepercayaan dari mahasiswa dan lembaga-lembaga yang menyekolahkan pegawainya di UT.

Setelah UT dapat mengatasi kekacauan sistem operasinya, visi dan misi yang muncul adalah mementingkan konsolidasi untuk memantapkan dan mengembangkan sasaran-sasaran yang sudah tercapai. Visi dan misi yang bersifat konsolidasi ini berjalan terus sampai rektor pertama menyelesaikan tugas memimpin UT selama delapan tahun; selanjutnya diteruskan oleh rektor berikutnya. Impian baru berkembang dan mendapatkan tempat di benak sebagian staf UT. Tidak semua impian dapat tercapai, tetapi impian yang paling penting yang belum dapat tercapai adalah memberikan pelayanan tutorial wajib bagi setiap mahasiswa. Bantuan tutorial yang diselenggarakan paling teratur atau rutin, meskipun belum dalam kualitas yang diharapkan, adalah tutorial bagi guru-guru SD yang menjadi mahasiswa UT. Pelayanan tutorial memang yang paling sulit dilaksanakan, tetapi yang kemungkinan besar sangat diperlukan kebanyakan mahasiswa. Kesulitan yang dihadapi adalah kesulitan biaya dan kesulitan akses kepada teknologi informasi dan komunikasi, meskipun warnet sudah tersebar di banyak tempat.

Bilamana tutorial dapat diselenggarakan dengan baik, kegagalan mahasiswa akan sangat dikurangi, dan kualitas pembelajaran juga akan jauh meningkat.

Kendala dan Pendukung Pelaksanaan Visi dan Misi

Pada tahap pertama pengembangan UT, semua kendala yang dapat dipikirkan muncul. Tidak ada rencana, tidak ada anggaran, tidak ada tempat kerja, dan tidak ada staf. Namun berkat kerja sama yang sangat baik dari para pengambil keputusan dan para simpatisan UT, serta kerja keras staf yang dapat diminta untuk membantu berdiri dan berkembangnya UT, maka UT dapat dengan selamat berdiri. Tanpa dukungan yang begitu luas dan dalam, rasanya UT tidak mungkin berdiri hanya dengan persiapan selama sepuluh bulan.

Pada tahap berikutnya, kendalanya adalah kekurangan waktu untuk mempersiapkan diri bagi perubahan operasi yang sangat penting untuk dilaksanakan. Karena kendala waktu itu, pelaksanaan perubahan operasi sangat tersendat-sendat. Pada waktu itu juga terjadi krisis keuangan pemerintah, sehingga subsidi kepada UT yang tadinya mencukupi untuk mendukung hampir semua operasi UT menjadi sangat berkurang. Pelayanan mahasiswa juga berkurang, sehingga mahasiswa harus menambah biaya kuliah di UT yang sangat signifikan. Namun lepas dari subsidi yang berkurang, dukungan pemerintah dan lembaga-lembaga lain cukup besar. Dukungan staf yang percaya diri dan mau bekerja keras sangat menentukan dalam meraih kepercayaan mahasiswa dan lembaga lain yang ingin mengirimkan pegawainya untuk belajar di UT.

Pada tahap ketiga, kehidupan UT menjadi lebih ringan setelah semua kendala pada tahap kedua dapat diatasi. Pelayanan mahasiswa dapat dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun di sana-sini masih banyak keluhan. Kesejahteraan staf dapat ditingkatkan, termasuk insentif dan bantuan membeli rumah. Kendala yang masih ada adalah keinginan mahasiswa untuk cepat lulus, tanpa ingin bersusah-susah untuk belajar. Hal ini menyebabkan kebocoran

ujian, contek-menyontek pada saat ujian, dan berbagai tindakan lain yang melawan hukum, termasuk di dalamnya pemalsuan ijazah. Lambat laun, kendala-kendala ini dapat dikurangi.

Pada dasarnya, pendukung utama dari terselenggaranya UT dengan cukup baik adalah dedikasi staf, tidak hanya staf tetap, tetapi juga staf pinjaman dari lembaga lainnya, dan toleransi mahasiswa. Karena dedikasi ini dan bantuan pemerintah, UT dapat mendirikan kampus di Pondok Cabe dalam waktu relatif singkat, dan mempunyai sarana dan prasarana lain yang cukup memadai, meskipun belum sesuai benar dengan impian yang hidup dalam benak pimpinan dan staf UT.□

UNIVERSITAS TERBUKA

PERIODE 1992-1996

Benny Soeprapto

Pengantar

Sebelum menjabat rektor UT saya pernah menduduki jabatan Direktur Pendidikan Menengah Umum (PMU), Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada waktu itu saya sudah menjalin kesepakatan kerja sama antara Direktorat PMU dengan UT dalam kaitan dengan guru-guru IPA yang belajar di UT.

Ketika itu Direktorat PMU sedang menyelenggarakan program yang disebut pemantapan kerja guru khusus untuk IPA, Matematika dan Bahasa Inggris. Program ini agak berbeda dengan kebiasaan penataran yang berlaku saat itu, yaitu para peserta dipanggil dari daerah untuk ditatar di pusat. Dalam penataran konvensional seperti itu, salah satu cara untuk melihat keberhasilan proses tersebut adalah dengan melakukan tes awal sebelum penataran dimulai, kemudian melakukan tes lagi pada akhir penataran. Bilamana hasil tes akhir

lebih baik daripada tes awal secara signifikan, penataran dianggap berhasil.

Pengalaman menunjukkan bahwa upaya semacam itu tidak menumbuhkan kebiasaan yang mengakar pada guru. Ketika yang bersangkutan pulang dan kembali ke sekolahnya masing-masing, memang semangatnya tinggi untuk mengubah kebiasaan mengajar yang lama dengan cara baru yang diperolehnya dari penataran. Sayangnya, hasil pemantauan kemudian menunjukkan bahwa semangat semacam itu ternyata tidak berlangsung lama dan lekas pudar. Ini dapat dipahami, sebab prestasi yang dicapainya pada akhir penataran tersebut adalah prestasi ketika guru berada dalam lingkungan yang berbeda dengan lingkungan kerja di sekolahnya. Penatarannya penuh dengan semangat inovasi; rasa kebersamaan sesama teman guru yang ditatar juga membentuk suasana yang menunjang semangat seperti itu. Namun setelah pulang kembali ke sekolahnya, lingkungan yang mendukung seperti ketika mereka ditatar itu tidak ada lagi, misalnya: kepala sekolahnya tidak terlalu peduli dengan apa yang dilakukan guru, teman-teman guru mereka yang ikut ditatar waktu itu umumnya tidak bekerja di sekolah tersebut, bahkan ada yang lokasi sekolah tempat kerjanya di daerah yang berbeda sehingga tidak terjadi komunikasi antarmereka.

Pada program pemantapan kerja guru, penataran dilakukan untuk kelompok guru yang domisilinya berdekatan. Kemampuan yang dilatihkan adalah hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh guru ketika mengajar di sekolahnya masing-masing. Isinya bukan berupa teori mengajar, atau bagaimana menuliskan tujuan instruksionalnya, melainkan praktek mewujudkannya secara nyata di sekolah. Dengan demikian bilamana penataran di lokasi sekolah itu berhasil, hasilnya akan lama bertahan karena ukuran keberhasilan itu diterapkan dalam lingkungan kerjanya sendiri. Guru-guru sejawat

yang dengan mudah dapat ditemui juga merupakan dukungan bagi daya tahan semangat kerjanya.

Pada awal program ini, sejumlah guru yang terpilih mendapatkan latihan sebagai penatar dalam kurun waktu yang panjang dan intensif di pusat, tetapi masing-masing harus tetap terikat pada sekolahnya masing-masing. Guru-penatar yang sering disebut "instruktur" tersebut kemudian memimpin penataran guru dari sejumlah sekolah yang terdapat dalam wilayahnya. Proses penatarannya berlangsung selama satu semester penuh. Topik penataran berupa cara mewujudkan pengajaran yang harus dikerjakan guru sehari-hari di sekolahnya, tentu saja ada sejumlah peremajaan materi baru yang dilakukan secara tidak langsung. Guru-guru yang ditatar memulai semester dengan membuat rancangan bersama di bawah bimbingan "instruktur" tersebut, untuk kemudian dilaksanakan di sekolahnya masing-masing. Setiap minggu mereka bertemu di salah satu sekolah untuk menceritakan pengalaman masing-masing, serta merancang kegiatan mengajar untuk minggu depannya. "instruktur" wilayah itu berperan untuk memberikan bantuan jika ada kesulitan yang harus diatasi oleh guru sekolah dalam mewujudkan pengajarannya. Untuk bidang studi IPA, yaitu pemahaman akan gejala dan perilaku alam, ada kalanya peralatan praktikum di sekolahnya tidak berfungsi, sehingga perlu dicoba terlebih dahulu, dan diadakan perbaikan seperlunya. Pertemuan mingguan dapat dimanfaatkan untuk melakukan persiapan semacam itu. Dengan demikian paling tidak seminggu sebelumnya guru-guru tersebut sudah benar-benar merasa siap mengajarkannya.

Kerja sama dengan UT yang dirintis oleh saya adalah dalam rangka merangkai kegiatan pementapan kerja guru IPA dengan kegiatan belajar guru yang sedang menjadi mahasiswa FKIP-UT. Di satu pihak, UT tidak mungkin melatih praktikum IPA hanya dengan modul cetakan. Di sisi lain, guru-guru IPA yang berhasil menjalani

program pemantapan kerja guru diakui sebagai salah satu komponen belajarnya di UT. Proses pelatihan praktikum itupun dilakukan tanpa guru-guru yang menjadi mahasiswa tersebut keluar dari lingkungan sekolahnya.

Kebijakan UT: Sasaran Layanan dan Kelembagaan

Pada bulan Desember 1993 UT mengintroduksi SWOT, sebagai cara untuk mengadakan evaluasi diri sendiri. Hal ini penting karena ada kemungkinan kendala eksternal tidak lagi mendukung visi UT, sehingga UT harus mengubah haluan.

Untuk jaman sekarang ini arah jangka panjang yang tepat tidak selamanya mudah dirumuskan. Banyak faktor penentu yang tidak berada di bawah wewenang kita, melainkan sangat dipengaruhi oleh kendala-kendala eksternal yang sewaktu-waktu datang tak terduga.

Dalam SWOT, unsur *strengths* dan *weaknesses* memang unsur internal yang mungkin masih dapat dikendalikan. Tetapi unsur *opportunities* dan *threats* pada dasarnya merupakan unsur eksternal yang dapat berubah dari waktu ke waktu dan harus selalu dicermati setiap saat.

Laporan periode ini memuat tiga hal sebagai perwujudan arah garis besar kebijakan. Yang pertama, kebijakan tentang sasaran layanan UT; yang kedua, pengaturan kelembagaan, dan yang ketiga, beberapa informasi dan data faktual perkembangan UT.

1. Kebijakan tentang Sasaran Layanan UT

Ketika UT didirikan pada tahun 1984, situasi “daya tampung” lulusan baru tamat SMA sangat memprihatinkan. Tempat yang tersedia di perguruan tinggi di Indonesia saat itu jauh di bawah jumlah mereka yang lulus SMA.

Dari data mahasiswa UT, tampak bahwa ada pergeseran liputan warga masyarakat yang memanfaatkan layanan yang disajikan oleh UT. Apalagi dalam kaitan dengan penempatan pembangunan sumber daya manusia sebagai primadona pembangunan Indonesia. Pendidikan kita sebaiknya tidak hanya terpukau memikirkan mereka yang usianya di bawah 25 tahun. UT justru harus mengisi kekosongan yang selama ini tidak digarap oleh perguruan tinggi konvensional, yaitu mereka yang tidak muda lagi, bahkan yang sehari-harinya disibukkan oleh perannya sebagai insan produktif (bekerja).

Kita dapat belajar dari pengalaman Program Penyetaraan Diploma II guru SD. Meskipun pada awalnya program tersebut sangat mengandalkan biaya dari Proyek Pinjaman Bank Dunia yang disalurkan melalui anggaran Depdikbud, tetapi setelah dimungkinkannya sistem swadana, tampak bahwa ada potensi sumber dana yang datang dari masyarakat yang tidak kalah kuatnya.

Pada waktu acara Dengar Pendapat dengan DPR-RI pada tanggal 15 Juni 1993, kami tekankan bahwa UT dapat ikut membantu mengubah pola perjalanan hidup manusia Indonesia, bukan belajar lalu bekerja melainkan *belajar* sambil bekerja. Itulah perwujudan dasar asas belajar sepanjang hayat, yang akan menjadi semakin penting perannya dalam era saling ketergantungan dalam skala global. Tanpa menutup pintu bagi lulusan baru tamatan SMA, UT melanjutkan upaya mencari peminatnya kepada mereka yang sedang bekerja.

Kebijakan tersebut diwujudkan di antaranya melalui penandatanganan kerja sama dengan TNI-AL 7 Mei, dengan Garuda Indonesia 19 Mei, dengan TNI-AD 24 Mei, dengan Bank BNI 18 Agustus 1993, dan seterusnya pada berbagai waktu lain di tahun-tahun berikutnya. Sejak itu banyak dari mereka yang berada pada strata sosial yang terhormat bergabung menjadi mahasiswa UT. Kehadiran mereka telah ikut menempatkan UT pada posisi yang lebih dihormati.

Dewasa ini, pada dasarnya terdapat dua kategori mahasiswa UT. Yang pertama adalah mahasiswa yang memasuki UT secara individual. Yang kedua adalah kategori mahasiswa yang disebut mahasiswa institusional. Kategori ini meliputi mereka yang sedang bekerja pada satu institusi, dan institusi tersebut menginginkan untuk meningkatkan kemampuan personilnya dengan memberi kesempatan belajar di UT, tanpa harus meninggalkan tugasnya sehari-hari.

Ditilik dari data mahasiswa yang mendaftar, jika mahasiswa UT yang terdaftar akhir 1992 berjumlah sekitar 180.000, maka pada akhir tahun 1995 jumlah tersebut menanjak naik mencapai lebih dari 350.000 orang. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 5% yang usianya di bawah 25 tahun.

Dengan demikian, kehadiran UT tidak dimaksud untuk menyaingi, tetapi justru untuk mengisi tempat yang terlupakan oleh sistem perguruan tinggi konvensional.

2. Kebijakan Kelembagaan

Jika sebuah mobil memerlukan perbaikan, maka mobil itu dapat berhenti sebentar, dan bagian-bagian yang perlu diperbaiki segera dibetulkan. Tetapi perbaikan di sebuah lembaga layanan masyarakat harus diibaratkan sebagai kapal terbang yang sedang mengudara. Kalau menginginkan perbaikan, harus dilakukan tanpa mengganggu

kewajibannya bahwa dia harus tetap terbang. Membandingkan situasi intern UT dengan beberapa lembaga yang lain, dapat disimpulkan bahwa sudah tiba saatnya UT menjadi lembaga yang dewasa. Salah satu ciri kedewasaannya yaitu bila unsur-unsur yang ada di dalamnya merupakan unsur pemrakarsa, yang tidak selalu menunggu perintah. Partisipasi unsur-unsur yang ada untuk ikut mengambil keputusan dalam batas-batas wewenangnya perlu terjadi.

Agar tidak salah tafsir, ada dua unsur di sini: unsur prakarsa dan unsur mengambil keputusan. Prakarsa yang dibagikan tidak secara otomatis semua keputusan juga dibagikan, kendali hirarkis tetap harus berfungsi. Terdapat alat pengendali yang dapat diungkap dalam peraturan, tetapi ada juga persoalan-persoalan yang tidak bersifat jelas batasnya, dan memerlukan bahan-bahan pertimbangan yang lebih luas sifatnya. Dalam hal yang terakhir ini lazimnya keputusan diambil secara hirarkis setelah melalui pembahasan yang melibatkan unsur-unsur terkait.

Untuk mengendalikan berlangsungnya mekanisme seperti itu, dirasakan perlu segera dilengkapinya infrastruktur kelembagaan. Karena itu secara bertahap kemudian dibentuklah senat-senat fakultas dan kemudian senat universitas, dengan komposisi: pakar keilmuan, eksekutif dan perwakilan, sesuai dengan aturan yang sudah ada. Badan-badan inilah yang kemudian harus berfungsi sebagai penjaga pagar agar para eksekutif dapat berjalan lewat rambu-rambu yang norma-normanya telah dibahas dan disepakati bersama. Peran penjaga pagar ini menjadi semakin penting berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang secara berangsur-angsur memberikan otonomi kepada perguruan tinggi negeri.

Dalam Statuta Universitas Terbuka yang sudah menjadi Keputusan Menteri tahun 1992, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam organisasi

UT sudah disusun secara lengkap, namun karena UPT tidak merupakan unit struktural resmi dari universitas, maka UPT-UPT tersebut perlu disahkan dengan Keputusan Rektor.

UPT yang dikukuhkan dengan Keputusan Rektor ialah Pusat Produksi Multi Media, Pusat Penerbitan Bahan Ajar, Pusat Distribusi, dan Pusat Antar Universitas-Pusat Pengembangan Aktivitas Instruksional (PAU-PPAI).

Reorganisasi UT yang sudah dimulai tahun 1992 juga dilanjutkan dengan mengesahkan Pusat Penelitian Kelembagaan dan Pusat Penelitian Media, serta Pusat Studi Indonesia dengan Keputusan Rektor. Ketiga pusat tersebut berada di bawah Lembaga Penelitian.

Pada awal tahun 1993, UT mengelola dana sekitar 20 milyar rupiah setahun. Pada tahun 1996, biaya operasi UT sudah mencapai sekitar 50 milyar rupiah setahun. Dana yang datang dari alokasi Rutin dan DIP hanya meliputi sekitar 30% saja dari biaya operasi UT. Sekitar 70% biaya operasi UT datang dari luar anggaran rutin. Dengan demikian UT berangsur-angsur menjadi lebih mandiri dalam soal pendanaan.

Anggaran Pendapatan UT (dalam ribuan rupiah)

Sumber Dana	1992/1993	1993/1994	1994/1995	1995/1996
Gaji PNS	2.062.801	2.254.888	8.956.740	10.603.056
Rutin	726.500	755.700	1.014.000	1.728.600
DIP : P2T	1.751.335	1.900.000	1.046.440	1.122.688
OPF	1.201.309	1.218.523	943.700	710.524
SPP / DPP	12.125.500	29.863.099	35.680.817	36.781.116
Jumlah	17.856.945	35.992.210	47.641.397	50.945.984

Otonomi bukan hanya “kebebasan” melainkan beban “tanggung jawab” yang harus dipikul sendiri oleh lembaga itu. Keterlibatan unsur-unsur yang lebih luas dalam mengendalikan arah gerak lembaga perlu terjadi, karena konsekuensi pemilihan arah itu akhirnya harus dipikul bersama, dalam suka ataupun duka. Kesepakatan-kesepakatan tentang kesejahteraan warga, anggaran dan tarif-tarif kerja/kegiatan dalam lembaga dan sebagainya, satu demi satu ditentukan dan dipakai bersama. Dengan demikian diharapkan bahwa masalah keuangan yang biasanya peka itu menjadi lebih transparan bagi unsur-unsur yang ada dalam lembaga.

Transparansi keuangan tidak berarti bahwa semua orang boleh mengetahui dan harus diberitahu tentang situasi keuangan. Transparansi berarti bahwa semua orang mengetahui jalurnya; semua yakin bahwa hal itu dikelola secara baik, karena ada mekanisme pengendalian yang diketahui bersama secara jelas. Selanjutnya terdapat orang atau sekelompok orang yang mempunyai kewajiban untuk memeriksa, dan ada mekanisme untuk menanyakannya jika perlu.

Di bidang organisasi, dalam melayani mahasiswa yang domisilinya meliputi seluruh wilayah tanah air Indonesia, bahkan (dalam jumlah yang relatif kecil) juga sudah merentang kepada warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, UT memang sudah menerapkan sistem yang mengantisipasi jauh ke masa depan. Meskipun secara formal UT sering dinamakan universitas negeri yang ke-45, ditilik dari strukturnya, UT bukan sebuah universitas yang berdiri sendiri seperti halnya dengan universitas negeri konvensional yang lainnya. UT dengan 35 UPBJJ-nya adalah sebuah “jaringan pendidikan tinggi negeri”, yang mengelola sistem pembelajaran jarak jauh, dengan lembaga induk yang lokasinya di Pondok Cabe.

Beberapa Informasi Faktual Perkembangan UT

Para pendiri UT telah merancang organisasi UT dengan sangat arif, agar dapat mewujudkan misi UT, yaitu memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat Indonesia untuk belajar pada jenjang pendidikan tinggi, tanpa mengorbankan mutu pendidikan yang disajikannya. Garis depan layanan UT diwujudkan oleh 35 UPBJJ yang sekaligus dibina oleh perguruan tinggi negeri setempat. Bahan-bahan belajar dan evaluasi hasil belajar dilakukan oleh pakar-pakar keilmuan terbaik yang terdapat di tanah air kita untuk menjaga mutu keilmuan yang disajikan melalui UT.

Pendidikan jarak jauh dalam wujud konkretnya berupa transaksi ilmu lewat media. Tidak semua kemahiran dapat ditransaksikan semata-mata lewat media (cetak, suara, ataupun gambar-gerak). Kita tidak mungkin misalnya, mendidik dokter ahli bedah lewat media dari Pondok Cabe, demikian pula halnya untuk mendidik insinyur perkapalan, atau insinyur pertambangan hanya mengandalkan informasi yang dikemas dalam media dan dikomunikasikan kepada mereka yang belajar. Bahkan untuk meningkatkan kemampuan mendidik para guru SD agar sanggup mengelola anak-anak, membentuk perangai mereka, dan sebagainya, diperlukan mitra-kerja, yaitu institusi yang mempunyai fasilitas, yang mempunyai wewenang, dan yang mengenal lingkungan alam sosial dan budaya yang ada di sekitarnya.

Dalam kaitan itu, dirasa perlu memperkuat lembaga penelitian UT. Untuk keperluan operasi, UT perlu mempunyai Pusat Penelitian Kelembagaan, yang memantau informasi tentang layanan UT. Kita melebarkan lingkup kegiatan Pusat Studi Indonesia agar dapat memberikan dukungan informasi yang handal dalam menangani tugas UT yang meliputi seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas dan berbentuk kepulauan ini. Kita tidak saja menyadari keragaman

sosial dan budaya yang ada di Indonesia, tetapi juga bahwa peta sosial dan budaya Indonesia itu berubah cukup cepat sebagai akibat dari lajunya pembangunan dan komunikasi. Selain itu kita menyadari pula dari pengalaman beberapa tahun terakhir ini, bahwa peta media komunikasi di Indonesia berubah dengan sangat cepat. UT yang mengandalkan operasinya dengan media, dengan sendirinya harus selalu dapat menempatkan dirinya secara tepat. Karena itu, dibuat Pusat Penelitian Media untuk mengikuti perkembangan teknis yang terjadi dalam bidang telekomunikasi dan teknologi informasi, khususnya yang berkaitan dengan operasi UT.

Membaca kecenderungan yang terjadi di dunia luas, dapat diamati dua gejala yang cukup menonjol di lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu makin kaburnya istilah pendidikan jarak jauh, sebab alat-alat komunikasi modern sudah mulai dapat menghilangkan jarak jauh yang dahulu memisahkan antara yang mengajar dengan yang diajar. Bahkan ada yang meramalkan terjadinya penggabungan antara institusi konvensional tatap muka dengan institusi jarak jauh. Seandainya proses penggabungan seperti itu terjadi di Indonesia, organisasi UT cukup siap untuk menghadapinya.

Yang kedua, bahwa mudahnya perbedaan antara belajar jarak jauh dengan pendidikan tatap muka konvensional terjadi sebagai akibat dapat dikemasnya semua jenis informasi dalam bentuk elektronik. Dalam wujud kemasan elektronik digital, informasi dapat dikomunikasikan ke mana saja secara cepat dan serentak, serta dapat disimpan dalam jumlah yang sangat besar, dengan wadah yang ukurannya cukup kecil. Saat ini sebuah piringan ukuran *compact disk* sanggup memuat informasi yang terdapat pada sebuah ensiklopedia 22 jilid, tetapi di tahun 1997 bahkan sudah muncul wadah ukuran sama, yang sanggup memuat 25 kali lebih banyak informasi.

Dalam kaitan dengan kemungkinan munculnya media kemasan elektronik ini, kita telah merintis pelatihan kemasan elektronik untuk bahan-bahan tutorial. Perpindahan dari kemasan cetak ke kemasan elektronik bukan hanya sekadar mengganti media, tetapi sekaligus mengubah cara berpikir kita tentang teknik pengajaran. Mereka yang baru mengetahui cara mengemas media cetak, cenderung berpikir dengan pola presentasi-linier karena memang begitulah yang dapat diwujudkan oleh media cetak. Pelatihan mengemas tutorial lewat CAI memungkinkan mereka mengubah pola berpikirnya dengan ragam navigasi yang jauh lebih banyak. Kompetisi dalam merebut peminat belajar melalui media elektronik tidak hanya diwarnai oleh isi dan perwajahan tampilannya saja, tetapi juga oleh alur navigasi interaktif yang dapat disajikannya.

Di bidang ketenagaan, pada awal saya bertugas di UT, sudah menginjak usia 8 tahun sejak dibangun dengan modal yang sangat minimal. Ada tenaga-tenaga orang yang dipindahkan dari departemen, ada tenaga yang dipinjam dari universitas (konvensional) lain, ada pula yang dipindahkan dari universitas lain, dan ada tenaga muda yang memulai karier bekerjanya di UT, sebagian sudah mendapatkan kesempatan melanjutkan studinya di luar negeri, sedangkan sebagian lagi masih belajar. Tidak lama sebelumnya juga ada sekitar 500 orang tenaga baru yang dipindahkan ke UT dari lingkungan Ditjen Dikdasmen, khusus dalam kaitan dengan program pendidikan Diploma-II Guru Sekolah Dasar. Kategori yang terakhir ini domisilinya tersebar di seluruh Indonesia, bahkan tidak hanya di kota tempat UPBJJ saja.

Pegawai Negeri Administratif UT bertambah dengan dua belas orang sejak tahun 1992/1993 (680 orang) sampai tahun 1995/1996 (692), sedangkan Pegawai Negeri Akademik berkurang dengan 16 orang sejak tahun 1992/1993 (788 orang) sampai tahun 1995/1996 (772

orang). Jumlah seluruh pegawai negeri pada tahun 1995/1996 menjadi 1464 orang.

Tambahan dari jatah PNS selama 4 tahun ini terlalu kecil, sehingga UT terpaksa mempekerjakan tenaga-tenaga tambahan yang dibayar melalui dana SPP/DPP, agar pelayanannya kepada mahasiswa yang jumlahnya sangat meningkat itu masih dapat berjalan. Selama 4 tahun ini tambahan Pegawai Negeri Administratif hanya 8 orang; Pegawai Negeri Akademik (dosen) hanya 12 orang. Kemudian UT menambah tenaganya dengan merekrut Tenaga Harian Lepas sebanyak 87 orang dan Tenaga Harian Tetap (honorar) sebanyak 3 orang.

Kemajemukan tenaga, baik dalam usia maupun dalam latar belakang, serta pengalamannya, di dalam lingkungan UT tentu saja membawa konsekuensi dan persoalan tersendiri. Mereka yang datang dengan pengalaman lama di lingkungan birokrasi umumnya cenderung menekankan pola wewenang struktural, karena memang begitulah lazimnya cara kerja yang dijalani pada masa-masa sebelumnya. Mereka yang datang dari perguruan tinggi konvensional, tentu tidak terlepas dari persepsinya tentang apa yang lazim terjadi pada perguruan tinggi konvensional. Apalagi peraturan-peraturan yang diberlakukan kepada tenaga-tenaga akademik di lingkungan UT belum dapat dilepaskan dari peraturan yang sebenarnya disusun untuk perguruan tinggi konvensional, sebab hanya UT satu-satunya yang berbeda. Mereka yang sebelumnya bekerja sebagai pendidik di sekolah-sekolah dalam lingkungan Ditjen Dikdasmen juga harus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan perguruan tinggi yang memiliki banyak perbedaan dengan aturan-aturan di sekolah.

Mereka yang berusia muda umumnya merupakan tenaga yang cekatan, penuh dengan cita-cita dan harapan, sedikit kurang sabar

karena belum sempat mengalami pahit getirnya kehidupan nyata. Tetapi mereka inilah yang pada saatnya akan merupakan tulang punggung UT. Sekalipun ada kekurangannya, sebagian dari pemegang keputusan di UT sudah dapat diserahkan kepada kelompok ini.

Prosesnya tentu tidak mudah. Terdapat aturan-aturan kepegawaian yang dalam banyak hal bersifat “menghalangi” penempatan tenaga-tenaga muda itu pada tempat-tempat tertentu. Dengan munculnya sedikit otonomi yang diberikan, maka harapan itu disalurkan lewat celah-celah kelonggaran yang ada.

Kesempatan untuk memperoleh pendidikan lanjut di luar negeri bagi tenaga-tenaga muda memang telah membuat modal ketenagaan UT pada posisi yang cukup baik. Hanya saja tidak selamanya kita memperoleh peluang untuk menempatkan mereka pada program yang tepat benar, relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka setelah kembali ke UT. Adaptasi dengan tugas dan lingkungan kerja yang ada memerlukan upaya tersendiri.

Dalam kaitan dengan kemajemukan seperti itu, maka di UT perlu dibuat Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia. Unit ini menghimpun informasi tentang keseluruhan ketenagaan UT, membuat peta situasi sekarang, mempersiapkan rambu-rambu pembinaan karier, menangkap peluang-peluang yang tersedia dari luar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM UT, agar memudahkan para pengambil keputusan dalam memilih arah pembinaannya.

Program-program pengabdian kepada masyarakat yang diwujudkan oleh UT tentu tidak sama dengan perguruan tinggi konvensional. Program “Kuliah Kerja Nyata” yang lazim ada di perguruan tinggi konvensional, yang dimaksudkan agar para mahasiswa yang belajar di kampus juga mengenal kehidupan kerja nyata, menjadi kurang

relevan bagi UT sebab sebagian besar mahasiswa UT adalah pekerja. Bagi para pekerja ini “kerja nyata” sudah merupakan bagian dari kehidupannya sehari-hari.

Sebagai lembaga, UT melalui Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) mengabdikan diri bagi pengembangan masyarakat, di antaranya membantu pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya melalui program penyuluhan dan pembimbingan kegiatan usaha. Di samping itu, UT mempunyai program pemberdayaan masyarakat dengan metode penyuluhan, terutama terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Program pemberdayaan masyarakat oleh UT juga dilaksanakan melalui siaran TV. Dalam hal ini, Pusat Produksi Multi Media UT, selain menghasilkan program audio dan video yang digunakan untuk mendukung mata kuliah-mata kuliah tertentu, juga memproduksi bahan penyuluhan kepada masyarakat.

Dalam periode ini telah dikembangkan berbagai *program televisi*, yaitu UU Lalu Lintas (2) bekerja sama dengan Ditjen Lantas; Perpajakan (11) bekerja sama dengan Ditjen Pajak; Lingkungan Hidup (5) bekerja sama dengan Kedubes Australia; Peranan Wanita (9) bekerja sama dengan Asia Foundation; Kesehatan Makanan (4) bekerja sama dengan Ditjen POM; Pengembangan Masyarakat Desa (6) bekerja sama dengan CIDA dan CARE International; Lingkungan Hidup (4) bekerja sama dengan Asia Foundation; Tenaga Nuklir (2) bekerja sama dengan Asia Foundation dan BATAN; Pembinaan Usaha Kecil (2) yang dikerjakan sendiri.

Dalam rangka melengkapi prasarana untuk mendukung operasinya, setahap demi setahap UT menambah fasilitas yang terdapat di kampus Pondok Cabe, agar dapat memenuhi tuntutan untuk melayani mahasiswa dalam jumlah yang sangat besar. Karena tuntutan akan kemandirian di bidang pendanaan, diupayakan agar

fasilitas-fasilitas fisik tersebut dapat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan kepada pihak lain. Terdapat beberapa gedung yang pembangunannya sudah dimulai pada tahun 1991/1992, tetapi baru dapat diselesaikan pada tahun 1993. Gedung-gedung tersebut adalah: (1) gedung serba guna; (2) studio Produksi Media; (3) wisma, yang pada tahun 1993 ditambah dengan satu unit lagi, yaitu Wisma III; dan (4) gudang (yang juga ditambah gudang II dan III). Dua rumah dinas yang juga sudah dimulai pembangunannya pada tahun 1992 dapat diselesaikan pada tahun 1993. Pada tahun 1992 juga sudah dimulai pembangunan satu gedung fakultas, namun karena dana pembangunannya tidak lancar, baru pada tahun 1994 gedung pertama fakultas selesai dibangun. UT kemudian membangun gedung khusus untuk percetakan di bagian belakang kampus. Gedung percetakan tersebut selesai dibangun pada tahun 1996, begitu pula gedung perlengkapan dan gedung pelayanan mahasiswa.

Dengan selesainya bangunan-bangunan tersebut, ruang kerja UT menjadi lebih lapang dibandingkan dengan sebelumnya. Studio Multi-media sudah dapat berfungsi seperti seharusnya, karena peralatan-nya sudah datang dan dipasang. Pelayanan mahasiswa dapat dilakukan dengan lebih baik, dan tidak mengganggu tugas-tugas UT lainnya, karena ditempatkan di gedung tersendiri. Keamanan alat-alat evaluasi yang tercetak juga dapat lebih diamankan, karena ada fasilitas '*security printing*'. Sebagian prasarana untuk kantor-kantor UPBJJ sudah dan sedang dalam proses perbaikan.

Mencoba membuat perbandingan UT dengan universitas terbuka yang ada di negara-negara lain di dunia saat ini, jumlah mahasiswa UT yang kini melebihi 350.000 orang itu memang termasuk sangat besar, sehingga oleh *the Open University* yang terdapat di Inggris, UT digolongkan dalam "*The Top Ten Mega Universities of the World*". Tanpa mengingkari kenyataan bahwa masih banyak

kekurangan-kekurangannya, barangkali kita perlu bersyukur bahwa pada tahun 1996, UT sudah sanggup mengisi salah satu peran yang bermakna dalam kehidupan masyarakat Indonesia. "*1995 Development Management Award of Asia*" yang diberikan kepada UT barangkali juga dapat kita gunakan sebagai salah satu indikator hasil kerja dan jerih payah kita bersama selama ini.

Harapan untuk Masa Depan UT

Dari Sisi Kelembagaan

Sebaiknya UT melihat masa depannya dengan memanfaatkan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi yang akan menjadi sebuah suprastruktur global dalam proses pendidikan. Diperkirakan bahwa perguruan tinggi konvensional juga akan memanfaatkan teknologi ini, karena terdapat pakar-pakar yang lebih senior dalam bidang keilmuannya dibandingkan dengan yang dimiliki oleh UT. Oleh karena itu, sebaiknya posisi UT, yang dari konsep pendiriannya berperan sebagai simpul utama jaringan yang melayani pendidikan tinggi lewat media, harus dijadikan fokus perhatian. Artinya, UT betul-betul mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan mutu akademik yang handal. Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah memikat pakar-pakar dari perguruan tinggi lain untuk bekerja sama dengan UT membuat desain program layanan elektronik yang dapat digunakan sebagai bahan ajar mandiri. Seperti diketahui, bahan-bahan yang dikemas secara elektronik dengan menanamkan "kepintaran" lewat teknik komputasi, memungkinkan proses belajar mandiri secara interaktif. Kemampuan semacam itu tidak terdapat pada layanan dalam bentuk bahan belajar cetak. Sejumlah staf muda di UT juga sudah berlatih dengan menggunakan program *Authorware*.

Untuk sekadar catatan perbandingan

Tahun 1995 (saat itu saya sedang menjabat Rektor UT), selaku dosen Ilmu Fisika saya diminta oleh Universiti Sains Malaysia (USM) yang berada di Pulau Penang untuk bertindak sebagai penguji tamu bagi program studi Fisika yang diselenggarakan oleh Bagian Pendidikan Jarak Jauh yang terdapat di Universitas tersebut. Tugas saya adalah memeriksa kurikulum, bahan-bahan ajar, naskah-naskah ujian, dan sebagainya. Saat itu USM sudah memiliki infrastruktur layanan elektronik pendidikan jarak jauh yang termasuk sangat canggih, misalnya kuliah *online* pun dapat dijalankan secara mudah. Saya berkesempatan mengunjungi wilayah lain di Malaysia, yaitu Kelantan, yang mahasiswanya dilayani dari kantor pusat USM yang ada di Pulau Penang. Pesertanya pada umumnya memang mereka yang sedang bekerja, bukan lulusan baru tamatan SMA. Untuk studi fisika, meskipun pada hari-hari biasa dilakukan melalui media (umumnya media cetak), terdapat persyaratan bagi mahasiswanya supaya hadir dan belajar di kampus USM yang terdapat di Pulau Penang. Kehadiran mereka di kampus digunakan untuk melakukan praktikum fisika, serta sejumlah kesempatan tatap-muka dengan dosen. Jadi sebuah universitas yang sebelumnya hanya beroperasi secara konvensional, saat itu juga sanggup melayani mahasiswa yang domisilinya jauh melalui layanan elektronik yang dimilikinya. Tentunya hal semacam itupun dapat terjadi di Indonesia, jika prasarannya memungkinkan.

Karena mereka mengetahui bahwa saya kebetulan sedang menjabat sebagai Rektor UT, saya juga diwawancarai di studio elektronik USM, untuk memberi gambaran sedikit tentang pengalaman UT yang merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menggunakan layanan jarak jauh. Saat itu saya jelaskan bahwa UT sebaiknya dilihat bukan sebagai sebuah universitas lain, tetapi sebuah pusat jaringan pendidikan tinggi yang menggunakan layanan jarak jauh.

Operasi UT ditopang oleh semua perguruan negeri yang berada di Indonesia. Pada setiap kota yang memiliki Perguruan Tinggi Negeri terdapat Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ), yang dipimpin oleh staf akademik dari perguruan tinggi negeri setempat. Bahan-bahan belajar yang disajikan oleh UT sebagian besar ditulis oleh pakar-pakar dari pelbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Staf akademik di UT yang pada umumnya masih muda dalam kepakarannya, membantu proses penulisan agar formatnya sesuai dengan format yang mudah dipelajari secara mandiri.

Tahun 2003 (saya sudah tidak lagi menjabat sebagai Rektor UT), dalam kaitan dengan membantu Koordinator Kopertis Wilayah IV, saya mengunjungi tiga universitas konvensional yang berada di sekitar Kuala Lumpur yang masing-masing juga melakukan layanan pendidikan jarak jauh. Rupanya peta situasinya sudah berubah dari situasi di tahun 1995. Sebelas perguruan tinggi negeri yang ada di Malaysia, sedang dalam proses akan membentuk lembaga yang dinamakan *Meteor Sdn Berhad* yang dimodali bersama oleh sebelas perguruan tinggi negeri itu untuk menjalankan layanan jarak jauh. Artinya, layanan pendidikan tinggi jarak jauh itu nantinya akan diselenggarakan oleh hanya satu lembaga, dengan bahan belajar yang sumbernya berada di sebelas universitas negeri pendukung ini. Pola ini pasti membuat proses layanan menjadi sangat efisien serta mutu akademiknya tetap terjaga.

Kalau kita simak secara cermat, bukankah itu skenario yang serupa dengan konsep organisasi UT saat didirikannya? Bedanya, lembaga *Meteor Sdn Berhad* itu tumbuh dari prakarsa sebelas universitas Negeri yang berada di Malaysia. Kesebelas universitas tersebut menjadi berkepentingan karena mereka yang memodali lembaga ini, dan dengan demikian ikut menentukan arah perjalanan lembaga yang dibuat bersama tersebut.

Dari Sisi Pemilihan Jenis Media (Sistem Penyalpaaian)

Saat itu UT mengandalkan media cetak sebagai fokusnya, dan sejauh mungkin harganya murah. Dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi, yang mengubah pola hidup kemasyarakatkan secara dramatik, UT perlu secara berkelanjutan memikirkan dampak dari kemajuan teknologi tersebut dengan pilihan layanan pendidikan oleh UT. Haruskah itu seragam, kalau komposisi para pengguna layanan UT memang tidak seragam coraknya, kemampuan finansialnya, domisilinya, dan seterusnya?

Pernah terjadi pertemuan bersama dengan negara tetangga kita Australia, yang dalam hal layanan pendidikan tinggi dapat digolongkan berhasil. Tidak berarti kita harus meniru apa yang dilakukan mereka, sebab konteks sosialnya berbeda. Bahkan ketika itu studi bersama tentang objek keragaman masyarakat yang harus dilayani oleh UT juga menarik bagi tetangga kita ini. Inilah kegiatan yang sebaiknya menjadi bahan penelitian kelembagaan UT. Rasanya tidak tepat apabila UT sekadar mencontoh kegiatan-kegiatan penelitian yang berjalan di perguruan tinggi konvensional. Kalau kajian ini benar-benar menjadi fokus kegiatan penelitian para staf akademik UT, maka ciri khas UT dapat menjadi "bendera yang dikibarkan". Demikianlah sebabnya diadakan Pusat Penelitian Media.

Pusat Studi Indonesia sebaiknya berfokus sebagai semacam basis data informasi yang khas tentang Indonesia, yang telah dihasilkan oleh pelbagai sumber yang ada. Untuk tidak disalahtafsirkan, kumpulan informasi tidak sama dengan sekadar "gudang" informasi. Pusat Studi ini dapat "merangkai" hasil-hasil penelitian yang sudah ada, sehingga menjadi simpulan-simpulan yang bermakna.

Dari Sisi Peranan UT sebagai “Pendidikan Terbuka”

Perlu dipahami sekali lagi, makna istilah “terbuka” yang terkait dengan UT. Dewasa ini sebagian masyarakat masih melihat UT dengan tekanan kata “universitas”. Dan lebih jauh lagi, seringkali yang diartikan adalah “universitas” sebagai lembaga pemberi gelar, atau predikat kualifikasi akademik lainnya. Jadi UT lebih sering dilihat sebagai lembaga “pemberi gelar dengan cara studi jarak jauh”. Padahal pada kenyataannya, UT juga diminati oleh mereka yang sudah bekerja, yang belum tentu gelar atau predikat akademiknya akan mempengaruhi kepangkatan dalam pekerjaannya. Mereka belajar di UT karena ingin mendapatkan pengetahuan baru, ingin membuka cakrawala wawasannya, yang tentunya akan membantu pelaksanaan tugas yang diembannya sehari-hari.

Dalam konteks sosial di masa depan, hendaknya kita juga memandang kehadiran UT sebagai *perwujudan* dari asas *belajar sepanjang hayat*. Perkembangan tatanan masyarakat yang lebih sering mengubah pola lapangan kerja yang tersedia, mengharuskan warga kita menyesuaikan kemahirannya sewaktu-waktu diperlukan. Pengetahuan serta keterampilan baru harus dipelajari dalam perjalanan hidupnya jika tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Inilah akar dari makna istilah “terbuka” yang terdapat di UT. Mereka dapat menentukan kecepatan proses belajar yang sesuai dengan waktu yang tersedia, memilih mata kuliah untuk jenis kemahiran yang diinginkannya, dan sebagainya, tanpa harus mencari gelar atau predikat akademik lainnya.

Kendala yang Dihadapi

Dari sisi kelembagaan, terasa bahwa kehadiran UT sebagai pusat jaringan layanan pendidikan jarak jauh, dalam prakteknya belum dirasakan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ada. Meskipun kerja sama formal antara UT dengan setiap PTN yang ada tidak mengalami gangguan, tetapi kehadiran UPBJJ di kota tempat PTN berada tidak selamanya dianggap sebagai bagian dari kegiatan PTN yang bersangkutan. Jadi perlu diadakan usaha yang cukup banyak untuk meyakinkan setiap PTN bahwa UT dengan UPBJJ-nya bersedia untuk berperan sebagai komponen layanan jarak jauh dari kegiatan PTN yang bersangkutan. Jumlah PTN di Indonesia cukup besar, dan harus diakui bahwa terdapat keragaman dalam tingkat pertumbuhannya sebagai lembaga akademik. Bukan sesuatu yang mudah rasanya untuk meyakinkan bahwa komponen-komponen yang tersedia di UT dapat membantu upaya pendidikan yang mereka jalankan.

Proses peremajaan bahan belajar UT merupakan kendala yang akan dirasakan amat berat. Sasaran UT pada awal berdirinya terfokus pada layanan bagi mereka yang baru lulus dari SMA yang tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar pada perguruan tinggi konvensional. Ada sekitar 500 jenis mata kuliah konvensional yang dikemas menjadi bahan cetak yang disebut "modul", ditambah dengan beberapa suplemen bahan audio dan video. Semuanya praktis ditujukan agar sejajar dengan apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi konvensional untuk meraih gelar sarjana atau predikat akademik lainnya seperti diploma-1, diploma-2, dan sebagainya.

Dengan peta peminat UT yang jauh berbeda dengan perkiraan semula, peremajaan bahan ajar ini memerlukan perubahan yang sifatnya *mendasar*, bukan sekadar tambal sulam. Menghimpun pakar-pakar yang dapat membantu perwujudan peremajaan bahan

ajar ini bukan sesuatu yang mudah, apalagi dengan kemampuan dana yang sebenarnya sedikit. Angka 50 milyar tampaknya besar, tetapi kalau dibagi dengan lebih dari 350 ribu mahasiswa yang harus dilayani, nilai rata-ratanya hanya kurang 150 ribu rupiah per mahasiswa per tahun.

Layanan pembelajaran “terbuka” juga pasti akan banyak saingannya. Jadi kualitas layanan UT (bukan hanya layanan administratif, tetapi juga proses pembelajarannya) harus siap bertanding dengan pesaing lainnya. Mestinya UT yang pernah ditunjuk sebagai tempat Pusat Antar Universitas untuk pengembangan proses pembelajaran yang efektif, harus siap meremajakan kemampuannya untuk bersaing dengan layanan dari lembaga yang lain. □

UNIVERSITAS TERBUKA

PERIODE 1996-2000

Bambang Sutjiatmo

Pengantar

Sebelum menjabat sebagai Rektor Universitas Terbuka (UT), saya adalah Pembantu Rektor I Universitas Terbuka. Saya adalah guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Dengan menjabat sebagai Pembantu Rektor UT saya sudah mendapatkan pengalaman bekerja di UT selama beberapa tahun, sebelum memimpin UT. Di bawah ini adalah tulisan saya tentang UT dalam kurun waktu masa jabatan saya, yaitu antara tahun 1996-2000.

Sistem pendidikan tinggi jarak jauh merupakan sistem pendidikan pilihan yang dapat memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan tinggi. Walaupun banyak keterbatasannya, UT telah banyak berperan dalam penyediaan kesempatan belajar bagi masyarakat Indonesia, di mana pun mereka berada. Di samping para lulusan baru dari SLTA, banyak lulusan SLTA yang telah bekerja dan yang pada waktunya tidak memperoleh kesempatan

an belajar, dapat mengikuti pendidikan tinggi melalui UT. Di samping itu, masyarakat dapat memanfaatkan UT untuk meningkatkan pengetahuan pribadinya, tanpa harus terdaftar sebagai mahasiswa. Mereka dapat mempelajari berbagai bahan ajar UT sesuai kebutuhan mereka.

Dengan penerapan sistem pendidikan jarak jauh yang memungkinkan standardisasi materi ajar dan penyediaan kesempatan belajar pendidikan tinggi yang sangat luas, UT dapat menjadi salah satu perekat kesatuan Indonesia.

Visi, Misi, dan Kebijakan ke-4: Menjadi Pusat Unggulan

Rencana Strategis UT 1998-2008 menyatakan visi, misi dan tujuan UT sebagai berikut.

Visi UT adalah, bahwa UT menjadi pusat unggulan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan dan penyebaran informasi pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di Indonesia. Hal itu berarti, bahwa UT harus mampu menjadi model penyelenggaraan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh yang berkualitas tinggi melalui pemanfaatan teknologi dan jaringan, serta menjadi perguruan tinggi terdepan dalam penelitian, pengembangan dan penyebaran informasi tentang berbagai aspek pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh.

Berlandaskan visi tersebut, UT menetapkan misi yang harus diemban, sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas SDM Indonesia dalam berbagai bidang keahlian.
2. Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi.

3. Meningkatkan akuntabilitas pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh, sehingga program UT dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas.
4. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi berkelanjutan.
5. Mengembangkan dan membina jaringan kemitraan dengan berbagai lembaga berdasarkan asas kerja sama yang saling menguntungkan
6. Memanfaatkan teknologi yang sesuai dalam pelaksanaan tugas pengelolaan pendidikan dan pelaksanaan proses belajar.
7. Berperan aktif dalam penelitian, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Melakukan penelitian, pengembangan, dan penyebaran pengetahuan pendidikan terbuka dan jarak jauh secara berkesinambungan.
9. Menghasilkan berbagai program instruksional berkualitas tinggi sesuai kebutuhan masyarakat.
10. Membantu menjembatani kesenjangan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dengan menghasilkan program instruksional baku.

Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut, UT berpedoman pada asas berikut.

- a. Asas kualitas.
Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, dan penyebaran informasi pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh selalu mengacu pada kualitas tinggi.
- b. Asas pemerataan.
Asas ini mencakup dua sisi. Pertama, seluruh program pendidikan harus mampu menjangkau dan dijangkau oleh masyarakat

luas dari berbagai strata sosial ekonomi dan terlepas dari kendala ruang dan waktu. Kedua, upaya pengembangan UT harus memberikan kesempatan, tugas dan tanggung jawab yang merata kepada seluruh staf UT sesuai dengan fungsi dan kemampuannya.

c. Asas relevansi.

Seluruh program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

d. Asas efisiensi.

Upaya pengembangan UT dilakukan untuk memperoleh hasil maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan jaringan secara optimal.

e. Asas kemandirian.

Dalam melaksanakan fungsinya, UT selalu menggali dan meningkatkan potensi sumber daya institusi secara kreatif dan inovatif.

f. Asas kemitraan.

Untuk peningkatan pelayanan pendidikan, UT selalu mengembangkan dan membina jaringan kerja sama dengan lembaga lain atas dasar kebersamaan yang saling menguntungkan.

g. Asas akuntabilitas.

Seluruh program, penyelenggaraan, dan produk UT harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas.

Tujuan UT untuk mencapai misinya adalah sebagai berikut.

1. Tertatanya sistem pengelolaan proses pembelajaran melalui pendidikan terbuka dan jarak jauh.

2. Peningkatan relevansi dan kualitas dalam pengembangan program pendidikan dan kurikulum, sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat.
3. Tercapainya pemerataan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi.

Garis besar pelaksanaan kegiatan untuk melaksanakan misi berdasarkan asas kegiatan adalah sebagai berikut.

Peningkatan Mutu dan Potensi SDM

Studi Formal

Pembinaan dan pengembangan dosen UT dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu studi lanjut dan pelatihan. Sejak tahun 1997, ketika Indonesia dilanda krisis moneter, kesempatan untuk studi lanjut bidang PTJJ (yang hanya ada di luar negeri) menjadi tidak ada. Dengan demikian, kesempatan sekolah lanjut hanya dibuka bagi program S-2 dan S-3 dalam negeri, terutama dalam bidang keilmuan, termasuk bidang teknologi pendidikan (yang menjadi landasan bagi PTJJ). Dalam jumlah kecil, selama tahun 1997 sampai tahun 2000, UT beruntung memperoleh kesempatan untuk mengirim staf sekolah lanjut di luar negeri untuk S-2 dalam bidang pendidikan dasar melalui proyek PGSD.

Publikasi Ilmiah

Untuk meningkatkan kemampuan penelitian staf dan untuk penyebaran ilmu dan pengetahuan, dibentuk forum publikasi ilmiah, yaitu dalam bentuk seminar ilmiah dan jurnal. Setiap tahun, setiap fakultas diberi kesempatan untuk menyelenggarakan seminar ilmiah.

Seminar tersebut diharapkan berbentuk publikasi hasil penelitian ilmu dan pengetahuan mikro. Kesempatan itu belum dapat sepenuhnya dipenuhi. Di samping itu, pada setiap penyelenggaraan acara wisuda, yaitu sehari sebelum hari wisuda, diadakan seminar dengan calon wisudawan sebagai peserta seminar. Hal itu diadakan, selain untuk menambah wahana bagi staf pengajar untuk menyampaikan hasil penelitiannya, juga untuk memberi informasi ilmiah kepada calon wisudawan.

Forum ilmiah lainnya adalah *jurnal*. Jurnal yang telah lama terbit adalah Jurnal PSI. Setelah jurnal PSI yang telah lama terbit, dalam 1998 – 2000, UT menerbitkan tiga jurnal. Dengan demikian, saat ini UT memiliki empat jurnal, yaitu Jurnal Studi Indonesia; Jurnal Pendidikan; Jurnal Matematika, Sains, dan Teknologi; dan Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh.

Kenaikan Jabatan Fungsional

Kenaikan jabatan fungsional dilakukan dengan menggunakan peraturan penilaian angka kredit jabatan sebagaimana diatur dalam Kepmenpan No. 59/Menpan/1987. Namun, aturan Kepmenpan itu tidak terlalu cocok untuk lingkungan UT yang menerapkan sistem PTJJ. Oleh karena itu, UT menyusun rincian kegiatan dan angka kredit jabatan yang disesuaikan dengan sistem PTJJ. Upaya penyusunan ini dimulai pada akhir tahun 1998, tetapi dihentikan pada tahun 1999 berhubung keluarnya Kepmenwasbangpan No. 38/Kep/MK.Waspan/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, yang memperbarui aturan sebelumnya. Dengan keluarnya aturan baru ini, pembahasan terhadap draft rincian kegiatan dan angka kredit jabatan untuk UT ditunda, dengan harapan untuk disesuaikan dengan aturan baru. Namun demikian, sampai saat ini petunjuk pelaksanaan terhadap aturan baru tersebut

belum keluar, sehingga perubahan draft rincian kegiatan dan angka kredit jabatan untuk UT belum dapat dilakukan. Sementara aturan baru belum dapat digunakan, penilaian terhadap dosen UT untuk kenaikan jabatan fungsional dilakukan dengan menggunakan rincian kegiatan dan angka kredit jabatan yang lama, yaitu Keputusan Rektor UT no. 109/PT45/KEP/1992.

Proses penilaian kenaikan jabatan fungsional mendapat perhatian dan selalu dijaga kualitasnya. Penekanan penilaian dilakukan pada kelompok karya penelitian. Setiap karya ilmiah dinilai oleh dua orang penilai. Administrasinya pun mendapat perhatian, sehingga proses tidak memakan waktu yang lama. Untuk menjaga kredibilitas staf pengajar UT, proses penilaian usulan kenaikan jabatan harus *selalu* dilakukan dengan *ketertiban tinggi*. Selama 4 tahun, yaitu tahun 1996 – 2000, 348 dosen naik jabatan, bahkan beberapa orang naik loncat tingkat. Dilihat dari jumlah dosen di kantor pusat sebanyak 355 orang, dapat dikatakan bahwa rata-rata setiap dosen dapat naik jabatan dalam 4 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa proses kenaikan jabatan telah berjalan dengan baik.

Peningkatan Mutu Proses Pendidikan

Ketertiban Registrasi

Registrasi merupakan langkah awal utama dalam proses belajar. Untuk menghindari kesulitan dalam administrasi belajar, sejak 1996 diberlakukan ketentuan, bahwa *setiap mahasiswa harus melakukan registrasi sendiri*, termasuk mahasiswa kerja sama. Kemudian, pada tahun 1998 registrasi ujian ulang dihilangkan, sehingga hanya dikenal registrasi pertama dan registrasi mata kuliah. Hal itu dilakukan untuk menyederhanakan administrasi dan untuk memenuhi biaya ujian yang tidak dapat dipenuhi oleh biaya ujian

ulang. Sejak itu, biaya ujian ulang sama dengan biaya registrasi mata kuliah. Komponen formulir registrasi yang mengalami perubahan berarti adalah dengan memasukkan tanda setor BRI yang telah tercetak nomor rekening UT. Hal ini dilakukan untuk menjamin masuknya SPP ke rekening UT.

Aspek lain yang juga mengalami perubahan adalah tempat penjualan formulir registrasi. Semula formulir registrasi hanya dijual di Kantor Pos Penjual Formulir (KPPF). Sejak tahun 1998, formulir registrasi juga dijual di UPBJJ-UT. Di samping itu, sejak tahun 1996, diupayakan agar formulir registrasi senantiasa harus tersedia dalam jumlah yang cukup di KPPF di kota UPBJJ-UT. Selain itu dibuat kesepakatan dengan PT Pos Indonesia, agar bila ada KPPF yang kehabisan formulir registrasi, Kantor Pos Wilayah harus dapat mengadakan mutasi formulir registrasi dari satu KPPF ke KPPF lain.

Berbagai perubahan itu telah lebih menyederhanakan pengelolaan formulir registrasi. Namun timbul pula gejala baru, yaitu adanya pemalsuan formulir registrasi yang terjadi di beberapa daerah. Atas dasar itu, pada tahun 2000 diputuskan untuk tidak lagi menjual formulir registrasi mata kuliah. Harga formulir registrasi itu diganti menjadi biaya registrasi yang dimasukkan sebagai salah satu komponen biaya belajar mahasiswa UT.

Masalah yang saat itu masih dihadapi adalah sebagai berikut.

- Ketersediaan data mahasiswa secara akurat pada waktu yang sesuai, belum tercapai dengan baik.
- Ketersediaan formulir registrasi pada waktu yang sesuai, di tempat yang sesuai, masih belum tercapai dengan baik.
- Pengiriman data mahasiswa dari UPBJJ-UT ke UT Pusat acapkali masih terlambat.

- Registrasi mahasiswa belum berlaku sepanjang waktu dalam arti yang sesungguhnya.

Salah satu pemecahan yang segera dilakukan dalam rangka memecahkan berbagai masalah tersebut secara sekaligus adalah dengan penyediaan dan pemanfaatan sambungan *online* antara UPBJJ-UT dengan UT Pusat sebaik mungkin.

Alih Kredit

Alih kredit sangat penting bagi UT, karena hal itu memungkinkan UT untuk menjadi lebih terbuka bagi beragam lapisan masyarakat yang ingin melanjutkan proses pendidikannya, melalui proses penghargaan terhadap pengalaman dan perolehan akademik sebelumnya. Alih kredit di UT terdiri dari dua jenis, yaitu alih kredit dari perguruan tinggi lain ke UT, dan alih kredit dari UT ke UT. Pada tahun 1998 dibuat dan diberlakukan *Pedoman Alih Kredit* berdasarkan standar akademik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem alih kredit ini menampung alih kredit lintas perguruan tinggi, sehingga proses alih kredit di UT *bukan* lagi merupakan suatu proses negosiasi atau formalitas.

Peningkatan Kualitas Bahan Ajar

Untuk meningkatkan kualitas bahan ajar dibentuk *Kelompok Kajian Bahan Ajar*. Sekitar 60 orang dosen UT bergabung dalam kelompok ini, dan bertugas untuk mengkaji beragam aspek bahan ajar UT, mulai dari model, landasan teori, media, komponen, perwajahan, validasi isi, keterbacaan, serta model pengembangannya. Namun demikian, untuk tetap menjaga kesinambungan proses pendidikan di UT, proses pengembangan bahan ajar di masing-masing fakultas

sesuai dengan kebutuhan tetap dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur yang sudah ada.

Kelompok Kajian Bahan Ajar juga mengkaji kemungkinan penerapan model *tim pengembang mata kuliah (tim mata kuliah)* yang sudah berhasil digunakan di berbagai institusi PTJJ di dunia. Pada dasarnya unsur utama dalam *tim mata kuliah* adalah penanggungjawab mata kuliah, ahli materi, ahli desain instruksional, dan ahli media. *Tim mata kuliah* dapat diperluas lagi dengan melibatkan unsur penelaah materi, penelaah bahasa, kelompok penerbitan (pengetik, penata letak, editor ketikan), dan calon pemakai bahan ajar (mahasiswa, tutor). Di samping itu, peningkatan kualitas bahan ajar dilakukan dengan kegiatan revisi bahan ajar cetak, penulisan bahan ajar untuk program baru, penulisan suplemen bahan ajar, penerbitan bahan ajar audio dan video, dan penulisan bahan ajar melalui jaringan internet.

Peningkatan Kualitas Distribusi Bahan Ajar

Distribusi bahan ajar merupakan kegiatan yang cukup pelik. Kepelikan ini tidak hanya dalam arti distribusi dan pengadaannya, tetapi lebih-lebih dalam hal pengadaan bahan ajar tepat waktu dan tepat tempat, dalam jumlah yang sesuai. Sering terjadi kekurangan bahan ajar di UPBJJ-UT. Kekurangan ini disebabkan oleh sukarnya pengadaan dan distribusi yang sesuai. Misalnya, pengadaan dan distribusi bahan ajar untuk program nonreguler yang dilakukan atas dasar kontrak kerja antara UT dengan mitra kerja sangat tergantung pada kontrak kerja. Sedangkan kontrak tersebut, terutama kontrak dengan Pemerintah Daerah, baru dapat dilakukan pada pertengahan tahun anggaran, yang disebabkan oleh berbagai kelemahan birokrasi. Di samping itu, tahun anggaran tidak sesuai dengan tahun ajaran. Untuk mengatasi hal itu, UT harus melakukan investasi yang

cukup besar supaya bahan ajar tersedia di gudang UT Pusat dan UPBJJ, jauh sebelum penandatanganan kontrak kerja. Ini berarti UT harus memiliki dana yang memadai untuk investasi, yang pada dasarnya dalam sistem penganggaran belanja negara sukar dilakukan.

Hal lain yang diperhatikan adalah kerja sama dengan PT Pos Indonesia atau lembaga ekspediter lainnya. Sejak tahun 1995, UT Pusat tidak lagi melayani pesanan bahan ajar langsung dari mahasiswa. Seluruh pesanan bahan ajar dilayani oleh UPBJJ. Kebijakan ini telah dapat menghemat dana pengiriman bahan ajar yang cukup berarti. UT Pusat menjamin bahan pengiriman bahan ajar ke UPBJJ-UT, dan mahasiswa dapat secara langsung (baik individual maupun kelompok) membeli bahan ajar ke UPBJJ-UT.

Pengiriman bahan ujian ke setiap lokasi ujian telah dapat dilakukan dengan baik. Keluhan kekurangan naskah, yang menjadi keluhan utama dalam pelaksanaan ujian beberapa tahun sebelumnya, sudah dapat diatasi. Penggandaan naskah melalui foto kopi oleh UPBJJ karena adanya kekurangan naskah sudah sangat jauh berkurang dan bahkan di beberapa tempat, hal itu tidak ada sama sekali. Keberhasilan itu tidak lain disebabkan makin akuratnya data peserta ujian yang tersedia di UT Pusat. Di samping itu, kerja keras dari segenap individu dan lembaga yang terkait dengan naskah ujian memungkinkan terjadinya perbaikan itu. Berbagai teknik untuk menghitung jumlah naskah ujian secara lebih akurat telah pula diterapkan di Pusat Pengujian, sehingga efisiensi pengadaan dan pengiriman naskah jauh meningkat.

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tutorial

Untuk membantu pengendalian mutu tutorial, UT menyediakan program akreditasi tutor, yaitu PAT-UT. Secara teratur, tutorial tatap

muka diberikan kepada mahasiswa PGSD. Sementara untuk mahasiswa reguler, tutorial tatap muka hanya diberikan atas permintaan kelompok belajar mahasiswa. Tutorial tertulis dilakukan oleh beberapa dosen UT di FKIP dan FMIPA melalui surat-menyurat langsung dengan mahasiswa. Sementara itu, tutorial melalui radio juga berlangsung, serta pengembangan tutorial berbantuan komputer juga dilakukan.

Pada tahun 1998 dilakukan uji coba peningkatan kuantitas tutorial. Setiap UPBJJ diwajibkan mengadakan tambahan satu tutorial dengan biaya dari UT. Tahun berikutnya, UPBJJ yang menyelenggarakan tutorial dengan baik diberi tambahan kesempatan menyelenggarakan tutorial dengan biaya UT. Untuk mengevaluasi uji coba itu dan untuk meningkatkan kualitasnya, pada tahun 1999 dibentuk Kelompok Kajian Tutorial yang secara khusus bertugas untuk menelaah berbagai kemungkinan pelaksanaan tutorial (tatap muka, radio, tertulis, dan berbasis internet).

Peningkatan Mutu dan Penyelenggaraan Ujian

Pada tahun 1998 dibentuk Kelompok Kajian Ujian yang bertugas pada upaya peningkatan kualitas butir soal, pemilihan jenis ujian yang sesuai untuk keterampilan tertentu, pengkajian kemungkinan penerapan ujian melalui komputer, serta menggiatkan kembali aktivitas pengembangan bank soal. Pengembangan bank soal UT dimulai pada tahun 1996. Bank soal dimaksudkan sebagai tempat penyimpanan butir soal yang sudah dikalibrasi, sehingga dapat ditemukan kembali untuk dirakit menjadi naskah ujian pada masa ujian berikut. Hal itu akan sangat meningkatkan efisiensi penyiapan naskah ujian. Karena berbagai kendala, upaya itu baru aktif kembali pada tahun 1998 melalui Kelompok Kajian Ujian.

Untuk mengatasi kecurangan mahasiswa, terutama yang berkenaan dengan menyontek dan atau bekerja sama, dilakukan analisis pola jawaban dari lembar jawaban ujian mahasiswa secara manual. Sekelompok mahasiswa yang banyak membuat jawaban salah yang sama diberi nilai tidak lulus. Pada awalnya, yaitu tahun kuliah 97.2, analisis pola jawaban secara manual dilakukan kepada semua lembar jawaban ujian. Walaupun upaya ini cukup efektif menjarung kecurangan dalam ujian, upaya ini menghambat pengolahan nilai mahasiswa, sehingga DNU mahasiswa menjadi terlambat. Oleh karena itu, kemudian analisis pola jawaban dilakukan terutama jika beredar kunci jawaban di lapangan dan jika terdapat laporan negatif dari pemantau ujian.

Sanksi kecurangan akademik juga diberikan kepada staf. Beberapa staf akademik dan beberapa staf administrasi yang terbukti telah melakukan kecurangan akademik telah dijatuhi hukuman administrasi berat.

Yudisium

Proses yudisium yang dilakukan sebelum tahun 1995 belum terkoordinasi dengan baik. Masing-masing fakultas melakukan yudisium sendiri-sendiri dalam hal jadwal dan prosedur. Pada tahun 1995 dibuat Prosedur Yudisium disertai pembentukan tim yudisium pada tingkat universitas yang terdiri dari berbagai unsur yang terkait dan bertanggung-jawab terhadap hasil yudisium, misalnya fakultas, Pusat Komputer, Pusat Pengujian, dan BAAKRENSI. Penetapan dan keputusan yudisium tetap merupakan wewenang fakultas masing-masing, namun pembentukan tim yudisium ini dapat membuat prosedur yudisium lebih jelas, benar, singkat, dan efisien. Diskusi yang terjadi antaranggota tim merupakan wahana untuk saling mengontrol dan mengecek untuk memperoleh penetapan yudisium

yang benar. Pembentukan tim yudisium juga meningkatkan efisiensi waktu, dalam arti jadwal yudisium menjadi sinkron antar fakultas. Pada akhirnya, prosedur yudisium yang baru ini menjadikan aktivitas yudisium sebagai aktivitas integral dalam sistem fakultas, sehingga kesalahan administratif relatif dapat dikurangi.

Bangunan Fisik

Dalam keterbatasan anggaran, UT telah berhasil menyelesaikan pembangunan sebagian gedung fakultas dan perpustakaan. Di samping itu, beberapa bangunan juga telah direnovasi, yaitu antara lain puskom, pusjian, dan studio.

Sebagian besar fasilitas fisik kantor UPBJJ adalah pinjaman (dan atau sewa) dari perguruan tinggi pembina. Ketika SPG/SGO di integrasikan ke Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) (sekitar tahun 1992), UT memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan ruangan-ruangan tersebut untuk menjadi kantor UPBJJ. Dari 32 UPBJJ (saat itu), baru sembilan UPBJJ yang ditindaklanjuti sehingga berhasil memperoleh pengalihan pemilikan dan pemanfaatan ruangan SPG/SGO menjadi kantor UPBJJ. Sementara itu, UT juga berupaya memenuhi kebutuhan kantor UPBJJ yang lain dengan tetap meminjam kepada perguruan tinggi pembina maupun membeli tanah dan membangun sendiri. Pada tahun 2000, kantor UPBJJ Surabaya dan Lampung milik UT diresmikan penggunaannya.

Peningkatan Mutu Program Pendidikan

Kurikulum Baru

Untuk meningkatkan mutu program pendidikan, UT telah mengganti kurikulum lama menjadi kurikulum 2000. Kurikulum itu sesuai

dengan kurikulum nasional dan telah diberlakukan pada tahun 2000. Ciri utama kurikulum 2000 antara lain adalah sebagai berikut.

- Sejak semester 2000.1 berlaku satu kurikulum.
- Penggunaan mata kuliah bersama dan penggunaan bahan ajar bersama antarprogram studi, berdasarkan pada prinsip efektivitas agar jumlah mata kuliah tidak terlalu banyak dan penghematan pengembangan bahan.
- Aturan transisi dibuat agar tidak merugikan mahasiswa, yaitu bahwa semua hasil belajar mahasiswa diakui.

Di samping itu, Kurikulum 2000 mempunyai sifat berikut.

- Tidak memiliki banyak mata kuliah berseri atau bersyarat.
- Tidak memiliki banyak mata kuliah berpraktikum.
- Beban studi per mata kuliah diperbesar (sks besar).
- Mata kuliah pilihan tidak terlalu banyak.

Penertiban Program Pendidikan

Pada tahun 1997, program sertifikat bahasa Inggris dihentikan. Sebelumnya, program tersebut dikelola oleh Lembaga Pengembangan Program Pengajaran Bahasa (LP3B) yang dibentuk oleh UT. Semua aturan akademik ditentukan sendiri oleh LP3B. Usaha UT untuk menertibkannya, yaitu agar semua aturan akademik dan aturan administrasi disesuaikan dengan aturan UT tidak berhasil. Karena itu, program sertifikat tersebut dihentikan.

Evaluasi Diri

Sebagai landasan untuk memperbaiki semua kegiatan akademik, administrasi, dan pengelolaan UT, pada tahun 1999 dilakukan

evaluasi diri UT. Semua elemen UT dilibatkan dalam kegiatan itu. Hasil evaluasi diri ini telah diterbitkan oleh UT pada tahun 2000.

Pengembangan Program Studi

Pada tahun 2000, UT menyampaikan usulan pembukaan beberapa program studi kepada Depdiknas, yaitu

- Program Studi Teknologi Pendidikan (S-1)
- Program Studi Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan (S-1)
- Program Studi Pendidikan Dasar (S-1)

Usulan Program Studi Teknologi Pendidikan, sampai akhir tahun 2000, belum mendapat jawaban dari Depdiknas. Tembusan penilaian Konsorsium Ilmu Pendidikan (KIP) tentang usulan itu menyatakan keberatan, karena kurikulumnya berorientasi pada konsep *full educational technology* (teknologi pendidikan penuh) dengan memasukkan paket pendidikan guru sekolah dasar sebagai isi dimensi teknologi pendidikan tersebut. Tampaknya, KIP masih melihat *empty educational technology* (teknologi pendidikan kosong) sebagai kecenderungan utama teknologi pendidikan. Sedangkan usulan Program Studi Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan saat itu masih dalam pertimbangan Depdiknas.

Sementara itu, usulan Program Studi Pendidikan Dasar setingkat S-1 telah mendapat lampu hijau dari Depdiknas untuk dilanjutkan. Pada akhir tahun 2000, usulan lengkap itu telah dapat disampaikan kepada Depdiknas.

Selain itu, UT pada tahun 2000 juga merencanakan pembukaan Program Magister Manajemen. Tim persiapan untuk itu, yang dipimpin oleh Dekan FE, telah dibentuk tahun 1999. Pembahasan pertama di tingkat UT dari hasil tim tersebut menunjukkan, bahwa

usulan dinilai masih sangat terlalu sederhana dan belum menunjukkan ciri dan tata cara belajar jarak jauh. Usulan tersebut belum memenuhi syarat. Tim diminta untuk bekerja lebih keras dan lebih seksama dengan melibatkan secara sungguh-sungguh semua satuan pendukung dan para anggota tim yang berkeahlian pendidikan jarak jauh.

Pengelolaan Anggaran

UT didukung oleh dana yang berasal dari Dana Rutin (DIK), Dana Pembangunan (DIP), dan Dana Masyarakat (DIK-S). Jumlah dana tahun 1996 s.d. 2000 berkisar 69 milyar s.d. 74 milyar rupiah per tahun anggaran. Kecilnya dana pembangunan (DIP) yang diperoleh UT, menyebabkan UT menjadi kurang leluasa melakukan program pengembangan dan program inovatif; sedangkan dana yang berasal dari mahasiswa (DIK-S) harus dikembalikan lagi kepada mahasiswa dalam bentuk penyelenggaraan proses pendidikan.

Dana UT selama tahun anggaran 1996/1997 s.d. 1999/2000 dipergunakan untuk melayani sekitar 400.000 mahasiswa. Sekitar 65% berasal dari DIK-S sedangkan sisanya sekitar 35% berasal dari pemerintah (dalam bentuk DIK dan DIP). Dalam situasi ekonomi yang sangat berat saat itu, hampir tidak mungkin bagi UT untuk menaikkan dana masyarakat (DIK-S) yang hampir seluruhnya berupa sumbangan pendidikan dan hasil penjualan produk akademik UT. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan adalah meningkatkan efisiensi dan ketertiban dalam pengelolaan dana.

Semua satuan unit kerja UT ikut serta merancang rencana program dan anggaran. Mereka juga mempunyai akses untuk turut serta mengawasi penggunaan dana UT. Proses penyusunan rencana dan program UT dilakukan melalui koordinasi antara Tim Pengembangan UT, Tim SP-4 dan Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi

(Rensi) berdasarkan arahan garis besar kegiatan dari pimpinan. Arahan itu umumnya berupa pemantapan kegiatan rutin dan pengembangan kegiatan proses belajar. Rencana itu kemudian mendapat pertimbangan Senat UT sebelum disampaikan kepada Depdiknas.

Untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, pada tahun 1998 telah diterbitkan Pedoman Satuan Kegiatan dan Satuan Biaya Kegiatan. Satuan kegiatan memuat rincian kegiatan, mana kegiatan rutin dan mana kegiatan tambahan dalam suatu kegiatan tertentu. Sedangkan satuan biaya memuat satuan honor, konsumsi, akomodasi dan lainnya.

Pelaksanaan rencana anggaran yang telah disetujui Depdiknas dilakukan melalui rapat Dewan Review. Hal itu dilakukan untuk efektivitas penggunaan anggaran, karena rencana anggaran mencantumkan satuan kegiatan garis besar, tidak terinci. Setiap pelaksanaan anggaran oleh unit diawali dengan usulan unit dan kemudian diperiksa oleh *Review Board* dengan berpedoman pada satuan kegiatan dan satuan biaya. Untuk membantu *Review Board* telah dibentuk dua tim teknis, yaitu Tim Teknis Bangunan dan Tim Teknis Komputer.

Pengawasan fungsional dilakukan oleh BPK, BPKP-Pusat, BPKP-DKI Jakarta, dan Inspektorat Jenderal Depdikbud/Depdiknas. Manajemen UT pada setiap pemeriksaan, yang dilakukan lebih kurang 2 (dua) kali setahun, selalu menindaklanjuti semua temuan sebagai hasil dari pemeriksaan/pengawasan lembaga tersebut. Hasil temuan dari badan/lembaga pengawasan tersebut memberikan masukan untuk meningkatkan dan memperbaiki kekurangan, kekeliruan dan penyimpangan mekanisme pengelolaan atau tata laksana kepegawaian, keuangan, fasilitas fisik dan operasional pelayanan akademik. Perbedaan persepsi tentang penerapan aturan dan

kekhususan sistem pendidikan jarak jauh antara Tim Pemeriksa dengan Penanggung jawab Unit yang diperiksa, seringkali dapat pula menimbulkan penilaian yang kurang sesuai dari pihak pemeriksa. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan tukar-menukar informasi dan pendapat antara kedua belah pihak.

Pengambilan Keputusan

Struktural

Secara struktural, koordinasi pengambilan keputusan pelaksanaan langkah operasional dilakukan melalui jalur komunikasi berikut.

- a. Rapat Pimpinan (Rapim) : Rektor dengan para Pembantu Rektor.
Rapat ini dipimpin Rektor dan merupakan koordinasi pelaksanaan kegiatan di tingkat UT.
- b. Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim): Rektor, para Pembantu Rektor, para Dekan dan para Ketua Lembaga.
Rapat ini dipimpin Rektor dan membahas antara lain hal berikut.
 - Koordinasi pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat
 - Pengambilan keputusan tentang aturan atau pedoman baru
 - Pengambilan keputusan tentang penugasan SDM
 - Evaluasi kegiatan
- c. Rapat Koordinasi Operasional: para pembantu rektor, para pimpinan fakultas, para kepala biro dan para pimpinan satuan.
Rapat ini dipimpin PR IV dan merupakan koordinasi pelaksanaan registrasi; proses dan evaluasi belajar; dan distribusi.
- d. Rapat Dewan Review: Rektor, para PR, Ka. BAUK.

Rapat ini merupakan koordinasi pelaksanaan anggaran. Kegiatan dengan anggaran lebih dari pada lima juta rupiah dinilai dalam rapat ini. Untuk membantu pimpinan, telah dibentuk dua tim teknis, yaitu Tim Teknis Bangunan dan Tim Teknis Komputer.

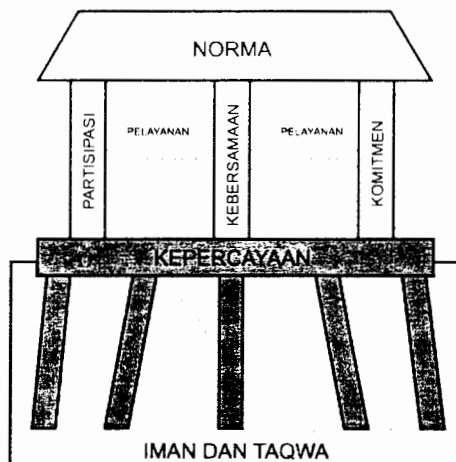
- e. Rapat Fakultas, Rapat Jurusan, dan seterusnya.
- f. Rapat Satuan.

Kultural

Agar diperoleh hasil yang baik dengan proses yang efisien dan efektif, semua kegiatan dilakukan dengan landasan berikut.

- a. Iman dan taqwa serta keterpercayaan sebagai fondasi.
- b. Partisipasi positif, yaitu menggunakan semua keahlian dan pengalaman untuk saling memperkuat.
- c. Kebersamaan, kesetiaan, untuk kemajuan bersama.
- d. Komitmen, untuk hasil dan proses yang profesional.

Landasan tersebut juga digunakan sebagai pedoman dalam pengangkatan staf untuk menduduki jabatan struktural.



Harapan dan Hambatan:

Meningkatkan Apresiasi Masyarakat terhadap Pendidikan

Dalam menjalankan kegiatannya, UT mempunyai hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal terutama adalah bahwa secara umum, kemampuan staf akademik UT dalam substansi ajar, kecuali dalam bidang pengetahuan pendidikan, masih memerlukan peningkatan untuk dapat berperan dalam penyusunan dan pengembangan modul kuliah. Penyusunan dan pengembangan modul kuliah, selain bidang pendidikan, masih sangat tergantung pada dosen senior, terutama dari PTN tatap muka. Hambatan ini diatasi, antara lain dengan pemberian kesempatan studi lanjut diutamakan dalam bidang substansi ajar. Di samping itu, banyak staf akademik diberi kesempatan dalam proses revisi modul ajar. Hambatan dan tantangan terbesar bagi UT adalah hambatan eksternal, yaitu kenyataan, bahwa *apresiasi masyarakat* terhadap pendidikan berada pada tingkat yang sangat rendah. Hal itu tampak jelas dengan banyaknya "universitas" yang membodohi masyarakat dengan memberi ijazah hampir tanpa proses pembelajaran tumbuh subur. Saat itu UT berusaha memerangnya dengan menegakkan kewibawaan institusi dengan berusaha merancang dan melaksanakan semua proses pembelajaran sesuai norma akademik yang tinggi. Wibawa institusi tersebut ditingkatkan dengan selalu mengajak semua tenaga administrasi dan dosen untuk menjaga kehormatan akademik. Warga institusi yang melecehkan akademik dipersilakan berpindah profesi.

Wibawa akademik dosen dijaga dan ditingkatkan, antara lain dengan memberi mereka kesempatan luas untuk menulis bahan ajar dan membuat soal ujian. Di samping itu, mereka dimotivasi untuk belajar lanjut dan ikut membangun gunung ilmu dan pengetahuan

dengan mempublikasikan kontribusi ilmu dan pengetahuan yang ditelitinya melalui jurnal dan seminar. Untuk menaikkan kepercayaan diri dalam pergaulan antarperguruan tinggi, UT menyelenggarakan seminar nasional yang dirancang dapat diselenggarakan dalam frekuensi yang konsisten. Gladi resik menjelang hari wisuda dimanfaatkan juga sebagai seminar lokal. Di samping itu, beberapa jurnal nasional juga diterbitkan.

Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan juga tercermin dengan kenyataan, bahwa ada mahasiswa PGSD, yang semuanya guru, yang seharusnya menjaga kehormatan akademik, melakukan kecurangan akademik dalam mengikuti ujian UT. Cukup banyak laporan adanya peredaran kunci jawaban yang sangat laku di lingkungan mahasiswa PGSD. Untuk mengatasi kecurangan mahasiswa, terutama yang berkenaan dengan menyontek dan atau bekerja sama dalam ujian, dilakukan *analisis pola jawaban* dari lembar jawaban ujian mahasiswa. Sekelompok mahasiswa yang banyak membuat jawaban-salah dengan pola sama, diberi nilai tidak lulus. Pada awalnya, yaitu tahun kuliah 1997, analisis pola jawaban secara manual dilakukan kepada semua lembar jawaban ujian. Walaupun upaya ini cukup efektif menjaring kecurangan dalam ujian, upaya ini menghambat pengolahan nilai mahasiswa, sehingga Daftar Nilai Ujian (DNU) mahasiswa menjadi terlambat. Oleh karena itu, kemudian analisis pola jawaban dilakukan jika beredar kunci jawaban di lapangan, dan jika terdapat laporan negatif dari pemantau ujian.

Tidak banyak orang menyadari, bahwa UT merupakan sedikit di antara perguruan tinggi yang *tidak hanya* mempelajari, *tetapi juga menerapkan* pengetahuan pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Ini merupakan kekayaan besar yang dapat ditularkan kepada institusi pendidikan lainnya.

Harapan masyarakat kepada UT adalah bahwa UT harus dapat secara konsisten, dengan melibatkan partisipasi positif semua warganya, menjaga kewibawaan akademik, agar dapat *memotivasi masyarakat*, termasuk warganya, dan mahasiswanya untuk dapat *mencari, memperoleh dan mengolah informasi* dengan baik. UT berpeluang menjadi salah satu institusi yang dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan.

Penutup

UT mempunyai peran yang besar dalam mengisi pembangunan pendidikan, terutama dengan kemampuannya untuk menyediakan kesempatan pendidikan tinggi di seluruh pelosok tanah air. Di samping itu, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, UT berkesempatan untuk menciptakan jaringan antarperguruan tinggi untuk pemerataan kemampuan melalui pemanfaatan kepakaran dan sarana yang tersedia pada perguruan tinggi yang kuat. Dengan sifat UT yang terbuka, program akademik UT harus bercirikan fleksibilitas. Hal ini memungkinkan siapa saja yang ingin mengikuti program pendidikan UT, baik untuk studi formal maupun tidak, untuk dapat memilih apa yang ingin ditempuh sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing.

Selain fleksibilitas, program akademik UT harus dirancang secara sistematis dengan selalu memperhatikan perkembangan internal maupun eksternal. Standar program akademik UT dapat mengatasi masalah kesenjangan pendidikan, dan UT dapat berperan sebagai barometer standar pendidikan tinggi di Indonesia.

Bahan ajar UT harus berkualitas tinggi dan tersedia dalam beragam bentuk media, termasuk yang berbasis internet, sehingga dapat diakses melalui berbagai cara. Upaya pengembangan dan

peningkatan mutu bahan ajar merupakan kegiatan kunci yang harus tetap diprioritaskan dalam kegiatan pendidikan.

Sementara itu, di masa depan, proses pembelajaran mahasiswa UT tidak dapat lagi diasumsikan berjalan dengan sendirinya. UT harus proaktif dalam penyediaan beragam layanan bantuan belajar bagi mahasiswa UT, termasuk layanan bantuan belajar yang berbasis internet. Keberhasilan UT sebagai institusi pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di masa depan tidak hanya diukur dari kualitas keluaran semata, tetapi juga dari kualitas proses pembelajaran yang terjadi.

Evaluasi dan alat evaluasi merupakan salah satu komponen inti yang sangat penting. Kualitas lulusan hanya dapat dikatakan baik, jika mereka dibuktikan baik berdasarkan alat ukur yang sah dan dapat dipercaya. Dalam evaluasi hasil belajar, kualitas butir soal, validitas perangkat ujian, jenis ujian, serta kemungkinan pelaksanaan *ujian berbasis komputer*, merupakan hal yang perlu memperoleh prioritas. Kredibilitas program akademik UT sangat tergantung pada kesahihan dan keterpercayaan sistem evaluasi hasil belajarnya. Sementara itu, evaluasi program harus terjadi secara berkesinambungan dan menjadi tugas utama dari dosen pengampu mata kuliah. Evaluasi program ini merupakan salah satu alat untuk mengendalikan mutu program akademik, dan sekaligus mekanisme umpan balik untuk melakukan revisi dan peningkatan mutu program.

Untuk menjaga kredibilitas, *peraturan akademik UT harus selalu dijaga dan ditaati*, dengan sistem penghargaan dan hukuman yang lebih jelas dan berlaku umum. Upaya khusus untuk mengatasi dan mengantisipasi kecurangan akademik, baik oleh mahasiswa maupun oleh staf *harus dilaksanakan* dengan serius.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas program akademik, UT harus memiliki sumber daya manusia yang handal dalam

bidang keilmuan, tetapi juga memiliki pengetahuan memadai tentang PTJJ. Dosen yang memiliki keterampilan pengelolaan pendidikan terbuka dan jarak jauh merupakan aset UT, bukan hanya bagi keberhasilan pengembangan program akademik UT, tetapi juga bagi keberhasilan UT untuk memantapkan keberadaannya dalam tatanan kehidupan dunia perguruan tinggi di Indonesia maupun di dunia internasional. Dengan demikian, arah pengembangan dosen UT adalah menjadikan dosen UT sebagai ahli pendidikan terbuka dan jarak jauh untuk bidang ilmu tertentu.

Peningkatan kualitas program akademik juga harus ditempuh secara bertahap dan berkesinambungan melalui upaya pengembangan aktivitas instruksional. Berbagai terobosan inovatif harus dilakukan dalam pengembangan aktivitas instruksional untuk memperoleh program akademik terpercaya. Seiring dengan hal tersebut, perkembangan teknologi yang amat pesat memberikan tantangan sekaligus peluang bagi UT untuk memanfaatkannya dan mengembangkan diri menjadi *perguruan tinggi maya*. Melalui pengembangan UT sebagai perguruan tinggi maya, UT diperkaya menjadi perguruan tinggi yang menyediakan beragam program studi, bahan ajar, dan layanan bantuan belajar, mulai dari yang sangat tradisional, yaitu berbasis bahan cetak, sampai ke yang paling mutakhir, yaitu berbasis internet. Mahasiswa UT dapat seluas-luasnya mengakses dan memilih program studi, bahan ajar, dan layanan bantuan belajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi individu mereka masing-masing. Melalui sistem tersebut, UT dapat semakin memantapkan fungsi dan peran strategiknya dalam upaya pemerataan pendidikan dalam skala nasional dan berperan besar dalam *meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan*. □

BAB III

**UNIVERSITAS TERBUKA DI MATA
MAHASISWA, ALUMNI,
KARYAWAN, DAN MASYARAKAT**

UNIVERSITAS TERBUKA DI MATA MAHASISWA DAN ALUMNI

Sri Subarmini Wahyuningsih dan Dewi Juliah Ratnaningsih

Pengantar

Dalam rangka menjaring pendapat mahasiswa dan alumni tentang keberadaan UT, tim penulis buku 20 tahun UT mengadakan wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada 159 mahasiswa dan alumni. Penyebaran kuesioner untuk mahasiswa dilakukan di berbagai UPBJJ, antara lain Malang, Bandung, Palembang, Jakarta, dan Mataram dengan harapan mendapat masukan yang lebih beragam. Wawancara dan kuesioner untuk menjaring masukan dari alumni dilakukan pada saat acara wisuda UT. Masukan tersebut diharapkan dapat mewakili pendapat mahasiswa UPBJJ lainnya. Wawancara pada alumni memuat 6 pertanyaan, yaitu : (a) harapan alumni terhadap UT, (b) kenyataan yang dialami alumni selama belajar di UT, (c) kendala yang dialami alumni selama di UT, (d) keuntungan yang dialami alumni UT, (e) kesan/pesan alumni terhadap UT, dan (f) pandangan masyarakat

terhadap alumni UT. Kuesioner yang disebar memuat 7 pertanyaan, yaitu: (a) alasan memilih UT, (b) sumber yang mendorong memilih UT, (c) kesan mahasiswa mengikuti pembelajaran di UT, (d) harapan mahasiswa memilih UT, (e) kenyataan yang dialami mahasiswa, (f) kesan mahasiswa terhadap UT, dan g. kesan teman sejawat terhadap UT. Pendapat yang tercantum dalam kuesioner maupun wawancara kami sajikan dalam tulisan sebagai berikut.

Universitas Terbuka di Mata Mahasiswa

Alasan Mahasiswa Memilih UT

Dari pendapat dalam kuesioner dapat disimpulkan bahwa alasan mahasiswa memilih UT karena UT merupakan lembaga pendidikan yang mampu menjawab keterbatasan dalam upaya mengakses pendidikan tinggi. Sistem pendidikan jarak jauh yang ditawarkan UT menarik minat mereka karena dapat melanjutkan kuliah tanpa mengganggu aktivitas kerja sehari-hari, baik sebagai karyawan maupun ibu rumah tangga. Belajar di UT juga dianggap dapat menghemat waktu dan biaya karena hampir tidak ada biaya transportasi dan akomodasi. Di samping itu, besarnya SPP dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan mahasiswa. UT dinilai fleksibel karena waktu pembelajaran dan mata kuliah yang ditempuh dapat ditentukan oleh mahasiswa sendiri. Mahasiswa tertarik belajar di UT juga didasari oleh keinginan untuk belajar lebih mandiri dalam meningkatkan ilmu pengetahuan. Status UT sebagai universitas negeri juga menjadi daya tarik karena mahasiswa tidak perlu lagi mengikuti ujian negara.

Sumber motivasi mahasiswa untuk kuliah di UT berasal dari banyak pihak, misalnya adanya dorongan atau motivasi, baik dari teman (teman yang dimaksud di sini adalah teman sejawat maupun

alumni), keluarga (ayah, suami, istri, kakak, sepupu, dll), sedangkan yang lainnya adalah dorongan untuk dapat belajar mandiri. Walaupun sudah berusia lanjut, banyak orang dewasa atau orang tua masih ingin menambah wawasan atau menyemangati yang lainnya untuk lebih giat dalam belajar. Mahasiswa berpendapat bahwa belajar di UT adalah untuk menambah ilmu pengetahuan, tidak semata-mata hanya mencari gelar.

Kesan Mahasiswa Selama Mengikuti Pembelajaran

Kesan mahasiswa selama mengikuti pembelajaran di UT bermacam-macam. Sebagian besar mempunyai kesan baik karena tidak menjumpai masalah yang cukup berarti selama mengikuti pembelajaran; lancar dalam melakukan registrasi, penerimaan UPBJJ terhadap mahasiswa selalu baik dan membantu sehingga mereka merasa terkesan dengan layanan yang diberikan. Namun, mahasiswa menyayangkan keterlambatan nilai-nilai ujian. Mahasiswa mengharapkan bahwa sebelum penutupan registrasi, daftar nilai ujian (DNU) sudah diterima.

Mahasiswa harus lebih aktif dalam mencari informasi agar mengetahui perkembangan UT. Bila mahasiswa UT pasif, informasi mutakhir tentang perubahan maupun perkembangan yang dilakukan oleh UT tidak diperoleh mahasiswa. Karena itu, mahasiswa disarankan aktif untuk datang ke UPBJJ setempat guna mendapatkan informasi. Dengan menjadi mahasiswa UT, mereka dipaksa untuk dapat belajar sendiri, memecahkan permasalahan sendiri sehingga mampu untuk mandiri. Mahasiswa meminta agar UT dapat memperhatikan bahasa dan kualitas modul. Mahasiswa menginginkan bahasa modul/bahan ajar lebih disederhanakan agar lebih mudah mencerna materi bahan ajar. Mahasiswa juga meminta UT meng-

aktifkan *website*-nya agar dapat lebih lancar untuk akses jarak jauh. Bagi mahasiswa yang sudah terbiasa menggunakan *web*, mahasiswa tersebut akan terbantu karena *web* sudah dilengkapi dengan tutorial elektronik maupun suplemen bahan ajar walaupun hanya sebagian dari jumlah mata kuliah yang ada.

Harapan, Kenyataan dan Kesan Mahasiswa tentang UT

Mahasiswa mempunyai beberapa harapan selama belajar di UT, seperti dapat memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan tanpa meninggalkan pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari.

Walaupun belajar secara mandiri, sebagian mahasiswa dapat menyelesaikan studinya tepat waktu. Setelah lulus, mereka berharap lebih profesional di bidangnya.

Kenyataan yang dihadapi atau dialami oleh mahasiswa UT setelah mengikuti pembelajaran di UT adalah sesuai dengan harapan dan sangat bermanfaat dalam pengembangan kariernya. Namun ada juga yang berpendapat jauh dari bayangan, yaitu sangat sulit untuk lulus dan mendapatkan nilai yang baik.

Mahasiswa sangat terkesan karena UT memberikan peluang bagi yang bekerja untuk meningkatkan pengetahuan, menimba ilmu serta mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Namun, ada juga yang berkesan UT dinomorduakan karena sangat sulit lulus. Mereka mengharapkan UT dapat meningkatkan layanan kepada mahasiswa, UT lebih disosialisasikan agar masyarakat lebih mengenal keberadaan UT sebagai perguruan tinggi alternatif yang dapat memberikan motivasi mahasiswa untuk belajar lebih mandiri.

Universitas Terbuka di Mata Alumni

Harapan, Kenyataan, dan Kesan Alumni tentang UT

Di mata alumni, UT merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerataan pendidikan di pelosok tanah air. Hal ini dimungkinkan karena UT menerapkan sistem pendidikan jarak jauh yang dapat menjangkau hampir seluruh pelosok tanah air. Namun, di samping keberadaannya UT pun mengalami kendala atau hambatan yang cukup berarti dalam pengelolaannya karena permasalahan yang dihadapi UT cukup luas dan kompleks. Hal ini disebabkan karakteristik mahasiswa sangat beragam, yang meliputi hampir seluruh daerah di Indonesia.

Harapan atau keinginan alumni selama menempuh studi di UT sangat beragam, di antaranya adalah ingin mendapatkan ilmu yang dapat diterapkan di lapangan, dan dapat meningkatkan jenjang karier, serta memperoleh gelar tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Selain itu, beberapa di antara alumni mengatakan bahwa UT memiliki potensi yang memadai untuk dijadikan sebagai perguruan tinggi negeri alternatif yang dapat menjawab semua harapan mahasiswa.

Harapan yang diinginkan mahasiswa UT tidak selalu sama dengan kenyataan yang mereka hadapi di lapangan. Kenyataan yang dirasakan alumni selama menjadi mahasiswa UT adalah belajar di UT tidak mudah, memerlukan ketekunan dan keuletan yang tinggi, karena sistem belajar jarak jauh menuntut pengelolaan waktu belajar yang baik dan upaya untuk belajar secara mandiri. Selain itu, keberhasilan di UT sangat bergantung pada kreativitas dan keaktifan mahasiswa sendiri. Namun demikian, di sisi lain

kenyataan yang dihadapi mahasiswa selama menempuh studi relatif lebih lama, dan proses pengumuman ujian sampai ke mahasiswa pun memakan waktu yang cukup lama.

Kesan lain yang mereka alami di UT adalah mereka berkeinginan melanjutkan studi dan bergabung kembali dengan UT. Oleh karena itu, dalam hal ini pesan yang mereka ungkapkan adalah agar UT dapat membuka program S-1 dan S-2 program Penyuluhan Pertanian. Hal ini disebabkan bagi mereka (DIII-Penyuluhan Pertanian) program yang diselenggarakan UT sangat bermanfaat dan relevan dengan pekerjaan yang mereka geluti. Selain itu, kesan alumni terhadap penyelenggaraan wisuda di UT Pusat adalah sangat khidmat dan meriah, meskipun tampaknya cukup sederhana. Hal lain yang membuat mereka senang mengikuti acara wisuda adalah mereka dapat bertemu dengan teman-teman lain dari seluruh propinsi yang ada di Indonesia, dan mereka dapat melihat langsung bangunan fisik UT yang selama ini tidak mereka bayangkan. Kebahagiaan dan kegembiraan lain yang mereka alami adalah ketika mereka bertemu dengan rektor beserta staf UT serta dosen-dosen yang selama ini menjadi partner; biasanya mereka hanya berkomunikasi ataupun berkonsultasi melalui telepon maupun surat.

Kendala dan Keuntungan Alumni Selama Menjadi Mahasiswa UT

Kendala yang dihadapi alumni selama kuliah di UT, antara lain bahan ajar yang dibutuhkan sering mengalami keterlambatan dan tidak tersedia di UPBJJ-UT, kelengkapan pendukung bahan ajar tidak semuanya tersedia bersama bahan ajar, penyelenggaraan tutorial kurang efektif baik dari segi waktu maupun tempat, konsultasi langsung dengan tutor sulit, dan terlalu banyak tugas dan praktikum yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Selain itu, beberapa alumni

mengungkapkan kendala yang mereka hadapi selama mereka mengajukan keluhan ke UT, yaitu harus melalui birokrasi yang panjang dan proses penyelesaian kasus serta pengumuman hasil ujian relatif lambat.

Di samping itu, beberapa keuntungan yang mereka peroleh selama kuliah di UT di antaranya adalah biaya kuliah di UT terjangkau, dapat belajar sambil bekerja (*learning by doing*), waktu yang digunakan lebih efisien, dan dapat mengatur waktu serta cara belajar sesuai keinginan dan karakteristik mahasiswa. Kesan yang mereka alami setelah menjadi alumni UT adalah mereka bangga bisa menyelesaikan kuliah di UT, karena ternyata kuliah di UT membutuhkan ketekunan dan keuletan yang cukup tinggi serta motivasi yang kuat. Meskipun demikian, beberapa alumni tampak kurang puas dan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan selama kuliah di UT. Mereka mengungkapkan pesan agar UT lebih meningkatkan pelayanan dan komunikasi kepada mahasiswa. Mereka juga menginginkan diadakan kelompok belajar (pokjar) secara gratis dan diadakan forum komunikasi yang baik antara UT Pusat, UPBJJ-UT, dan mahasiswa, baik dalam kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan lain yang sangat mendukung terwujudnya ikatan alumni UT seluruh Indonesia, sehingga mereka dapat merasakan adanya hubungan kekeluargaan yang erat meskipun hal ini dilakukan secara jarak jauh.

Pandangan Sejawat Mahasiswa dan Alumni Terhadap UT

Selain kesan dari mahasiswa UT secara langsung, terdapat pula kesan yang diberikan oleh teman-teman sejawat mahasiswa mengenai UT. Sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa penyelenggaraan UT dinilai cukup baik dan mendukung keberada-

annya karena dapat meningkatkan profesionalitas mahasiswa, memberi motivasi untuk belajar lebih giat dan mandiri, serta belajar menghadapi tantangan dan tidak kalah dengan PTN lain. Di samping itu, terdapat juga anggapan bahwa penyelenggaraan UT kurang baik, karena menjadi mahasiswa UT itu mudah tetapi sulit lulus, layanannya kurang memuaskan, sulit komunikasi dengan sesama mahasiswa lainnya; sebagian ragu-ragu tentang keberadaan UT karena belum atau kurang mengetahui tentang UT.

Menurut para alumni, pandangan masyarakat terhadap kualitas lulusan UT cukup baik, diakui, dan disegani, bahkan mereka mengatakan bahwa kualitas lulusan UT setara dengan lulusan PTN lain. Di samping itu bahan ajar yang ditulis oleh para pakar dari universitas terkemuka menyebabkan mereka merasa setara dengan alumni universitas terkemuka tersebut. Namun, sebagian masyarakat yang belum mengetahui UT menganggap bahwa kualitas lulusan UT belum terlihat secara jelas dan sebagian alumni UT masih kurang dihargai. Pandangan masyarakat terhadap daya saing lulusan UT tidak kalah dengan lulusan dari PTN, bahkan ada yang mengatakan masih lebih baik dari PTN lain karena lulusan UT dianggap lebih mandiri dan dewasa dalam mengelola sumber-sumber belajar. Meskipun demikian, sebagian masyarakat lain menilai bahwa daya saing lulusan UT belum terlihat dengan jelas, karena sebagian besar mahasiswa UT sudah bekerja. Mengenai kinerja di tempat bekerja, beberapa alumni mengatakan bahwa kuliah di UT sangat membantu mereka dalam bekerja dan dapat meningkatkan kinerja mereka dibandingkan sebelum mereka kuliah di UT. Akan tetapi, mereka mengungkapkan peningkatan dalam kinerja atau profesionalisme dalam bekerja sangat bergantung pada individu masing-masing, tidak semata-mata merupakan hasil kuliah (*knowledge*), tetapi berhubungan erat dengan komitmen dan prestasi dalam bekerja.

Simpulan

Dari seluruh penyajian di atas, dapat disimpulkan bahwa UT sangat didukung mahasiswa dan alumninya karena mereka dapat memperluas wawasan dan menambah ilmu tanpa harus meninggalkan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing karena pengambilan serta waktu kuliah dapat direncanakan sendiri. Agar tetap eksis dan lebih dikenal di mata masyarakat, UT harus lebih banyak mensosialisasikan diri atau membuat promosi atas keberadaannya. UT diharapkan dapat memperbaiki layanan kepada mahasiswa, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan mahasiswa dapat terlayani dengan cepat dan masyarakat yang akan belajar di UT bertambah jumlahnya. Yang lebih penting adalah bahasa dan kualitas bahan ajar yang digunakan mahasiswa lebih diperhatikan, pendistribusian bahan ajar diharapkan tidak mengalami keterlambatan. □

UNIVERSITAS TERBUKA DALAM PANDANGAN MITRA KERJA

Yulia Budiwati

Pengantar

Universitas Terbuka (UT), sejak pertama kali berdiri hingga saat ini tidak bisa terlepas dari kerja sama dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Kerja sama tersebut antara lain dengan Ditjen-Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) yang bertindak sebagai pengarah baik pada saat awal pendirian, maupun pada saat pengembangan. Di samping itu, UT juga bekerja sama dengan Lembaga Pos Indonesia dalam menyalurkan bahan ajar dan perangkat belajar lainnya. Dalam rangka penulisan bahan ajar, UT telah menjalin kerja sama dengan universitas-universitas lainnya. Di samping itu, UT juga menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga lain dalam rangka membantu mengembangkan sumber daya manusia dari lembaga tersebut.

Dalam rangka mencari masukan bagi pengembangan masa mendatang UT merasa perlu untuk mengetahui bagaimana tanggapan mitra kerja atas perkembangan yang selama ini sudah dicapainya. Sehubungan dengan hal itu, berikut disajikan hasil wawancara dengan sejumlah pimpinan departemen terkait, perguruan tinggi, dan instansi pengguna.

Universitas Terbuka di Mata Pimpinan Departemen

Satrio S. Brojonegoro
Dirjen DIKTI

Pada pendirian awal, misi UT adalah memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang terbatas lokasi, usia dan waktu. Pada saat itu pendidikan guru menjadi salah satu sasarannya, karena para guru tidak bisa meninggalkan tugasnya kalau harus bersekolah di perguruan konvensional. Pada mulanya modus yang digunakan masih sangat konvensional, yaitu memakai layanan pos dalam bentuk bahan ajar cetak (modul). Kemudian dilengkapi dengan suara (tutorial melalui radio dan televisi), dan sekarang ini UT didorong untuk mengembangkan belajar-e (pembelajaran melalui media elektronik).

Dulu orang tidak memandang UT karena dianggap “bisa dibeli”. Imaji ini harus diubah. UT harus memperbaiki mutu, dan harus mempunyai sistem untuk mengontrol mutu ini. Dengan teknologi yang tersedia dibuat sistem *online* untuk pelayanan administratif dan akademik yang lebih baik. UT bisa merujuk pada perkembangan *Open University* di Inggris. Dengan demikian orang akan melihat

UT sebagai perguruan tinggi yang menawarkan kualitas, sehingga UT akan menjadi suatu pilihan.

Ke depannya pengembangan UT bukan hanya sekadar program yang berakhir pada gelar, melainkan merupakan pendidikan berkelanjutan. UPBJJ perlu ditenahi, dan difungsikan sebagai pusat sumber belajar (*resource center*), yang juga mempunyai kemampuan dalam evaluasi, tutorial bila masih diperlukan, dan penyediaan modul. Membuat UT untuk menjadi lebih fleksibel, adalah mengubah struktur UT dan menjadikan UT sebagai fasilitator bagi pengembangan modul, sistem evaluasi dan sistem penyiaran materi (*production house*). Tenaga ahlinya dapat diambil dari luar negeri. Dengan demikian, materi bahan ajar UT jauh menjadi lebih berbobot dibandingkan universitas lainnya, karena ditangani oleh para ahli. UT tidak perlu khawatir dengan persaingan sebab UT lebih mempunyai pengalaman dan kemampuan dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Sebaiknya UT menjadikan universitas konvensional sebagai mitra kerja. Prinsipnya UT dapat menjangkau semua sektor karena semua bidang membutuhkan ilmu pengetahuan. UT dapat mengembangkan sejenis pelatihan atau kursus pendek yang berkualitas sehingga dapat dijual mahal.

Dr. Indra Djati Sidi
Dirjen Dikdasmen

Keberadaan UT sangat strategis, mengingat Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Keberadaan UT juga merupakan pilihan/tawaran dalam rangka menanggulangi kekurangan guru, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana UT mampu memberikan proses pendidikan yang ekuivalen dengan cara-cara konvensional. Seharusnya pada masa mendatang, baik UT maupun perguruan tinggi lainnya mampu menawarkan pendidikan

yang berkualitas. Untuk dapat memperoleh kualitas pendidikan yang baik, dibutuhkan adanya penjaminan kualitas. Kalau UT mampu mengangkat sistem dan proses pendidikannya yang berorientasi kualitas yang dapat menempatkan lulusannya bersaing dengan siapa saja, maka banyak pihak berkepentingan yang akan mendambakan pelayanan tersebut.

Kontribusi UT saat ini sudah cukup besar, yaitu memberikan pelatihan terpadu terhadap guru-guru dan dapat memberikan penyetaraan-penyetaraan dalam meningkatkan kualitas guru. Di samping itu, UT harus menjadi perguruan tinggi eksklusif atau elit yang memang mampu memberikan efisiensi kualitas. UT perlu mengembangkan imaji bahwa UT diperlukan bagi orang yang memang membutuhkan kualitas, sehingga tidak mudah menjadi mahasiswa UT, tetapi butuh: 1) niat yang kuat, 2) kerja keras, 3) menempuh tugas-tugas yang cukup berat. Dengan demikian, lulusan UT akan memperoleh penghargaan dari masyarakat. Diharapkan UT bisa menjadi "pelopor pendidikan yang sesungguhnya" dan akan selalu meningkatkan jaminan kualitasnya sehingga dapat dicapai pendidikan yang berkualitas.

Universitas Terbuka di Mata Perguruan Tinggi Lain

Zainal Ridho Djafar
Rektor Universitas Sriwijaya

Keberadaan UT dapat menjembatani kesenjangan antara keterbatasan sarana pendidikan tinggi dengan kebutuhan untuk memperoleh pendidikan tinggi. Prospek UT di masa mendatang sangat baik. Banyaknya peminat untuk mengikuti kuliah sistem jarak jauh

menunjukkan bahwa segmen mahasiswa yang dapat dilayani masih cukup besar. Namun, UT jangan terjebak pada paradigma makin banyak mahasiswa maka pasti berarti lembaganya semakin baik. Kualitas pembelajaran dan sistem pelayanan perlu mendapat perhatian. Di samping sebagai institusi pendidikan tinggi dengan sistem belajar jarak jauh, UT harus lebih memperluas jaringan layanan dan informasi ke daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh perguruan tinggi konvensional, dengan cara mengoptimalkan teknologi informasi. Selain menyediakan media pembelajaran di luar tatap muka, simpul-simpul UT di daerah perlu diperkuat dengan tersedianya tenaga akademik dan tenaga penunjang yang handal.

Dengan berbagai program yang dimilikinya, UT secara umum telah memberikan kontribusi bagi peningkatan sumber daya manusia dan secara khusus memberikan warna tersendiri dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Kontribusi yang seharusnya diberikan UT adalah pembelajaran pendidikan tinggi yang lebih spesifik, dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, dan menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat juga harus lebih ditingkatkan, sehingga UT dapat menjadi unggulan pembelajaran dengan sistem jarak jauh. Dalam hal ini UT dapat menjalin hubungan yang lebih erat lagi dengan perguruan tinggi tatap muka lainnya.

Dr. Djabir Hamzah, MA
Pembantu Rektor I Universitas Hasanuddin

Setiap lembaga pendidikan tinggi, seperti halnya UT, mempunyai masa-masa kegiatan yang banyak tergantung pada kinerjanya. Saat ini terlihat bahwa kinerja UT dihadapkan pada kompetitor-kompetitor, antara lain dari PTS atau perguruan-perguruan tinggi yang bermunculan di kabupaten. Dengan berkembangnya berbagai

media komunikasi, "*distance learning*" di Indonesia akan mempunyai pangsa pasar tersendiri, yang secara profesional dapat ditangani oleh UT. Tampaknya sarana yang dimiliki UT masih terbatas, sehingga dalam pelayanannya UT sering mengalami hambatan teknis. Namun UT cukup baik dalam rangka penjaminan mutu dengan adanya standarisasi dan dikembangkannya pedoman-pedoman mengenai penjaminan mutu. Kalaupun UT mengalami kesulitan dalam mengembangkan belajar-e ini, mungkin karena belajar-e masih belum cocok dengan budaya dan kesiapan masyarakat, pada dasarnya UT mempunyai keunggulan dalam penyelenggaraan sistem belajar jarak jauh. UT dapat digunakan sebagai pembanding dalam penyelenggaraan program-program jarak jauh oleh universitas lainnya.

Lebih baik UT tetap teguh pada domainnya, yaitu mendudukkan diri sebagai spesialisasi dalam mengembangkan pendidikan jarak jauh, terutama diprioritaskan di daerah-daerah, karena di kota sudah ada universitas tatap muka. Kalau bisa mengembangkan kerja sama di kawasan Asia Tenggara secara regional, UT juga dapat berbagi dengan universitas lain, baik dalam hal bahan ajar atau model pembelajaran. Target populasi UT di bidang kependidikan sangat membantu guru-guru menjadi sarjana. UT memang sangat profesional dalam mengembangkan bidang kependidikan. Mungkin untuk menawarkan variasi disiplin ilmu yang sangat luas, UT perlu memilih disiplin ilmu yang lebih spesifik. Kecuali itu UT juga harus mengembangkan strategi dalam bidang pemasaran. UT harus melakukan evaluasi diri untuk mengetahui keunggulan yang dimiliki, dan apa yang dapat membuat UT mampu bertahan.

Prof. Asniar Ismail, SE, M.M
Rektor Universitas Tanjungpura

Sistem belajar jarak jauh yang dikembangkan oleh UT sangat membantu, baik universitas maupun masyarakat umum terutama yang terdapat di daerah untuk memperoleh kesempatan belajar, karena tidak semua orang memperoleh kesempatan belajar di PTN dan PTS tatap muka. Peningkatan pendidikan sangat dibutuhkan oleh para pegawai negeri maupun swasta terutama para guru, juga bagi pengembangan SDM di daerah-daerah. Karena sekarang berlaku otonomi daerah, peningkatan SDM pun disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, sehingga program-program yang ditawarkan UT untuk tiap daerah seharusnya tidak sama. Meskipun PTN melihat juga kebutuhan masyarakat ini, tetapi UT memiliki peralatan dan media yang tidak atau kurang dimiliki PTN lain. Sebaiknya UT membuka program studi yang dibutuhkan masyarakat, yaitu program studi yang tidak terdapat di PTN atau PTS di masyarakat tersebut. Perlu juga disosialisasikan bahwa UT sama dengan universitas lainnya, artinya bahwa UT tidak hanya diperuntukkan orang-orang yang sudah bekerja, tetapi mahasiswa lulusan SMA pun dapat belajar di UT sambil mencari pekerjaan. Dengan demikian keberadaan UT akan semakin berarti dan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa sebenarnya sangat membutuhkan tutorial. Untuk itu, UT perlu meningkatkan tutorial, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, terutama untuk mahasiswa yang jauh dari kota dengan memanfaatkan tenaga edukatif yang terdapat di kota (dalam hal ini Untan sebagai Universitas Pembina siap membantu). Beberapa mahasiswa menganggap bahwa kuliah di UT itu mudah lulus, tetapi sebagian yang lain menganggap sulit lulus. Sebenarnya hal itu sangat tergantung pada bagaimana mahasiswa mengelola waktu. Belajar di UT memang membutuhkan komitmen

dan disiplin waktu yang baik. UT perlu melakukan evaluasi dan monitoring terhadap mahasiswa yang dalam waktu lama belum juga lulus untuk mengetahui kesulitan belajarnya. Di samping itu, perlu juga diteliti bagaimana perkembangan karier mahasiswa UT sebelum dia kuliah di UT dan sesudah dia kuliah di UT. Hal ini untuk mengetahui kesejajaran kualitas lulusan UT dengan lulusan PTN lainnya.

Peningkatan kualitas UT dapat dikembangkan melalui penerapan sistem belajar jarak jauh dengan berbagai media (IT), lagipula sekarang semakin banyak orang cenderung menambah ilmu tanpa harus meninggalkan tempat bekerja. Mungkin modul UT dapat dikembangkan dalam model elektronik. Sebenarnya prospek UT di masa mendatang cukup baik, asal UT terus mengembangkan media-media yang digunakan dan yang disesuaikan dengan kebutuhan di masa mendatang. Media pembelajaran UT perlu dikemas dengan cara yang lebih menarik, sehingga orang di luar UT dapat tertarik untuk bergabung dengan UT.

Prof. Dr. Imam Syafi'ie
Rector Universitas Negeri Malang

Selama 20 tahun perkembangannya, hasil yang dicapai oleh UT cukup banyak. Hal ini menunjukkan UT merupakan organisasi yang sehat. UT telah memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat dengan memberikan kesempatan belajar pada masyarakat luas, khususnya bagi Guru SD/D-II. Pengembangan pembelajaran melalui media elektronik juga sudah semakin baik. Informasi melalui internet (sistem *online*) yang mulai dikembangkan oleh UT menunjukkan kemajuan UT yang luar biasa. UT semakin dikenal di kalangan masyarakat

Kendala yang dihadapi UT adalah bahwa sebagian besar mahasiswa bekerja sehingga cenderung hanya menginginkan gelar dan ijazah, bukan bertujuan untuk mengembangkan ilmu. Sebaiknya mulai diusahakan agar cabang UT yang terdapat di daerah (UPBJJ) tidak lagi menumpang tempat di PTN lain. UT juga harus mengusahakan pemberian pelayanan administrasi dan akademik yang lebih baik. Peningkatan UT dapat mengarah pada memberikan porsi yang lebih besar kepada daerah-daerah. Untuk itu perlu dikembangkan belajar-e (elektronik) agar memudahkan mahasiswa mengakses lewat internet. Timbul kendala, yaitu memang banyak mahasiswa yang kurang menguasai teknologi. Di samping itu perlu dijaga agar jangan sampai arah perkembangan UT dialihkan dari berfokus perkembangan ilmu menjadi berfokus kursus. UT harus bersama-sama dengan instansi lain yang terkait membangun kultur masyarakat belajar, yaitu membangun kultur belajar sendiri, tidak harus di dalam ruang yang selalu tersedia guru. Mahasiswanya harus dapat dan bersedia mendalami atau mengembangkan studi mandiri melalui perpustakaan yang disediakan UT di daerah atau di Perguruan Tinggi lain.

Drs. Poncojari Wahyono, M.Kes

Pembantu Dekan 1 FKIP, Universitas Muhammadiyah Malang

Pengembangan pendidikan yang selama ini belum dijangkau oleh universitas lain, dapat ditangani oleh UT dengan cara pendidikan jarak jauhnya hingga sampai ke pelosok daerah. Namun dikhawatirkan mereka yang belajar di UT hanya untuk mencari gelar. Agar UT dapat memberikan pendidikan seluas-luasnya dan di satu sisi dapat menjaga kualitasnya, maka yang paling mendasar adalah pengembangan SDM-nya untuk jangka panjang agar tidak tergantung atau tertinggal dari Perguruan Tinggi lain.

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh UT adalah dalam rangka meningkatkan kualitas mahasiswanya, diusahakan meningkatkan kelengkapan prasarana pembelajaran di daerah-daerah. Pembatasan waktu belajar juga diperlukan, sekaligus diharapkan dari segi pengembangan ilmu menjadi lebih optimal. Perlu diusahakan memperbanyak pendaftaran mahasiswa UT yang berasal dari lulusan baru SMA, karena motivasi untuk mengembangkan ilmunya lebih baik daripada yang sudah bekerja. Satu hal yang perlu dikhawatirkan adalah di samping mahasiswa perlu sentuhan kemahasiswaan atau pengalaman akademis, mereka juga membutuhkan pengalaman organisasi atau pengalaman di luar nonakademis, dan UT memiliki kelemahan dalam hal ini. Misi UT untuk mensarjanakan masyarakat Indonesia sebaiknya diubah menjadi membuat pandai masyarakat Indonesia. UT perlu mengembangkan ilmu yang bersifat terapan, juga pengembangan kewirausahaan, sehingga dapat dikatakan lulusan UT pun akan dapat mandiri seperti cara belajarnya.

Kusmayanto Kadiman
Rektor Institut Teknologi Bandung

Karena sifatnya yang "terbuka", UT harus memilih strategi untuk tidak bertanding secara langsung dengan perguruan tinggi lainnya, melainkan harus mengembangkan strategi untuk memilih modus yang berbeda dengan yang ditawarkan oleh perguruan tinggi lainnya. Misalnya program studi dipilih yang unik, yang belum banyak dikembangkan oleh perguruan tinggi lainnya. UT juga harus pandai-pandai memanfaatkan peluang yang tidak mampu digarap oleh perguruan tinggi lainnya. Dalam koridor UT, teknologi menjadi kata kunci.

UT tampaknya tidak menunjukkan banyak kiprahnya dalam kaitannya dengan departemen teknis di era otonomi daerah. Modus belajar-e merupakan peluang besar bagi UT. UT dapat bekerja sama

dengan departemen teknis untuk menyelenggarakan belajar-e dalam rangka menjawab kebutuhan mereka. Di samping itu, banyak negara-negara yang menawarkan bantuan apabila belajar-e dilaksanakan di Indonesia. UT tidak perlu khawatir dengan SDM-nya karena keahlian dan teknologi bisa dibeli. Yang perlu dikembangkan oleh UT adalah kemampuan dalam mengelola, memasarkan dan memanfaatkan jaringan yang ada, serta mencari keunikan atau kekuatan yang dimiliki yang bisa ditawarkan. Bank-bank besar di Indonesia mempunyai kapasitas teknologi informasi yang besar; tugas UT-lah memanfaatkan peluang ini melalui jalur kemitraan. Kelas jauh sebaiknya tidak dilihat sebagai ancaman, tetapi mereka perlu dijadikan mitra karena mereka mempunyai pasar; sedangkan UT mempunyai aspek legalnya. ITB juga bersedia untuk membuat kerja sama dengan UT. UT mempunyai peluang besar di bidang pendidikan berkelanjutan mencari promotor melalui modus kemitraan, sebab paradigma pendidikan sudah bergeser dari berpusat pada pengajar menjadi "berpusat pada pebelajar".

Hal lain yang harus diperhatikan UT adalah sebaiknya tidak menentukan biaya pendidikannya dengan harga murah, terutama bagi orang-orang yang hanya ingin membeli gelar. Apabila imaji jatuh, maka akan sangat berat untuk membangunnya lagi. Yang harus ditawarkan adalah kemampuan (kualitas) yang akan diperoleh oleh lulusannya. Juga harus terdapat pernyataan kualitas (kepastian), karena selama ini kontrol UT terhadap penyelesaian studi mahasiswa tidak ada. UT perlu pula melakukan promosi yang atraktif dalam menawarkan potensinya.

Prof. Dr. Sutjipto
Rektor Universitas Negeri Jakarta

Keberadaan UT adalah sangat tepat di tengah-tengah kebutuhan masyarakat dalam hal kesempatan pendidikan dan perkembangan teknologi. Dengan demikian, prospek UT di masa mendatang berpeluang sangat besar. Yang agak sulit dilakukan oleh UT adalah kontrol kualitas terhadap lulusannya, karena mendidik orang di universitas bukan hanya semata-mata mengembangkan pengetahuannya, melainkan juga nilai dan perilakunya. Dengan demikian proses belajar di UT harus didesain bukan hanya untuk menambah ilmu melainkan juga untuk mengubah pola pikir dan sikap. Untuk pendidikan guru, mungkin perlu dilakukan tes masuk sebagai evaluasi awal dan UT harus memilih calon mahasiswa yang benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi guru

UT memang merupakan pusat pembina bagi pendidikan jarak jauh. Sistem pendidikan ini dapat juga dilaksanakan oleh perguruan tinggi lainnya. Namun dengan profesionalitasnya; UT tentu akan menjadi pemenang dalam persaingan di bidang tersebut. Yang harus diperhatikan adalah bahwa UT harus memilih bidang studi yang ditawarkannya secara kritis, yaitu bidang studi mana yang paling cocok dan paling efektif diselenggarakan melalui sistem belajar jarak jauh. Selain mempunyai keunggulan, UT juga mempunyai keterbatasan, misalnya dalam mendidik guru tidak hanya melibatkan pengetahuan saja, melainkan juga perilakunya. Keterbatasan ini sebaiknya disadari oleh UT sehingga dilakukan pengimbangan seperlunya.

Dr. P. Suparno, SJ, MST
Rektor Universitas Sanata Dharma

Budaya belajar mandiri di Indonesia belum tinggi, sehingga mahasiswa UT belajar secara asal-asalan. Dengan model UT, mahasiswa tidak dapat dipaksa belajar, sedangkan di universitas konvensional, mahasiswa lebih dapat dipaksa belajar. Di sinilah tantangan terbesar UT, yaitu membudayakan belajar mandiri. UT harus lebih mengembangkan model, metode dan cara pembelajarannya.

Keberadaan UT dilihat dalam konteks nasional, yaitu dalam rangka pemerataan pendidikan dan memajukan masyarakat. Banyak orang merasa kesulitan untuk mengakses pendidikan tinggi karena berbagai keterbatasan, dan UT dapat menjangkau mereka ini. Jika pemerintah ingin membantu generasi muda menjadi lebih maju, salah satu yang ditawarkan adalah UT. Keberadaan UT adalah dalam rangka melengkapi dan membantu universitas yang sudah ada, bukan menjadi saingan universitas tersebut.

UT dapat mengembangkan belajar sepanjang hayat, yaitu sekolah yang mau membantu perkembangan orang secara menyeluruh. Program yang ditawarkan bermacam-macam, dan diperuntukkan bermacam-macam kalangan. Universitas Sanata Dharma (dalam hal ini yayasan Kanisius) bekerja sama dengan UT dalam rangka menyelesaikan guru-guru dari yayasan Kanisius ke program studi PGSD. Universitas Sanata Dharma tetap membuka diri bagi kerja sama dengan UT, baik dalam hal penyediaan tenaga ahli maupun fasilitas pembelajaran.

Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng, Ph.D
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengendalian Mutu
Universitas Gadjah Mada

Dari sisi positif, UT memberi peluang untuk orang-orang yang mempunyai kendala meningkatkan akses ilmu pengetahuan melalui program-program reguler, atau universitas reguler. Sisi negatifnya, UT kurang menampilkan diri di masyarakat sehingga banyak orang yang belum mengetahui tentang UT, lebih-lebih program dan sistem pembelajarannya.

Kerja sama antara UGM dengan UT secara institusi memang belum ada, tetapi kerja sama yang sifatnya individual sudah ada, misalnya banyak dosen UGM yang menulis modul-modul UT. Kerja sama secara institusional antara UGM dan UT, berdasarkan hubungan saling menguntungkan dapat dibangun dalam rangka berbagi inovasi. Antara UGM dan UT dapat dibangun jaringan kerja untuk saling tukar-menukar bahan yang diakses bersama-sama melalui ICT. Teknologi pembelajaran di UT tentu paling maju, dan UGM memiliki dosen-dosen yang sudah terbiasa dengan riset dan konsultasi teknologi. Di sinilah UT dan UGM dapat bersama-sama memperkaya wawasan teknologi. Bagi UGM, UT bukan saingan. Saingan kita bukanlah sesama perguruan tinggi, tetapi saingan kita adalah negara-negara lain yang melakukan investasi pendidikan di Indonesia.

UT harus menyelenggarakan paket-paket yang lebih fleksibel, sehingga tersedia berbagai macam program yang ditawarkan. UT harus meneliti kajian kebutuhan berdasarkan kondisi yang terdapat di Indonesia, pasaran kerja, iklim politik di Pemda, dan budaya yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian UT harus menganalisis pemasarannya dan pendekatan yang digunakan. Masyarakat Indonesia terdiri dari empat lapisan: (1) masyarakat yang sangat tertinggal, (2) masyarakat yang mulai berkembang, (3)

masyarakat yang berada pada tataran pergaulan nasional, dan (4) masyarakat yang berada pada tataran pergaulan internasional. Ketiga masyarakat terakhir sudah biasa mengakses teknologi sebagaimana yang ditawarkan oleh UT. UT dengan karakteristiknya dapat menciptakan kalimat-kalimat lamaran kepada masyarakat, supaya masyarakat menaruh harapan bahwa dengan belajar di UT, ilmu pengetahuan dapat diakses demi kesejahteraan dirinya, keluarganya dan bangsanya.

Universitas Terbuka di Mata Pengguna

Toto Hardiyanto Subagyo, PhD
Vice President PT Garuda Indonesia

Bagi PT Garuda Indonesia, kerja sama yang selama ini dirintis dengan UT telah membuka peluang bagi karyawannya untuk memperoleh bekal ilmu pengetahuan demi kelancaran tugas dan peningkatan kualitas mereka. Sebagai perusahaan jasa, PT Garuda Indonesia berusaha untuk menjadi yang terdepan. Karyawan di bagian depan merasa perlu untuk meningkatkan kualitas dirinya dalam melayani penumpang. Banyak karyawan PT Garuda Indonesia, terutama yang berada di bagian depan, yang telah berhasil lulus dari UT. Hal ini membuktikan bahwa kerja sama dapat berjalan dengan baik.

Jika terdapat karyawan yang belum atau tidak dapat menyelesaikan programnya, mungkin karena PT Garuda Indonesia kurang motivasi atau mungkin pihak UT yang kurang menyapa mahasiswanya. Dengan demikian, UT harus lebih banyak melakukan pendekatan kepada mahasiswa, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga mahasiswa merasa dekat, diperhatikan, dan dimotivasi belajarnya. Harapan lainnya ialah UT harus lebih meningkatkan

pelayanannya sehingga tidak ada lagi keluhan tentang keterlambatan pelayanan UT. Dalam melangkah ke depan pihak PT Garuda Indonesia ingin sekali menjalin kerja sama kembali, dan siap dengan MOU (*Memorandum of Understanding*) untuk program S-2. PT Garuda Indonesia siap menyediakan fasilitas belajar, seperti ruang dan sarana pendukung lainnya.

Kartiman Junaedi

**Staf Direktorat Dikmas (Pendidikan Masyarakat), Ditjen
Diklusepora (Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga)**

UT merupakan partner kerja yang telah terbina sejak tahun 1989, tepatnya ketika muncul proyek pemberantasan buta aksara. Dalam penanganan proyek tersebut, modul yang digunakan adalah hasil kerja sama dengan UT, karena jajaran pimpinan Depdikbud saat itu memandang UT sangat memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan pembelajaran dengan modul. Hasil kerja sama selama ini sangat memuaskan sebab melalui modul Kejar Paket A dan Kejar Paket B telah berhasil dientaskan angka buta aksara yang cukup signifikan. Bagi Diknas sendiri, secara tidak langsung diperoleh masukan tentang cara menyusun modul yang baik.

Semoga di masa mendatang UT dapat meningkatkan kualitasnya. Secara institusi, Dikmas menginginkan supaya kerja sama yang selama ini telah dilakukan lebih ditingkatkan lagi.

Ismanto, SE, M.M

Manager Pelatihan PT Pos Bandung

Kerja sama PT Pos dengan UT sudah berlangsung lama. Selama ini UT menggunakan jasa PT Pos dalam melayani mahasiswanya. Kerja sama dalam bentuk pendidikan diawali oleh keinginan PT Pos untuk meningkatkan sumber daya manusia dan karier karyawannya.

Lulusan UT dinilai cukup baik, dilihat dari kedalaman materi bahan ajar. Selanjutnya semua tergantung pada individu masing-masing, apakah dia dapat menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya ke dalam sistem kerja yang dihadapi. Sebaiknya UT mempunyai kampus induk atau tempat di mana mahasiswa dapat mengajukan keluhan, untuk kepastian penampungan keluhan mahasiswa. UT juga perlu mengembangkan jaringan kerja di antara mahasiswanya untuk meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa. Hal ini diperlukan karena tampaknya atmosfir akademik mahasiswa di UT tidak terlihat berhubungan antarmahasiswa tidak saling mengenal. Padahal kenyataannya banyak orang yang berkiprah di dunia kerja berawal dari hubungan semasa belajar bersama.

UT yang sudah berusia 20 tahun sudah mempunyai eksistensi di masyarakat, tetapi UT tetap harus terus meningkatkan kualitasnya. UT sangat dibutuhkan masyarakat, terutama mereka yang mempunyai masalah dalam hal ekonomi dan geografi. UT yang sudah mulai menerapkan belajar-e tentunya semakin meningkatkan efisiensi biaya operasionalnya. Apabila UT dapat melakukan hal ini, banyak orang mencari UT sebab orang sangat mengharapkan pendidikan dengan biaya yang terjangkau tapi tetap berkualitas.

Ida Nuraeni B.Sc, M.Ed dan Ir. Armein Uha, Ms
Koordinator PTPL (Pendidikan Tinggi Pertanian Lapangan),
STPP (Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian) Bogor

Adanya tuntutan karier dari PPL yang berada di bawah Departemen Pertanian melatarbelakangi dibentuknya kerja sama Deptan dengan UT dalam bentuk program D-III PTPL. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sikap, pengetahuan dan keterampilan penyuluh seiring dengan perkembangan teknologi, agar penyuluh tidak tertinggal dari petani. Selain karena tuntutan karier, berlaku peraturan bahwa penyuluh yang belum mempunyai jenjang pendidikan D-

III akan dicabut tunjangan fungsionalnya, dan dialih-kan menjadi struktural.

Menurut amanat ketua STPP, kontribusi nilai 40% untuk praktikum dan 60% untuk teori sebagaimana yang digunakan di UT sebaiknya ditukar persentasenya sebab jenjang profesional lebih mengutamakan praktek daripada teori. Selain itu sebaiknya diadakan jenjang pengecekan kebenaran kode dan mata kuliah yang dipilih mahasiswa oleh UPBJJ sehingga dapat mengurangi kesalahan registrasi. UT sebaiknya juga mengembangkan teknologi, seperti fasilitas komputer atau informasi yang dapat diakses internet (fasilitas *online*) sehingga mahasiswa tidak perlu pergi ke UPBJJ untuk mendapatkan informasi. Kurikulum UT harus terus dikembangkan dengan menambah mata kuliah yang lebih mengarah pada pengembangan teknologi, seperti mata kuliah komputer. Kurikulum juga sebaiknya diper-baharui, mengingat selama ini D-III PTPL masih menggunakan kurikulum tahun 1987, padahal STTP sudah menggunakan kurikulum 2000.

Kerja sama yang terjalin antara STTP dengan UT dilihat dari lulusannya adalah, sejak tahun 1999 sampai 2003 mahasiswa yang telah lulus sebanyak 1.792 orang. Di samping itu terdapat peningkatan karier pegawai. Masa pensiun pegawai juga menjadi lebih lama dan karier menjadi lebih panjang. Saat ini para lulusan D-III PTPL UT banyak yang meneruskan kuliah S-1 di daerah secara swadana. Mudah-mudahan kerja sama dapat diteruskan dengan rencana dikembangkannya program S-1 Pertanian di UT.

Once Kurniawan, S. Kom, M.M
Direktur Akademik Universitas Bina Nusantara

Misi UT untuk memajukan bangsa melalui pendidikan perlu mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini karena UT

memberi kesempatan kepada sebanyak-banyaknya orang untuk mendapatkan pendidikan, sebab pendidikan di UT tidak dibatasi oleh jarak geografis ataupun umur. Perjalanan UT selanjutnya tidak hanya terpaku oleh segala sesuatu yang telah dicapai 10 atau 20 tahun yang lalu tetapi harus melihat tantangan ke depan dengan memperhitungkan bahwa teknologi informasi merupakan suatu infrastruktur yang harus digunakan UT dalam proses pembelajarannya, di samping juga harus mengikuti perkembangan dunia industri maupun dunia kerja. Selanjutnya UT harus dapat menghasilkan mahasiswa yang tidak hanya mempunyai nilai baik tetapi juga mempunyai suatu karya yang menunjukkan kemampuannya, sehingga lulusan UT dapat bernilai tinggi.

Dari hasil wawancara, tampak bahwa dalam pandangan mitra kerjanya, UT dinilai sangat mampu menjawab kebutuhan tentang kesempatan mencapai pendidikan tinggi bagi masyarakat di segala segmen dan pelosok daerah. Keterbatasan masyarakat untuk mengakses perguruan tinggi konvensional disebabkan faktor geografis, ekonomi, keterbatasan waktu, dan lain-lain serta semakin maraknya masyarakat memasuki sistem pendidikan kelas jauh sebenarnya menunjukkan bahwa prospek sistem pembelajaran sebagaimana yang ditawarkan oleh UT sangat menjanjikan. Di samping itu UT juga dinilai dapat menjadi contoh bagi pengembangan media belajar yang berupa modul. Tetapi disayangkan bahwa UT dinilai kurang mampu menampakkan dan menawarkan diri.

Untuk itu UT harus pandai melihat potensi yang dimiliki dan melakukan kaji kebutuhan dalam rangka pengembangan diri. Sebaiknya UT mempunyai warna tersendiri dalam program-program yang ditawarkan sehingga bersifat unik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat di mana UT berada. UT juga harus bersifat fleksibel, yaitu kekuatannya dalam hal memproduksi modul, memproduksi media pembelajaran, dan melakukan evaluasi dapat

digunakan untuk memperluas program-program yang ditawarkan. Dalam rangka ini, UT dinilai kurang mampu berpikir alternatif dan menangkap peluang-peluang yang ada. Pembelajaran sepanjang hayat merupakan salah satu peluang besar bagi UT. Untuk itu kerja sama dengan berbagai pihak harus semakin banyak dikembangkan, antara lain dengan departemen teknis, sesama rekan perguruan tinggi, dan lain-lain.

Untuk mendukung aktivitasnya, penerapan teknologi di segala bidang sangat dianjurkan. *Belajar-e* dan sistem pelayanan *online* yang sudah dikembangkan harus semakin ditingkatkan. Sistem penjaminan kualitas yang sedang dikembangkan oleh UT dinilai baik, walaupun untuk beberapa hal Universitas Terbuka masih harus banyak berbenah diri. UT harus memperbaiki pelayanannya baik pelayanan administrasi maupun akademik, sarana dan prasarana yang terdapat di daerah, kualitas sumber daya manusianya agar tidak terlalu bergantung pada universitas pembina, dan lain-lain. UT yang dinilai sebagai pusat pembina dalam hal pendidikan jarak jauh, yang salah satunya adalah program pendidikan keguruan, harus dapat menjaga imaji sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas, sehingga kontrol terhadap kualitas merupakan prioritas. □

PANDANGAN KARYAWAN TERHADAP UNIVERSITAS TERBUKA

Sugilar dan Agus Saryadi

Pengantar

Seorang karyawan UT menghabiskan waktu sekitar delapan jam sehari di tempat kerjanya. Hal ini berarti sekitar setengah dari waktu hidup mereka dalam keadaan terjaga dihabiskan di tempat kerja, tentu saja di luar hari libur atau cuti. Dengan demikian, betapa pentingnya bagi seorang karyawan untuk merasa senang dan puas dengan berbagai aspek yang terkait dengan tempat kerja. Apakah yang membuat karyawan memiliki kepuasan kerja? Banyak penelitian mengenai kepuasan kerja, tetapi jawaban yang jelas terhadap pertanyaan tersebut belum memuaskan. Kepuasan kerja merupakan fenomena yang terlalu rumit untuk dapat dijelaskan ke dalam faktor-faktor yang sederhana. Karyawan sebagai seorang manusia, adalah unik. Setiap karyawan memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga berbeda pula aspek yang dapat membahagiakan mereka. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang mem-

berikan kontribusi terhadap kepuasan bekerja pada banyak orang, di antaranya ialah kesejahteraan atau pendapatan, pengembangan karier, aktualisasi diri, dan kondisi lingkungan kerja.

Tulisan ini tidak bermaksud menjelaskan secara detil mengenai kepuasan kerja. Melalui survei kami mencoba memaparkan pandangan karyawan terhadap kesesuaian harapan dan kenyataan dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan status mereka sebagai karyawan UT. Aspek tersebut meliputi kesejahteraan, pengembangan karier, aktualisasi diri, dan kondisi lingkungan kerja. Besarnya kesenjangan antara harapan dan kenyataan terhadap suatu aspek menunjukkan kepuasan terhadap aspek tersebut. Jika harapan jauh di bawah kenyataan maka ini dapat dianggap sebagai kondisi ketidakpuasan karyawan. Sebaliknya, bilamana harapan sesuai dengan kenyataan maka kondisi tersebut dianggap sebagai kondisi yang memuaskan karyawan. Pada tulisan ini, aspek kesejahteraan, pengembangan karier, aktualisasi diri, dan kondisi lingkungan kerja masing-masing dijabarkan dalam indikator atau subkomponen berikut.

1. Kesejahteraan: pendapatan, jaminan sosial (kesehatan dan hari tua), perumahan, pendidikan anak, transportasi, kebanggaan sebagai karyawan, berfungsinya unit-unit yang menunjang kesejahteraan karyawan.
2. Pengembangan karier: kesesuaian pendidikan dengan pekerjaan, kesesuaian pekerjaan dengan minat dan bakat, kesempatan mengembangkan karier, sarana dan prasarana pendukung pengembangan karier.
3. Aktualisasi diri: kegembiraan dalam bekerja, kesempatan menerapkan hal-hal baru dalam pekerjaan, kesesuaian pekerjaan dengan kata hati, nilai kejujuran dalam bekerja, kesempatan untuk berbeda pendapat, kesempatan untuk mengajukan ide-ide, serta pemberian tanggung jawab dan wewenang.

4. Kondisi lingkungan kerja: lingkungan fisik, lingkungan sosial, disiplin pegawai, kebijakan mengenai waktu bekerja, peranan pimpinan terhadap pekerjaan.

Metode Pengumpulan Data

Hingga tahun 2004, jumlah karyawan UT adalah 1613 orang. Sebanyak 864 karyawan berada di UT Pusat, sedangkan sisanya tersebar di 35 UPBJJ-UT. Populasi survei ini ialah karyawan UT yang berada di UT Pusat. Sampel diambil secara acak dengan memperhatikan proporsi jumlah karyawan berdasarkan tahun masuk dan jabatan struktural di UT. Tahun masuk dan jabatan struktural dianggap dapat mempengaruhi respons terhadap pertanyaan dalam survei. Dengan ukuran sampel 251 karyawan, survei ini memiliki *sampling error* kurang dari 6,2% untuk taraf kepercayaan 95%. Hal ini berarti, dengan peluang 95%, hasil yang sebenarnya terletak pada selang $\pm 6,2\%$ dari hasil yang diperoleh pada survei ini.

Fokus pertanyaan pada survei ini ialah persepsi karyawan terhadap kesesuaian harapan dan kenyataan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan status mereka sebagai karyawan UT. Hal-hal yang berkenaan dengan harapan dan kenyataan mencakup komponen kesejahteraan, pengembangan karier, aktualisasi diri, dan kondisi lingkungan kerja. Kuesioner pada survei ini menggunakan skala penilaian 1 sampai 5 terhadap pernyataan yang berkaitan dengan komponen-komponen tersebut. Nilai 1 menunjukkan bahwa responden menilai komponen dalam pernyataan tersebut kurang dari 20% sesuai antara harapan dan kenyataannya, nilai 2 menunjukkan antara 21%–40% sesuai harapan dan kenyataan, nilai 3 menunjukkan antara 41%–60% sesuai antara harapan dan kenyataan, nilai 4 menunjukkan 61%–80% sesuai antara harapan

dan kenyataan, dan nilai 5 menunjukkan 81%–100% sesuai antara harapan dan kenyataan.

Untuk tiap komponen dikembangkan butir-butir yang terkait sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Reliabilitas kuesioner ini ditunjukkan oleh koefisien reliabilitas sebesar 0,85. Validitas kuesioner ditelaah melalui analisis faktor untuk melihat kecenderungan pengelompokan butir-butir instrumen berdasarkan keempat aspek yang diukur, yaitu kesejahteraan, pengembangan karier, aktualisasi diri, dan kondisi lingkungan kerja.

Data penilaian responden disajikan dalam rata-rata terbobot sehingga memiliki arti sejajar dengan skala nilainya. Dengan demikian, jika diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,15 hal ini berarti secara rata-rata responden menilai bahwa kurang lebih 60% pada suatu komponen atau subkomponen yang ditanyakan telah sesuai antara harapan dan kenyataan. Selain itu, karena penilaian responden bersifat relatif terhadap standar tertentu, informasi yang disajikan lebih sesuai bila dimaknai dalam perbandingan antarkomponen atau subkomponen. Misalnya, rata-rata penilaian responden terhadap dua subkomponen masing-masing 3,15 dan 3,40 maka selain dapat diartikan sebagai persentase kesesuaian harapan dan kenyataan, nilai tersebut dapat diartikan bahwa subkomponen yang terakhir relatif lebih memiliki banyak kesesuaian dibandingkan subkomponen pertama. Dengan demikian, urutan subkomponen atau komponen berdasarkan rata-rata nilai memiliki makna perbandingan besarnya kesesuaian antara harapan dan kenyataan.

Gambaran Keseluruhan

Pada Tabel 1 tersaji nilai rata-rata penilaian responden terhadap komponen yang ditanyakan dalam survei. Secara keseluruhan,

karyawan UT memberikan penilaian di atas 3 terhadap semua komponen yang dinilai. Rata-rata penilaian terhadap masing-masing komponen mencapai 3.38. Hal ini berarti, dalam pandangan karyawan, lebih dari 60% yang berkaitan dengan kesejahteraan, pengembangan karier, aktualisasi diri, dan lingkungan kerja, telah sesuai dengan yang mereka harapkan. Komponen kesejahteraan dinilai paling rendah (3,18) oleh karyawan UT dibandingkan komponen lainnya. Aspek kesejahteraan berkaitan dengan pendapatan, jaminan sosial (kesehatan dan hari tua), perumahan, pendidikan anak, transportasi, kebanggaan sebagai karyawan, berfungsinya unit-unit yang menunjang kesejahteraan karyawan. Hal-hal tersebut dinilai lebih rendah oleh karyawan UT dibandingkan dengan komponen lain.

Kepuasan karyawan terhadap pendapatan seyogianya dilihat dari perbandingan relatif dengan karyawan pada institusi lain yang setara. Artinya, perbandingan seyogianya dalam koridor sesama perguruan tinggi, lebih khusus lagi ialah sesama perguruan tinggi negeri (PTN). Meskipun demikian, tak terhindarkan bahwa mungkin saja para karyawan UT membandingkannya dengan pendapatan yang diperoleh karyawan di institusi lain yang tidak setara, misalnya saudaranya yang bekerja di perusahaan swasta asing atau tetangga yang bekerja di BUMN. Secara objektif, UT mungkin satu-satunya PTN yang memberikan insentif rutin, uang transport, makan siang, dan honorarium tambahan apabila mereka terlibat dalam kegiatan.

Komponen kesejahteraan, yang biasanya diukur dengan materi dan menjadi idaman setiap karyawan, pada survei ini justru mendapat nilai rendah. Ini bukan berarti mereka tidak bersyukur dengan apa yang mereka terima. Tampaknya, materi bukan segala-galanya dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan. Ternyata komponen aktualisasi diri merupakan komponen yang mendapat penilaian paling tinggi (3,50) dari karyawan UT.

Aspek pengembangan karier berkaitan dengan kesesuaian pendidikan dengan pekerjaan, kesesuaian pekerjaan dengan minat dan bakat, kesempatan mengembangkan karier, sarana dan prasarana pendukung pengembangan karier. Aspek ini mendapat penilaian yang hampir sama dengan aktualisasi diri, yaitu sebesar 3,46. Dengan demikian, harapan mereka terhadap perkembangan karier telah dipenuhi sekitar 70%.

Pengembangan karier tenaga akademik UT terkait dengan jenjang kepangkatan tenaga dosen perguruan tinggi. Selain itu, kesempatan meningkatkan kemampuan intelektual melalui pendidikan formal terbuka lebar. Sejak awal kelahiran UT hingga sekarang, tawaran mengikuti pendidikan S-2 dan S-3, baik di dalam maupun luar negeri, selalu tersedia. Perkembangan karier tenaga administratif dilihat dari jenjang kepangkatan dan jabatan struktural, sehingga terbuka kesempatan bagi mereka untuk mengikuti kursus-kursus maupun pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dapat menunjang karier mereka. Diklat-diklat yang tersedia dari Sepada/Adum, Sepama, hingga Lemhanas. Nilai rata-rata penilaian karyawan UT terhadap aspek pengembangan karier menunjukkan bahwa karyawan UT tidak terlalu merisaukannya. Dengan kata lain, pengembangan karier karyawan UT merupakan suatu keniscayaan apabila seseorang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan tak tercela.

Aspek aktualisasi diri terkait dengan kegembiraan dalam bekerja, kesempatan menerapkan hal-hal baru dalam pekerjaan, kesesuaian pekerjaan dengan kata hati, nilai kejujuran dalam bekerja, kesempatan untuk berbeda pendapat, kesempatan untuk mengajukan ide-ide, serta pemberian tanggung jawab dan wewenang. Ini berarti dalam hal tersebut sekitar 70% karyawan UT merasa harapannya telah terpenuhi, begitu pula kondisi untuk berbeda pendapat dan mengajukan ide-ide terutama terkait dengan budaya kerja yang amat

konduif di lingkungan institusi ini. Sebagai institusi pendidikan tinggi, karyawan UT merasa dengan leluasa dapat menyumbangkan ide-ide baru demi terciptanya budaya kerja terbuka. Terkait dengan angka penilaian terhadap aspek kesejahteraan, dapat digambarkan bahwa karyawan UT merasa lebih mampu beraktualisasi diri dalam pekerjaannya di UT meskipun belum mendapat kesejahteraan yang sesuai dengan harapannya.

Tabel 1
Penilaian Karyawan UT

KOMPONEN	NILAI RATA-RATA
Kesejahteraan	3.18
Perkembangan karier	3.46
Aktualisasi Diri	3.50
Lingkungan Kerja	3.40

Aspek kondisi lingkungan kerja terkait dengan lingkungan fisik, lingkungan sosial, disiplin pegawai, kebijakan mengenai waktu bekerja, peranan pimpinan terhadap pekerjaan. Aspek ini dinilai lebih baik daripada aspek kesejahteraan, meskipun di bawah aspek aktualisasi diri dan perkembangan karier. Lingkungan kerja secara fisik memang telah banyak ditingkatkan akhir-akhir ini. Ruang kerja, gedung, dan taman lebih terawat kebersihannya. Bagaimana dengan lingkungan kerja nonfisik? Hasil penilaian karyawan terhadap aspek lingkungan kerja menunjukkan penilaian 3,40 dan penilaian terendah justru diberikan pada lingkungan fisik yang hanya mencapai (2,71).

Kesejahteraan

Dalam hal kesejahteraan karyawan, secara finansial, UT memiliki berbagai kebijakan. Kebijakan yang paling populer adalah pemberian insentif kepada seluruh karyawan. Melalui sistem insentif, setiap karyawan mendapat penghasilan tambahan di luar gaji sebagai pegawai negeri sipil. Kebijakan ini berlaku semenjak UT berdiri pada tahun 1984. Pada awal kelahiran UT, sistem insentif ini membuat karyawan baru UT merasa sangat terbantu dalam hal pendapatan. Sebagai calon PNS, gaji yang diterima relatif kecil. Dapat dibayangkan, betapa sulitnya menyejahterakan keluarga dengan gaji minim. Sementara kebutuhan hidup tidak hanya berkaitan dengan pangan dan sandang, tetapi juga membayar sewa kontrak rumah serta biaya pendidikan anak. Oleh karena itu, pemberlakuan sistem insentif dalam rangka kesejahteraan karyawan diharapkan dapat menjamin kontinuitas bekerja.

Pada perkembangan terakhir, mulai tahun 2001, karyawan UT juga mendapatkan makan siang dan menerima uang transport. Pemberian uang transport menganut asas keadilan. Artinya, jumlah yang diterima sesuai dengan jumlah kehadiran. Selain itu, karyawan yang terlibat dalam berbagai kegiatan tentu menerima honorarium yang juga menambah penghasilan bulanan mereka.

Dari berbagai kebijakan tersebut, bagaimana responden menilai penghasilan mereka sebagai karyawan UT? Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai rata-rata untuk subkomponen penghasilan karyawan adalah 3,18. Ini berarti karyawan UT menilai bahwa kurang lebih 60% harapan terhadap penghasilannya sebagai karyawan UT telah terpenuhi. Penghasilan sebagai karyawan UT dinilai lebih baik dibandingkan subkomponen lainnya, seperti pendidikan untuk anak, perumahan, dan jaminan sosial. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Dalam bidang jaminan sosial, selain asuransi kesehatan yang dimiliki oleh semua pegawai negeri, UT menyediakan layanan kesehatan bagi karyawannya. Poliklinik UT menyediakan dokter umum dan dokter gigi. Para karyawan tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk memeriksa kesehatannya, tetapi hanya memberikan sekadar biaya administrasi, yang nilainya tidak lebih dari beberapa bungkus mi instan. Di samping itu, Yayasan Pembina UT memberikan bantuan pembiayaan bagi karyawan yang memerlukan perawatan di rumah sakit.

Dalam bidang bantuan pendidikan untuk anak-anak karyawan, UT telah membangun sekolah mulai TK sampai SMA. Anak-anak karyawan UT yang bersekolah di sekolah-sekolah tersebut mendapat keringanan biaya. Selain itu UT, juga menyediakan beasiswa untuk anak berprestasi yang diberikan bukan hanya bagi siswa di sekolah yang didirikan UT, tetapi juga siswa dari sekolah lain.

Dalam bidang perumahan karyawan, UT memiliki program untuk memfasilitasi pemilikan rumah bagi karyawannya. Pada awal kelahirannya, UT telah mengupayakan kerja sama dengan pihak pengembang (*developer*) dalam pengadaan rumah. Dalam hal ini UT memberikan bantuan berupa pinjaman uang muka tanpa bunga kepada para karyawan yang belum memiliki rumah sendiri. Sampai saat ini pun, UT terus mengupayakan fasilitas bagi karyawannya untuk memiliki rumah. Akhir-akhir ini, UT juga memberikan pinjaman dana untuk pembangunan rumah bagi karyawan yang telah memiliki tanah sendiri namun belum sempat membangun.

Meskipun semua upaya tersebut telah dilakukan, agak mengherankan bahwa penilaian terhadap jaminan sosial (termasuk kesehatan), pendidikan anak-anak, dan perumahan dinilai relatif rendah, yaitu masing-masing 2,76, 2,74, dan 2,55. Ini berarti, dalam pandangan karyawan UT, kurang dari 60% harapan terhadap jaminan sosial,

pendidikan anak, dan perumahan telah sesuai dengan kenyataannya. Barangkali ini terjadi karena banyak karyawan UT yang baru masuk yang belum tersentuh oleh program-program kesejahteraan UT. Selain itu, seiring dengan perkembangan kebutuhan keluarga yang makin meningkat, maka kebutuhan kesejahteraan pun makin meningkat pula. Jika pada masa awal perkembangan UT, program kesejahteraan yang disediakan UT mungkin masih memadai, sekarang sudah tidak memadai lagi. Misalnya, rumah dengan dua kamar dinilai memadai pada waktu itu, tetapi, sekarang menjadi tidak layak, karena anggota keluarga bertambah. Kebutuhan terhadap pendidikan pun mengalami perubahan. Jika dulu, para karyawan menyekolahkan anaknya dari TK sampai SMP, kini meningkat menjadi SMU sampai perguruan tinggi.

Tabel 2
Penilaian terhadap Komponen Kesejahteraan

SubKomponen	Frekuensi Jawaban					Nilai Rata-rata
	1	2	3	4	5	
Pendapatan	6	59	49	122	8	3.18
Jaminan sosial	20	45	107	62	3	2.76
Perumahan	16	67	81	61	10	2.74
Pendidikan anak	18	65	98	48	1	2.55
Transportasi	5	27	22	141	45	3.64
Kebanggaan karyawan	3	9	33	150	46	3.78
Berfungsinya unit kesejahteraan	1	23	70	134	20	3.57

Kebijakan UT yang dinilai sangat cerdas, selain pemberian insentif, juga penyediaan sarana transportasi. Para petinggi UT menyadari bahwa dengan lokasi kantor pusat UT di kawasan pinggiran Jakarta,

secara otomatis masalah transportasi menjadi perhatian utama. Memang, sebagian karyawan sudah berdomisili di berbagai perumahan di sekitar Tangerang, Depok, dan Bogor. Tetapi sebagian karyawan lainnya masih tinggal di Jakarta dan Bekasi. Untuk kebijakan penyediaan sarana transportasi ini, UT tidak membedakan wilayah tempat tinggal. Baik yang bertempat tinggal jauh dari kantor UT maupun yang bertempat tinggal di sekitar UT dapat memperoleh fasilitas transportasi.

Sarana transportasi yang disediakan adalah kendaraan Toyota Kijang. Cara memperolehnya, karyawan cukup mengajukan usulan yang didahului kesepakatan anggota untuk membentuk semacam paguyuban lengkap dengan rute yang dilalui. Setiap mobil jemputan beranggota rata-rata sepuluh orang. Dalam kebijakan penyediaan sarana transportasi ini, UT hanya menyediakan kendaraan. Perawatan rutin kendaraan tersebut menjadi tanggung jawab seluruh anggota, sedangkan jika ada kerusakan berat ditanggung UT.

Sebagai suatu paguyuban, mereka memiliki berbagai norma, di antaranya ialah ketepatan waktu jemputan. Dalam hal ini, terdapat segi positifnya, yaitu para karyawan relatif tepat waktu datang dan pulang. Selain itu, hubungan antara anggota menjadi lebih akrab. Untuk mengurangi kejenuhan selama perjalanan, anggota jemputan menggunakannya untuk mengobrol atau berdiskusi. Tidak mengherankan jika berbagai topik yang sedang hangat di UT dibahas tuntas di dalam mobil jemputan.

Dalam lima tahun terakhir, UT mengeluarkan kebijakan yang juga dinilai sangat manusiawi, yaitu memberikan bantuan perbaikan dan perawatan mesin sampai renovasi *body* mobil kijang yang dilakukan secara bertahap. Kini, tampilan kijang jemputan yang sudah direnovasi tampak lebih menarik. Oleh karena itu, penilaian karyawan UT terhadap transportasi cukup tinggi, yaitu 3,64. Ini

berarti sekitar 80% harapan mereka terhadap sarana transportasi telah terpenuhi.

Poliklinik, koperasi, Yayasan Pembina UT, Dharmakarya UT, sekolah-sekolah, sarana olah raga merupakan unit-unit kesejahteraan yang tersedia di UT. Menurut pendapat karyawan UT, berfungsinya unit kesejahteraan di UT setara dengan nilai 3,57. Ini berarti sekitar 70% harapan mereka terhadap berfungsinya unit-unit kesejahteraan tersebut telah dipenuhi.

Penilaian yang sangat menggembirakan diberikan oleh karyawan UT pada aspek kebanggaan sebagai karyawan UT. Karyawan UT memberi nilai 3,78 terhadap kebanggaan sebagai karyawan UT. Hal ini merupakan nilai tertinggi dalam komponen kesejahteraan. Dengan kata lain, kebanggaan menjadi karyawan UT yang mereka harapkan telah dipenuhi sekitar 80%. Barangkali hal ini berkaitan dengan lingkup UT secara faktual bahwa UT adalah perguruan tinggi berskala nasional, dengan cabang-cabang di setiap provinsi. Lagipula, bangunan fisik UT akhir-akhir ini tampak semakin meyakinkan, sebagai sebuah kantor yang dapat dibanggakan.

Pengembangan Karier

Pada tahun 2004, UT menyediakan anggaran lebih dari enam ratus lima puluh juta rupiah untuk beasiswa karyawannya. Karyawan penerima beasiswa ditentukan oleh Tim Penentu Pemberian Tugas/Izin Belajar (TPP-TIB). Semenjak tahun 1998, setiap tahunnya kurang lebih 20 orang karyawan UT menerima beasiswa dari UT untuk pendidikan lanjutannya. Kebijakan lain yang dimulai tahun 2003 di UT ialah rotasi pegawai. Semua kebijakan tersebut merupakan upaya untuk menyelaraskan antara pendidikan dan minat serta bakat karyawan sehubungan dengan pekerjaannya. Kebijakan yang

terkesan kontroversial yang terkait dengan masalah ini ialah UT sebagai “pengelola” atau “sumber”. Pada level mata kuliah, masalah ini terkait dengan arah pengembangan tenaga dosen, apakah akan diarahkan sebagai ahli substansi mata kuliah atau ahli dalam mengelola mata kuliah. Sampai saat ini kontroversi mengenai masalah ini masih sering muncul di kalangan tenaga akademik. Pada kalangan tenaga administratif masalah ini tentunya tidak terlalu menarik untuk dibicarakan. Apakah masalah ini mempengaruhi penilaian karyawan UT terhadap kesesuaian pendidikan dan minat mereka dengan pekerjaan? Hasil survei menunjukkan bahwa karyawan UT memberikan nilai rata-rata 3,57 untuk kesesuaian antara pendidikan dan pekerjaan, dan 3,56 untuk kesesuaian pekerjaan dengan minat/bakat. Hal ini berarti secara rata-rata, karyawan UT menilai bahwa sekitar 70% harapan mereka berkenaan dengan kesesuaian pendidikan dan minat/bakat mereka dengan pekerjaan telah terpenuhi.

Penilaian karyawan UT terhadap kesesuaian pendidikan dan minat mereka dengan pekerjaan masih lebih baik dibandingkan penilaian mereka terhadap perkembangan karier mereka. Penilaian karyawan terhadap kesempatan pengembangan karier adalah 3,27, sedangkan penilaian karyawan terhadap sarana/prasarana pendukung pengembangan karier adalah 3,44. Hal ini berarti mereka menilai bahwa hanya sekitar 60% harapan mereka terhadap perkembangan karier mereka menjadi kenyataan.

Tabel 3
Penilaian terhadap Komponen Perkembangan Karier

Subkomponen	Frekuensi Jawaban					Nilai Rata-rata
	1	2	3	4	5	
Kesesuaian pendidikan dengan pekerjaan	3	30	45	141	27	3.57
Kesesuaian pekerjaan dg minat / bakat	4	28	57	132	27	3.56
Kesempatan untuk mengembangkan karier	9	39	91	94	17	3.27
Sarana dan prasarana pendukung karier	2	38	66	123	19	3.44

Aktualisasi Diri

Aktualisasi diri dalam survei ini lebih berkaitan dengan hal-hal praktis seperti kegembiraan dalam bekerja, kesempatan menerapkan hal baru, kesesuaian pekerjaan dengan nurani, nilai kejujuran dalam pekerjaan, kesempatan untuk berbeda pendapat, kesempatan untuk mengajukan ide-ide, dan kesesuaian tanggung jawab dan wewenang. Karyawan UT menilai bahwa kegembiraan dalam bekerja merupakan aspek yang paling mendapat nilai tinggi (3,83) dalam kelompok aktualisasi diri. Ini berarti mereka memiliki situasi psikologis yang baik dalam bekerja. Begitu juga dengan nilai kejujuran yang terkait dengan pekerjaan. Penilaian karyawan UT terhadap yang terakhir ini mencapai 3,71. Dengan demikian secara moralitas pun mereka merasa situasi kerja yang mereka nilai baik.

Tabel 4
Penilaian terhadap Komponen Aktualisasi Diri

Subkomponen	Frekuensi Jawaban					Nilai Rata-rata
	1	2	3	4	5	
Kegembiraan dalam bekerja	1	11	36	170	30	3.83
Kesempatan menerapkan hal baru	5	37	77	116	13	3.34
Kesesuaian pekerjaan dengan nurani	4	31	63	129	18	3.43
Nilai kejujuran dalam pekerjaan	3	17	29	153	39	3.71
Kesempatan untuk berbeda pendapat	5	41	74	116	11	3.30
Kesempatan untuk mengajukan ide-ide	5	34	78	118	13	3.36
Tanggung jawab dan wewenang	4	27	50	149	17	3.54

Kesesuaian pekerjaan dengan nurani dinilai hampir sama dengan tanggung jawab dan wewenang. Penilaian terhadap kedua hal tersebut tergolong moderat, yaitu masing-masing 3,43 dan 3,54. Hal ini juga menggambarkan bahwa kebanyakan responden adalah karyawan yang bukan pejabat struktural, karena dalam populasi pun demikian. Mereka tidak memiliki terlalu banyak masalah dalam tanggung jawab dan wewenang dalam pekerjaan. Hal ini berbeda dengan penilaian karyawan terhadap kesempatan menerapkan hal baru, kesempatan untuk berbeda pendapat, serta kesempatan mengajukan ide-ide, yang dinilai lebih rendah oleh karyawan UT, masing-masing 3,34, 3,30, dan 3,36. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan memiliki gagasan dalam pekerjaannya tetapi terhambat dalam mengomunikasikannya. Sarana untuk curah pendapat seharusnya tersedia dalam rapat-rapat yang dilaksanakan di unit kerja masing-masing.

Lingkungan Kerja

Penataan lingkungan kerja telah banyak dilaksanakan di UT akhir-akhir ini. Pengembangan lingkungan fisik masih terus dilakukan UT, baik di pusat maupun di UPBJJ-UT. Mungkin karena masih dalam taraf pengembangan inilah yang membuat penilaian karyawan UT terhadap lingkungan fisik mencapai nilai terendah di antara sub-komponen lainnya, yaitu hanya 2,71 dibandingkan rata-rata penilaian pada komponen ini yang mencapai 3,40. Suatu hal yang menggembirakan adalah penilaian karyawan terhadap lingkungan sosial yang mencapai nilai tertinggi pada komponen lingkungan kerja, yaitu 3,77. Lingkungan sosial berkaitan dengan hubungan antarkaryawan. Salah satu keuntungan nonekonomis dari karyawan ialah bertemu dan bekerja sama dengan orang lain yang memiliki minat dan latar belakang yang sama. Hubungan persahabatan yang kuat dapat terbentuk di tempat kerja. Karyawan UT menilai bahwa hal-hal tersebut sebagian besar telah terpenuhi di tempat kerja. Penilaian terhadap lingkungan sosial ini mungkin juga terkait dengan kegembiraan dalam bekerja yang juga dinilai tinggi oleh karyawan UT.

Tabel 5
Penilaian terhadap Komponen Lingkungan Kerja

Subkomponen/Indikator	Frekuensi Jawaban					Nilai Rata-rata
	1	2	3	4	5	
Lingkungan fisik	32	39	139	37	1	2.71
Lingkungan sosial	1	17	32	170	27	3.77
Kebijakan waktu bekerja	1	21	41	163	20	3.66
Peranan pimpinan	4	27	62	134	22	3.55

Karyawan UT menilai bahwa kebijakan waktu bekerja dan peranan pimpinan dalam pekerjaan tidak sebaik lingkungan sosial yang telah terbentuk selama ini. Penilaian terhadap kebijakan waktu bekerja, serta peranan pimpinan dalam pekerjaan masing-masing mencapai 3,66, dan 3,55. Kedua penilaian ini jelas lebih baik dibandingkan penilaian mereka terhadap lingkungan fisik yang hanya mencapai 2,71, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan penilaian mereka terhadap peranan pimpinan. Jika penilaian terhadap peranan pimpinan tersebut dihubungkan dengan penilaian pada Tabel 4 yang menunjukkan relatif rendahnya penilaian pada aspek kesempatan menerapkan hal baru, kesempatan untuk berbeda pendapat, serta kesempatan mengajukan ide-ide, maka mungkin dapat diartikan bahwa karyawan UT memiliki potensi untuk bekerja secara lebih kreatif dan mandiri.

Simpulan

Tulisan ini telah memaparkan gambaran kesesuaian harapan dan kenyataan karyawan UT terhadap kesejahteraan, pengembangan karier, aktualisasi diri, dan kondisi lingkungan kerja. Komponen kesejahteraan mendapat penilaian sebesar 3,18. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata penilaian terhadap tiap komponen, yaitu sebesar 3,38. Aspek kesejahteraan berkaitan dengan pendapatan, jaminan sosial (kesehatan dan hari tua), perumahan, pendidikan anak, transportasi, kebanggaan sebagai karyawan, berfungsinya unit-unit yang menunjang kesejahteraan karyawan. Karyawan UT menilai bahwa komponen aktualisasi diri mereka dalam pekerjaannya paling memenuhi harapan dibanding komponen lainnya, seperti yang ditunjukkan oleh angka penilaian sebesar 3,50.

Pada komponen kesejahteraan, kebanggaan sebagai karyawan UT mendapat penilaian dari karyawan UT dengan nilai yang relatif

tinggi. Kebanggaan sebagai karyawan UT bahkan mendapat penilaian kedua tertinggi dari seluruh indikator pada survei ini. Pada komponen pengembangan karier, kesesuaian minat mereka dengan pekerjaannya mendapat penilaian tertinggi. Pada komponen aktualisasi diri, kegembiraan dalam bekerja dinilai paling tinggi oleh karyawan UT. Kegembiraan dalam bekerja bahkan merupakan sub-komponen yang mendapat penilaian tertinggi untuk semua indikator dalam survei ini. Pada komponen lingkungan kerja, karyawan UT menempatkan lingkungan sosial dalam pekerjaan dengan nilai tertinggi, jauh di atas lingkungan fisik yang menempati peringkat terendah dalam penilaian mereka. □

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP UNIVERSITAS TERBUKA

Effendi Wahyono

Pengantar

Kelahiran pendidikan jarak jauh didorong oleh adanya kesenjangan antara tingginya kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan keterbatasan sarana/prasarana pendidikan. Kesenjangan itu dalam berbagai hal diatasi dengan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh.

Belajar dengan sistem jarak jauh sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1950-an dengan diselenggarakannya sekolah penyiaran (*schoolbroadcasting*) yang diprakarsai oleh Djawatan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (kini Departemen Pendidikan Nasional). Kemudian di Bandung diselenggarakan penataran guru secara tertulis. Di samping lembaga pemerintah, pada periode itu terdapat sebuah lembaga swasta di Semarang yang menyelenggarakan kursus tata buku secara tertulis dengan sistem jarak jauh.

Pada tahun 1970-an, kebutuhan akan tenaga kependidikan sangat tinggi seiring dengan perluasan kesempatan belajar. Pendidikan tenaga kependidikan (guru) diselenggarakan dengan program-program *instant* (program cepat) untuk dapat memenuhi kebutuhan guru baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama (SLP) maupun sekolah menengah atas (SLA). Guru SLP diangkat dari lulusan D-I atau PGSLP, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan guru SLA diangkat dari mereka yang telah memiliki ijazah D-III atau PGSLA. Akibat dari kebijakan itu, terjadi penurunan mutu guru yang jika tidak diatasi, akan mengakibatkan penurunan mutu pendidikan. Karena itu, perlu diadakan peningkatan mutu guru dengan mengirimkan mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi dalam kenyataannya, mereka tidak dapat meninggalkan pekerjaannya sebagai guru yang jumlahnya waktu itu masih sangat kecil. Tidak ada guru pengganti jika mereka dikirim untuk mengikuti pendidikan. Cara yang paling efisien yang memungkinkan mereka dapat mengikuti pendidikan dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai guru adalah dengan pendidikan jarak jauh.

Pada tahun 1981 Pemerintah menyelenggarakan proyek pendidikan tenaga kependidikan dengan sistem jarak jauh. Semula proyek ini ditangani oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi karena hal ini menyangkut tingkat pendidikan tinggi, proyek itu kemudian dialihkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan proyek ini diserahkan kepada 12 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di seluruh Indonesia.

Masalah lain yang muncul sebagai dampak perluasan kesempatan pendidikan adalah ledakan lulusan sekolah menengah yang terjadi pada Pelita IV, yang tidak sebanding dengan daya tampung pendidikan tinggi. Ketika itu lulusan sekolah menengah atas telah mencapai 600.000 siswa. Jumlah itu diperkirakan akan meningkat menjadi 1,5 juta, sedangkan daya tampung perguruan tinggi yang

ada waktu itu, baik negeri maupun swasta hanya mencapai kurang lebih 650.000. Itu berarti ada lebih dari 750.000 lulusan sekolah lanjutan atas yang tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi. Pemerintah tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk membuka perguruan tinggi tatap muka (konvensional) guna menampung lulusan sekolah menengah atas, sedangkan pemerataan belajar menjadi salah satu unsur dalam Delapan Jalur Pemerataan Pembangunan, program Pembangunan Lima Tahun (Pelita) IV.

Untuk mengatasi kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada, pemerintah memutuskan untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi negeri dengan sistem jarak jauh. Perguruan tinggi jarak jauh, dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya, memungkinkan pemerintah untuk memberikan kesempatan yang luas kepada warga negara Indonesia guna mengikuti pendidikan tinggi.

Demikianlah tujuan utama pendirian UT adalah untuk menampung lulusan sekolah lanjutan tingkat atas yang ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat pendidikan tinggi, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan mutu dan kemampuan guru sekolah menengah tingkat pertama dan atas melalui pendidikan Diploma dan S-1 kependidikan, serta meningkatkan kemampuan mengajar para pengajar (dosen) di perguruan tinggi melalui Akta Mengajar V.

Masalah Pendidikan

UT didirikan karena adanya masalah dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia yang harus dipecahkan. Masalah utama yang dihadapi dunia pendidikan tinggi yang melatarbelakangi kelahiran UT adalah

masalah 1) daya tampung, 2) mutu, 3) relevansi, dan 4) produktivitas pendidikan tinggi.

1) *Daya Tampung*

Setiap tahun jumlah lulusan SLTA yang ingin memasuki pendidikan tinggi atau ingin menjadi mahasiswa meningkat lebih besar dari peningkatan kapasitas penerimaan mahasiswa baru, baik pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Pada akhir Pelita IV jumlah mahasiswa yang harus ditampung pada perguruan tinggi akan mencapai 1,5 juta; sementara daya tampung perguruan tinggi hanya kurang lebih 700.000 orang. Dengan demikian, akan banyak calon mahasiswa yang tidak dapat memasuki dunia pendidikan tinggi.

2) *Mutu Pendidikan*

Sumber daya utama penyelenggaraan pendidikan adalah tenaga pengajar atau dosen. Jumlah staf pengajar di seluruh perguruan tinggi negeri pada waktu itu (awal 1980-an) hanya kurang lebih 20.000 orang. Dari jumlah itu hanya 4.000 tenaga pengajar yang berstatus tenaga pengajar mandiri yaitu lektor ke atas. Jumlah staf pengajar tersebut menghadapi mahasiswa yang jumlahnya mencapai 300.000 orang. Di samping itu, dari sisi sebaran, baik secara regional maupun bidang ilmu keadaannya lebih memprihatinkan. Dari 4.000 orang yang berstatus tenaga pengajar yang berfungsi secara mandiri, 80 persen berada di 9 universitas/institut yang umumnya berada di Jawa.

3) *Relevansi*

Perencanaan pendidikan waktu itu belum pernah didasarkan atas kebutuhan pasar kerja. Perencanaan lebih banyak didasarkan atas tersedianya sumber daya (meskipun secara kualitas belum memadai), terutama tuntutan sosial seperti penampungan lulusan sekolah menengah. Akibat keadaan ini adalah ketidakmerataan dalam penyediaan lulusan perguruan tinggi untuk lingkungan kerja.

4) *Produktivitas Pendidikan*

Minimnya anggaran pembangunan untuk sektor pendidikan menyebabkan lembaga pendidikan selalu mengalami masalah kekurangan dana. Kekurangan dana pembangunan dan operasional menyulitkan pengembangan perguruan tinggi. Masalah itu diperumit lagi oleh kekurangan jumlah staf pengajar dan kekurangan dalam pengalaman dan pengetahuan staf pengajar. Kondisi yang serba kurang itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas perguruan tinggi. Produktivitas perguruan tinggi, baik dalam bidang menghasilkan lulusan, informasi ilmiah, maupun informasi pembangunan sebagai produk tridharma perguruan tinggi waktu itu masih sangat lemah.

Kondisi pendidikan tinggi seperti itulah yang melatarbelakangi lahirnya UT, sehingga kelahiran UT diharapkan dapat ikut membantu memecahkan masalah tersebut. Meskipun demikian, kehadiran UT pada tahun 1984 menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat pendidikan yang sudah muncul sejak ide mendirikan sebuah pendidikan tinggi terbuka digulirkan. Tak heran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sendiri sempat ragu untuk meneruskan perencanaan penyiapan pendirian UT. Ada sebagian

masyarakat yang menyambut optimis atas kehadiran UT. Ada pula kalangan yang pesimis terhadap UT. Mereka yang optimis berharap dengan kehadiran UT, kesempatan warga masyarakat yang ingin memasuki perguruan tinggi menjadi tidak terbatas. Pendidikan tinggi tidak eksklusif hanya dapat dimiliki oleh masyarakat kalangan tertentu. Sebaliknya bagi mereka yang pesimis menganggap bahwa pendidikan tinggi tidak dapat dilakukan secara massal. Bagi mereka, pendidikan yang dilakukan secara massal tidak akan dapat menjaga standar kualitas.

Masalahnya kemudian adalah bagaimana mendirikan universitas yang sifatnya massal dengan sistem terbuka dengan tidak mengabaikan masalah kualitas. Pendidikan yang sifatnya massal seperti UT dapat pula dijamin kualitasnya jika penulis bahan ajar dan penulis soal ujiannya dilakukan oleh dosen-dosen terbaik yang hanya dimiliki oleh beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia. Bahan ajar tersebut kemudian dicetak (dilengkapi dengan penjelasan menggunakan audio/video) dan dikirim kepada mahasiswa yang tersebar di berbagai wilayah. Dengan cara seperti ini, sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh UT justru dapat menjembatani kesenjangan mutu pendidikan yang ada.

Mendirikan sebuah perguruan tinggi jarak jauh tidak memerlukan sumber daya akademik yang lengkap. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan perguruan tinggi jarak jauh adalah kemampuan manajemen untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya akademik yang ada, yang telah dimiliki oleh perguruan tinggi atau lembaga yang sudah ada. Waktu itu banyak tenaga ahli yang dimiliki oleh berbagai perguruan tinggi dan lembaga lain yang belum dimanfaatkan secara optimal. Tenaga ahli itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh UT untuk menulis bahan ajar dan soal-soal ujian.

Sejak awal UT dirancang untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga lain, terutama dalam pemanfaatan sumber akademik seperti ahli dalam bidang ilmu (untuk menulis bahan ajar, tutor), ahli instruksional (untuk merancang desain instruksional), ahli media (untuk merancang jenis media yang digunakan), dan ahli bahasa, tempat dan peralatan praktek, dan perpustakaan. Karena itu kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga lain merupakan syarat mutlak dalam penyelenggaraan UT. Sebaliknya bagi perguruan tinggi lain, kehadiran UT merupakan suatu keuntungan. Banyak tenaga dosen yang mendapatkan kesempatan menulis bahan ajar untuk pendidikan tinggi yang waktu itu, bahkan sampai saat ini masih tergolong langka. Dengan kehadiran UT, perguruan tinggi di daerah dapat menggunakan bahan ajar UT yang ditulis oleh para ahli yang ada di Indonesia. Sisi lain dari kehadiran UT adalah ketersediaan bahan ajar yang dapat dipergunakan sebagai bahan perkuliahan bagi dosen dan mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Dari kenyataan itu, kehadiran UT bukan merupakan saingan bagi perguruan tinggi yang ada tetapi sebagai pelengkap.

Fenomena Pendidikan

Kelahiran UT mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari besarnya peminat UT ketika pertama kali UT menerima pendaftaran mahasiswa pada pertengahan tahun 1984. Terdapat sekitar 270.000 calon mahasiswa yang menyampaikan keinginannya untuk menjadi mahasiswa UT. Dari jumlah itu 200.000 adalah mereka yang baru lulus dari SLTA. Bagi mereka, UT menjadi pilihan ketiga, jika mereka tidak diterima pada pilihan pertama dan kedua. Tetapi karena kemampuan sumber daya yang dimiliki UT, pada tahun pertama UT hanya dapat menerima sekitar 54.000 mahasiswa.

Kehadiran UT mengubah peta pengelolaan perguruan tinggi. Pada tahun-tahun awal kelahiran UT, banyak perguruan tinggi swasta kecil yang mendaftarkan mahasiswanya menjadi mahasiswa UT. Bahan ajar UT digunakan sebagai bahan perkuliahan mereka. Sebagai mahasiswa UT, mereka juga mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh UT. Perguruan tinggi itu praktis hanya berfungsi sebagai lembaga penyelenggara tutorial bagi mahasiswa UT. Bahkan sampai saat ini, terdapat lembaga pendidikan yang menawarkan program S-1 meskipun lembaga itu tidak memiliki izin operasional. Seluruh mahasiswanya didaftarkan menjadi mahasiswa UT, mengikuti ujian UT, dan mendapatkan ijazah dari UT. Pilihan ini diambil dengan beberapa pertimbangan, antara lain UT adalah perguruan tinggi negeri. Sebagai perguruan tinggi negeri, mahasiswa yang didaftarkan menjadi mahasiswa UT tidak lagi harus mengikuti ujian negara, yang waktu itu menjadi momok bagi sebagian perguruan tinggi swasta, terutama perguruan tinggi swasta yang baru berdiri.

Pada awal perkembangannya, UT hanya menangani sistem registrasi, penyediaan bahan ajar dan ujian, sedangkan tutorial hanya dapat dilaksanakan di tempat-tempat tertentu. Hal itu telah mendorong munculnya bimbingan-bimbingan belajar. Lembaga bimbingan belajar mahasiswa UT itu sama sekali tidak berafiliasi dengan UT. Mereka adalah anggota masyarakat yang memanfaatkan kebijakan UT.

Dengan diinspirasi oleh UT yang menyelenggarakan tutorial dan ujian setiap hari Sabtu dan Minggu, pada tahun 1990-an banyak perguruan tinggi tatap muka yang membuka kelas eksekutif yang menyelenggarakan perkuliahan pada setiap hari Sabtu dan Minggu. Kelas ini dibuka untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang ingin melanjutkan studinya, tetapi mereka tidak dapat mengikuti perkuliahan pada hari kerja. Meskipun demikian,

mereka tidak mungkin memiliki fleksibilitas dan aksesibilitas yang tinggi, seperti halnya sistem belajar yang diselenggarakan UT.

Tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 60 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah No. 61 tentang perguruan tinggi berbadan hukum. Terdapat pihak yang beranggapan bahwa Peraturan Pemerintah itu dikeluarkan karena pemerintah tidak memiliki dana untuk membiayai perguruan tinggi sebagai dampak dari krisis moneter yang terjadi sejak tahun 1997. Namun pihak lain menganggap bahwa Peraturan Pemerintah itu dikeluarkan untuk memberikan otonomi yang lebih besar pada perguruan tinggi dalam mengelola manajemen keuangannya. Terdapat empat perguruan tinggi yang pertama kali dialihkan fungsinya dari perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Perubahan status ini semula diperkirakan akan mengubah peta persaingan dalam hal perekrutan mahasiswa baru. Seperti halnya perguruan tinggi swasta, mahasiswa menjadi andalan dalam pencarian sumber dana pendidikan. Dengan demikian, masalah keterbatasan daya tampung bukan lagi menjadi isu sentral pembangunan pendidikan tinggi.

Pada tahun 1999, masalah lain yang muncul sebagai isu besar dalam dunia pendidikan selain dikeluarkan dua Peraturan Pemerintah tentang pendidikan tinggi tersebut di atas, juga dikeluarkan keputusan tentang Badan Akreditasi Nasional (BAN). Badan ini dibuat oleh Departemen Pendidikan untuk memberikan penilaian terhadap mutu pendidikan yang diberikan oleh setiap perguruan tinggi. Sebagaimana diketahui, UT adalah satu-satunya lembaga penyelenggara pendidikan tinggi dengan sistem jarak jauh. Dengan demikian, dibuatlah acuan yang dapat dijadikan standar untuk menilai UT.

Landasan Hukum Pendidikan Tinggi Jarak Jauh

Meskipun pada awalnya banyak kalangan yang tidak menyetujui kelahiran UT, tetapi setelah beberapa tahun kemudian, banyak perguruan tinggi yang ingin membuka perkuliahan secara jarak jauh, di samping tatap muka yang telah diberikan. Keinginan perguruan tinggi tatap muka membuka pendidikan jarak jauh mendorong Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan yang berisi rambu-rambu penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Pada tahun 1991, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan No. 0564/u/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh. Dalam pasal 4 ayat 1 keputusan itu, dijelaskan bahwa pendidikan tinggi jarak jauh diselenggarakan oleh UT dan perguruan tinggi lain yang diberi tugas untuk melaksanakannya melalui program studi pendidikan jarak jauh. Ayat 2 keputusan itu menyebutkan bahwa penugasan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh menteri atas usul Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Pada pasal 8 Keputusan itu disebutkan bahwa syarat dan tata cara pendirian Universitas Terbuka diatur oleh menteri.

Dengan berlakunya Keputusan Menteri itu, pendidikan tinggi jarak jauh tidak lagi menjadi monopoli UT. Pendidikan tinggi lain mendapatkan peluang untuk membuka atau menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh, dengan syarat mendapat persetujuan atau penugasan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (kini Pendidikan Nasional). Peluang perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan jarak jauh juga secara tidak langsung sudah diwadahi dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999.

Aturan rinci dari pemerintah yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 107 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Program

Pendidikan Tinggi Jarak Jauh. Keputusan Menteri ini mengatur tata cara dan persyaratan penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Syarat-syarat penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 keputusan itu tidaklah mudah dipenuhi. Disebutkan bahwa program pendidikan tinggi jarak jauh diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memang memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain: *pertama*, punya sumber daya untuk merancang, menyusun, memproduksi, dan menyebarluaskan seluruh bahan ajar yang diperlukan untuk memenuhi kurikulum program. Syarat *kedua*, bekerja sama dengan perguruan tinggi lain yang sudah mempunyai izin penyelenggaraan program studi yang sama untuk memfasilitasi kegiatan pengembangan program dan bahan ajar, pemberian layanan bantuan belajar, layanan perpustakaan, pelaksanaan praktikum dan pementapan pengalaman lapangan, serta penyelenggaraan evaluasi hasil belajar secara jarak jauh; *ketiga*, mempunyai sumber daya untuk memutakhirkan secara berkala setiap bahan ajar yang diproduksi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; *keempat*, mempunyai sumber daya untuk menyediakan fasilitas praktikum dan/atau akses bagi mahasiswa untuk melaksanakan praktikum; *kelima*, sudah mempunyai izin penyelenggaraan program studi secara tatap muka dalam bidang studi yang sama, yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Pendidikan Tinggi dengan nilai A atau U (unggulan). Penyelenggara juga diwajibkan membuat laporan pelaksanaan dan menyampaikan laporan kepada Menteri Pendidikan Nasional secara berkala setiap tahun.

Dalam pasal 3 Keputusan Menteri No. 107 tersebut juga dipaparkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh dilaksanakan dengan mengutamakan: (a) penggunaan berbagai media komunikasi

yang berbentuk media komunikasi tercetak dikombinasikan dengan media lain; (b) penggunaan metode pembelajaran interaktif yang didasarkan pada konsep belajar mandiri dengan dukungan bantuan belajar dan fasilitas pembelajaran. Bahan ajar dikembangkan dan dikemas dalam bentuk tercetak dikombinasikan dengan media yang yang dapat digunakan mahasiswa untuk proses belajar mandiri (*Kompas*, 25 September 2001). Keberadaan pendidikan jarak jauh semakin jelas dalam dunia pendidikan di Indonesia dengan keluarnya Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Jaringan Kemitraan Pendidikan Tinggi Jarak Jauh

Hal yang perlu digarisbawahi dari Keputusan itu adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh harus dilaksanakan melalui suatu jaringan kerja sama dengan perguruan tinggi lain. Kerja sama itu diperlukan dalam kaitannya dengan penyediaan penulis bahan ajar, penulis soal, distribusi bahan ajar, penyediaan tutor dan ruang tutorial, penyelenggaraan praktikum, pemanfaatan perpustakaan, dan penyelenggaraan ujian. Dari bentuk kerja sama tersebut, penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh sebenarnya merupakan penyelenggaraan jaringan mata rantai pendidikan antarperguruan tinggi.

Bentuk kerja sama tersebut telah lama dijalankan UT. Ketika pertama kali didirikan pada tahun 1984 kekuatan UT adalah adanya jaringan kerja sama dengan hampir seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dari 44 perguruan tinggi negeri yang ada waktu itu, hanya satu yang tidak mau bekerja sama dengan UT. Melalui kerja sama itu, UT dapat merekrut penulis bahan ajar dari para ahli yang berasal dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Melalui

kerja sama tersebut, UT juga dapat memperoleh sumber daya untuk penyelenggaraan tutorial dan ujian di daerah-daerah. Di samping itu, untuk pendistribusian bahan ajar, dan komunikasi surat-menyurat, UT juga bekerja sama dengan Kantor Pos dan Giro (PT Pos Indonesia); sedangkan untuk kelancaran komunikasi, UT melakukan kerja sama pula dengan PT Telkom.

Dengan memperhatikan infrastruktur jaringan yang dimiliki UT tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Satrio Soemantri Brodjonegoro, sebagaimana dikutip *Kompas* 25 September 2001 mengatakan bahwa dari segi infrastruktur, apa yang dimiliki UT sudah cukup baik, hanya perlu beberapa perbaikan. Namun dari segi kualitas perlu ditingkatkan, sehingga bobotnya diakui oleh negara-negara lain. Dari segi program di masa depan, diharapkan UT tidak hanya melayani warga negara Indonesia, tetapi juga harus dapat diakses oleh masyarakat dunia. "Agar program pendidikan yang dilakukan UT dapat diakses masyarakat luar negeri, minimal oleh negara-negara ASEAN, materi pembelajaran yang ada harus diperbarui. Pembaruan itu baik secara materi pelajaran atau kurikulum maupun mutunya," demikian pendapat Satrio (*Kompas*, 25 September 2001).

Babak Kompetisi

Berlakunya keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang pendidikan tinggi jarak jauh merupakan salah satu perwujudan peningkatan sumber daya manusia yang menjadi salah satu program Pendidikan Nasional. Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia Departemen Pendidikan menetapkan empat kebijaksanaan pokok dalam bidang pendidikan, yaitu pemerataan dan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan, dan efisiensi pendidikan.

Aspek pemerataan kesempatan yang ingin dicapai Departemen Pendidikan mengandung tiga hal, yaitu persamaan kesempatan 'ekualitas', aksesibilitas, dan keadilan atau kewajaran. *Ekualitas* berarti bahwa setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan. *Aksesibilitas* mengandung arti bahwa setiap orang, tanpa memandang asal-usulnya mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan pada semua jenis, jenjang, serta jalur pendidikan. Keadilan mengandung arti adanya "perbedaan" perlakuan menurut kondisi internal dan eksternal peserta didik. Adalah *adil* jika peserta didik diperlakukan menurut bakat, minat, dan kemampuannya. Aspek relevansi dapat dilihat sebagai keterkaitan antara pendidikan dan kebutuhan pembangunan. Mengingat keterbatasan sumber daya, perguruan tinggi harus dikelola secara efisien.

Dengan memperhatikan kebijaksanaan Departemen Pendidikan di atas, UT telah memberikan andil yang besar. UT telah memainkan peranan yang besar dalam meningkatkan kesempatan dan pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan tinggi. UT juga telah memberikan aksesibilitas yang tinggi bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikannya pada tingkat pendidikan tinggi, di manapun mereka berada. Jumlah mahasiswa yang pernah mencapai sekitar 400.000 orang telah memberikan andil yang besar bila dibandingkan dengan daya tampung seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Pengelolaan mahasiswa yang besar tersebut hanya dimungkinkan pada penyelenggaraan pendidikan dengan sistem jarak jauh (*Suara Terbuka* No. 7/Th. VII, Desember 1996).

Meskipun peluang untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh telah dibuka lebar, hingga saat ini terdapat beberapa lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Mereka banyak yang lebih memilih membuka kelas eksekutif atau

program-program ekstensi. Pembukaan program-program seperti itu lebih mudah bila dibandingkan dengan pembukaan program pendidikan jarak jauh. Pembukaan program pendidikan jarak jauh memerlukan infrastruktur yang tidak murah dan juga tidak mudah. Sebuah lembaga swasta yaitu Yayasan Indonesia Bangkit sejak tahun 2001 berusaha untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh dengan berafiliasi dengan Universitas Tun Abdurazak di Malaysia. Meskipun promosinya begitu gencar, usaha Yayasan Indonesia Bangkit untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh rupanya belum banyak mendapat sambutan dari masyarakat. Beberapa perguruan tinggi negeri di Kalimantan pada tahun 2001 juga pernah merancang pembangunan jaringan kemitraan untuk menyelenggarakan perkuliahan dengan sistem jarak jauh, tetapi kemudian tidak terdengar lagi perkembangan selanjutnya.

Kondisi-kondisi seperti pembukaan kelas eksekutif maupun kelas ekstensi, bahkan pendidikan sistem jarak jauh dari perguruan tinggi lain di samping akan merupakan ancaman bagi UT, juga merupakan peluang bagi UT untuk melakukan kompetisi secara sehat. Dengan adanya saingan, UT akan bekerja lebih keras untuk mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain. Untuk memiliki daya saing yang sehat, UT pun harus terus meningkatkan kemampuannya meng-ungguli perguruan tinggi lain. Visi UT untuk menjadi perguruan tinggi unggulan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan penyebaran informasi tentang pendidikan jarak jauh menunjukkan adanya komitmen UT terhadap mutu layanan. Sistem jaminan kualitas (Simintas) yang mulai diterapkan di UT sejak tahun 2003 dapat dilihat sebagai upaya UT untuk mewujudkan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.

Satu hal yang membanggakan pada dekade terakhir ini adalah gejala menguatnya kembali hubungan kemitraan antara UT dan perguruan tinggi negeri pembina UT. Banyak perguruan tinggi negeri yang

menata kembali hubungan kemitraannya dengan UT. Peran universitas pembina tidak lagi sebatas memberikan bantuan sumber daya manusia bagi UPBJJ UT di daerah, tetapi lebih dari itu, yaitu dalam bentuk pemberian tutorial kepada mahasiswa UT. Hubungan kerja sama lebih kuat pada beberapa perguruan tinggi negeri yang dijadikan mitra UT dalam pengembangan program S-2. Program ini dibuka dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh.

Program S-2 UT yang dibuka sejak tahun 2003 meliputi tiga program studi yaitu program studi manajemen, manajemen pendidikan, dan administrasi negara. Program ini dikembangkan dengan memanfaatkan jaringan kerja sama perguruan tinggi negeri. Dengan demikian, penerimaan mahasiswa S-2 UT tidak merata di semua daerah (UPBJJ), tetapi hanya di UPBJJ tertentu yang universitas pembinanya memiliki program studi yang sama dengan program studi S-2 yang diselenggarakan UT. Universitas pembina di daerah-daerah tersebut akan memperbantuan dosen-dosen dan fasilitas lain yang dimilikinya, seperti ruang kuliah untuk mendukung penyelenggaraan program S-2 UT.

Peran UT di Masyarakat

Dalam memasuki usianya yang ke-20, UT telah memberikan warna tersendiri dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kelahiran UT telah mengubah pandangan masyarakat Indonesia dalam menyikapi pendidikan tinggi. Dengan adanya UT, masyarakat tidak lagi memiliki satu pandangan “menjadi mahasiswa dulu sampai lulus, kemudian bekerja” tetapi juga memiliki pandangan lain yang menjadi pilihan hidupnya, yaitu “bekerja dulu jika ada peluang, setelah itu mengambil kuliah sambil bekerja”.

Peran UT dalam pendidikan tinggi semakin penting dan strategis dengan besarnya jumlah mahasiswa yang dimiliki. Dari kurang lebih 950.000 jumlah mahasiswa perguruan tinggi negeri, 28 persen di antaranya adalah mahasiswa UT. Dari jumlah itu dapat dikatakan bahwa kelahiran UT telah meningkatkan daya tampung perguruan tinggi negeri secara signifikan. Setelah lulus mahasiswa UT bukan orang-orang yang memperebutkan pasar kerja, karena sebagian besar mereka sudah bekerja. Itu menunjukkan bahwa UT tidak menciptakan penganggur berpendidikan tinggi.

Dari paparan di atas, dapat dilihat peran strategis UT dalam dunia pendidikan tinggi. Peran tersebut antara lain dalam perluasan daya tampung perguruan tinggi, penyebaran berbagai hasil riset tentang pendidikan tinggi jarak jauh, penyediaan bahan ajar perguruan tinggi, peningkatan kualitas pegawai dari berbagai instansi, pengembangan berbagai model media pembelajaran, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk kepentingan pendidikan.

Dengan jumlah mahasiswa yang besar, UT menempati posisi yang strategis dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Dalam hal perluasan daya tampung pada tingkat pendidikan tinggi, UT menempati posisi penting.

Saat ini UT merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dengan sistem terbuka dan jarak jauh modus tunggal. Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan jarak jauh, UT telah melakukan berbagai penelitian tentang pelaksanaan pendidikan tinggi jarak jauh. Hasil-hasil penelitian ini digunakan oleh UT sebagai bahan dalam pengembangan UT. Hasil penelitian tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang sistem pendidikan tinggi

terbuka dan jarak jauh, lebih khusus lagi tentang penyelenggaraan UT.

Produksi bahan ajar UT, yang jumlahnya telah mencapai lebih dari 1000 mata kuliah dan ditulis oleh pakar dari berbagai lembaga pendidikan di Indonesia, telah mengisi kekosongan penyediaan buku teks pada tingkat pendidikan tinggi. Bahan ajar UT telah banyak dimanfaatkan oleh dosen-dosen perguruan tinggi lain, baik negeri maupun swasta, sebagai bahan perkuliahan. Bahan ajar yang diproduksi UT bukan hanya bahan ajar tercetak saja, tetapi dilengkapi dengan bahan noncetak dalam bentuk CD, VCD, bahan ajar berbantuan komputer, dan kaset audio. Di kemudian hari bahan ajar UT juga akan dapat diakses melalui Internet.

Sebagian besar mahasiswa UT adalah orang yang sudah bekerja, baik di pemerintah maupun swasta. Mereka adalah orang-orang yang ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung tugas mereka. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan itu akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan instansi tempat mereka bekerja. Dengan demikian, UT telah melakukan peran aktif dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Simpulan

Kelahiran UT merupakan suatu fenomena dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Dengan jumlah mahasiswanya yang besar, UT memiliki peran strategis dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Keberhasilan UT dalam perluasan jangkauan disebabkan sifatnya yang fleksibel dan aksesibel sebagai lembaga pendidikan jarak jauh. Fleksibilitas dan aksesibilitas merupakan keunggulan sistem belajar jarak jauh yang tidak dapat dicapai dalam lembaga

pendidikan yang konvensional. Perkembangan UT telah mewarnai dinamika dan konstalasi pendidikan tinggi di Indonesia.

Dengan memperhatikan empat program utama dari kebijakan Departemen Pendidikan Nasional yaitu pemerataan dan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan, dan efisiensi pendidikan, UT dapat dikatakan telah mengambil peran yang besar dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. □

Daftar Pustaka

- Almunawar, M. 1999. 'Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Terbuka (SLTP Terbuka): alternatif pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (Wajar Diknas)', Dalam Belawati, T. *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Jakarta: universitas Terbuka.
- Broto Siswoyo, S. 1996. *Catatan Akhir 4 tahun Masa Bakti Rektor Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Habib, Z. 1999. 'SRP: embrio pendidikan terbuka di Indonesia'. Dalam Belawati, T. *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Suparman, A. dan Aminuddin Zuhairi, 2004. *Pendidikan Jarak Jauh: Teori dan Praktek*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka
- Suwondo, 2003. 'PPPG Tertulis Bandung'. Dalam Dedi Supriyadi, *Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan, dan Perjuangannya sejak Zaman Kolonial hingga Era Reformasi*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan.
- Universitas Terbuka, 2000. *Evaluasi Diri Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka (tidak diterbitkan).

Kompas, 25 September 2001

Suara Terbuka No. 7/Th. VII, Desember 1996.

BAB IV

PERAN UNIVERSITAS TERBUKA DALAM PEMBANGUNAN

PERAN UNIVERSITAS TERBUKA DALAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Durri Andriani

Pengantar

Dalam kaitannya dengan pembangunan Indonesia, Universitas Terbuka (UT) sebagai sebuah institusi pendidikan memfokuskan diri pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Fokus pembangunan SDM tercermin dari tujuan pendirian UT. Sejak awal, UT didirikan dengan tujuan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi tetapi karena alasan lokasi (misalnya tinggal jauh dari lokasi kampus) dan waktu tidak dapat bergabung dengan institusi pendidikan tatap muka. Sistem yang diterapkan di UT memungkinkan mereka (seperti sudah bekerja dan tidak dapat meninggalkan pekerjaannya) yang tidak dapat hadir dalam kelas untuk mengikuti pelajaran.

Peran UT dalam pembangunan SDM dilakukan dengan menyediakan program pendidikan dengan kualitas tinggi bagi seluruh mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk dapat memberikan

pendidikan dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, UT melakukan upaya standardisasi bahan secara berkesinambungan, penelitian, pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan, pertemuan ilmiah, seperti penerbitan jurnal, buku nonmodul, dan produk akademik lain.

Berikut ini rincian dari peran UT dalam meningkatkan kualitas SDM dan pemersatu bangsa yang telah dijalin selama 20 tahun usia UT.

Standardisasi Bahan Ajar, Bahan Belajar, dan Bahan Ujian

Mahasiswa UT tersebar di seluruh Indonesia, baik di kota besar maupun kota kecil. Di samping itu, terdapat variasi yang tinggi pada kondisi mahasiswa UT, baik dalam hal kemampuan ekonomi, akses ke informasi, maupun pengalaman belajar. Untuk menjamin setiap mahasiswa UT memperoleh fasilitas belajar yang sama dengan kualitas tinggi, UT melakukan standardisasi pada tiga aspek utama berikut ini.

a. Bahan Ajar

Bahan ajar yang dikembangkan UT mengacu pada satu standar yang dibuat untuk menjaga kualitas. Dengan standar tersebut, bahan ajar yang dihasilkan dapat dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang ditargetkan dalam suatu mata kuliah tertentu. Mekanisme pengembangan bahan ajar secara rinci dapat dilihat pada Bab V buku ini.

b. Bantuan Belajar

Di UT bantuan belajar diberikan dalam bentuk konseling, praktek dan praktikum, serta tutorial. Dengan memperhatikan ketersebaran domisili mahasiswa, UT merasa perlu untuk

mengembangkan dan menerapkan standar pelaksanaan bantuan belajar. Dengan demikian, setiap mahasiswa UT mendapatkan bantuan belajar dengan kualitas yang sama.

c. Bahan Ujian

Seluruh mahasiswa UT, di manapun domisili mereka, mengikuti ujian dengan materi yang sama dan waktu yang sama. Mekanisme pelaksanaan ujian di lokasi-lokasi ujian juga mengikuti prosedur yang sama. Standardisasi pengembangan dan pelaksanaan ujian ini ditujukan untuk mendapatkan kualitas lulusan yang sama untuk seluruh mahasiswa, di manapun mereka tinggal.

Dalam kaitannya dengan bahan ajar, bantuan belajar, dan bahan ujian ini terdapat empat aspek yang distandardisasi, yaitu:

a. Kualitas SDM yang Terlibat

UT memiliki standar minimal kualifikasi SDM yang terlibat dalam proses pengembangan bahan ajar dan bahan ujian. Di samping itu, standar minimal juga diterapkan pada SDM yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan belajar.

b. Proses Pengembangan

Dalam mengembangkan bahan ajar, bantuan belajar, dan bahan ujian, UT menerapkan standar prosedur yang harus diikuti oleh pihak terkait. Dalam proses pengembangan bahan ajar terjadi penyesuaian yang signifikan pada saat UT memutuskan untuk menggunakan paket bahan ajar pada tahun 2002. Sebelumnya, pengembangan bahan ajar dilakukan dengan fokus pada bahan ajar cetak sehingga dalam proses pengembangan belum dirasa perlu untuk mengintegrasikan GBPP (Garis Besar Program

Pembelajaran) dengan GBPM (Garis Besar Program Media). Sejak diputuskan untuk menggunakan paket bahan ajar maka dalam proses pengembangan bahan ajar tim pengembang diharuskan untuk mengintegrasikan GBPP dengan GBPM.

Dalam tiga tahun terakhir, UT mencurahkan lebih banyak perhatian pada bantuan belajar. Proses pengembangan bantuan belajar saat ini memasukkan unsur penilaian kinerja mahasiswa yang dilakukan tutor sebagai bagian dari nilai akhir yang diperoleh mahasiswa yang bersangkutan. Perkembangan yang signifikan juga terjadi pada proses pengembangan bahan ujian. Jika sebelumnya pengembangan soal untuk satu mata kuliah dilakukan per set naskah, maka sejak tahun 2002 dilakukan pengembangan per butir soal sesuai dengan kisi-kisi soal. Di samping itu, sejak tahun 2003 UT dengan intensif melakukan pemetaan soal, yaitu kegiatan memposisikan setiap butir soal dalam kisi-kisi soal mata kuliah yang bersangkutan. Target UT adalah memiliki 10 set naskah soal untuk setiap mata kuliah yang siap digunakan setiap saat.

c. Proses Produksi

Standar dalam proses produksi ditujukan untuk mendapatkan hasil tanpa cacat. Untuk bahan ajar, standar modul yang dihasilkan adalah tidak ada kesalahan ketik, kertas tidak mudah lepas, cetakan jelas dan rata, dan ukuran sama. Sementara itu, untuk bahan ujian, fokus ditekankan pada tidak adanya kebocoran pada saat produksi. Perkembangan yang signifikan dari proses produksi bahan ajar adalah dikembangkannya modul dengan sampul penuh warna sejak tahun 2003.

d. Proses Distribusi dan Pelaksanaan

Produk UT dikembangkan dan diproduksi di kantor pusat UT di Jakarta. Untuk dapat diterima oleh mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia, UT harus mendistribusi produk tersebut baik dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki UT maupun melalui bantuan lembaga lain.

Dalam periode 20 tahun operasi UT, terjadi beberapa penyempurnaan terhadap tiga pilar utama ini. Untuk bahan ajar, sejak tahun 2002 UT memutuskan untuk menggunakan paket bahan ajar yang merupakan pemanfaatan optimal dari beragam media yang tersedia untuk meningkatkan efektivitas bahan ajar UT. Untuk bantuan belajar, sejak tahun 2002, UT menawarkan dua bentuk tutorial: Tutorial Tatap Muka Rancangan Khusus (TTMRK) dan Tutorial *Online*. TTMRK adalah tutorial yang khusus dikembangkan untuk mata kuliah dengan tingkat kelulusan rendah. Untuk membantu mahasiswa menguasai materi satu mata kuliah, UT mengembangkan TTMRK dan mahasiswa diminta untuk menghadiri tutorial tatap muka serta mengerjakan tugas dengan bantuan penuh dari tutor. Untuk ujian saat ini, UT sedang mengembangkan Bank Soal yang dijalankan dengan sistem terkomputerisasi. Melalui Bank Soal, butir soal dan naskah ujian untuk setiap mata kuliah dapat dikeluarkan dengan mengacu pada standar tertentu.

Dimulai pada tahun 2004, keseluruhan standar yang disyaratkan ini secara rinci dituangkan dalam Pedoman dan Panduan Simintas (Sistem Jaminan Kualitas) yang menjadi pegangan bagi semua pihak yang terlibat.

Peningkatan Kualitas

Produk yang terstandar saja tidak mencukupi upaya UT untuk meningkatkan kualitas SDM. Untuk mendapatkan hasil yang optimal diperlukan produk dengan standar kualitas tinggi. Dalam rangka mencapai hal ini, UT secara berkesinambungan melakukan monitoring, evaluasi, dan penelitian terhadap setiap aktivitas yang dilakukan.

Secara tersistem dan terintegrasi UT telah melakukan serangkaian penelitian untuk memahami karakteristik mahasiswa UT dan menyempurnakan bahan ajar, bantuan belajar, serta bahan ujian yang dihasilkan. Penelitian tentang mahasiswa yang sudah pernah dilakukan meliputi penelitian untuk mendapatkan informasi persepsi mahasiswa terhadap PTJJ, kesiapan belajar, motivasi belajar, strategi dan gaya belajar, serta pemanfaatan sumber dan media belajar. Informasi yang diperoleh dari penelitian dijadikan masukan dalam mengembangkan program yang lebih sesuai dengan karakteristik mahasiswa UT.

Saat ini UT memiliki 225.203 mahasiswa di empat fakultas (lihat Tabel 1) yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia (lihat Tabel 2) serta 582.222 lulusan (lihat Tabel 3)

Tabel 1
Jumlah Mahasiswa per Fakultas

No	Fakultas	Jumlah Mahasiswa	
		N	%
1	FEKON	36.032	16
2	FMIPA	11.260	5
3	FKIP	139.626	62
4	FISIP	38.285	17
Total		225.203	100

Sementara itu, penelitian tentang bahan ajar difokuskan untuk mendapatkan informasi mengenai keterbacaan, efektivitas (frekuensi mempelajari, lama mempelajari, kesulitan yang dialami), aksesibilitas (kepemilikan, kemudahan dan kesulitan mengakses), serta pemanfaatannya (cara memanfaatkan).

Tabel 2
Sebaran Domisili Mahasiswa per Pulau

No	Pulau	Jumlah Mahasiswa	
		N	%
1	Sumatera	56.301	25
2	Jawa	99.090	44
3	Kalimantan	22.520	10
4	Sulawesi	20.268	9
5	Bali, NTB, NTT	15.764	7
6	Maluku	4.504	2
7	Papua	6.756	3
Total		225.203	100

Tabel 3
Jumlah Lulusan per Fakultas

No	Fakultas	Jumlah Mahasiswa	
		N	%
1	FEKON	9.369	2
2	FMIPA	7.087	1
3	FKIP	548.075	94
4	FISIP	17.691	3
Total		582.222	100.00

Untuk bantuan belajar, penelitian ditekankan pada efektivitas pelaksanaan bantuan belajar yang diberikan (siapa yang memanfaatkan, persepsi mahasiswa tentang bantuan belajar yang diberikan,

pengaruh bantuan belajar terhadap hasil belajar, persiapan tutor), aksesibilitas mahasiswa terhadap bantuan belajar (lokasi, waktu, biaya), dan pengelolaan (mekanisme pengelolaan, personel terlibat, rekrutmen SDM, pelaporan).

Sementara itu, penelitian tentang bahan ujian dititikberatkan pada efektivitas bahan ujian (kemampuan untuk menilai hasil belajar mahasiswa, kesesuaian jenis, ragam, dan lama waktu ujian), dan penyelenggaraan ujian (keamanan naskah, SDM terlibat, pelaporan), serta hasil ujian (tingkat kesulitan naskah dan hasil ujian).

Pengembangan dan Penyelenggaraan Pelatihan

Sebagai institusi pendidikan, UT memiliki sumber daya untuk mengembangkan dan menyelenggarakan beragam pelatihan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, baik secara individual maupun melalui organisasi. Inisiatif pelatihan dapat timbul dari UT maupun dari instansi yang berkepentingan. Pelatihan yang dilakukan UT atas permintaan instansi dalam lima tahun terakhir antara lain meliputi Pelatihan Tenaga Pendukung Administrasi dan Organisasi Bapedal Daerah, (BPLH Wilayah), Pelatihan Standardisasi dan Sertifikasi Kompetensi Manajemen SDM di Perusahaan (Kanwil Depnakertrans DKI), serta Budi Daya Jamur dan Pembentukan Wira Usaha Baru (Dinas Tenaga Kerja DKI).

Pelatihan untuk masyarakat umum yang inisiatifnya dari UT antara lain adalah pendidikan anak usia dini yang ditujukan untuk para pengelola sekolah, orang tua murid, pejabat dinas pendidikan dan dinas terkait lain; pendidikan demokrasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk aparat pemda dan anggota DPRD; serta pendidikan advokasi dan hak asasi manusia dengan peserta pedagang K-5 dan masyarakat pesisir.

Selain itu, UT juga mendapatkan tugas untuk menyelenggarakan pelatihan AA (*Applied Approach*) & Pekerti yang ditujukan bagi para dosen untuk meningkatkan kompetensi mengajar mereka.

Di samping itu, UT juga banyak membantu instansi lain dalam merintis pengembangan program jarak jauh seperti yang dilakukan dengan LAN dan Pusdiklat Departemen Keuangan melalui kegiatan Pengembangan Program Diklat Jarak Jauh. Pada kegiatan ini, UT membantu mulai dari pengembangan sistem, penyiapan bahan ajar, prosedur dan pelaksanaan bantuan belajar, sampai dengan penyiapan bahan ujian yang sesuai dengan karakteristik belajar jarak jauh.

Pertemuan Ilmiah

Secara aktif, UT menyelenggarakan pertemuan ilmiah, baik untuk tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat internasional, pada tahun 1989 UT dipercaya menjadi penyelenggara Konferensi AAOU. Kepercayaan ini kembali diperoleh dengan ditunjuknya UT untuk menyelenggarakan konferensi AAOU tahun 2005. Di samping itu, sebagai anggota SEAMOLEC, pada bulan September tahun 2004, UT dipercaya untuk bertindak sebagai tuan rumah dalam konferensi tahunan SEAMOLEC.

Pada tingkat nasional UT menyelenggarakan Seminar Nasional Jaringan Pendidikan (2000 dan 2002), dan Seminar Nasional PTJJ (2003 dan 2004). Selain sebagai penyelenggara tunggal, UT bekerja sama dengan instansi lain, juga menyelenggarakan seminar ilmiah. Sejak tahun 2002, UT berkerja sama dengan PUSTEKKOM dan beberapa perguruan tinggi lain menyelenggarakan seminar tahunan bertajuk Seminar Teknologi Pendidikan.

Pada setiap pelaksanaan seminar, banyak peserta yang berpartisipasi. Bagi mereka yang tidak dapat secara langsung berpartisipasi

menghadiri seminar, UT menerbitkan *selected best papers* dari berbagai makalah seminar dengan penyempurnaan berdasarkan hasil diskusi dalam seminar. Buku ini disebarluaskan ke perpustakaan dan di toko buku.

Di samping seminar, untuk meningkatkan kualitas SDM, UT juga menyelenggarakan bedah buku. Secara periodik, sejak tahun 2002 UT mengundang pakar dan pemerhati untuk membahas buku yang dipandang dapat memberikan wawasan baru terhadap satu masalah. UT sudah dua kali melakukan bedah buku, yaitu tahun 2002 dengan buku Cakrawala Pendidikan dan tahun 2004 dengan buku PTJJ.

Dalam kaitannya dengan PTJJ, pada bulan Februari 2004 UT memfasilitasi dibentuknya Asosiasi Profesi Pendidikan Jarak Jauh Indonesia (APPJJI). Asosiasi nonprofit ini beranggotakan mereka yang memiliki minat pada PJJ. Melalui asosiasi ini diharapkan UT dapat meningkatkan pemahaman tentang PJJ dan dapat meningkatkan peran PJJ dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

Penerbitan Jurnal dan Buku Ilmiah

Upaya UT untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia dilakukan juga melalui penerbitan jurnal dan buku ilmiah nonmodul. Saat ini UT menerbitkan empat jurnal, yaitu:

- a. Jurnal Studi Indonesia
- b. Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh
- c. Jurnal Matematika, Sains, dan Teknologi
- d. Jurnal Pendidikan

Penerbitan keempat jurnal ini ditujukan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi akademika untuk mendeseminasikan hasil penelitian dan karya ilmiah lain. Keempat jurnal ini terbuka bagi

seluruh akademika dari semua instansi pendidikan. Untuk mendapatkan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, diterapkan syarat dan prosedur khusus untuk artikel yang dimuat dalam keempat jurnal tersebut.

Sampai saat ini, sebagian besar kontributor jurnal berasal dari dalam UT sendiri. Meskipun demikian, dalam setiap penerbitan selalu terdapat kontributor dari luar UT. Asal instansi kontributor antara lain berasal dari BPPT, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Cendrawasih, dan LIPI.

Setiap edisi Jurnal dikirimkan kepada perpustakaan-perpustakaan. Jurnal dapat diperoleh di UT Pusat. Untuk memperluas akses, Jurnal dapat pula dilihat dalam website UT di <http://psi.ut.ac.id>.

Pemanfaatan Produk Akademik

Peningkatan kualitas SDM juga dilakukan UT melalui penyebaran produk-produk akademik. Saat ini UT memiliki 1.200 judul modul, 3.000 program kaset audio, 512 program kaset video, 50 program CAI (*Computer Aided Instruction*), dan 70 judul *web-based supplement*.

Bahan ajar UT ini banyak digunakan oleh perguruan tinggi tatap muka. Meskipun tidak ada perjanjian formal antara UT dan institusi pendidikan lain tentang penggunaan bahan ajar UT, secara individual mahasiswa dan dosen menggunakan modul UT dalam proses belajarnya. Sebagai contoh, dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah (baik yang berada di Purwokerto, Surakarta, Kendari, Sumatera Utara, Bengkulu, maupun Palembang) menggunakan modul-modul UT.

Modul UT juga banyak digunakan di perguruan tinggi di daerah Indonesia timur seperti di Universitas Tujuh belas Agustus (Sama-

rinda), Universitas Haluoleo (Kendari), Universitas Gorontalo (Gorontalo) dan IKIP Mataram (Mataram). Di samping itu, modul UT juga digunakan oleh perguruan tinggi di daerah konflik seperti di Universitas Al Muslim (Bireun, Aceh) dan STIE (Surien, Aceh).

Selain itu, terdapat beberapa perpustakaan yang menjadi pelanggan modul UT, seperti Perpustakaan Daerah Boran di daerah Kalimantan dan Perpustakaan Daerah Bengkulu.

Simpulan

Produk yang dihasilkan dan kegiatan yang dilakukan UT dalam 20 tahun ini telah mampu meningkatkan kualitas SDM Indonesia seperti yang tercermin dari banyaknya mahasiswa yang bergabung di UT dan lulusan yang telah berhasil menyelesaikan program studinya di UT. Di samping itu, kemampuan UT untuk menjangkau seluruh pelosok Indonesia memungkinkan dibukanya pemerataan kesempatan belajar yang berkualitas bagi mereka yang membutuhkan.

Untuk mereka yang tidak dapat secara langsung bergabung dengan UT, produk yang dihasilkan UT seperti buku nonmodul, pelatihan, dan jurnal dapat dijadikan sumber pengetahuan yang bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi.

Meningkatkan kualitas SDM merupakan misi pertama UT. Secara operasional, misi ini dimaterialisasikan ke dalam bentuk penawaran beragam program pendidikan dan pelatihan, dengan sasaran mahasiswa khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Program-program ini dikembangkan dan dilaksanakan oleh unit-unit di UT, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit.

Upaya untuk peningkatan kualitas SDM yang difokuskan pada mahasiswa dilakukan dengan memberikan layanan pendidikan yang

berkualitas tinggi melalui dua cara, (1) standardisasi bahan ajar, bantuan belajar, dan bahan ujian, dan (2) peningkatan kualitas layanan. Sementara itu, untuk masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat ilmiah, UT mengembangkan pelatihan, mengadakan pertemuan ilmiah, menerbitkan jurnal ilmiah dan buku nonbahan ajar, dan melibatkan pakar dari berbagai lembaga lain dalam pengembangan produk, serta membuka akses ke seluruh produk UT.□

PERAN UNIVERSITAS TERBUKA DALAM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

Supartomo

Pengantar

Dalam tata pergaulan Internasional, tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara diukur dari tinggi-rendahnya pendapatan per kapita negara yang bersangkutan. Pendapatan per kapita merupakan rasio antara pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Dalam hal ini, suatu faktor yang sangat berpengaruh dan menentukan adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM yang tinggi dan kuat merefleksikan *harga* dan *produktivitas* yang tinggi, yang pada gilirannya akan mempunyai pengaruh positif yang besar terhadap pendapatan nasional suatu negara.

Kualitas SDM suatu negara tercermin dari tingkat pendidikan penduduknya, termasuk di dalamnya jumlah dan sebaran penduduk yang mempunyai pendidikan tinggi. Karena itu, dalam jangka panjang, upaya untuk menghasilkan dan meningkatkan jumlah

penduduk berpendidikan tinggi merupakan usaha yang strategis dan mulia.

Universitas Terbuka (UT) merupakan perguruan tinggi negeri di Indonesia dan merupakan satu-satunya penyelenggara yang menggunakan sistem pendidikan jarak jauh. Sejak berdiri tahun 1984 sampai tahun 2003, UT telah menghasilkan lulusan lebih dari 500.000 orang dengan berbagai jenjang pendidikan dari empat fakultas yang dimiliki, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ilmu Sosial (FISIP), Fakultas Ekonomi (FEKON), dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Lulusan UT tersebar di seluruh pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke, mencakup dan berasal dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Sebagian besar dari mereka adalah guru SD, penyuluh pertanian, perwira menengah dan perwira tinggi TNI, anggota kepolisian, pegawai negeri sipil, karyawan swasta dan sebagainya.

Menyongsong ulang tahun UT ke 20, tulisan ini akan menelaah dan mendeskripsikan secara umum peran dan sumbangan UT dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi di Indonesia. Setelah pendahuluan, dilanjutkan uraian tentang posisi Indonesia di dunia, profil SDM, pendidikan dalam pengembangan SDM, UT di lingkup PTN dan peran UT.

Posisi Indonesia di Dunia

Sampai dengan tahun 2003 rata-rata pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia dalam empat tahun terakhir sebesar 3,5 persen. Pertumbuhan ini sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan 10 tahun terakhir sebelum krisis ekonomi tahun 1997 sebesar 7% setahun. Banyak faktor nonekonomi yang berkaitan dengan sosial politik dan lainnya yang masih tidak stabil (sering

disebut krisis multidimensi) yang mempengaruhinya, sehingga hingga saat ini Indonesia masih sibuk dengan berbagai permasalahan dan berjalan di tempat, sedangkan negara-negara tetangga kita seperti Thailand, Malaysia dan Philipina ternyata lebih beruntung dan telah berhasil lolos dari krisis.

Dalam "World Development Report 2002" yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Indonesia dimasukkan ke dalam kelompok negara-negara berpredikat *berpendapatan rendah* dengan pendapatan per kapita sebesar US\$ 570 setahun. Sebelum krisis ekonomi 1997 pada saat kurs dollar terhadap rupiah sebesar Rp 2.200,00 saat itu sebenarnya Indonesia sudah masuk kelompok yang lebih baik, yaitu *berpendapatan menengah rendah* dengan pendapatan per kapita lebih dari US\$ 1000. Pendapatan perkapita sebagai tolok ukur memang terlalu sederhana dan kasar sehingga dalam perbandingan antara negara perlu dilihat juga faktor-faktor lain agar diperoleh ilustrasi yang lebih utuh.

Sekilas gambaran secara umum yang menunjukkan posisi Indonesia di antara beberapa negara dilihat dari beberapa aspek yang disajikan dalam Tabel 1 berikut

Tabel 1
Data Pertumbuhan Indonesia di antara Beberapa Negara Tahun 2002

Negara	Penduduk (Juta) dan Pertumbuhan (%) *	Pendapatan Perkapita (US \$)	Pertum- buan PDB (%)	Buta Huruf	Harapan Hidup
AS	288 (0,9 %)	34.260	3,4	-	77
Jepang	127 (0,3 %)	34.210	1,3	-	81
Thailand	61 (0,9 %)	2.010	4,2	5	69
Malaysia	23 (2,5 %)	3.380	7,0	13	72
Indonesia	210 (1,7 %)	570	3,5	14	66
Banglades	130 (1,6 %)	380	4,8	59	61
Nigeria	127 (2,8 %)	260	2,4	37	47

Sumber : Diolah dari Word Development Report 2002

Dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat serta nilai mata uang yang rendah sekitar Rp 9000,00 per dollar, saat ini Indonesia memiliki tingkat pendapatan perkapita cukup rendah di antara beberapa negara ASEAN, apalagi dibandingkan dengan negara-negara yang tergolong maju seperti Amerika Serikat dan Jepang. Secara kasar angka-angka di atas menggambarkan bahwa rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk Malaysia sekitar 6 kali rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia. Tingkat kesejahteraan orang Amerika hampir setara dengan orang Jepang, yaitu sekitar 60 kali tingkat kesejahteraan orang Indonesia. Bagaimana posisi Indonesia dibandingkan dengan Bangladesh dan Nigeria? Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk Indonesia adalah 1,5 kali lebih baik dibandingkan Bangladesh, dan 2,1 kali lebih baik dibandingkan Nigeria.

Tentang penduduk yang buta huruf, yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mampu membaca dan menulis, Thailand dan Malaysia menempati posisi yang lebih baik. Sedangkan keadaan di Bangladesh dan Nigeria, jauh lebih buruk dibandingkan keadaan di Indonesia. Harapan hidup orang Thailand dan Malaysia lebih tinggi dibandingkan orang Indonesia. Dibandingkan dengan Nigeria dan Bangladesh, harapan hidup orang Indonesia lebih tinggi. Dalam hal ini, Jepang dan Amerika Serikat menempati posisi yang jauh lebih baik.

Gambaran sekilas, dan ilustrasi angka-angka dalam tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk Indonesia berada dalam posisi cukup terbelakang di antara negara lain. Keadaan tersebut juga menyiratkan makna dan pesan mengenai perlunya upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Indonesia melalui jalur pendidikan untuk mencapai kemajuan. Melalui pendidikan, khususnya pendidikan

tinggi, kualitas dan kompetensi SDM akan meningkat, begitu pula penghasilan atau kesejahteraan mereka.

Profil SDM Indonesia

Sumber daya manusia secara umum bisa dikategorikan menjadi 2, yaitu penduduk yang mempunyai potensi yang siap dan harus dididik (penduduk di luar usia kerja), serta penduduk yang mempunyai potensi yang siap dan harus bekerja (penduduk usia kerja). Pendidikan formal yang ditawarkan oleh Universitas Terbuka lebih melayani penduduk yang mempunyai potensi yang siap dan harus bekerja. Kita akan melihat lebih jauh profil untuk sumber daya manusia yang siap dan harus bekerja, yang sering disebut sebagai angkatan kerja. Angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja yang sudah bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Secara lebih spesifik mereka adalah tenaga kerja yang benar-benar mau bekerja memproduksi barang atau jasa.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, telah terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari waktu ke waktu. Ada perubahan yang menurun di sektor pertanian, yaitu dari 66,70% pada tahun 1971 menjadi 33,7% pada tahun 2001, dan cenderung terus menurun. Di sektor industri dan jasa terjadi perubahan yang sebaliknya, meningkat dari 33,30% pada tahun 1971 menjadi 64,3% pada tahun 2001, dan cenderung terus mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan struktur tenaga kerja ini adalah perkembangan bidang ekonomi, peningkatan pendidikan tenaga kerja, tingkat kesehatan yang lebih baik, dan rasa aman dalam bekerja.

Pada awal abad 21, Indonesia belum dapat melepaskan diri dari SDM dengan kualitas rendah. Dalam hal ini, ada semacam

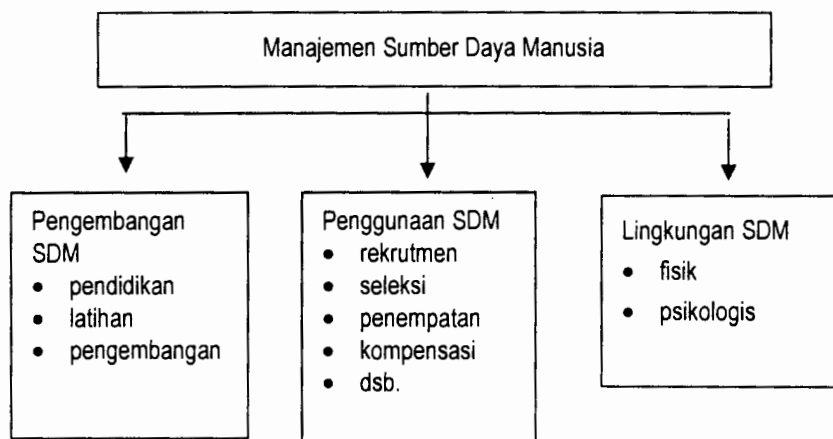
kontradiksi antara apa yang tersedia dan sedang terjadi dengan apa yang dibutuhkan. Situasi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini antara lain diwarnai oleh hal sebagai berikut: semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin besar persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor jasa. Selain itu, sebagian besar tenaga kerja berada di sektor informal dengan tingkat produktivitas yang rendah. Di sisi lain, permintaan kualitas tenaga kerja menuju tahun 2020 digambarkan sebagai berikut. Untuk tingkat paling bawah, mereka harus memilih keterampilan berbahasa, matematika, logika dan kemampuan komputer. Pada tingkat menengah, kemampuan mereka harus ditambah dengan kemampuan komunikasi dan pengetahuan komputer tingkat lanjut. Untuk tingkat manajemen, diperlukan kemampuan yang tinggi tentang teknologi informasi dan perencanaan strategis.

Dalam mengantisipasi keadaan di atas, peran UT menjadi semakin penting dan nyata dalam meningkatkan kualitas SDM melalui jalur pendidikan tinggi. UT berpotensi memenuhi peluang dan kebutuhan SDM berkualitas secara cepat dan massal dengan menawarkan berbagai program studi yang sudah ada dan program baru sesuai permintaan di dunia usaha dan industri.

Pendidikan dalam Pengembangan SDM

Secara umum pengembangan SDM dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pendidikan dan pelatihan. Jalur pendidikan lebih mengarah pada dimensi pengetahuan dan sikap manusia, memerlukan waktu yang lebih panjang, skala dan biaya lebih besar dan lebih terstruktur. Sedangkan jalur pelatihan lebih terfokus pada sisi ketrampilan atau *skill* dan untuk suatu sasaran tertentu yang lebih spesifik. Dalam konsep manajemen SDM, *Pengembangan SDM* merupakan salah satu dari tiga subsistem dalam manajemen SDM. Dua subsistem lainnya adalah *pemanfaatan SDM* dan *lingkungan*

SDM. Ilustrasi visual sistem manajemen SDM digambarkan sebagai berikut.



Kenyataan di lapangan, SDM tidak akan berperan dan bekerja secara optimal apabila mereka tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan dengan baik. Kinerja mereka juga tidak akan tinggi sesuai kemampuan dan kapasitas yang dimilikinya, apabila tidak diberi lingkungan kerja yang memadai. Dari sudut lain, SDM yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dengan benar juga akan gagal berprestasi jika berada di tempat kerja yang tidak tepat, dipimpin orang yang salah atau dimasukkan dalam lingkungan kerja yang tidak mendukung. Begitulah beberapa benang merah dalam manajemen SDM.

Sebagai salah satu bentuk pengembangan SDM, pendidikan mempunyai peran dan posisi strategis. *Pertama*, pendidikan harus berlangsung terus-menerus selama masih terdapat kebutuhan dunia kerja. Dalam bahasa ekonomi, pendidikan diperlukan apabila permintaan

terhadap kualifikasi tertentu di pasar tenaga kerja masih lebih besar daripada penawaran. *Kedua*, pendidikan dipercaya sebagai satu-satunya cara mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, dalam proses yang sistematis dan terkontrol secara ketat. *Ketiga*, umumnya pendidikan menjadi satu-satunya alat untuk memelihara, mengembangkan dan mengapresiasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki. *Keempat*, telah terbukti dalam berbagai penelitian, bahwa ada korelasi positif antara pendidikan dan kemajuan sebuah organisasi atau perusahaan, bahkan sebuah negara.

Universitas Terbuka di Lingkup Perguruan Tinggi Negeri

Universitas Terbuka secara resmi berdiri tahun 1984 dan merupakan Universitas Negeri ke 45 dari 74 PTN di Indonesia. Ada 2 alasan utama yang mendorong berdirinya UT yang menerapkan pendidikan jarak jauh, yaitu upaya peningkatan daya tampung perguruan tinggi dan upaya peningkatan kualitas guru dalam jumlah banyak secara cepat.

Ketika pertama dibuka, mahasiswa UT yang terdaftar berjumlah 54.635 orang. Jumlah mahasiswa UT pernah mencapai puncaknya pada tahun 1997, yaitu 417.204 orang dan pada tahun 2003, 225.203 orang. Kontribusi UT dalam dunia pendidikan tinggi negeri dipandang dari sudut jumlah mahasiswa yang dilayani dapat dilihat pada tabel 2 berikut

Tabel 2
Jumlah Mahasiswa PTN Tahun 2002

Jenjang \ PTN	UT	PTN Lain	Jumlah
Strata 1	94.722 (15,3)	525.145 (84,7)	620.669 (100)
Diploma	169.635 (54,0)	144.013 (46,0)	313.666 (100)
Jumlah	264.357 (28,2)	669.960 (71,8)	934.317 (100)

Sumber : Diolah dari Direktori Dikti 2002

Dari 76 PTN yang tersebar di seluruh wilayah tanah air dengan total mahasiswa 934.317 orang, 28% di antaranya adalah mahasiswa UT. Apabila pada PTN di luar UT jumlah mahasiswa program strata 1 hampir 3,6 kali jumlah mahasiswa program diploma, ternyata pola mahasiswa UT berbentuk sebaliknya. Jumlah mahasiswa UT program diploma hampir 1,8 kali jumlah mahasiswa program strata 1. Data ini menunjukkan bahwa UT telah dapat meningkatkan daya tampung perguruan tinggi secara signifikan, terutama program diploma, sehingga pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan lebih terbuka luas. Sebagaimana diketahui, sebagian besar mahasiswa program diploma UT tidak lain adalah para guru SD yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih jauh lagi, kontribusi beserta keunikan UT dalam PTN dapat kita lihat pada data kelulusan UT dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu umur, jenis kelamin, status kerja dan domisili mereka pada tabel 3 berikut.

Sebagian besar lulusan UT, lebih dari 95% berumur 29 tahun ke atas. Apabila dilihat status mereka, ternyata lebih dari 99% yang menyelesaikan studi di UT berstatus telah bekerja. Ini menjelaskan bahwa UT tidak menciptakan penganggur berpendidikan tinggi. Mereka yang menuntut ilmu di UT adalah para pekerja yang ingin

meningkatkan kualitas dan kemampuannya untuk membuka kesempatan dan karier yang lebih baik di masa yang akan datang.

Tabel 3
Lulusan UT Tahun 2002

Aspek Fakultas	Umur		Jenis Kelamin		Status		Wilayah	
	29 thn ke bawah	29 thn ke atas	Laki-laki	Perempuan	Kerja	Tak kerja	Jawa	Luar Jawa
FKIP	1.878	46.127	20.162	27.843	48.005	0	26.087	21.918
FISIP	225	985	853	357	102	182	822	388
FEKON	405	709	767	347	942	172	938	176
FMIPA	96	3102	255	642	316	38	2.373	825
Jumlah	2.604	50.303	24.338	29.189	53.135	392	30.220	23.307
%	4,86	95,14	45,40	54,60	99,26	0,74	52,5	43,5

Sumber : Diolah dari Statistik UT 2003

Walaupun tidak berbeda jauh, ternyata lulusan UT lebih banyak perempuan, yaitu sebanyak 54,6 %. Sebagian besar lulusan UT adalah guru-guru SD, jumlah guru perempuan lebih banyak dibandingkan dengan guru laki-laki.

Sebaran para lulusan UT, 52,5% berdomisili di Jawa sedangkan sisanya, yaitu 43,5% berasal dari berbagai pulau di luar Jawa. Mengingat hampir 65% penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa, data ini menunjukkan bahwa UT cukup menunjang pemerataan lulusan perguruan tinggi yang umumnya terkonsentrasi di pulau Jawa.

Simpulan

Dengan menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh dalam skala besar, UT telah berperan sebagai agen perubahan, khususnya dalam dunia pendidikan tinggi. Proses dan perkembangan ini terus

berlangsung dengan baik menyangkut jumlah mahasiswanya, proses pembelajaran, teknologi media yang digunakan, maupun personil yang menggerakkan operasional organisasi, baik dosen maupun pegawai administrasinya.

Berikut dipaparkan enam peran utama UT sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi dan pengembang SDM di Indonesia

1. *Memperbesar kualitas dan kuantitas tenaga terdidik yang berpendidikan tinggi dalam waktu secepat mungkin.*

Upaya meningkatkan jumlah sarjana secara signifikan melalui perguruan tinggi konvensional menghadapi banyak kesulitan. UT mampu menjawab tantangan ini karena untuk keperluan pembelajaran mahasiswa, tidak diperlukan gedung atau "kursi".

2. *Melakukan berbagai riset untuk pengembangan kualitas pendidikan tinggi.*

Masa depan pendidikan tinggi di dunia akan sangat dipengaruhi oleh sistem belajar jarak jauh, tetapi riset dalam bidang ini masih sangat terbatas di Indonesia. Dalam hal ini, patutlah dianggap bahwa UT mempunyai potensi dan telah melangkah lebih awal dalam melakukan riset-riset yang diperlukan. Hasil-hasil riset di bidang ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas metode belajar jarak jauh untuk keperluan UT sendiri, maupun untuk diaplikasikan di tempat lain

3. *Memproduksi bahan ajar untuk perguruan tinggi.*

Sampai saat ini, UT telah menghasilkan 864 judul bahan ajar (mata kuliah) untuk perguruan tinggi. Hampir seluruh bahan ajar ini ditulis oleh dosen-dosen atau pakar-pakar berkualitas dan terbaik di bidangnya, berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Observasi lapangan menunjukkan bahwa cukup banyak mahasiswa maupun dosen di berbagai perguruan tinggi

di luar UT menggunakan modul-modul tersebut untuk keperluan perkuliahan mereka.

4. *Meningkatkan kualitas pegawai di berbagai instansi.*

Sejak lama UT telah menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, Depdagri, Pos dan Giro, TNI, Garuda Indonesia, BNI, BRI, Pemda dan lain-lain dalam meningkatkan kualitas pendidikan para pegawai dalam berbagai instansi tersebut. Program-program kerja sama ini meliputi program gelar (S-1), diploma, ataupun nongelar (diklat-diklat berdurasi pendek).

5. *Memperkaya variasi media pembelajaran.*

Proses pembelajaran di UT berlangsung secara jarak jauh. Cara ini telah mendorong UT untuk mengembangkan berbagai media dan metode pembelajaran, agar proses belajar mahasiswa berjalan secara optimal. Selain modul, UT juga telah mengembangkan media pembelajaran audio – visual (radio, TV, kaset, CD dan internet). Proses diseminasi metode ini di kalangan mahasiswa UT berjalan lambat, karena faktor ekonomi dan aksesibilitas teknologi tersebut bagi mahasiswa.

6. *Menjalinkan kerja sama internasional.*

Dalam hal kerja sama Internasional, UT telah lama menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga di mancanegara, baik lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah, baik perguruan tinggi maupun nonperguruan tinggi. Program-program kerja sama ini bervariasi, berbentuk pendidikan bergelar untuk staf UT, program nongelar (*short course*), kerja sama pengembangan bahan ajar, sistem manajemen, dan bidang akademik. Di saat ini dan di masa depan, kerja sama semacam ini akan terus dilanjutkan dan dikembangkan.

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Direktori Pendidikan Tinggi Tahun 2002*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- World Development Report 2002*, Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development..
- Suparman, M. Atwi, *Pidato Rektor pada Wisuda III Tahun 2002*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka, 2000. *Evaluasi Diri UT*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Irawan, Prasetya, 2002. 'Peran pendidikan dalam pengembangan SDM dalam rangka otonomi daerah'. (Seminar Nasional) di UPBJJ Gorontalo .
- Universitas Trbuka, 2003. *Statistik UT tahun 2003*. Jakarta: Universitas Terbuka.

PERAN UNIVERSITAS TERBUKA SEBAGAI WAHANA PEMERSATU BANGSA

Tina Ratnawati

Pengantar

Upaya pemerintah Indonesia dalam memberi kesempatan kepada warga negaranya untuk memperoleh pendidikan tinggi diwujudkan dengan didirikannya Universitas Terbuka (UT) sebagai PTN ke-45 di Indonesia pada tanggal 4 September 1984. Pendirian UT yang menerapkan sistem belajar jarak jauh ditujukan untuk (1) memberikan kesempatan yang luas bagi warga negara Indonesia di mana pun mereka tinggal untuk memperoleh pendidikan tinggi; (2) menampung lulusan SLTA yang tidak tertampung di PTN (daya tampung terbatas) dan PTS (biaya tinggi); (3) mengembangkan pelayanan pendidikan tinggi bagi mereka yang bekerja atau karena alasan lain tidak dapat melanjutkan belajar di perguruan tinggi tatap muka, serta (4) mengembangkan program pendidikan akademik dan profesional yang sesuai dengan kebutuhan nyata pembangunan yang belum banyak dikembangkan oleh perguruan tinggi lain. Dalam perkembangannya, sistem

pendidikan ini dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Daya Jangkau

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang menerapkan sistem belajar jarak jauh, daya jangkau UT sangat luas. Melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi diharapkan UT dapat menjangkau peserta didik yang luas bahkan di daerah terpencil yang sulit dijangkau transportasi. Untuk daerah yang secara geografis sulit, sistem tersebut dapat diterapkan. Keadaan geografis negara kita yang terdiri dari belasan ribu pulau dan penduduk yang berjumlah lebih dari 200 juta serta tersebar luas di seluruh pelosok tanah air merupakan faktor kuat untuk menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. UT diharapkan mampu menjangkau seluruh pelosok Indonesia.

Pada dasawarsa 1980-an terjadi penumpukan sejumlah besar lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang tidak dapat tertampung di tingkat pendidikan tinggi, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Pada tahun 1983/1984 misalnya, lulusan SLTA mencapai 666.100 orang. Sebagian besar dari mereka ditambah dengan lulusan SLTA dari tahun-tahun sebelumnya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, sementara daya tampung perguruan tinggi negeri hanya 250.000 orang. Di sisi lain, kualitas guru SD, SLTP, dan SLTA diidentifikasi kurang memadai. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia pada tahun 1984 mendirikan UT sebagai Perguruan Tinggi Negeri ke-45 dengan misi untuk memberikan akses dan rute alternatif bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), sejumlah besar guru, dan kelompok orang yang sudah bekerja lainnya untuk mengikuti pendidikan tinggi.

Dilihat dari hakikat penyelenggaraan pendidikan jarak jauh seperti UT, karakteristik yang membedakan pendidikan jarak jauh dan pendidikan tatap muka dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, pendidikan jarak jauh ditandai dengan adanya jarak antara mahasiswa dengan pengajar dan pengelola pendidikan. *Kedua*, pendidikan jarak jauh mengandalkan media cetak dan noncetak. *Ketiga*, mahasiswa belajar secara mandiri dan dapat memanfaatkan berbagai macam bantuan belajar. *Keempat*, mahasiswa belajar di mana saja, kapan saja, dan dapat memilih program pendidikan menurut kebutuhannya. Dan *kelima*, pendidikan jarak jauh menawarkan program pendidikan dengan standar kualitas yang sama bagi seluruh mahasiswa.

Sampai saat ini, mahasiswa UT tersebar di seluruh Indonesia yang dikelola oleh 35 Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) UT. Sebagian besar (85%) mahasiswa UT adalah orang yang sudah bekerja. Mereka memilih UT sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka sebagai orang dewasa yang umumnya memiliki komitmen pada pekerjaan dan didorong oleh keterbatasan waktu untuk mengikuti program pendidikan pada perguruan tinggi tatap muka biasa. Kuliah di UT sangat fleksibel tanpa harus meninggalkan pekerjaan atau keluarga, dan tidak dibebani dengan biaya hidup tambahan untuk pondokan dan transportasi sebagaimana kuliah pada perguruan tinggi tatap muka biasa. Belajar di UT sangat fleksibel. UT dapat memenuhi berbagai kebutuhan mahasiswanya. Sebagai contoh, mahasiswa dapat berpindah-pindah tempat ujian di seluruh tanah air sesuai dengan kebutuhannya.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui UT dengan sistem pendidikan jarak jauh mendapat sambutan yang cukup hangat dari kalangan masyarakat berbagai tingkatan dan latar belakang, terutama mereka yang benar-benar menjadi sasaran didik utama UT, yaitu mereka yang berasal dari kelompok masyarakat yang sudah bekerja,

tinggal di daerah terpencil, dan tidak memiliki akses pada universitas tatap muka biasa. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah mahasiswa UT saat ini lebih dari 200.000 orang. Dari jumlah tersebut, 85 % diantaranya adalah mereka yang telah bekerja. Dari data pribadi mahasiswa UT yang tersimpan, tercatat mahasiswa UT dengan berbagai latar belakang tingkat pendidikan, sosial ekonomi, usia, pekerjaan, dan tersebar luas di seluruh pelosok negeri, bahkan hingga ke luar negeri. Karena mahasiswa UT tersebar di seluruh tanah air dan tidak setiap hari bergerak menuju kampus, aktivitas mahasiswa sebesar ini relatif tidak tampak bagi kebanyakan masyarakat UT, sebagaimana mahasiswa pada universitas tatap muka biasa. Bayangkan seandainya ada, betapa besarnya suatu kampus perguruan tinggi tatap muka yang mempunyai mahasiswa lebih dari 200.000 orang.

Perlu dicatat bahwa pada tahun 1998, jumlah mahasiswa UT mencapai lebih dari 400.000 orang, sebagian besar di antara mereka adalah para Guru Sekolah Dasar yang mengikuti Program Diploma II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Dengan jumlah mahasiswa melebihi 100.000 orang, UT mungkin dikategorikan ke dalam 10 *mega-universities* di dunia. Daya tampung UT yang sangat besar dimungkinkan karena daya jangkauan media yang digunakan sangat luas dan mampu mengatasi kendala jarak dan waktu. Televisi dan radio dapat disiarkan secara nasional, bahan ajar cetak (modul) dapat dikirimkan melalui jaringan pos ke seluruh pelosok Indonesia dan mahasiswa dapat mempelajarinya kapan dan di mana saja sesuai waktu mereka yang tersedia.

Pemerataan Kesempatan Belajar

Tidak dapat dipungkiri bahwa UT dengan sistem belajar jarak jauhnya telah menjadi bagian dalam sistem pendidikan nasional.

Sistem belajar jarak jauh membiasakan peserta didiknya untuk terus belajar melalui berbagai sumber, baik itu cetak maupun noncetak sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat berimplikasi pada ketatnya persaingan dalam menghadapi era perdagangan bebas. Walaupun memiliki kekuatan sumber daya alam yang cukup besar, untuk tetap eksis, Indonesia tidak dapat mengandalkan kekuatannya pada sisi ini saja. Kekuatan sumber daya manusia akan sangat menentukan dalam era perdagangan bebas nanti. Karena itu, diperlukan upaya yang berarti dalam menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan mampu bersaing secara global. Upaya melalui jalur pendidikan harus ditempuh. Salah satu kesempatan ini harus dilakukan melalui sistem pendidikan jarak jauh yang mengutamakan kemandirian peserta didiknya.

Kehadiran otonomi daerah yang resmi diberlakukan di tanah air sejak tanggal 1 Januari 2001 disambut banyak pihak dengan senang hati. Melalui sistem otonomi daerah ini setiap daerah (kabupaten/kota) mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus daerahnya. Dalam aspek pendidikan, otonomi daerah juga memberikan warna tersendiri. Bagi daerah yang memandang otonomi daerah sebagai suatu kesempatan untuk memajukan pendidikan khususnya di daerahnya, mereka merasa optimis dapat menggunakan kesempatan ini. Pada hakikatnya, memajukan pendidikan berarti membangun aset masa depan, yaitu meningkatkan mutu sumber daya manusia. Jika SDM terbentuk, mereka akan lebih mantap memajukan daerahnya, didukung oleh fasilitas sumber daya alam yang memadai. Pendidikan tinggi dengan sistem belajar jarak jauh memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam usaha peningkatan mutu SDM ini.

UT sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dengan sistem belajar jarak jauhnya telah menghasilkan lulusan yang cukup berperan bagi

pembangunan bangsa. Lembaga seperti Departemen Pertanian bekerja sama dengan UT menyelenggarakan peningkatan profesional para penyuluh pertanian lapangan melalui program D-III Penyuluhan Pertanian. Program inipun terus dikembangkan dan ditingkatkan menjadi program S-1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Karakteristik pendidikan jarak jauh memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik tanpa harus meninggalkan tempat tinggal dan tugas sehari-harinya.

Peningkatan kompetensi guru SD yang tersebar di seluruh Indonesia dilakukan melalui Program D-II PGSD dan Program S-1 PGSD yang diselenggarakan di UT. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah mengalokasikan sebagian anggaran pendidikan daerahnya untuk kebutuhan peningkatan kompetensi guru. Mereka juga bisa mengikuti pendidikan sambil bekerja. Dengan daya jangkau UT yang luas, sistem belajar jarak jauh bisa menjangkau guru sebagai peserta didik sampai di daerah terpencil yang sulit dijangkau transportasi. Keterbatasan fasilitas belajar, ruang belajar atau tenaga pendidik akan dapat diatasi karena sistem ini dapat memaksimalkan sumber belajar yang ada dan tidak memerlukan ruang khusus. Mereka dibiasakan belajar menggunakan berbagai sumber belajar, yaitu setiap ada kesempatan, mereka dapat belajar. Peningkatan kompetensi para pegawai yang tersebar di daerah-daerah relatif sulit jika dilakukan dengan cara konvensional. Sejak tahun 2002, UT telah bekerjasama dengan Departemen Kehakiman dan HAM memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mengikuti program pendidikan tinggi melalui UT. Dengan kondisi sebagai narapidana, mereka adalah termasuk dalam kelompok yang tidak mungkin mengikuti pendidikan tinggi tatap muka.

Telah dijelaskan bahwa sistem pendidikan jarak jauh memberikan kebebasan belajar kepada peserta didik. Ini berarti bahwa sikap-sikap seperti kemandirian, disiplin, tanggung jawab, keuletan,

keingintahuan, serta kebiasaan membaca sangat dibutuhkan dalam sistem ini. Sistem ini juga memberikan keleluasaan kepada setiap orang untuk mengelola sesuai dengan kebutuhannya, baik dalam hal bahan belajar, sistem pengelolaan waktu, maupun sistem belajarnya.

Di samping potensi ini, biaya pendidikan di UT boleh dikatakan cukup murah bagi mahasiswa di Indonesia. Untuk program studi nonkependidikan yang bukan program kerja sama, mahasiswa tidak diwajibkan untuk membeli bahan ajar atau modul. Mereka boleh meminjam dari teman, meminjam dari lulusan UT, atau pergi ke Perpustakaan UPBJJ-UT, Perpustakaan Daerah, serta Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri Pembina setempat. Biaya pendidikan di UT mencakup SPP dan registrasi. Biaya ini akan dikelola dalam bentuk berbagai macam pelayanan akademik dan administratif bagi mahasiswa. Keadaan pembiayaan seperti ini diharapkan akan terjangkau bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan jarak jauh melalui UT.

Sesuai dengan latar belakang pendirian UT, maka program studi yang ditawarkan terdiri dari program studi kependidikan yang bernaung di bawah FKIP dan program studi nonkependidikan yang bernaung dibawah tiga fakultas, yaitu FMIPA, FEKON, dan FISIP. Sedangkan strata pendidikan yang dikelola UT sampai saat ini adalah Sertifikat nongelar, Diploma I, Diploma II, Diploma III, Strata I, serta *Advanced Courses Program*.

Jaringan Kerja Sama

Pada dasarnya, pendidikan jarak jauh harus didukung oleh suatu jaringan kerja sama yang cakupannya mencapai seluruh negeri bahkan juga ke seluruh dunia. Karena itu sejak awal UT didesain sebagai perguruan tinggi yang operasionalnya mengandalkan kerja

sama dengan berbagai pihak. Pimpinan UT terus berupaya untuk tetap dapat meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan menjalin jaringan kerja sama. UT telah mengadakan kerja sama dengan berbagai lembaga, baik lembaga pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri untuk peningkatan kualitas pendidikannya.

Untuk mendukung kegiatan operasional UT dan pengelolaan jaringan kerja sama ini, UT didukung oleh 35 Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ). UPBJJ dipimpin oleh staf dari dalam UT maupun tenaga-tenaga senior dari PTN setempat. Dalam konteks ini perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia merupakan unsur penting dalam jaringan kerja sama UT. UT sejak awal juga telah mengembangkan dan mengelola kerja sama dalam berbagai bentuk dari berbagai instansi lain selain perguruan tinggi negeri. Bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan UT dengan berbagai instansi, dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu kerja sama dalam pengembangan SDM, kerja sama dalam pengembangan sistem dan dukungan operasional, dan kerja sama dalam penyediaan fasilitas kegiatan.

Kerja Sama dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jenis kerja sama ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kerja sama dalam pengembangan SDM UT dan kerja sama dalam pengembangan SDM institusi mitra kerja UT. Kerja sama jenis pertama telah dimulai sejak UT berdiri. Sebagaimana telah disebutkan dalam bab dua, para pengelola UT umumnya belum memiliki pengalaman dalam pengelolaan pendidikan jarak jauh. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak seperti Bank Dunia, Unesco, dan CIDA, UT mengirimkan stafnya ke Canada, Amerika Serikat, dan Australia

untuk melanjutkan studinya pada tingkat S-2 dan S-3 dalam bidang manajemen pendidikan jarak jauh. Dari hasil kerja sama tersebut ada sekitar 50 orang staf UT yang dikirim dan berhasil menyelesaikan pendidikannya. Mereka itu yang kini memegang peran penting dalam pengelolaan UT. Selain itu UT juga memberikan kesempatan kepada stafnya untuk melanjutkan studinya pada jenjang S-2 dan S-3 dalam bidangnya masing-masing.

Kelompok kedua dalam jenis kerja sama ini adalah kerja sama dalam pengembangan SDM mitra UT. Berbagai instansi melakukan kerja sama dengan UT dalam rangka pengembangan SDM mereka. Lembaga-lembaga yang melakukan kerja sama dengan UT untuk meningkatkan SDM-nya antara lain adalah Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah dan pemerintah daerah (untuk meningkatkan pendidikan guru-guru sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah umum). Kerja sama jenis ini dilakukan pula dengan Departemen Pertanian, BKKBN, Perpustakaan Nasional, TNI, PT Garuda Indonesia, PT Pos Indonesia, dan PT Telkom

Kerja Sama dalam Pengembangan Sistem dan Dukungan Operasional

Sistem belajar jarak jauh berbeda dengan perkuliahan sistem tatap muka. Sebagaimana disebutkan dalam bab dua, UT didirikan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi dengan memanfaatkan sumber yang ada, terutama SDM pendidikan tinggi. Atas dasar pemikiran tersebut, sejak awal pengembangan UT dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi. Dalam struktur UT, perguruan tinggi negeri yang ada di seluruh Indonesia bahkan berstatus sebagai pembina UPBJJ UT di daerah masing-masing. Kerja sama dengan perguruan tinggi ini dilakukan

dalam bidang pengembangan sistem jaringan operasional, penyediaan penulis bahan ajar dan penulis soal ujian, dan kerja sama dalam penyelenggaraan tutorial baik untuk penyediaan tutor maupun ruang-ruang tutorial. Kerja sama untuk penyelenggaraan tutorial selain dengan lembaga perguruan tinggi juga dilakukan dengan TVRI, TPI (kini sudah dihentikan), RRI, Indosat, stasiun radio swasta daerah, dan *Q-Channel*, serta pemerintah daerah. Kerja sama untuk mendukung operasional juga dilakukan oleh UT dengan PT Pos untuk pengiriman bahan ajar, pengiriman surat-menyurat, penyediaan formulir registrasi, dan pembayaran SPP. Sejak tahun 1990, UT juga menyelenggarakan kerja sama dengan BRI untuk pembayaran SPP program D-II PGSD, kemudian sejak tahun 2001 seluruh pembayaran SPP UT dilakukan melalui BRI.

Kerja Sama dalam Penyediaan Fasilitas Kegiatan

UT sejak awal tidak didesain sebagai perguruan tinggi yang memiliki fasilitas lengkap seperti perguruan tinggi konvensional. Mahasiswa UT yang besar dan tersebar di berbagai penjuru tanah air, bahkan di beberapa negara mendorong UT untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan ruang tutorial dan ruang ujian. Untuk kepentingan itu UT bekerja sama dengan 213 pemerintah kabupaten/kota diantara 327 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, serta dengan atase pendidikan di beberapa negara. Melalui kerja sama tersebut, UT dapat menyelenggarakan tutorial dan ujian di tempat-tempat yang mudah dijangkau mahasiswa. Selain itu, UT juga pernah melakukan kerja sama dengan PT Telkom dalam penyelenggaraan ujian STT Telkom, dan Kopertis wilayah Jakarta dalam pengelolaan ujian negara untuk mata kuliah Pancasila.

Warung Informasi dan Telekomunikasi (Warintek) menggalang kerja sama dengan UT agar mahasiswa mendapat kemudahan dalam

mengakses informasi melalui website UT. Melalui website UT, mahasiswa dapat mengakses informasi lengkap mengenai sistem UT dan perpustakaan elektronik UT. Dengan mengakses website UT, mahasiswa UT juga dapat memperoleh bimbingan belajar, tutorial online, bahan ajar suplemen.

Selain bekerja sama dengan pihak dalam negeri, ke luar negeri pun UT telah mengembangkan jaringannya. Dalam perkembangannya, UT mendapatkan dukungan dari *International Council for Distance Education (ICDE)* dalam upaya peningkatan kualitas melalui program audit kualitas institusional internasional yang dilaksanakan oleh *ICDE Standards Agency (ISA)*. Audit tersebut direncanakan dilaksanakan pada tahun 2005 dengan maksud untuk mengidentifikasi kelemahan UT untuk bekal perbaikan menuju tahun 2010. Pada tahun 2009, UT akan meminta audit dari *Asian Association Open University (AAOU)* untuk mengetahui posisinya di antara anggota AAOU. Disamping itu, UT juga menjalin kerjasama dengan berbagai institusi internasional lain seperti *SEAMEO (South-East Asian Ministers of Education Organisation)* dan *UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)* dalam upaya meningkatkan pengembangan pendidikan jarak jauh nasional maupun internasional.

Lebih lanjut, UT juga menjalin kerja sama dengan berbagai *Open Universities* di dunia, seperti *FernUniversitaet Jerman.*, *Open University of Catalonia Spanyol*, *Sukhothai Thammathirat Open University Thailand*, dan *Vietnam Open University* melalui kerangka kerja sama *ASEAN-European Union University Network Programme*. Kerja sama ini meliputi berbagai bidang seperti penelitian terapan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kurikulum, serta pemanfaatan teknologi online.

Walaupun demikian, dalam pengembangan institusinya, khususnya dalam bidang pengembangan kerjasama, UT juga masih mengalami kendala dalam mencari dukungan dari pihak lain yang terkait dengan kegiatan UT. *Pertama*, adalah dukungan program televisi. Sampai saat ini UT belum memiliki akses terhadap pemanfaatan jaringan televisi swasta nasional sehingga program-program video yang telah dibuat UT tidak dapat disiarkan melalui televisi dan cukup direproduksi dalam bentuk VCD yang dikemas sebagai paket bersama bahan ajar tercetak. Pemanfaatan jaringan televisi swasta nasional memerlukan biaya yang sangat tinggi, sehingga tidak terjangkau oleh UT. Saat ini UT hanya memperoleh dukungan dari suatu program televisi kabel yang hanya dapat diakses oleh kalangan terbatas, yaitu *Q Channel*. Berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari *Open Universities* lain di Asia seperti di Korea dan Thailand, biaya penyiaran program televisi tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Mereka mempunyai program yang ditayangkan di televisi setiap hari dalam waktu beberapa jam. *Kedua*, dukungan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi membutuhkan biaya yang sangat besar. Pada saat ini UT melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) merintis upaya untuk mendapatkan bantuan hibah dari pihak asing. Bila bantuan tersebut berhasil diperoleh, maka pelayanan akademik dan administratif bagi maha-siswa UT akan dapat diselenggarakan dengan lebih cepat, akurat dan intensif. Jalan menuju visi UT untuk menjadi salah satu pusat unggulan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh di Asia pada tahun 2010 akan lebih lancar.

Simpulan

Keberadaan UT sebagai penyelenggara pendidikan dengan sistem belajar jarak jauh, memberikan peluang sebagai wahana pemersatu bangsa. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan UT dalam mengembangkan pendidikan atau pelatihan untuk peningkatan kualifikasi sumber daya manusia di daerahnya. Kondisi ini dapat pula dimanfaatkan oleh lembaga, institusi lainnya, serta masyarakat luas. Lulusan UT diharapkan berpengaruh secara signifikan pada kemajuan pembangunan bangsa. □

BAB V

SISTEM OPERASI UNIVERSITAS TERBUKA

PELAKSANAAN SISTEM OPERASI

Pengantar

Universitas Terbuka (UT) dalam penyelenggaraan pendidikannya menerapkan sistem belajar jarak jauh (SBJJ). Sebagai perguruan tinggi jarak jauh, sistem yang diterapkan UT memiliki keunikan yang tidak dapat disamakan dengan perguruan tinggi tatap muka. Dalam SBJJ yang diterapkan di UT, terdapat lima komponen utama yang tidak semuanya terdapat dalam sistem belajar tatap muka. Kelima komponen itu adalah bahan ajar, registrasi, distribusi bahan ajar, proses belajar, dan evaluasi. Komponen bahan ajar meliputi pengembangan program, kurikulum, pengembangan (penulisan) bahan ajar, penggandaan bahan ajar. Registrasi merupakan rangkaian pendaftaran mahasiswa mulai dari pembelian formulir di kantor pos atau di kantor UPBJJ-UT, pembayaran SPP di bank, sampai akhirnya pengembalian formulir registrasi di kantor-kantor UPBJJ. Distribusi bahan ajar adalah

pendistribusian bahan ajar kepada mahasiswa yang telah mendaftarkan diri sebagai mahasiswa UT dan membeli bahan ajarnya. Proses belajar adalah rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh proses belajar mahasiswa, mulai dari menyusun strategi belajar sampai mengikuti berbagai layanan belajar yang diberikan UT seperti tutorial. Evaluasi sebagai alat mengukur kemampuan mahasiswa dalam menguasai kompetensi mata kuliah. Kelima komponen ini dalam sistem UT dikenal dengan sistem operasi.

Bab ini membahas sistem operasi yang diterapkan UT dalam penyelenggaraan belajar jarak jauh. Sistem operasi yang dibahas dalam bab ini meliputi pengembangan program akademik, kurikulum dan bahan ajar, distribusi, registrasi, layanan mahasiswa, dan evaluasi hasil belajar mahasiswa. Agar pembaca mendapatkan gambaran yang jelas, setiap komponen yang dibicarakan dalam bab ini ditinjau dengan perspektif sejarah. Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat memahami perkembangan setiap komponen dalam sistem operasi UT selama 20 tahun dan prospek ke depan.

PERKEMBANGAN PROGRAM AKADEMIK

Siti Julacha

Sistem Pengembangan Program

Universitas Terbuka (UT) memiliki kemampuan untuk melayani peningkatan kualifikasi sumber daya secara massal, karena mampu memberikan pilihan cara belajar kepada peserta didiknya. UT menawarkan program pendidikan jarak jauh yang menggunakan berbagai modus yang mampu mengatasi perbedaan atau jarak antara guru dan siswa (Perraton, 1993), seperti melalui surat menyurat, pembelajaran melalui radio, televisi bahkan internet. Modus tersebut memudahkan siswa untuk melakukan aktivitas lain di samping belajar dalam waktu yang bersamaan, dan juga memberikan kemudahan dalam pengelolaan waktu secara individual. Hal ini sesuai dengan tujuan didirikannya UT, yaitu (1) memberikan kesempatan yang luas bagi warga negara Indonesia, di mana pun tempat tinggalnya untuk memperoleh pendidikan tinggi, (2) mengembangkan pelayanan pendidikan bagi mereka yang bekerja atau karena alasan lain tidak dapat melanjutkan belajar di

perguruan tinggi tatap muka, serta (3) mengembangkan program pendidikan akademik dan profesional yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata pembangunan yang belum banyak dikembangkan oleh perguruan tinggi lain.

Awalnya, pengembangan program studi dan kurikulum dilakukan oleh satuan tugas pada tingkat universitas melalui konsultasi dengan berbagai konsorsium pendidikan tinggi. Hasilnya adalah empat program S-1, yaitu Administrasi Negara, Administrasi Niaga, Ekonomi dan Studi Pembangunan, serta Statistika.

Selanjutnya, fungsi satuan tugas pengembangan program dialihkan kepada fakultas. Sejak berdiri hingga saat ini UT memiliki empat fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi (FEKON), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Pengembangan program studi dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan pertimbangan mengenai keunikan sistem pendidikan jarak jauh.

Pada awal berdirinya, selain mengembangkan beberapa program studi, UT juga menerima pelimpahan pengelolaan Program D-I dan D-II Pendidikan Guru Sekolah Menengah dan Program Akta Mengajar V dari Dirjen Dikti. Program kependidikan merupakan limpahan dari tugas Proyek Pendidikan Guru melalui belajar jarak jauh, yang semula ditangani oleh 12 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Negeri. Sementara itu, Program Akta Mengajar V ditujukan untuk meningkatkan keterampilan mengajar dosen perguruan tinggi tatap muka melalui sistem belajar jarak jauh. Dalam perjalanannya, Program Akta Mengajar V diganti menjadi Program *Applied Approach* (Program AA) yang ditujukan bagi dosen senior dan Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Program PEKERTI) untuk dosen junior. Pelaksanaan kedua

program tersebut diserahkan kepada UT sebagai koordinator dan pemberi sertifikat. Pengelolaan kedua program tersebut ditangani oleh Pusat Antar Universitas-Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional UT (PAU-PPAI UT).

Pengembangan dan pembukaan program studi baru pada semua fakultas didasarkan atas beberapa alasan. *Pertama*, inisiatif universitas sebagai respon atas perkembangan internal dan eksternal yang mengakibatkan munculnya kebutuhan masyarakat terhadap program-program tertentu. Pengembangan program seperti itu biasanya diawali dengan studi kelayakan tentang pangsa pengguna program. Upaya ini dilakukan mengingat mahalnya operasi sebuah program studi di UT. Karena itu, keberlanjutan (*sustainability*) suatu program harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. UT akan membuka program bila sekurang-kurangnya terdapat 3.000 calon pengguna.

Kedua, pembukaan suatu program didasarkan atas permintaan khusus instansi pemerintah karena kebutuhan peningkatan kompetensi dan kualifikasi pegawainya. Program-program yang dibuka dengan alasan tersebut di antaranya Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar, baik dalam jenjang D-II maupun sarjana (S-1), Program Pendidikan Guru Sekolah Menengah (PGSM) atau guru bidang studi, Program Statistika Terapan, Penyuluhan Pertanian, BKKBN, Perpustakaan, dan program-program sertifikat pada umumnya.

Namun demikian, UT juga menutup program-program yang tidak diperlukan lagi oleh masyarakat. Keluwesan UT dalam membuka dan menutup suatu program merupakan salah satu prinsip yang dianut agar dapat melayani kebutuhan masyarakat yang beragam dengan baik.

Sejak awal berdirinya hingga saat ini, melalui keempat fakultasnya, UT telah menawarkan 83 program.

Berdasarkan Garis-garis Besar Rencana Induk Pengembangan (GB-RIP) UT 1992 – 2000, UT melaksanakan program pendidikan yang memberikan kesempatan yang luas kepada warga negara Indonesia di mana pun tempat tinggalnya untuk memperoleh pendidikan tinggi dengan kualitas baik. Selain itu, UT juga mengembangkan pelayanan pendidikan tinggi bagi mereka yang sudah bekerja, dan atau yang tidak dapat mengikuti pendidikan tinggi konvensional. UT mengembangkan pula program akademik dan profesional yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata pembangunan, yang belum dikembangkan oleh perguruan tinggi lain. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa UT perlu mengembangkan program yang terjangkau, baik biaya maupun jarak oleh mereka yang berminat belajar dan bertempat tinggal di mana saja di Indonesia maupun di beberapa negara lainnya. Di samping itu, UT juga perlu mengembangkan program khusus dan pelayanan khusus yang ditujukan untuk mahasiswa tertentu; dalam batas-batas tertentu, mengembangkan program studi yang memerlukan praktikum dan pemantapan pengalaman lapangan, yang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga lain. UT menawarkan program studi secara berjenjang sehingga mahasiswa dapat memulai dengan program sertifikat, kemudian meneruskannya ke program diploma, dan akhirnya dapat menyelesaikan program sarjana, tanpa kehilangan banyak satuan kredit semester (SKS).

Adanya perubahan orientasi penyelenggaraan program, perkembangan teknologi informasi dan ekonomi, baik nasional maupun internasional, membuka beragam bidang kerja baru. Hal ini juga memberikan tantangan bagi UT untuk mampu mengembangkan program akademik yang dapat mengikuti perubahan yang terjadi. □

Daftar Pustaka

Perraton, H. (ed.). 1993. *Distance education for teacher training*.
New York: Routledge.

PERKEMBANGAN KURIKULUM DAN BAHAN AJAR

Mohamad Yunus

Perkembangan Kurikulum

Kurikulum bagi setiap program di UT merupakan cetak biru (*blue print*) sebagai landasan dan acuan penyelenggaraan program-program akademik. Sebagai sebuah cetak biru rujukan program, kurikulum menyajikan penjelasan saintifik tentang rasionalisasi akademik dan kemengapaan dari setiap aspek dan sosok dari wujud kurikulum tersebut; juga sasaran program, tujuan program atau kompetensi lulusan, struktur program, bahan ajar, pembelajaran, layanan pembelajaran, penilaian, dan sertifikasi.

Untuk menghasilkan suatu dokumen kurikulum yang utuh dan solid dalam konteks Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ), ternyata tidaklah mudah. Diperlukan cukup waktu dan proses uji coba yang tidak sebentar. Kesulitan itu muncul selain karena sejak awal berdirinya hingga saat ini UT merupakan satu-satunya institusi PTJJ di Indonesia, kurikulum yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pun didesain untuk perguruan tinggi tatap muka,

bukan PTJJ. Sementara itu, kurikulum PTJJ mancanegara tidak dapat secara langsung diadopsi oleh UT karena kondisinya yang berbeda.

Sejak awal berdirinya hingga saat ini, perkembangan kurikulum UT dapat dikategorikan ke dalam tiga periode, yaitu periode awal, periode perbaikan, dan periode penataan. Periodisasi tersebut sebenarnya lebih didasarkan pada warna atau orientasi dominan yang terjadi dalam pengembangan kurikulum untuk setiap masa.

1. Periode Awal (1984-1995)

Persiapan pendirian UT relatif sangat singkat waktunya. Hanya sekitar 10 bulan. Untuk kepentingan berjalannya UT, disiapkanlah sistem operasi yang paling sederhana, salah satunya adalah kurikulum. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengikuti kurikulum inti sedangkan dikembangkan oleh Ditjen Dikti, yang perumusannya dibantu oleh para pakar dari setiap bidang terkait dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu langkah penting yang dilakukan UT saat itu dalam mengembangkan kurikulum adalah keberaniannya untuk meniadakan program mayor dan minor, yang masih diterapkan oleh perguruan tinggi tatap muka di Indonesia.

Kurikulum yang dihasilkan pun masih sangat sederhana. Laiknya kurikulum yang dikembangkan dengan pendekatan isi, kurikulum setiap program di UT pun hanya terdiri dari komponen tujuan program, struktur kurikulum dengan mata kuliah wajib dan pilihan, serta deskripsi isi atau materi dari setiap mata kuliah. Kegiatan praktek dan praktikum masih dihindari karena kesulitan pengimplementasiannya di lapangan. Karakteristik PTJJ belum sepenuhnya terpikirkan secara utuh ketika mengembangkan kurikulum.

Untuk kemudahan penanganan, mata kuliah yang ditawarkan dikemas dalam bentuk paket-paket mata kuliah yang wajib diambil mahasiswa. Tutorial pun disediakan UT untuk seluruh mata kuliah yang ditawarkan. Akan tetapi, pada tahun kedua pemaketan mata kuliah tidak dapat dipertahankan lagi karena berbagai kendala. Mahasiswa yang tidak lulus salah satu atau beberapa mata kuliah kesulitan mengikuti paket mata kuliah berikutnya. Kantor pos pun tidak memiliki tempat untuk menampung seluruh bahan ajar yang diperlukan mahasiswa.

Akhirnya, pemaketan mata kuliah pun dihilangkan. Mahasiswa dibebaskan untuk memilih dan meregistrasi mata kuliah yang ditawarkan. Kendati demikian, untuk Program D-II PGSD yang mulai dibuka pada tahun 1990 dan program-program kerja sama lainnya, pemaketan mata kuliah tetap dilakukan tanpa adanya mata kuliah pilihan. Kebijakan ini diterapkan untuk kemudahan pengelolaan karena UT berkewajiban menyediakan tutorial untuk setiap mata kuliah program tersebut. Kegiatan praktek dan praktikum pun tidak dapat dihindari lagi karena tujuan mata kuliah menuntut pengalaman belajar seperti itu.

2. Periode perbaikan (1995-2002)

Seiring dengan diberlakukannya kurikulum nasional pendidikan tinggi tahun 1995, UT pun mulai memperbaiki kurikulum seluruh programnya. Namun demikian, perbaikan kurikulum masih lebih terfokus pada penggantian atau penataan mata kuliah yang tidak sesuai dengan kurikulum nasional. Kecuali untuk program PGSD, mahasiswa program lain dibebaskan untuk mengambil mata kuliah wajib maupun pilihan sesuai dengan keinginannya. Mata kuliah yang memerlukan praktek dan praktikum pun telah banyak diberi fasilitas.

Keberadaan mata kuliah pilihan untuk setiap program studi, ternyata menimbulkan inefisiensi dan menjadi beban bagi UT. Bahan ajar dan bahan ujian harus disediakan pada setiap semester dengan biaya yang cukup mahal. Padahal, peminat mata kuliah pilihan itu pun tidak terlalu banyak. Akhirnya, pada tahun 2001 dilakukan kembali perbaikan kurikulum yang disebut dengan *kurikulum minimalis*. Mata kuliah pilihan pun dihilangkan. Setiap program studi hanya menyediakan mata kuliah-mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa.

Ternyata, sesederhana apa pun perbaikan kurikulum itu, bagi konteks PTJJ dampaknya cukup besar. UT tidak dapat serta merta mengganti atau memperbaiki semua bahan ajar secara serempak. Selain dana yang diperlukan sangat besar, waktu penyelesaian bahan ajar pun tidak sebentar. Pengembangan (revisi atau tulis baru) bahan ajar setiap mata kuliah memerlukan waktu rata-rata sekitar 18 bulan. Sementara itu, perubahan kurikulum atau bahan ajar pun harus diinformasikan kepada semua mahasiswa di seluruh Indonesia. Untuk keperluan sistem dan mahasiswa, UT menyusun kesetaraan mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum lama dengan kurikulum baru. Peristiwa ini melahirkan istilah mata kuliah inti dan noninti.

3. *Periode penataan (2003-2005)*

Sejalan dengan semakin kuatnya semangat peningkatan kualitas akademik di UT, ditambah lagi dengan pemberlakuan otonomi perguruan tinggi dan kebijakan penerapan kurikulum berbasis kompetensi, UT pun melakukan penataan kembali kurikulum program studinya. Dengan mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 dan Nomor 045/U/2002 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi,

kurikulum seluruh program studi mulai ditata ulang. Seluruh komponen yang semestinya tercakup dalam suatu kurikulum telah diupayakan keberadaannya. Penataan kurikulum dimulai dari penentuan sasaran program, tujuan atau kompetensi lulusan program, analisis kompetensi, analisis kurikuler, bahan ajar, sistem layanan, asesmen, tata penyelenggaraan program, hingga penjaminan mutu program. Pertimbangan substansi dan sistem dalam konteks PTJJ telah digunakan sebagai landasan penataan kurikulum. Hasil penataan ini didokumentasikan dalam bentuk naskah akademik program studi. Upaya ini diharapkan akan menghasilkan suatu acuan program yang utuh dan solid sehingga apa pun keputusan operasional program bertolak dari naskah akademik tersebut.

Dalam penataan kurikulum seluruh program studi, Prof. Dr. M. Atwi Suparman, M.Sc. selaku Rektor UT, dalam bukunya *Universitas Terbuka Memasuki Era Gelora Simintas Tahun 2004* menyatakan bahwa:

- a. Program studi dan mata kuliah yang ditawarkan UT harus kompetitif di Asia, yang berarti *transferable* ke *open university* lain di Asia.
- b. Program studi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, yang diindikasikan oleh relevansi yang tinggi dengan kebutuhan pengguna lulusan, struktur kurikulum yang luwes dan fleksibel, dan penggunaan teknologi moderen yang tepat guna.
- c. Program studi yang ditawarkan UT menjadi salah satu *benchmark* atau acuan mutu bagi *open university* lain.

Untuk mewujudkan kurikulum yang seperti itu tentu diperlukan proses yang tidak sebentar. Mulai tahun 2003 penataan kurikulum pun dilakukan. Seiring dengan penataan dokumen kurikulum, aspek-aspek lainnya seperti bahan ajar, bahan ujian, dan sistem operasional, secara simultan ditata ulang secara bertahap.

Perkembangan Bahan Ajar

Dalam konteks PTJJ, bahan ajar merupakan media pembelajaran yang sangat strategis. Melalui bahan ajar itu mahasiswa belajar, berinteraksi, berefleksi, dan mengevaluasi diri. Melalui bahan ajar pula mahasiswa berhubungan dan berkomunikasi secara virtual dengan penulis modul sebagai dosennya. Karena itu pula, bahan ajar UT tidak hanya bermuatan materi ajar, tetapi juga strategi belajar, pengalaman belajar, evaluasi belajar, serta perangkat instruksional lainnya.

Pengembangan bahan ajar UT dirancang berdasarkan prinsip kecukupan-kelengkapan dan membelajarkan sendiri mahasiswa. Bahan ajar dikemas dalam bentuk media cetak (modul, panduan, dan perangkat cetak lainnya) serta noncetak (audio, video, dan bahan ajar berbasis komputer termasuk di dalamnya web atau *online*). Seperti halnya pada PTJJ lain di luar negeri, media cetak merupakan bahan ajar utama UT. Namun demikian, secara bertahap dikembangkan pula bahan ajar noncetak yang mengarah pada paket bahan ajar multimedia. Sampai saat ini, 20 % dari 793 mata kuliah yang ditawarkan UT telah didukung oleh paket bahan ajar multimedia.

Dalam mengembangkan bahan ajar, UT melibatkan para ahli materi dari perguruan tinggi negeri dan swasta, serta institusi lainnya. Sampai dengan tahun 2003, UT telah bekerja sama dengan 63 instansi dalam pengembangan bahan ajar. Pelibatan pihak luar UT dalam mengembangkan bahan ajar disebabkan oleh beberapa alasan. *Pertama*, karena keterbatasan sumber daya manusia intern UT sendiri. *Kedua*, UT dapat memilih pakar-pakar terbaik di bidangnya untuk menghasilkan bahan ajar berkualitas. Namun demikian, pemanfaatan sumber luar (*outsourcing*) memiliki tantangan tersendiri. UT tidak dapat sepenuhnya mengendalikan waktu

penyelesaian penulisan bahan ajar. Ketiga, pelibatan para pakar dari luar UT merupakan upaya pengembangan jaringan untuk memperkenalkan secara luas keberadaan UT.

Terbukti, bahan ajar UT tidak hanya digunakan oleh mahasiswa UT, tetapi juga oleh pengguna dan mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Mengingat ragam pemakai dan daya jangkau pemakaiannya, UT dihadapkan pada tantangan untuk selalu dapat memelihara mutu kesahihan dan kekinian substansi bahan ajar serta pengemasannya secara terus menerus, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Rektor dalam bukunya *Universitas Terbuka Memasuki Era Gelora Simintas Tahun 2004* mencantumkan sosok bahan ajar yang berkualitas.

- a. Isinya benar dan mutakhir.
- b. Ditulis oleh pakar yang berkualifikasi tinggi di bidangnya.
- c. Dirancang dengan menerapkan konsep desain instruksional yang sistematis dan sesuai dengan konsep pembelajaran jarak jauh, yaitu utuh-lengkap dan membelajarkan sendiri mahasiswa.
- d. Desain fisik berstandar internasional.
- e. Berbentuk paket multimedia yang tepat guna.

Tentu saja, kerja keras dan perjalanan panjang perlu ditempuh untuk mewujudkan bahan ajar yang memiliki karakteristik seperti itu pada tahun 2010. Mungkinkah impian itu terwujud? Jika menengok sejarah perkembangan bahan ajar UT hingga wujudnya seperti saat ini, impian itu optimis akan tercapai.

1. Periode Awal (1982-1990)

Pada awal berdirinya, UT memutuskan bahwa bahan ajar ditulis oleh para penulis modul yang direkrut dari para dosen yang memiliki keahlian yang berasal dari berbagai perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia. UT tidak mengadaptasi atau mengadopsi

buku-buku yang sudah tersedia di pasaran karena memang buku-buku tersebut tidak didesain sebagai bahan ajar PTJJ. Dengan cara ini, UT dapat mengatur sendiri sistem pengemasan dan penyajian bahan ajar sesuai dengan keperluannya. Keputusan tersebut sangat tepat karena pengembangan bahan ajar seperti itu dapat dimanfaatkan sebagai media untuk memperkenalkan kepada khalayak keberadaan UT sebagai institusi PTJJ di Indonesia. Dengan keputusan tersebut, jadilah UT pun sebagai penerbit terbesar buku teks perguruan tinggi di Indonesia yang dikenal dan diakui oleh perguruan tinggi negeri dan swasta.

Pengembangan bahan ajar seluruh fakultas saat itu dikoordinasikan oleh suatu tim UT, yang diketuai oleh Dr. M. Atwi Suparman, M.Sc. yang saat itu menjabat sebagai Pembantu Rektor III. Tim menyusun suatu acuan pengembangan bahan ajar yang dikenal dengan *Panduan Penulisan Modul*. Para penulis modul yang terlibat adalah para dosen terkemuka dari berbagai perguruan tinggi negeri, seperti UI, IKIP Jakarta (sekarang UNJ), IPB, ITB, IKIP Bandung (sekarang UPI), UNPAD, Universitas Jenderal Soedirman, UNDIP, UGM, IKIP Yogyakarta (sekarang UNY), UNS, UNAIR, IKIP Surabaya (sekarang UNESA), dan IKIP Malang (sekarang UM).

Penulisan modul berjalan cukup lancar. Komitmen penulis, luar biasa tingginya. Hubungan antarpengarang dengan tim UT sangat dekat. Namun demikian, karena waktu penulisan modul sangat mendesak, proses penelaahan terhadap penulisan pun dilakukan agak terburu-buru. Bahkan beberapa modul tidak sempat ditelaah. Akibatnya, sejumlah kesalahan pun tidak dapat dihindarkan. Berbagai kesalahan itu ditemukan oleh Tim Evaluasi Modul yang dibentuk UT pada semester pertama. Pada cetakan berikutnya berbagai kesalahan itu sudah diperbaiki. Kesalahan-kesalahan mekanis-ortografis, sajian yang terlalu sulit dimengerti mahasiswa, dan kekeliruan substansi, berhasil disempurnakan. Bahan ajar untuk

satu semester dikirim dua kali. Keputusan ini diterapkan untuk memberikan kesempatan kepada penulis modul yang tidak dapat menyelesaikan modulnya tepat waktu.

Namun demikian, saat itu wujud bahan ajar lebih terfokus pada bahan tercetak yang disebut dengan modul. Kendati secara umum pengembangan bahan ajar noncetak belum menjadi fokus perhatian, pengembangan bahan ajar noncetak seperti audio dan video, telah mulai dilakukan.

2. Periode perbaikan dan pengembangan (1988-2004)

Beberapa tahun setelah UT berdiri dan terbentuk fakultas-fakultas, pengembangan bahan ajar ditangani oleh masing-masing fakultas. Pengembangan bahan ajar noncetak pun mulai digarap lebih intensif. Bukan hanya audio dan video, bahkan juga bahan ajar berbantuan komputer. Bahkan tahun 2001 telah dimulai pengembangan bahan ajar berbasis *web* atau *online*.

Mulai tahun 2002, ditetapkan ketentuan bahwa revisi secara bertahap harus dilakukan terhadap modul-modul yang telah berusia sekurang-kurangnya 6 tahun, atau kurang dari 6 tahun tetapi memiliki cukup banyak kekurangan mendasar. Sementara itu, kendati mulai tahun 2001 mulai dikembangkan secara intensif, mulai tahun 2005 seluruh bahan ajar mata kuliah harus sudah dilengkapi dengan media noncetak. Pengembangan bahan ajar pun diarahkan menjadi paket multimedia.

Untuk menjaga mutu bahan ajar, penataan dan pengembangan bahan ajar dikawal dengan seperangkat acuan yang bernaung di bawah payung Sistem Jaminan Kualitas atau Simintas. Tahun 2003 telah terbit sejumlah pedoman yang terkait dengan tata pengem-

bangun bahan ajar, baik cetak maupun noncetak. Pedoman-pedoman itulah yang menjadi rujukan seluruh elemen UT dalam mengembangkan bahan ajar, setelah sebelumnya masing-masing fakultas memberlakukan beragam variasi ketentuan penulisan bahan ajar. □

Daftar Pustaka

- Keegan, D. (ed.). 1993. *Theoretical Principles of Distance Education*. New York: Routledge.
- Lockwood, F., (ed.) 1995. *Open and Distance Learning Today*. London: Routledge. McCarthy, E.
- (ed). 1998. *The Design and Production of Self-Instructional Materials*. London: Kogan Page.
- Salas, E., dkk. 2002. 'Emerging themes in distance learning research and practice: some food for thought', *International Journal of Management Reviews*, 4, (2).
- Simonson, M. 2003. *Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Learning*. Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
- Universitas Terbuka. 2004. *Katalog UT 2004*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Universitas Terbuka. 2000. *Laporan Evaluasi Diri UT*. Jakarta: Universitas Terbuka.

PERKEMBANGAN SISTEM REGISTRASI MAHASISWA

Sulaiman

Sistem Registrasi Mahasiswa

Registrasi adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan data mahasiswa yang akan mengikuti proses belajar di UT. Kegiatan registrasi dilakukan oleh mahasiswa agar UT memiliki data pribadi mahasiswa dan data mata kuliah yang akan ditempuh oleh setiap mahasiswa pada setiap semester (masa registrasi).

Hingga saat ini terdapat dua jenis registrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Pertama, *registrasi pertama*, untuk mencatat data pribadi mahasiswa dan mata kuliah yang diambilnya pada semester pertama. Kedua, *registrasi mata kuliah*, yakni pendaftaran dan pencatatan data mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa pada semester tertentu. Sejak awal berdirinya UT, mahasiswa telah diwajibkan untuk melakukan registrasi agar yang bersangkutan dapat mengikuti proses pembelajaran dan ujian.

Sampai saat ini, sistem registrasi yang diterapkan oleh UT mengalami beberapa kali perubahan baik yang bersifat mendasar maupun yang sifatnya penyesuaian. Secara umum, perkembangan sistem registrasi dapat dibagi ke dalam lima periode berikut.

1. Mulai UT berdiri sampai Tahun 1985

Pada awal berdirinya, pendaftaran mahasiswa UT dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru), dan jalur pendaftaran langsung ke UT. Jalur pertama diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang masih memiliki kesempatan untuk mengikuti Sipenmaru, sedangkan jalur kedua diberlakukan untuk calon mahasiswa yang tidak lagi memiliki kesempatan mengikuti Sipenmaru. Pada tahun pertama (1984) UT menjadi pilihan kedua dalam Sipenmaru, sedangkan pada tahun kedua (1985) UT menjadi pilihan ketiga. Setelah melalui proses seleksi, baik melalui Sipenmaru maupun melalui UT, calon mahasiswa akan menerima panggilan untuk melakukan registrasi.

Dalam proses registrasi, yang pertama dilakukan oleh calon mahasiswa adalah membeli berkas registrasi pertama di kantor pos. Setelah formulir registrasi diisi dan dilengkapi persyaratannya, calon mahasiswa membayar SPP di kantor pos, kemudian menyerahkan formulir yang diisinya ke kantor UPBJJ untuk mendapatkan pengesahan kemahasiswaannya.

Penerimaan mahasiswa hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dibuat dengan 10 angka. Dua angka pertama menunjukkan kode UPBJJ-UT, dua angka berikutnya menunjukkan kode tahun masuk, dua angka berikutnya menunjukkan kode program studi, dan empat angka terakhir menunjukkan nomor urut mahasiswa. Pemberian NIM kepada mahasiswa dilakukan setelah mahasiswa menyerahkan formulir registrasi.

Registrasi mata kuliah dilakukan dengan sistem paket. Mahasiswa yang telah mengirim formulir registrasi, langsung dapat mengikuti ujian mata kuliah semester I dan II.

Permasalahan yang dihadapi dalam sistem registrasi pada periode ini adalah belum adanya mekanisme pendaftaran ujian ulang mata kuliah yang tidak lulus pada ujian pertama dan keluwesan sistem pemberian NIM yang digunakan. Jika ada mahasiswa yang pindah UPBJJ-UT atau pindah program studi, maka NIM yang bersangkutan tidak lagi memberikan arti seperti rancangan semula. Perpindahan mahasiswa yang juga berarti berganti NIM, sangat menyulitkan pengelolaan administrasi mahasiswa.

2. Tahun 1986

Pada tahun 1986 UT mulai menerapkan kebijakan registrasi mahasiswa yang dapat dilakukan sepanjang waktu. Mahasiswa pun bebas memilih mata kuliah yang ditawarkan oleh UT. Pada tahun itu diberlakukan tiga masa registrasi dalam satu tahun. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan pada setiap semester. Mahasiswa, menyerahkan formulir registrasi ke UT Pusat melalui Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ)-UT dan selanjutnya UT Pusat memproses registrasi dengan menggunakan mesin *scanner*. Berhubung pada saat itu SDM dan fasilitas komputer belum sepenuhnya mendukung, maka cukup banyak kesalahan registrasi mahasiswa. Sistem pemberian NIM diubah menjadi sembilan angka dengan memasukkan formula *check digit* untuk menghindari adanya pemalsuan atau kesalahan-kesalahan dalam memasukkan data.

3. Tahun 1987 sampai dengan 1992

Setelah dievaluasi secara menyeluruh, ternyata UT tidak mungkin dapat melaksanakan tiga masa registrasi dalam satu tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 1987 UT kembali membuka dua masa registrasi dalam satu tahun. Jenis registrasi mahasiswa dibedakan menjadi tiga, yaitu Registrasi Pertama, Registrasi Ujian Ulang, dan Pendaftaran Ujian Komprehensif Tertulis (UKT). Formulir pendaftaran ujian ulang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengikuti ujian mata kuliah yang tidak lulus pada ujian semester sebelumnya.

Mulai tahun 1987 mahasiswa melakukan registrasi di UPBJJ-UT. UPBJJ-UT memeriksa formulir registrasi dan mengirimkannya ke UT Pusat. Selanjutnya UT Pusat memproses formulir registrasi dengan menggunakan mesin *scanner*. Seiring dengan dibukanya kerja sama Program Penyetaraan D-II PGSD tahun 1990 dan Program Penyetaraan D-III PGSM tahun 1992, diberlakukanlah registrasi per paket mata kuliah. Mahasiswa kedua program tersebut harus mengambil sejumlah mata kuliah yang telah ditetapkan UT menurut paket semester. Penerimaan mahasiswa untuk kedua program studi ini hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun. Dengan demikian mulai tahun 1990 terdapat dua sistem registrasi, yaitu sistem reguler dan sistem non-reguler yang di dalamnya mencakup Program PGSD, Program PGSM, dan beberapa program kerja sama lainnya.

4. Tahun 1993 sampai dengan 1997

UT mulai menerapkan sistem desentralisasi registrasi yang memberikan tanggung jawab lebih kepada UPBJJ-UT dalam pengolahan data registrasi. Mulai tahun 1993 formulir registrasi program reguler tidak lagi diproses di UT Pusat melainkan didata di UPBJJ-UT. Dengan demikian, tugas UT Pusat lebih pada kompilasi

dan validasi data dari UPBJJ-UT, termasuk formulir yang gagal diproses di UPBJJ-UT.

5. Tahun 1998 sampai dengan 2004

Mulai tahun 1998 UT menghilangkan istilah ujian ulang. Mahasiswa yang gagal atau tidak lulus dalam menempuh ujian semester harus melakukan registrasi mata kuliah yang tidak lulus dengan membayar SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, jenis registrasi dibedakan menjadi tiga, yaitu Registrasi Pertama, Registrasi Mata Kuliah, dan Pendaftaran UKT.

Sehubungan dengan bergulirnya otonomi daerah yang mulai diterapkan pada tahun 2002, maka kewenangan UPBJJ-UT lebih ditingkatkan, khususnya dalam hal perekrutan mahasiswa kerja sama. Atas nama Rektor, Kepala UPBJJ-UT diharapkan dapat melakukan kontrak kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Program PGSD maupun Program Reguler.

6. Sistem Registrasi Mendatang

Pada prinsipnya registrasi mahasiswa UT dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Namun, sehubungan dengan keterbatasan sistem teknologi informasi yang digunakan selama ini, maka UT pun masih menerapkan batasan-batasan baik dari aspek waktu pelaksanaan maupun tempat untuk melakukan registrasi.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan prima bagi mahasiswa, calon mahasiswa, dan kepada masyarakat luas sebagaimana tercantum dalam tiga fokus program pengembangan Universitas Terbuka. Maka di masa mendatang perlu dikembangkan suatu sistem registrasi yang dapat memacu dan memudahkan mahasiswa yang

akan melakukan registrasi mata kuliah. Sistem registrasi tersebut adalah registrasi online yang dapat diakses oleh mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Sistem registrasi *online* ini dimaksudkan agar mahasiswa UT dapat melakukan registrasi mata kuliah secara cepat dan mudah dan dapat diakses melalui UPBJJ-UT, dari tempat tinggal mahasiswa maupun di tempat-tempat lain yang ditentukan oleh UT.

Faktor-faktor yang mendukung terwujudnya registrasi *online* di antaranya sebagai berikut.

- Tersedianya sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai.
- Tersedianya lembaga keuangan (perbankan) yang membantu menanganai setoran SPP secara *online* dengan daya jangkauan yang cukup luas di seluruh tanah air.
- Kemauan dan kemampuan mahasiswa untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui internet.

Perkembangan Jumlah Mahasiswa

Selama 20 tahun jumlah mahasiswa UT mengalami perkembangan yang luar biasa. Hingga tahun 2003 telah terdaftar 1.095.440 orang sebagai mahasiswa UT. Pada awal berdirinya, UT telah memiliki mahasiswa sebesar 54.000 orang. Jumlah itu bertambah menjadi 65.000 mahasiswa pada tahun kedua. Tahun ketiga (1986) dengan pertimbangan untuk memudahkan keleluasaan mahasiswa dalam registrasi, UT memberlakukan sistem registrasi yang waktu itu dikenal dengan "sistem registrasi baru".

Sistem ini sebenarnya dianggap sebagai sistem registrasi yang paling sesuai dengan sistem pendidikan jarak jauh. Namun, karena pengisian formulir registrasinya lebih rumit dan belum familiar bagi mahasiswa, banyak mahasiswa yang melakukan kesalahan dalam

melakukan registrasi. Masalah itu diperumit lagi dengan pemahaman sebagian staf UT terhadap sistem yang baru diberlakukan itu. Akibat pemberlakuan sistem registrasi ini, mahasiswa UT mengalami penurunan yang drastis sehingga jumlahnya menjadi hanya sekitar 16.000 mahasiswa. Pada tahun berikutnya UT menyempurnakan kembali "sistem registrasi baru"nya sehingga namanya menjadi "sistem registrasi baru yang disempurnakan". Jumlah mahasiswa UT pun berangsur-angsur naik kembali.

Tahun 1990-an, dengan adanya program penyetaraan D-II guru sekolah dasar (D-II PGSD) jumlah mahasiswa UT mengalami peningkatan yang sangat pesat. Tahun 1991 (masa registrasi 1991.2) jumlah mahasiswa baru UT mencapai 62.500 orang sehingga jumlah total mahasiswa pada masa registrasi tersebut 125.601 orang. Tahun berikutnya, mahasiswa baru yang mendaftar menjadi mahasiswa UT jumlahnya mencapai 76.262 orang, dan tahun 1993 jumlah mahasiswa baru yang melakukan registrasi mencapai 115.161 orang, sehingga total mahasiswa aktif yang melakukan registrasi pada masa registrasi 1993.2 mencapai 309.465 orang. Dari tahun ke tahun selama kurun waktu 1990-an mahasiswa UT terus mengalami peningkatan. Jumlah mahasiswa UT mencapai puncaknya pada tahun 1997. Pada tahun itu jumlah mahasiswa UT mencapai lebih dari 400.000 orang. Lonjakan mahasiswa itu selain disebabkan oleh adanya program penyetaraan D-II PGSD, juga karena aktifnya UT menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga.

Saat ini jumlah mahasiswa aktif (masa registrasi 2003.2) mencapai 208.675 orang. Sebagian besar adalah mahasiswa yang direkrut melalui kerja sama dengan berbagai lembaga. Dalam usia 20 tahun ini jumlah mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan studinya di UT mencapai 582.222 orang. Jumlah itulah yang saat ini tercatat sebagai alumni UT. □

PERKEMBANGAN DISTRIBUSI BAHAN AJAR

A. Agung M. Sastrawan Putra

Sistem Distribusi Bahan Ajar

Dalam sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) seperti yang diterapkan oleh Universitas Terbuka (UT), bahan ajar (tercetak dan terekam) merupakan salah satu komponen utama dalam proses belajar mengajar di samping komponen utama lainnya seperti registrasi, tutorial/praktek/ praktikum dan ujian. Keterbatasan waktu pertemuan dengan dosen (tutor) menuntut mahasiswa UT agar belajar lebih mandiri dengan bertumpu pada bahan ajar yang telah tersedia. Namun demikian, bahan ajar tersebut tidak akan bermakna jika tidak dapat diterima oleh mahasiswa sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu penerimaan bahan ajar akan sangat menentukan keberhasilan belajar mahasiswa UT. Semakin cepat mahasiswa menerima bahan ajar semakin banyak waktu yang tersedia untuk mempelajari bahan ajar tersebut sehingga hasil belajar mahasiswa akan lebih baik.

Namun demikian, domisili mahasiswa UT yang menyebar di seluruh pelosok tanah air, kondisi geografis yang berbentuk kepulauan, serta sarana transportasi dan komunikasi yang belum berkembang secara merata di seluruh tanah air, merupakan kendala utama dalam pendistribusian bahan ajar. Belum lagi banyaknya jumlah bahan ajar dan perangkatnya yang harus dikelola (diterima dan dikirimkan). Dengan memperhatikan pelbagai hambatan dan tantangan tersebut, UT berupaya untuk terus mencari dan memperbaiki sistem pendistribusian bahan ajar yang ideal agar mahasiswa dapat memperoleh bahan ajar tersebut tepat waktu sesuai dengan mata kuliah yang ditempuhnya.

Sejak berdirinya UT pada September 1984, sistem pendistribusian bahan ajar mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan perubahan sistem operasional UT.

1. Periode 1984 – 1989

Periode tahun 1984-1989 merupakan periode yang sangat dinamis dan kritis dalam sistem pendistribusian bahan ajar UT. Masa ini merupakan masa pencarian bentuk sistem operasional yang ideal bagi UT. Pada periode ini terjadi dua kali perubahan sistem registrasi mahasiswa yang berkaitan langsung dengan pendistribusian bahan ajar. Bahkan dapat dikatakan bahwa pertimbangan utama yang mendasari perubahan sistem registrasi mahasiswa adalah sistem pendistribusian bahan ajar.

Pada tahun pertama beroperasinya UT, 1984/1985, tidak banyak hambatan yang dijumpai dalam pendistribusian bahan ajar kepada mahasiswa. Registrasi mahasiswa dilakukan satu tahun sekali. Jumlah mahasiswa yang diterima pada tahun pertama mencapai 54.000 orang dari sekitar 260.000 peminat. Penawaran mata kuliah bersifat paket semester (semester genap dan ganjil) dengan empat

program studi yang ditawarkan, yaitu Program Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan, Administrasi Negara, Administrasi Niaga, dan Statistika Terapan. Setiap program studi pada setiap semester menawarkan lima mata kuliah yang dibagi menjadi dua paket. Paket pertama berisi tiga mata kuliah umum (diambil oleh seluruh program studi) dan paket kedua terdiri dari dua mata kuliah bidang studi. Dengan demikian pada tahun pertama, UT hanya menyediakan lima paket bahan ajar setiap semester yang terdiri dari satu paket umum dan empat paket bidang studi dan seluruh mata kuliah yang ditawarkan berjumlah lima belas. Pengiriman paket bahan ajar kepada mahasiswa dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada awal semester untuk paket pertama dan pada pertengahan semester untuk paket kedua.

Dalam pendistribusian bahan ajar kepada mahasiswa, UT bekerja sama dengan Perum Pos dan Giro (sekarang PT Pos Indonesia). Bahan ajar dikemas di UT Pusat dan disebar ke kantor-kantor pos yang telah ditetapkan, sesuai dengan jumlah mahasiswa yang diterima di setiap wilayah. Pada tahun pertama, UT mengadakan seleksi penerimaan mahasiswa baru sehingga jumlah mahasiswa yang harus disediakan bahan ajarnya untuk setiap wilayah, dapat diketahui dengan pasti. Mahasiswa memperoleh bahan ajar melalui kantor pos yang ditunjuk setelah membayar SPP dan biaya bahan ajar. Selanjutnya mereka melakukan registrasi di UPBJJ-UT setempat. Setelah melakukan registrasi, mahasiswa dapat membentuk kelompok belajar dan belajar bersama. Pembentukan kelompok belajar mudah dilakukan oleh mahasiswa karena adanya kesamaan mata kuliah yang diambil untuk setiap program studi.

Pada tahun kedua, 1985/1986, jumlah paket mata kuliah yang ditawarkan bertambah sejalan dengan penambahan program studi baru, dari empat program studi menjadi 26 program studi (14 buah program reguler dan 12 program Akta V). Dengan semakin

bertambahnya program studi yang ditawarkan, kesulitan dalam pendistribusian bahan ajar mulai terasa karena jumlah paket bahan ajar yang harus disediakan semakin banyak, yang menuntut penyediaan tempat penampungan bahan ajar yang lebih besar di setiap kantor pos yang ditunjuk. Pihak Kantor Pos mulai mengalami kesulitan menyediakan tempat untuk menampung bahan ajar UT. Akhirnya pada tahun ketiga, 1986/1987, UT memutuskan untuk mengubah pola pendistribusian bahan ajarnya melalui perubahan sistem registrasi yang dikenal dengan "sistem registrasi baru". Penawaran mata kuliah tidak lagi dalam bentuk paket semester tetapi seluruh mata kuliah yang bahan ajarnya sudah siap dapat diregistrasikan oleh mahasiswa. Penerimaan mahasiswa baru tidak dilakukan setiap tahun tetapi pada setiap masa registrasi. Dalam satu tahun tidak lagi terdiri dari dua semester tetapi dibagi menjadi tiga masa registrasi. Sehingga dalam satu tahun direncanakan menerima tiga kali mahasiswa baru dan ada tiga kali masa ujian.

Sesuai dengan sifat keterbukaan UT, mahasiswa bebas menentukan dan memilih mata kuliah yang akan diikuti setiap semester maksimal sepuluh mata kuliah sesuai dengan jumlah jam ujian yang tersedia setiap masa ujian. Perubahan mendasar yang berkaitan dengan bahan ajar adalah mahasiswa tidak diwajibkan membeli bahan ajar. Mahasiswa dapat membeli bahan ajar secara berkelompok. Dengan demikian, biaya kuliah di UT menjadi lebih ringan.

Dengan perubahan sistem penawaran mata kuliah, sistem pendistribusian bahan ajar kepada mahasiswa juga mengalami perubahan yang mendasar. Mahasiswa tidak lagi mengambil bahan ajar di kantor pos seperti sebelumnya, melainkan dikirim langsung dari UT Pusat ke alamat mahasiswa sesuai dengan bahan ajar yang dipesan. Dalam pengiriman bahan ajar, UT tetap melakukan kerja sama dengan kantor pos.

Mahasiswa yang ingin membeli bahan ajar, memesan dengan cara mengisi kolom pemesanan bahan ajar pada formulir registrasi. Pembayaran biaya bahan ajar dilakukan melalui kantor pos dengan menggunakan giro khusus bahan ajar yang terpisah dari giro pembayaran SPP. Bukti pembayaran biaya bahan ajar (giro bahan ajar) dikirim bersama-sama dengan formulir registrasi ke UT Pusat. Setelah formulir diterima dan diproses di UT Pusat, mahasiswa dikirim bahan ajar ke alamat masing-masing sesuai dengan pesanan. Dengan sistem pendistribusian bahan ajar seperti ini maka tidak terjadi lagi penumpukan bahan ajar UT di kantor pos seperti tahun sebelumnya. Namun demikian bukan berarti permasalahan selesai. Banyak permasalahan yang muncul justru di luar perkiraan semula.

Perubahan sistem operasi yang sangat mendasar yang dilakukan UT menuntut kesiapan perangkat komputer beserta sumber daya manusianya, termasuk juga kesiapan mahasiswa dalam mengadopsi sistem baru ini. Pada sistem operasi ini, semua formulir registrasi dan Nomor Induk Mahasiswa diganti sesuai dengan kebutuhan komputerisasi data mahasiswa. Formulir registrasi yang telah diisi oleh mahasiswa diolah melalui mesin *scanner* dan diproses melalui komputer oleh Bagian Registrasi secara terpusat. Bagi mahasiswa yang memesan bahan ajar, dari hasil pemrosesan formulir registrasi diterbitkan label paket bahan ajar yang berisi identitas dan alamat mahasiswa serta bahan ajar yang dipesan. Berdasarkan label paket bahan ajar tersebut, Pusat Distribusi menyiapkan dan mengemas bahan ajar dan mengirimkannya ke alamat mahasiswa yang tersebar di seluruh pelosok tanah air melalui kantor pos.

Dengan dukungan pihak kantor pos yang memiliki kantor cabang hampir di seluruh kecamatan di Indonesia, pada awalnya UT optimis sistem pendistribusian bahan ajar dapat berjalan dengan baik. Kenyataannya, pendistribusian bahan ajar tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Kompleksnya sistem operasi baru dengan

waktu persiapan yang sangat pendek serta keterbatasan sarana dan prasarana komputer dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki UT saat itu mengakibatkan sistem baru ini tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan semula. Pendeknya waktu persiapan juga berdampak pada kurang tersosialisasikannya sistem baru dengan baik kepada UPBJJ-UT yang ada di daerah, khususnya kepada mahasiswa. Banyak mahasiswa belum siap mengadopsi sistem operasi baru yang berbasis komputer. Hal ini terlihat dari banyaknya kesalahan yang dilakukan mahasiswa dalam mengisi dan menghitamkan formulir registrasi. Pengisian formulir registrasi (*scanable form*) dengan menggunakan pensil 2B merupakan hal yang baru dan belum biasa bagi sebagian besar mahasiswa UT. Kesalahan banyak dilakukan oleh mahasiswa dalam mengisi formulir tersebut. Akibatnya, data registrasi tidak dapat diproses dengan cepat. Kekurangsiapan UT dalam mengantisipasi kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa, yang jumlahnya di luar perkiraan, mengakibatkan pesanan bahan ajar mahasiswa tidak dapat dikirimkan tepat pada waktunya sampai menjelang masa ujian tiba.

Hambatan dalam penyampaian bahan ajar juga terjadi karena ketidakjelasan alamat mahasiswa di satu sisi dan keterbatasan pihak kantor pos dalam menyampaikan kiriman bahan ajar tersebut di sisi lain. Banyak bahan ajar yang dikirimkan kepada mahasiswa dikembalikan ke UT Pusat oleh pihak kantor pos karena alamat yang tidak jelas atau tidak dikenal, baik yang diakibatkan oleh kesalahan dalam penulisan alamat atau karena alamat mahasiswa di luar jangkauan pos. Khusus untuk daerah kecamatan dan pedesaan serta daerah terpencil lainnya, penyampaian bahan ajar tidak dapat dilakukan secara langsung ke alamat mahasiswa. Petugas pos tidak sanggup menyampaikan bahan ajar mahasiswa yang berupa paket besar dengan berat lebih dari 10 kg karena alat transportasi menggunakan sepeda. Mahasiswa harus mengambil sendiri paket

bahan ajar tersebut ke kantor pos terdekat setelah menerima surat pemberitahuan dari kantor pos. Datang ke kantor pos terdekat untuk beberapa wilayah di republik ini bukanlah hal yang mudah dan murah, sehingga mahasiswa membutuhkan waktu dan biaya tambahan untuk mendapatkan pesanan bahan ajarnya.

Kegagalan UT dalam menerapkan sistem operasi baru ini mengakibatkan banyak mahasiswa terlambat menerima bahan ajar dan bahkan tidak sedikit jumlah mahasiswa yang sama sekali tidak menerima bahan ajar sampai ujian akhir berlangsung. Akibatnya, UT menerima lebih dari 18.000 surat pengaduan belum menerima bahan ajar, di samping ratusan mahasiswa yang datang langsung ke UT Pusat setiap hari. Surat terbuka melalui media massa juga banyak dilayangkan oleh mahasiswa. Kondisi seperti ini mengundang perhatian anggota DPR RI saat itu, sehingga Pimpinan UT dipanggil untuk memberikan penjelasan.

Tidak tertanganinya pengaduan mahasiswa secara cepat dan tuntas, berdampak pada jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi pada semester berikutnya. Jumlah mahasiswa yang meregistrasi pada tahun 1987 (masa registrasi 87.1) menurun secara drastis dari sekitar 54.000 pada tahun 1985 menjadi 17.000 orang. Jumlah ini merupakan jumlah mahasiswa teregistrasi terendah sejak UT berdiri. Jika kondisi seperti ini terus berlangsung maka akan berdampak serius terhadap kelangsungan hidup UT.

Pada masa registrasi 87.2 (tahun kuliah 1987/1988), Pimpinan UT memutuskan untuk mengubah kembali sistem operasi UT, termasuk pola pendistribusian bahan ajar melalui perubahan sistem registrasi mahasiswa yang dikenal dengan "*sistem registrasi baru yang disempurnakan*". Perubahan pola distribusi yang terjadi pada sistem baru yang disempurnakan ini adalah bahan ajar tidak lagi dikirim langsung ke alamat mahasiswa. UT Pusat memberdayakan UPBJJ

untuk berperan dalam pendistribusian bahan ajar. Bahan ajar dari UT Pusat dikirim ke UPBJJ-UT. Mahasiswa tetap tidak diwajibkan membeli bahan ajar. Mahasiswa yang ingin mendapatkan bahan ajar dapat menempuh dua cara. Pembelian secara langsung bagi mahasiswa yang bisa datang ke UPBJJ atau memesan melalui kantor pos bagi mahasiswa yang tempat tinggalnya jauh dan tidak dapat datang langsung ke UPBJJ. Pemesanan bahan ajar melalui kantor pos dilakukan dengan mengisi formulir pemesanan bahan ajar dan membayar biaya bahan ajar di kantor pos dengan menggunakan giro khusus setoran bahan ajar. Formulir pemesanan beserta bukti pembayaran dikirim ke UPBJJ dan pihak UPBJJ selanjutnya akan mengirimkan bahan ajar tersebut ke alamat mahasiswa. Namun demikian, pola pemesanan bahan ajar melalui pos ini menjadi kendala tersendiri bagi UPBJJ karena diperlukan adanya tambahan biaya untuk ongkos pengiriman. Mahasiswa yang tempat tinggalnya jauh dari UPBJJ banyak yang memilih untuk membeli bahan ajar secara berkelompok dan mengutus satu orang perwakilan untuk datang ke UPBJJ atau ke UT Pusat untuk membeli bahan ajar.

Konsekuensi dari perubahan sistem pendistribusian bahan ajar ini adalah UT Pusat harus menyediakan seluruh bahan ajar di setiap UPBJJ dengan jumlah yang memadai, sesuai dengan jumlah mahasiswanya. UPBJJ harus menyiapkan gudang penyimpanan bahan ajar dan menerapkan sistem pergudangan dan administrasi bahan ajar agar bisa melayani permintaan bahan ajar dengan baik. Dengan sistem ini, pelayanan pendistribusian bahan ajar menjadi lebih baik. Hal itu tercermin dari peningkatan secara bertahap jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi.

Namun demikian, kendala lain muncul terutama dalam kecukupan penyediaan jumlah bahan ajar di setiap UPBJJ. UT kesulitan memprediksi kebutuhan bahan ajar untuk mahasiswa di setiap UPBJJ karena mahasiswa tidak diwajibkan membeli bahan ajar. UT harus

menyediakan seluruh bahan ajar di setiap UPBJJ sesuai dengan jumlah mahasiswa setiap program studi. Akibatnya, sering terjadi penumpukan jenis bahan ajar mata kuliah tertentu, sementara banyak mata kuliah lain kehabisan bahan ajar. Bahan ajar UT tidak hanya dipakai oleh mahasiswa UT tetapi juga banyak dipergunakan oleh mahasiswa perguruan tinggi lain. Di samping itu, ada kecenderungan sebagian besar mahasiswa UT yang melakukan registrasi dan membeli bahan ajar menjelang penutupan masa registrasi, sehingga UPBJJ sering kehabisan bahan ajar. Untuk permintaan ke UT Pusat dan pengiriman bahan ajar ke UPBJJ memerlukan waktu antara dua sampai tiga minggu dengan catatan semua bahan ajar yang dipesan tersedia di Pusat Distribusi. Kendala waktu seperti ini semakin memperpendek waktu belajar mahasiswa.

2. Periode 1990 – 1999

Pada periode 1990-1999 tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem pendistribusian bahan ajar UT. Periode ini ditandai dengan peningkatan jumlah mahasiswa yang sangat drastis (mendekati 400.000 orang pada tahun 1996/1997), yang disebabkan oleh adanya pembukaan Program Penyetaraan D-II Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada tahun ajaran 1990/1991 di samping adanya pembukaan program studi baru lainnya.

Belajar dari pengalaman sebelumnya, terutama dalam penanganan registrasi dan pendistribusian bahan ajar, program D-II PGSD dirancang berbeda dengan program lainnya (program reguler). Mata kuliah ditawarkan dalam bentuk paket semester yang pada tahap awal terdiri dari enam semester dan akhirnya dipadatkan menjadi lima semester. Setiap mahasiswa memperoleh bahan ajar. Ini terjadi karena biaya bahan ajar sudah tercakup dalam biaya kuliah setiap semester.

Namun demikian, terjadi perubahan pemilikan bahan ajar mahasiswa Program D-II PGSD Proyek yang dibiaya Ditjen Dikdasmen. Untuk angkatan pertama satu paket bahan ajar diperuntukkan bagi satu orang mahasiswa. Akan tetapi untuk angkatan berikutnya satu paket bahan ajar diperuntukkan bagi dua sampai tiga orang mahasiswa, sehingga tidak setiap mahasiswa memperoleh satu paket bahan ajar secara utuh. Kekurangannya diambil dari paket bahan ajar mahasiswa angkatan sebelumnya yang sudah tidak dipergunakannya lagi. Namun, hal itu sulit dilaksanakan di lapangan. Keadaan ini bertambah parah ketika pencetakan dan pengiriman bahan ajar sepenuhnya dilakukan oleh Bagian Proyek Penyetaraan D-II PGSD Ditjen Dikdasmen. Banyak dijumpai mahasiswa D-II PGSD Proyek yang tidak memperoleh bahan ajar. UT pun sulit mengontrol pengiriman bahan ajar tersebut. Dengan diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah dan pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah pada tahun 1999, pembiayaan mahasiswa Proyek Program D-II PGSD tidak lagi dilakukan melalui Proyek Penyetaraan di Ditjen Dikdasmen melainkan melalui Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi. Sejak itu pengiriman bahan ajar program D-II Proyek dilakukan sepenuhnya oleh UT Pusat seperti halnya pengiriman bahan ajar untuk mahasiswa swadana. Setiap mahasiswa memperoleh bahan ajar yang dikirim setiap awal semester.

Pembenahan pendistribusian bahan ajar pun terus dilakukan dan salah satu upaya tersebut adalah pengembangan aplikasi komputer yang dimulai pada tahun 1998 untuk program regular dan tahun 2000 untuk program D-II PGSD.

3. Periode 2000 - 2004

Periode 2000–2004 ditandai dengan penggunaan aplikasi komputer untuk pengelolaan distribusi bahan ajar baik di UT Pusat maupun di UPBJJ. Penggunaan aplikasi komputer sudah menjadi kebutuhan wajib mengingat semakin banyaknya jumlah bahan ajar yang harus didistribusikan. Lebih dari 1000 jenis bahan ajar dan bahan kelengkapan akademik yang harus didistribusikan kepada mahasiswa dengan total keseluruhan mencapai lebih dari satu juta set setiap tahunnya. Tanpa data yang akurat akan banyak kendala yang dihadapi dalam pengadaan dan pendistribusian bahan ajar tersebut. Penyediaan bahan ajar dalam jumlah besar di UT Pusat dan di UPBJJ sulit dilakukan mengingat keterbatasan dana pengadaan dan keterbatasan daya tampung gudang bahan ajar di UPBJJ. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi bahan ajar di UT Pusat maupun di UPBJJ menjadi sangat penting sehingga prediksi kebutuhan bahan ajar untuk setiap mata kuliah harus dapat dilakukan secara lebih akurat.

Pengadministrasian yang baik juga menyangkut penghitungan dan pelaporan stok bahan ajar secara teratur serta kelancaran penyetoran dana hasil penjualan bahan belajar dari UPBJJ ke UT Pusat. Pelaporan stok bahan ajar dan penyetoran uang penjualan yang tidak teratur berdampak terhadap kelancaran pengiriman bahan ajar ke UPBJJ. UT Pusat dalam hal ini Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) yang memegang otoritas pengendalian stok bahan ajar di UPBJJ serta pengendalian keuangan hasil penjualannya tidak akan memenuhi permintaan bahan ajar oleh UPBJJ apabila persediaan bahan ajar di UPBJJ dianggap masih mencukupi. Keputusan ini diambil berdasarkan laporan stok dan penyetoran dana hasil penjualan. Sering dijumpai beberapa UPBJJ terlambat memberikan laporan dan menyetorkan dana hasil penjualan bahan ajar karena berbagai pertimbangan, misalnya dana hasil penjualan bahan ajar dipergunakan terlebih dahulu untuk membiayai kegiatan operasional

UPBJJ. Kondisi seperti ini akan mengorbankan pelayanan bahan ajar untuk mahasiswa karena permintaan bahan ajar yang telah habis persediaannya tidak dapat dilakukan dengan segera. Oleh karena itu, perlu dicari pemecahan melalui pembenahan pengelolaan administrasi bahan ajar. Komputerisasi stok dan pelaporan bahan ajar merupakan salah satu solusi yang ditempuh. Untuk mendukung kelancaran administrasi bahan ajar baik di UT Pusat maupun di UPBJJ, penerapan komputerisasi bahan ajar merupakan kebutuhan yang mendesak.

Mulai tahun 1998 dilakukan persiapan komputerisasi bahan ajar di UT Pusat dengan menggunakan komputer jaringan lokal (*Local Area Network* atau LAN). Pada tahun 2000 komputerisasi bahan ajar di UT Pusat sudah berjalan secara memadai dan dilanjutkan dengan persiapan komputerisasi pengelolaan bahan di UPBJJ. Tahun 2001, komputerisasi bahan ajar reguler di UPBJJ sudah berjalan dan dilanjutkan dengan komputerisasi bahan ajar PGSD pada tahun 2002. Dengan dimanfaatkannya LAN, sistem pendistribusian bahan ajar mengalami perubahan secara mendasar.

Proses pendistribusian bahan ajar diawali dengan penetapan tiras cetak bahan ajar. Rapat penetapan tiras cetak bahan ajar dipimpin oleh Pembantu Rektor Bidang Operasional dengan melibatkan Fakultas, BAAKRENSI, BAUK, Pusat Penerbitan, Pusat Produksi Multi Media, Pusat Komputer dan Pusat Distribusi. Penetapan jumlah cetak bahan ajar untuk setiap mata kuliah dilakukan dengan cara memprediksi kebutuhan bahan ajar tersebut untuk satu semester ke depan. Prediksi didasarkan atas data registrasi mahasiswa semester sebelumnya, dan data penjualan di UPBJJ, serta jumlah bahan ajar yang masih tersedia di Pusat Distribusi dan sisa stok di UPBJJ. Rapat tiras dilakukan dua kali setahun, satu bulan sebelum masa registrasi yang akan datang dimulai. Fakultas, di bawah koordinasi Pembantu Rektor bidang Akademik, sebagai

penanggung jawab pengembangan bahan ajar harus memastikan bahwa bahan ajar yang akan ditawarkan pada masa registrasi berikutnya sudah siap digandakan.

Master bahan ajar cetak disediakan oleh Pusat Penerbitan (Pusbit) dan master bahan ajar noncetak disiapkan oleh Pusat Produksi Multi Media (P2M2). Pencetakan bahan ajar menjadi tanggung jawab BAUK dengan menggunakan percetakan luar. Pencetakan bahan ajar memakan waktu antara dua sampai tiga minggu sejak Surat Perintah Cetak (SPC) dikeluarkan. Hasil pencetakan selanjutnya diserahkan ke Pusat Distribusi untuk disimpan dan disiapkan pengirimannya ke UPBJJ. Dengan dilakukannya rapat penentuan tiras cetak secara teratur dengan melibatkan semua unit terkait, jumlah pencetakan bahan ajar dapat terkontrol dengan lebih baik, sehingga tidak terjadi pencetakan bahan ajar yang melampaui kebutuhan. Hal ini dapat menghindari adanya penumpukan bahan ajar di gudang distribusi serta mencegah pengeluaran biaya cetak yang berlebihan pada suatu periode tertentu.

Penerimaan bahan ajar dilakukan oleh Pusat Distribusi setelah bahan ajar tersebut lolos hasil pemeriksaan Pusbit (untuk bahan ajar cetak) dan P2M2 (untuk bahan ajar noncetak). Selanjutnya bahan ajar tersebut ditata di gudang distribusi dan data penerimaan dan penataan dimasukkan ke dalam komputer. Pemasukan data penerimaan bahan ajar harus segera dilakukan untuk memastikan bahwa bahan ajar tersebut telah bisa dipesan. Pengiriman bahan ajar dilakukan atas perintah pengiriman (*Delivery Order* atau DO) yang disiapkan oleh BAUK atas disposisi Pembantu Rektor Bidang Operasional. Berdasarkan DO yang diterima, Pusat Distribusi merakit dan menyiapkan pengiriman bahan ajar tersebut.

Pengiriman bahan ajar dari UT Pusat ke UPBJJ menggunakan kendaraan UT khususnya untuk wilayah Jawa, Bali, Lombok dan

Sumatera Bagian Selatan. Sedangkan untuk daerah lainnya pengiriman bahan ajar dilakukan dengan menggunakan jasa pos. Dengan pertimbangan biaya kirim dan kecepatan pengiriman, secara bertahap sebagian dari pengiriman bahan ajar dipercayakan kepada perusahaan jasa pengiriman swasta.

Semua tahapan pengiriman mulai dari pembuatan DO sampai dengan pengiriman bahan ajar dicatat melalui komputer sehingga persediaan bahan ajar di UT Pusat dapat diketahui setiap saat. Sedangkan persediaan bahan ajar di UPBJJ dapat diketahui dari laporan bulanan yang dikirimkan oleh UPBJJ ke UT Pusat. Dengan beroperasinya sistem komputerisasi bahan ajar di UPBJJ, pemesanan bahan ajar dan pembuatan laporan stok bahan ajar dapat dilakukan secara otomatis.

Komputerisasi bahan ajar menuntut pemutakhiran data secara teratur yang harus dilakukan segera setelah setiap langkah kegiatan dilakukan. Keterlambatan dalam pemutakhiran data bahan ajar akan mengakibatkan ketidaksesuaian antara data bahan ajar di komputer dengan kenyataan stok bahan ajar yang ada di gudang. Pemutakhiran program-program komputer serta peningkatan kemampuan sumber daya manusianya perlu dilakukan secara berkesinambungan.

Tantangan ke Depan (2005-2010)

Untuk mencapai visi dan misi UT yang telah ditetapkan, segala upaya harus dikonsentrasikan untuk pencapaian visi dan misi tersebut. Rektor UT menekankan bahwa sistem distribusi bahan ajar menempati posisi teramat penting dalam manajemen UT di masa mendatang. Bahan ajar yang telah didesain secara khusus harus sampai ke tangan mahasiswa tepat pada waktunya. Penyampaian bahan ajar tersebut harus didukung oleh sistem distribusi yang

handal. Bahan ajar harus terdistribusi dengan cepat dan mudah diperoleh oleh mahasiswa. Untuk itu, bahan ajar harus tersedia dalam jumlah yang memadai dan didukung oleh kontrol inventaris yang berfungsi secara otomatis.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, pembenahan sistem distribusi bahan ajar harus secara terus menerus dilakukan, baik di bidang sumber daya manusia, sarana dan prasarana, manajemen, maupun aplikasi komputer. Pembinaan dan pelatihan pegawai harus dilakukan secara berkesinambungan. Pemahaman dan penguasaan terhadap sistem dan prosedur kerja terus ditingkatkan sehingga setiap pegawai menguasai tugas dan mengerti tanggung jawabnya. Sistem dan prosedur kerja yang sudah tersedia harus terus diimplementasikan dan dievaluasi setiap saat sehingga dapat menjadi pedoman kerja yang berkembang sesuai kebutuhan. Perbaikan secara berkesinambungan baik secara interen maupun dengan melibatkan pihak-pihak lain harus dilakukan. Kesadaran untuk membangun sistem manajemen mutu harus menjadi komitmen semua pihak mulai dari pimpinan teratas sampai pegawai pada tingkat terendah. Dengan demikian, harapan untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 dapat tercapai.

Peningkatan sarana dan prasarana, terutama sarana penyimpanan bahan ajar dan sistem inventaris di UPBJJ perlu mendapat prioritas untuk ditingkatkan. Pemutakhiran komputerisasi distribusi bahan ajar di UT pusat dan di UPBJJ harus terus dilakukan. Penyempurnaan aplikasi distribusi bahan ajar yang telah dirintis sejak tahun 2003 melalui tim teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dan akan diimplementasikan pada tahun 2004 akan menjadi titik tolak otomatisasi sistem distribusi bahan ajar UT. Dengan terus dilakukannya pembenahan sistem aplikasi komputer di UT Pusat dan di UPBJJ, ke depan diharapkan jaringan komputer UT Pusat –

UPBJJ berfungsi secara *on-line* sehingga pendistribusian bahan ajar kepada mahasiswa dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat dan efisien. □

Daftar Pustaka

- Soelaiman, N. dan Listyarini, S. 2004. 'Pengelolaan bahan ajar di Universitas Terbuka'. Dalam Asandhimitra dkk. Ed., *Pendidikan tinggi jarak jauh*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Suparman, M.A. 2004. *Universitas Terbuka Memasuki Era Gelora Simintas Tahun 2004*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Sutjiatmo, B. 2003. 'Sistem manajemen kualitas untuk perguruan tinggi: penerapan ISO Seri 9000 (2000)'. Dalam Durri Andriani dkk., Ed., *E-Learning dalam Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka. 1984. *Panduan Studi Mahasiswa Universitas Terbuka*. Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka. 1985. *Mengenal Universitas Terbuka : Program Diploma, S-1 dan Akta V*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka. 2000. *Katalog Universitas Terbuka 2000*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Universitas Terbuka. 2002. *Laporan Tahunan Rektor tahun 2002*. Departemen Pendidikan Nasional, Universitas Terbuka
- Universitas Terbuka. 2004. *Katalog Universitas Terbuka 2004*. Jakarta: Universitas Terbuka.

PERKEMBANGAN SISTEM LAYANAN BANTUAN BELAJAR

Mohamad Yunus

Sistem Layanan Bantuan Belajar

Sebagai suatu institusi PTJJ di Indonesia, sejak awal UT telah berupaya untuk mengembangkan sistem layanan yang dapat membantu mahasiswa dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan studinya. Disadari betul bahwa sistem belajar jarak jauh telah menimbulkan suasana dan paradigma baru dalam belajar. Perubahan paradigma itu terkait dengan kebiasaan belajar yang semula berorientasi pada belajar di kampus menjadi belajar di rumah, belajar tatap muka menjadi belajar jarak jauh, berbasis lisan menjadi teks, dan belajar terbimbing menjadi belajar mandiri.

Mengubah kultur belajar mahasiswa dari paradigma lama ke paradigma baru tentu tidak mudah tanpa kerja keras dan sistematis yang harus dilakukan baik oleh mahasiswa maupun oleh UT. Karena itu, layanan sebagai bagian integral dalam konteks PTJJ memiliki

fungsi strategis dalam menunjang keberhasilan studi mahasiswa di UT. Terlebih lagi dengan keadaan, latar belakang, dan kemampuan mahasiswa yang sangat bervariasi. Berbagai persoalan yang dalam konteks belajar di perguruan tinggi tatap muka dapat diselesaikan secara langsung dan berhadapan, dalam konteks Sistem Belajar Jarak Jauh (SBJJ) dilakukan dengan berjarak, tidak selalu langsung, dan memerlukan media.

Memang benar, mahasiswa UT dituntut untuk dapat mandiri. Mandiri dalam belajar, mandiri dalam memecahkan persoalan belajar yang dihadapi, dan mandiri dalam segala hal yang terkait dengan keberhasilan studinya. Namun demikian, kemandirian setiap mahasiswa tidak serta merta tumbuh dan terjadi dengan sendirinya karena hal itu terkait dengan kultur, motivasi, latar belakang, dan kemampuan mahasiswa sendiri. Menjadikan mahasiswa mandiri bukan berarti melepaskan dan membiarkannya sendiri tanpa membekalinya dengan wawasan, sikap, dan keterampilan untuk memandirikannya. Kemandirian tidak berarti bahwa mahasiswa dibiarkan sendiri mengatasi segala hal yang terkait dengan studinya, tanpa pembekalan, sentuhan, dan penyediaan fasilitas dari universitas tempatnya menimba ilmu. Upaya pemandirian mahasiswa harus dilakukan sebelum, di awal, dan ketika mahasiswa belajar di UT. Kemandirian di sini dimaknai sebagai kemampuan mahasiswa untuk berinisiatif, mengatur strategi dan pola belajar, serta mengatasi permasalahan belajar yang dihadapinya dengan atau tanpa bantuan orang lain.

Atas dasar itu pula, mahasiswa baru UT dibekali dengan wawasan ke-UT-an yang disampaikan dalam Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB). Namun, OSMB saat ini lebih berisi informasi ke-UT-an. Sementara wawasan, sikap, dan keterampilan belajar mandiri belum lah tersajikan dengan cukup. Kesertaan mahasiswa dalam OSMB pun tidaklah wajib. Oleh karena itu, pada masa mendatang UT akan

menyediakan paket 'pelatihan' bagi para mahasiswa baru yang terkait dengan apa dan bagaimana UT, strategi belajar di UT, strategi mempelajari bahan ajar, kiat mengelola waktu belajar, cara berkomunikasi dan mengakses berbagai fasilitas informasi dan layanan yang disediakan UT. Pelatihan tersebut bersifat wajib diikuti seluruh mahasiswa, yang dilakukan dalam bentuk tatap muka maupun jarak jauh. Pemandirian mahasiswa ketika studi di UT dilakukan melalui pelbagai informasi dan bimbingan yang diberikan UT serta bahan ajar mata kuliah yang didesain sebagai bahan ajar yang utuh dan membelajarkan.

Untuk memberikan layanan terhadap mahasiswa, sejak awal berdirinya UT membentuk Pusat Pelayanan Mahasiswa (PPM). PPM berfungsi memberikan layanan apa pun yang diperlukan mahasiswa: aduan, keluhan, saran, hingga ke bahan ajar. Sebagai unit, keberadaan Pusat Pelayanan Mahasiswa sempat dibekukan. Fungsi layanan diberikan oleh unit-unit terkait yang ada di Pusat maupun UPBJJ-UT. Namun, ketika mahasiswa yang datang ke UT Pusat dengan segala permasalahannya semakin banyak, Pusat Pelayanan Mahasiswa yang kemudian disebut Unit Pelayanan Mahasiswa (Pelma) dihidupkan kembali. Pegawai Pelma berasal dari unit-unit pendukung teknis UT seperti Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK), Biro Administrasi Akademik, Perencanaan, dan Sistem Informasi (BAAK-RENSI), dan Pusat Pengujian. Namun demikian, fungsi layanan lebih diarahkan pada pemberian informasi yang diperlukan mahasiswa, administrasi akademik, dan hal-hal administratif lainnya. Sementara hal-hal yang bersifat akademik ditangani oleh fakultas, sedangkan hasil ujian oleh Pusat Pengujian.

Layanan mahasiswa dapat dibagi atas tiga macam, yaitu layanan informasi, layanan administrasi akademik, layanan perpustakaan, dan layanan akademik. Layanan akademik mencakup layanan bantuan belajar, konseling, dan bimbingan atau konsultasi akademik.

1. Layanan informasi

Layanan informasi mencakup penyediaan berbagai informasi yang terkait dengan belajar mahasiswa. Di antara bentuk layanan ini adalah ucapan selamat datang (*welcome greeting*) bagi mahasiswa baru, penginformasian program dan kebijakan baru yang relevan, penyapaan bagi mahasiswa nonaktif atau mahasiswa yang beberapa kali gagal ujian, serta respon atas pertanyaan atau aduan mahasiswa. Untuk akses informasi tentang UT, disediakan layanan mahasiswa di UT Pusat atau UPBJJ-UT. Mahasiswa dapat melakukannya dengan datang langsung, melalui telepon, atau membuka *website* UT dengan alamat [http:// www.ut.ac.id](http://www.ut.ac.id), atau info@p2m.ut.ac.id. Melalui *website*-nya, UT telah menyediakan layanan informasi yang cukup lengkap yang dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu informasi umum, informasi akademik, dan informasi lain.

2. Layanan administrasi akademik

Layanan administrasi akademik mencakup komponen dan perangkat yang terkait dengan keperluan studi mahasiswa. Bentuk layanan ini di antaranya meliputi: (1) penyediaan formulir registrasi di Kantor Pos dan UPBJJ-UT seluruh Indonesia; (2) penyediaan bahan ajar cetak dan noncetak di seluruh UPBJJ-UT, toko buku tertentu, dan Koperasi Karunika di UT Pusat, serta bahan ajar dan suplemennya yang dapat diakses oleh mahasiswa secara gratis melalui *website* UT dengan alamat [http:// www.ut.ac.id/ol-suppl/ba_suple.htm](http://www.ut.ac.id/ol-suppl/ba_suple.htm).; (3) alih kredit; (4) hasil ujian, baik berupa Daftar Nilai Ujian (DNU) yang dikirimkan setiap semester kepada mahasiswa, maupun Lembar kemajuan Akademik Mahasiswa (LKAM) yang berisi daftar nilai seluruh mata kuliah yang telah diperoleh mahasiswa; (5) pemberian Surat Keterangan Penempuhan Mata Kuliah bagi mahasiswa nonaktif atau mahasiswa yang berkeinginan untuk tidak

menyelesaikan studinya; serta (6) Surat Keputusan Yudisium bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studi serta ijazah/sertifikat dan transkrip bagi mahasiswa yang telah lulus program.

3. *Layanan Perpustakaan*

Layanan perpustakaan kepada mahasiswa dilakukan oleh UT melalui kerja sama dengan Perpustakaan Nasional RI. Mahasiswa dapat memanfaatkan koleksi Perpustakaan Nasional, baik yang berada di pusat maupun di daerah, dalam hal ini perpustakaan daerah. Untuk mahasiswa di Pulau Jawa, mereka dapat memanfaatkan koleksi perpustakaan perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri (FKP2T) se-Jawa, yang bernaung di bawah Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Untuk dapat memanfaatkan perpustakaan anggota Forum Kerja Sama Perpustakaan Perguruan Tinggi (FKP2T) ini mahasiswa harus memiliki Kartu Sakti dari perpustakaan setempat, dengan biaya Rp 5.000,- per semester.

Untuk memperluas akses mahasiswa terhadap layanan perpustakaan, UT juga bergabung dengan *Indonesia Digital Library Network* (IDLN). IDLN adalah jaringan perpustakaan digital Indonesia yang beranggotakan lebih dari 80 mitra, baik yang berasal dari institusi maupun individual. Pemanfaatan layanan perpustakaan IDLN dapat dilakukan mahasiswa dengan mengakses alamat: <http://gdlhud.indonesiadln.org/>.

4. *Layanan akademik*

Layanan akademik berkaitan dengan bantuan yang diberikan UT kepada mahasiswa dalam menguasai kompetensi mata kuliah dan permasalahan belajar yang dihadapi mahasiswa. Bentuk layanan

meliputi: tutorial, praktek, praktikum, serta konsultasi atau bimbingan akademik.

Tutorial

Tutorial adalah suatu proses pemberian bantuan dan bimbingan belajar dari seseorang kepada orang lain. Dalam sistem pembelajaran di UT, tutorial merupakan bagian integral dari proses pembelajaran mahasiswa. Dalam tutorial terkandung berbagai aspek, yaitu bantuan belajar, interaksi tutor dengan mahasiswa, dan interaksi mahasiswa dengan mahasiswa. Tutorial diupayakan untuk membantu mahasiswa dalam memecahkan berbagai masalah belajar melalui penyediaan tambahan informasi, diskusi, dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan motivasi mahasiswa untuk belajar dan menyelesaikan studi. Di samping itu, tutorial dimaksudkan untuk menumbuhkan kemampuan mahasiswa agar mau dan mampu belajar mandiri.

Dalam konteks pembelajaran di UT, tutor lebih berperan sebagai fasilitator. Sementara hal-hal yang dibahas dalam tutorial lebih bersumber dari pertanyaan-pertanyaan atau problema yang dibawa dan disampaikan mahasiswa. Hal itu terjadi jika mahasiswa sebelum tutorial telah mempelajari bahan ajar. Namun, kenyataan menunjukkan adanya kecenderungan mahasiswa kerap hadir dalam tutorial tanpa kesiapan seperti itu. Sementara tutor pun, kerap tergoda untuk berceramah. Akhirnya, alih-alih tutorial yang terjadi adalah pengajaran di mana mahasiswa lebih asyik sebagai pendengar dan tutor sebagai penceramah. Padahal, tutor telah memiliki rancangan tutorial yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk mengarahkan dirinya dan tutorial yang diasuhnya agar dapat berjalan secara efektif.

Untuk mengatasi hal itu, UT melakukan dua hal. *Pertama*, penerapan seleksi tutor. Tutor direkrut dari dosen (UT, perguruan tinggi, maupun lembaga lain), guru, atau tenaga kependidikan lain yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh UT. *Kedua*, penataran tutor atau pemberian pembekalan sebagai tutor melalui penataran tatap muka maupun jarak jauh. Ribuan tutor pernah mendapat pembekalan dari UT. Namun demikian, karena penataran tutor tatap muka tidak murah, UT tidak dapat melakukannya sendirian. Selama ini penataran tersebut dilakukan melalui kerja sama dan bantuan instansi lain seperti Ditjen Dikdasmen untuk program PGSD dan PGSM, dan Ditjen Dikti melalui Pusat Antaruniversitas (PAU) UT. Pembekalan tutor yang lain dilakukan dengan sistem penataran jarak jauh dengan menggunakan Program Akreditasi Tutor UT (PATUT). Pada tahun 2004 ini UT mulai merintis penyusunan Pedoman Tutorial bagi tutor mahasiswa program PGSD dan Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak (PGTK). Pemilihan kedua program tersebut karena UT berkewajiban menyediakan tutorial tatap muka bagi para mahasiswanya. Biaya tutorial bagi kedua program tersebut terintegrasi dengan biaya SPP.

Ada empat jenis tutorial yang disediakan UT bagi mahasiswa. Keempat jenis tutorial tersebut adalah tutorial tatap muka, tutorial tertulis melalui surat dan media massa, tutorial radio dan televisi, serta tutorial melalui internet (tutorial elektronik).

1. Tutorial Tatap Muka (TTM)

Pada awal berdirinya, UT menyediakan TTM gratis untuk seluruh mahasiswa. Ini dapat terjadi karena mata kuliah seluruh program dikemas berdasarkan paket. Namun, seiring dengan perubahan sistem registrasi yang membebaskan mahasiswa untuk menentukan sendiri mata kuliah yang diambilnya, ditambah lagi mahal biaya

tutorial, maka UT pun tidak lagi menyediakan TTM. Mahasiswa yang memerlukan tutorial membentuk sendiri kelompok dan kegiatan tutorial atau mendaftar ke UPBJJ atas biaya sendiri.

Selanjutnya, mulai tahun 90-an UT memberikan kesempatan kepada masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, untuk menyelenggarakan TTM. Lembaga-lembaga tersebut merekrut dan mengorganisir mahasiswa, bukan hanya dalam hal tutorial, tetapi mulai dari fasilitasi registrasi hingga fasilitasi tempat ujian. Saat itu cukup banyak bermunculan apa yang disebut dengan *UT Kampus*. Namun, dalam perkembangannya, ternyata cukup banyak lembaga-lembaga tersebut yang menjanjikan kelulusan dan mencari cara yang tidak semestinya agar mahasiswa yang diasuhnya lulus ujian dengan mudah dan hasil yang baik. Sistem yang telah dirancang UT tentu saja tidak mudah ditembus untuk keperluan tersebut. Melihat keadaan seperti itu, akhirnya UT pun melepaskan diri dari kerja sama dengan UT Kampus atau lembaga-lembaga penyedia layanan tutorial lainnya. Pelaksanaan tutorial pun selanjutnya diserahkan kepada UPBJJ-UT kembali untuk mengkoordinasikan penyelenggaraannya.

Pada dasarnya, TTM yang dilakukan UT terdiri dari tutorial tatap muka biasa (TTMB) dan tutorial tatap muka rancangan khusus (TTMRK).

TTMB adalah kegiatan tutorial yang inisiatif dan pengelolaan pelaksanaannya, termasuk mencari tutor, sepenuhnya diserahkan kepada mahasiswa. Mahasiswa membentuk sendiri kelompok tutorial dengan atau tanpa bantuan Kelompok Belajar Mahasiswa (KBM). Ragam tutorial ini bersifat opsional. Kegiatan tutorial pun tidak memberikan kontribusi terhadap nilai akhir suatu mata kuliah.

Sesuai dengan namanya, TTMRK, memiliki kekhususan dalam hal: (1) frekuensi pertemuan tutorial sebanyak 8 kali; (2) adanya 3 tugas

tutorial yang harus dikerjakan mahasiswa selama tutorial; (3) persyaratan tutor yang berasal dari dosen perguruan tinggi, serta (4) kontribusi nilai tugas tutorial terhadap nilai akhir mata kuliah sebesar 30%. Kegiatan TTRMK sepenuhnya di bawah kendali dan tanggung jawab UPBJJ-UT.

Penyelenggaraan TTRMK disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, karena permintaan mahasiswa. Sekelompok mahasiswa meminta kepada UPBJJ-UT untuk menyediakan tutorial. Biaya tutorial ditanggung mahasiswa, di luar SPP. *Kedua*, program tutorial itu telah dirancang secara khusus sebagai bagian integral pembelajaran suatu program. Mata kuliah per semester pun disusun secara paket dan ditentukan oleh UT Pusat. Mahasiswa tidak perlu membayar biaya tutorial lagi secara khusus karena biaya tersebut telah termasuk dalam SPP. TTRMK seperti ini berlaku untuk Program PGSD (D-II Penjaskes serta D-II dan S-1 Guru Kelas), Program D-II PGTK, *Advanced Courses Program* (ACP), serta program-program kerja sama.

2. Tutorial Tertulis (Tuter)

Tutorial tertulis adalah bantuan belajar bagi mahasiswa yang dilakukan melalui korespondensi seperti surat menyurat, fax, atau media massa. Jenis tutorial ini ditangani oleh setiap fakultas di UT Pusat. Mahasiswa menerima dan merespon materi inisiasi. Kemudian, tutor yang memberikan balikan. Mata kuliah yang ditutorialkan dengan tuter belum terlalu banyak karena keterbatasan daya dukung SDM dosen UT Pusat.

3. Tutorial Terekam Melalui Siaran

Mahasiswa dapat mengikuti tutorial radio pada Programa Nasional Radio Republik Indonesia (RRI) gelombang FM 93.2 pukul 08.10

WIB. Tutorial radio diudarakan 5 kali seminggu. Sementara itu, tutorial melalui Televisi Republik Indonesia (TVRI) ditayangkan pada hari-hari tertentu. Selain bekerja sama dengan TVRI, UT juga bekerja sama dengan TV Q-Channel. Sebelumnya, UT pernah bekerja sama dengan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) untuk tutorial melalui televisi. Namun karena berbagai kendala, saat ini tutorial melalui TVRI dan TPI tidak ada lagi.

4. *Tutorial Elektronik (Tutel)*

Universitas Terbuka sejak akhir tahun 1999 memberikan layanan tutorial dengan memanfaatkan teknologi jaringan atau internet, yang disebut dengan tutorial elektronik. Untuk mengikuti tutel mahasiswa dapat mengunjungi website UT: <http://www.ut.ac.id/indonesia/tutor/tutel.htm> atau mengirimkan e-mail ke tutel@p2m.ut.ac.id. Mata kuliah yang telah tersedia tutelnya dapat diikuti oleh setiap mahasiswa tanpa dikenakan biaya. Hingga saat ini UT telah menyediakan tutorial internet untuk 174 mata kuliah dari empat fakultas. Para tutor adalah para dosen UT Pusat sebagai pengampu mata kuliah yang ditutorialkan. Dalam tutorial tersebut disediakan tugas tutorial yang harus dikerjakan mahasiswa. Keaktifan mahasiswa dan nilai tugas tutel berkontribusi 10 % terhadap nilai akhir mata kuliah.

Keterlibatan mahasiswa dalam tutel masih bersifat opsional. Kecuali, untuk tutel *Advanced Courses Program* (ACP) yang bersifat wajib karena merupakan bagian yang terintegrasi dengan tutorial tatap muka. Namun demikian, keterlibatan mahasiswa (non-ACP) dalam tutel masih rendah. Hanya sekitar 2 % mahasiswa yang mengikuti tutel. Di antara penyebabnya adalah rendahnya minat dan literasi komputer mahasiswa.

Praktek dan Praktikum

Kegiatan praktek dan praktikum merupakan pengalaman belajar yang wajib dilakukan oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu, yang kompetensi akhirnya berorientasi keterampilan. Untuk keperluan mahasiswa tersebut, ada dua cara yang dilakukan UT. Cara pertama, UT melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga untuk membantu kegiatan praktek dan praktikum mahasiswa. Cara ini lebih mudah dikendalikan dan dikontrol oleh UPBJJ karena lembaga dan orang yang membimbing mahasiswanya jelas. Cara kedua, UT membebaskan mahasiswa untuk mencari sendiri tempat praktek dan praktikum termasuk pembimbing dan instruktur. Mahasiswa diberikan panduan bagaimana praktek dan praktikum itu dilakukan.

Untuk meningkatkan mutu proses dan hasil praktek dan praktikum, saat ini UT sedang melakukan penataan kembali secara menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan praktek dan praktikum. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan pembentukan sentra praktek dan praktikum. Sentra tersebut dapat berupa perguruan tinggi, sekolah, Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu (LPPM), atau lembaga pendidikan lainnya yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. UPBJJ-UT akan menetapkan sentra-sentra tersebut sebagai mitra yang akan membantunya dalam pelaksanaan praktek dan praktikum mahasiswa.

Bimbingan Akademik

Layanan penyuluhan atau konseling meliputi layanan konsultasi mengenai strategi belajar, cara belajar, pemilihan program studi, pemilihan mata kuliah, dan konsultasi masalah-masalah lain yang berkaitan dengan perkuliahan. Untuk keperluan tersebut, mahasiswa

dapat menghubungi fakultas yang bersangkutan atau staf akademik di UPBJJ-UT melalui surat, telepon, internet, atau datang langsung ke UT Pusat.

Setiap awal tahun mulai tahun 2002, UT secara sistematis telah melakukan penyapaan kepada mahasiswa melalui surat. Fungsi penyapaan ini, selain untuk menciptakan komunikasi yang akrab dengan mahasiswa, juga bermanfaat untuk melihat kemajuan akademik dan memetakan masalah belajar yang dialami mahasiswa. Untuk mahasiswa yang sudah lewat masa studi tapi belum dapat lulus, diberikan beberapa bantuan alternatif seperti melalui Program Penanganan Mahasiswa Aktif Lewat Masa Studi (ALMS), kesempatan mengikuti ujian ulang di setiap semester, dan pemberian tugas tambahan dengan kriteria tertentu. Mahasiswa yang tidak melanjutkan studinya, akan diberikan Surat Keterangan Penempuh-an Mata Kuliah.

Berbagai upaya penyempurnaan dilakukan oleh UT untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Hal ini tampak dari berbagai kebijakan manajemen UT yang berupaya menciptakan pelayanan prima dalam semua aspek untuk memenuhi kepuasan pengguna atau mahasiswanya. Upaya-upaya tersebut di antaranya sebagai berikut.

- a. Mengembangkan berbagai perangkat pedoman dan instrumen pelayanan mahasiswa.
- b. Menjalin dan memelihara kerja sama dengan berbagai instansi di dalam dan di luar UT untuk membuka akses pelayanan yang lebih luas bagi setiap mahasiswa. Sebagai contoh, dalam hal bantuan pembelajaran lewat udara, agar diperoleh daya jangkauan tutorial udara yang luas, UT bekerja sama dengan RRI. Siaran tutorial udara melalui RRI dilakukan 5 kali dalam seminggu selama 25 menit per siaran. Siaran melalui TVRI dilakukan setiap dua minggu dengan durasi waktu 25 menit per

jam tayang. Melalui kerja sama dengan dua lembaga pemerintah tersebut diharapkan mutu dan daya jangkauan siaran tutorial udara UT akan lebih baik dan luas. Sementara itu, tutorial melalui televisi dilakukan UT bekerja sama dengan televisi Q-Channel.

- c. Menyediakan fasilitas *online* yang memungkinkan pangkalan data mahasiswa dapat diakses oleh setiap unit yang ada di UT, sehingga pelayanan dapat diberikan secara akurat dan cepat.
- d. Untuk memberikan pelayanan secara jarak jauh dan cepat, UT juga menyediakan fasilitas pelayanan mahasiswa melalui internet yang dapat diakses oleh setiap mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Fasilitas ini dilengkapi dengan *Net-Blazer* dan *Linux* untuk aplikasi internet. Dengan dilengkapi oleh peralatan modern dan SDM yang profesional, UT telah menawarkan sejumlah web suplemen mata kuliah melalui media internet (tutorial elektronik). Penerapan teknologi internet ini merupakan upaya terkini yang mampu meningkatkan mutu sistem penyampaian UT. Mahasiswa dapat mengakses informasi tentang soal tugas mandiri dan nilai ujian melalui internet. Mulai 2004.2 dapat mengecek nilai ujian melalui *Short Message System* (SMS).
- e. Memberikan bantuan belajar tambahan dalam bentuk tutorial remediasi bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya dengan tepat waktu, seperti melalui Program Penanganan Mahasiswa Aktif Lewat Masa Studi (ALMS) Program D-II PGSD.

Dalam *Universitas Terbuka Memasuki Era Gelora Simintat Tahun 2004*, Atwi Suparman selaku Rektor UT menetapkan arah penataan bantuan belajar dan layanan administrasi akademik dan konseling. Menurut Rektor, bantuan belajar kepada mahasiswa harus bermakna dan mudah diakses, yang diindikasikan oleh hal-hal sebagai berikut.

- a. Menjadi bagian integral dari kegiatan belajar mahasiswa, di samping belajar mandiri.
- b. Berkontribusi terhadap kualitas proses belajar mandiri dan nilai akhir
- c. Tersedia berbagai modus tutorial sehingga setiap mahasiswa dapat mengikuti minimal satu modus tutorial.

Dalam hal layanan administrasi dan konseling dinyatakan bahwa:

- a. tersedia konselor/pembimbing pada saat mahasiswa membutuhkan; dan
- b. tersedia sarana komunikasi dalam berbagai modus (seperti surat menyurat, telepon, faksimile, dan internet) yang dapat dipilih mahasiswa dan konselor pada saat dibutuhkan. □

Daftar Pustaka

- Evans, T. 1994. *Understanding Learners in Open and Distance Education*. London: Kogan Page.
- Garland, M.R. 1993. 'Student perceptions of the situational, institutional, dispositional, and epistemological barriers to persistence'. *Distance Education*, 14 (2).
- Harry, K, John., and Keegan, D. (Eds). 1993. *Distance Education: New Perspectives*. London: Routledge.
- Kadarko, W. 2002. 'Kemampuan belajar mandiri dan faktor-faktor psikososial yang mempengaruhinya: kasus Universitas Terbuka'. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, 1 (1).
- McLoughlin, C. 2002. 'Learner support in distance and networked learning environments: ten dimensions for successful design'. *Distance Education*, 23. (2).

- Puspitasari, K. A. & Islam, S. 2003. 'Kesiapan belajar mandiri mahasiswa dan calon potensial mahasiswa pada pendidikan jarak jauh di Indonesia'. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, 4, (1), hal. 16-31.
- Simpson, O. 2000. *Supporting Students in Open and Distance Learning*. London: Kogan Page Limited.
- Sugilar. 2000. 'Kesiapan belajar mandiri peserta pendidikan jarak jauh'. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, 1, (2), hal. 1-13.
- Universitas Terbuka. 2004. *Katalog UT 2004*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka. 2000. *Laporan Evaluasi Diri UT*. Jakarta: Universitas Terbuka.

PERKEMBANGAN SISTEM EVALUASI HASIL BELAJAR

Siti Julaelha

Sistem Evaluasi Hasil Belajar

Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengukur keberhasilan studi mahasiswa dalam satu mata kuliah dan atau satu program studi. Kegiatan ini terdiri dari serangkaian aktivitas yang dimulai dari pengembangan bahan ujian, pemrosesan dan penggandaan bahan ujian, pelaksanaan ujian, serta pengolahan dan pengumuman hasil ujian.

Pada awal berdirinya, UT merancang dua jenis evaluasi hasil belajar, yaitu tes unit dan tes akhir. Tes unit diselenggarakan dua kali di tengah proses belajar. Sementara itu, tes akhir sesuai dengan namanya, diselenggarakan pada akhir semester. Kedua jenis tes tersebut diselenggarakan di kelas di bawah pengawasan petugas ujian.

Saat ini ada tiga cara yang dilakukan UT dalam melakukan evaluasi hasil belajar bagi mahasiswanya. *Pertama*, evaluasi dilakukan secara

mandiri oleh mahasiswa melalui latihan dan tes formatif dalam setiap modul, serta Tugas Mandiri. *Kedua*, evaluasi dilakukan oleh instruktur dalam kegiatan praktek dan praktikum, dan tutor dalam kegiatan tutorial. *Ketiga*, evaluasi dilaksanakan langsung oleh UT secara serempak di seluruh Indonesia dalam ujian akhir semester atau ujian akhir program.

Ada tujuh jenis evaluasi belajar yang dilakukan UT pada saat ini. Jenis evaluasi hasil belajar tersebut adalah Tugas Mandiri (TM), Tugas Tutorial, Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Praktek atau Praktikum, Ujian Pemantapan Kemampuan Profesional, serta Ujian Komprehensif Tertulis (UKT) atau Tugas Akhir Program (TAP).

1. Tugas Mandiri (TM)

TM bertujuan untuk mengukur penguasaan mahasiswa terhadap suatu mata kuliah. Materi yang diujikan dalam TM mencakup 50% dari materi bahan ajar yang disajikan dalam buku materi pokok (BMP). TM dapat berbentuk tes pilihan ganda, soal uraian, atau bentuk lain sesuai dengan kompetensi yang dituntut dari suatu mata kuliah. Tugas Mandiri dikerjakan oleh mahasiswa secara mandiri, tanpa pengawasan. kemudian hasilnya dikirimkan kepada tutor atau kepada UPBJJ-UT untuk dinilai. Hasil TM berkontribusi sebesar 15% - 20% terhadap nilai akhir mata kuliah.

Naskah TM beserta Lembar Jawaban Tugas Mandiri (LJTM) dapat diperoleh di UPBJJ-UT pada waktu mahasiswa menyerahkan berkas registrasi. Saat ini, naskah TM dimasukkan ke dalam Buku Materi Pokok (modul) mata kuliah, atau mahasiswa dapat mengaksesnya melalui *website* UT dengan alamat: <http://www.ut.ac.id/tm/>.

2. Tugas Tutorial

Dengan disediakannya tutorial tatap muka rancangan khusus (TTMRK) dan tutorial *online*, mahasiswa diminta untuk mengerjakan 3 tugas yang harus dikerjakan pada saat kegiatan tutorial. Setiap tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa dinilai dan diberi masukan oleh tutor. Kehadiran dan keaktifan mahasiswa dalam tutorial serta nilai tugas tutorial yang diperoleh merupakan nilai tutorial yang berkontribusi 30% terhadap nilai akhir suatu mata kuliah. Sementara itu, nilai tugas tutorial pada tutorial *online* memiliki kontribusi 10 % terhadap nilai akhir suatu mata kuliah.

3. Ujian Akhir Semester (UAS)

UAS bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa pada suatu mata kuliah secara utuh, meliputi seluruh materi bahan ajar mata kuliah. UAS merupakan komponen pengendali dan parameter keberhasilan belajar mahasiswa dalam menguasai kompetensi suatu mata kuliah. Ujian ini dilaksanakan secara tertulis maupun lisan. UAS diselenggarakan secara serentak di tempat-tempat ujian yang telah ditentukan oleh UT.

4. Penilaian Praktek

Ujian praktek dimaksudkan untuk mengukur keterampilan mahasiswa dalam menerapkan konsep, prinsip, dan prosedur dalam situasi nyata atau buatan secara terprogram untuk mata kuliah nonsains. Praktek ini bersifat wajib dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa yang tidak mengikuti atau melakukan praktek, nilai akhir mata kuliahnya tidak akan diumumkan kendati yang bersangkutan telah mengikuti UAS. Nilai ujian praktek memberikan kontribusi sebesar 15% - 40% terhadap nilai akhir suatu mata kuliah.

5. Penilaian Praktikum

Praktikum dimaksudkan untuk mengukur keterampilan dan ketepatan mahasiswa dalam melakukan praktikum dalam bidang sains. Nilai praktikum memberikan kontribusi sebesar 15% - 100% terhadap nilai akhir suatu mata kuliah.

6. Ujian Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP)

Pemantapan kemampuan profesional merupakan salah satu program kulminatif yang harus dilakukan oleh mahasiswa peserta program yang menuntut kemampuan unjuk kerja. Bentuk kegiatan PKP dari berbagai program studi relatif berbeda, sesuai dengan karakter dan jenis kemampuan yang dituntut. Pada Program D-III Penyuluhan Pertanian FMIPA (Pertanian, Peternakan, Perikanan), misalnya, PKP dilakukan melalui Praktek Kerja Lapangan. Sementara itu, pada Program D-II Penyelia Industri dan Jasa FMIPA, kegiatan PKP disebut Praktek Kerja. Program D-II Perpustakaan FISIP melaksanakan kegiatan PKP melalui kegiatan Praktek Kerja Perpustakaan.

Pada program-program studi di FKIP terdapat dua jenis ujian PKP, yaitu Ujian Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) untuk mahasiswa peserta program diploma dan Ujian Pemantapan Kemampuan Profesional untuk mahasiswa yang mengikuti program sarjana. Ujian PKM difokuskan pada kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran, sementara itu, PKP difokuskan pada kemampuan merancang, melaksanakan, serta meningkatkan dan memperbaiki pembelajaran berdasarkan kaidah-kaidah penelitian tindakan kelas (PTK). Untuk FKIP, PKM/PKP merupakan salah satu *exit-requirement* atau persyaratan kelulusan seluruh program kependidikan.

7. Tugas Akhir Program (TAP)

Ujian Komprehensif Tertulis (UKT) merupakan persyaratan kelulusan untuk semua program sarjana. Pada tahun 2003.2 pimpinan UT mengubah UKT menjadi Tugas Akhir Program (TAP). TAP dimaksudkan untuk memverifikasi penguasaan kompetensi mahasiswa secara komprehensif terhadap suatu bidang ilmu tertentu dan mengekspresikannya secara tertulis. Oleh karena itu, peserta TAP adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademik. Substansi soal TAP bersifat problematik, menyeluruh, dan terbuka-terarah. Problematik artinya soal-soal yang diberikan berkenaan dengan permasalahan yang harus dipecahkan berdasarkan konsep-konsep keilmuan secara memadai. Menyeluruh artinya jawaban yang diminta menuntut kemampuan mahasiswa untuk mengaitkan unsur-unsur keilmuan dari berbagai mata kuliah secara terpadu. Terbuka-terarah artinya soal-soal TAP memungkinkan mahasiswa memberikan jawaban dari sudut pandang yang berbeda yang sesuai dengan rambu-rambu jawaban yang diinginkan. Selain itu, soal TAP juga menguji kemampuan berpikir profesional, artinya mahasiswa dituntut untuk menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam konteks profesinya.

Pengembangan Soal dan Pengolahan Hasil Ujian

Pengembangan soal, pada awalnya dikoordinasikan oleh bank soal atau unit pengembangan soal (UPS) di setiap fakultas. UPS ini bertugas mengelola pengembangan soal, penyiapan naskah ujian, pemeriksaan ujian uraian dan ujian komprehensif tertulis, penyiapan bahan yudisium, serta penyimpanan kartu soal. Namun dalam

perjalanannya, tuntutan layanan akademik yang semakin beragam menyadarkan UT akan perlunya layanan ujian yang terkoordinasi dengan baik melalui pendirian bank soal. Bank soal dikembangkan untuk membantu penyiapan soal dengan kualitas yang standar. Bank soal, dalam pendidikan terbuka dan jarak jauh yang bersifat masal, merupakan komponen yang sangat penting. Kehadiran bank soal sangat diperlukam, terutama untuk mempermudah proses pengelolaan (pengumpulan, seleksi, dan revisi) butir soal, perakitan soal, dan kalibrasi butir soal. Soal-soal yang tersimpan dapat sewaktu-waktu dipilih dan dirakit menjadi naskah ujian baru dengan acuan kisi-kisi mata kuliah.

Pelbagai upaya peningkatan kualitas penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara terus-menerus. Dari sisi alat penilaian, upaya tersebut dilakukan mulai dari penentuan kompetensi pengembang, pengembangan kisi-kisi standar, kesesuaian bentuk soal dengan karakteristik mata kuliah, keseimbangan jumlah butir soal dengan waktu ujian, hingga pengelolaan soal dalam bank soal UT yang dilakukan secara komputerisasi. Dari segi pelaksanaan penilaian, peningkatan mutu tersebut di antaranya dilakukan melalui peningkatan pengawasan ujian serta penyediaan waktu dan tempat ujian yang memudahkan mahasiswa untuk mengikutinya. Pada aspek pengolahan hasil ujian, upaya itu dilakukan dengan cara mempercepat pemrosesan dan pengumuman hasil ujian. Pemeriksaan hasil ujian uraian yang semula dilakukan seluruhnya di UT Pusat secara bertahap dilakukan di UPBJJ-UT dengan melibatkan dosen UT di daerah dan dosen-dosen dari perguruan tinggi setempat. Mahasiswa-mahasiswa yang terdeteksi melakukan kecurangan dan kerja sama ujian langsung diberi nilai E. Tindakan ini didasarkan atas catatan pengawas ketika ujian berlangsung, serta pola jawaban yang terdeteksi oleh pemeriksa jawaban mahasiswa

untuk ujian uraian, dan oleh program komputer yang telah didesain secara khusus oleh UT.

Secara rinci, langkah-langkah yang dilakukan UT untuk mengendalikan mutu ujian adalah sebagai berikut.

1. *Pengembangan Kisi-kisi Soal*

Kisi-kisi soal mencakup peta sebaran untuk setiap mata kuliah, TIK mata kuliah dan indikator soal, ragam soal, serta ranah evaluasi berikut jenjang ranah yang diukur. Kisi-kisi soal ditulis, ditelaah, dan divalidasi oleh para dosen dari dalam dan luar UT. Dalam pengembangan soal, kisi-kisi berfungsi memandu pengembang soal agar soal yang dikembangkan sesuai dengan tujuan atau kompetensi mata kuliah sehingga reliabilitas dan validitas soal pun dapat terwujud dengan baik.

2. *Penulisan Bahan Ujian*

Penulisan soal dilakukan dengan mengacu pada kisi-kisi mata kuliah yang telah ditetapkan. Untuk kepentingan bank soal UT, setiap soal dikembangkan sekurang-kurangnya 10 butir. Para penulis soal adalah para dosen UT dan dosen dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta yang memenuhi kriteria tertentu, seperti berlatar belakang bidang studi yang relevan, sekurang-kurangnya Lektor untuk yang berpendidikan S-1 atau Asisten Ahli untuk yang berpendidikan S-2/S-3. Sebelum mengembangkan soal, mereka dilatih terlebih dahulu dalam hal tata penulisan soal UT.

3. *Penelaahan dan Perakitan Soal*

Untuk mengantisipasi adanya kemungkinan butir soal yang kurang baik, para dosen dari setiap fakultas melakukan penelaahan setiap butir soal. Penelaahan difokuskan pada semua aspek soal: isi, bahasa, konstruksi, dan kesesuaiannya dengan

kisi-kisi. Soal-soal yang tidak sesuai, diperbaiki oleh penelaah atau dikembalikan kepada penulisnya jika kesalahan itu terlalu banyak.

Selanjutnya, soal yang telah dianggap baik diserahkan kepada Bank Soal, Pusat Pengujian UT. Pada awalnya, para penelaah merakit soal itu secara manual sehingga dihasilkan set soal untuk setiap mata kuliah. Namun pada saat ini karena sistem bank soal sudah berjalan, perakitan soal telah dapat dilakukan secara terkomputerisasi.

4. *Pemrosesan Bahan Ujian*

Selanjutnya, soal-soal yang dinyatakan siap pakai diketik, disunting dan difinalkan, dicetak, digandakan, dan dikemas dalam paket-paket khusus. Dengan didukung oleh perangkat teknologi dan tenaga-tenaga yang terlatih, diharapkan dapat menghasilkan bahan-bahan ujian yang berkualitas tinggi. Kemudian, bahan-bahan ujian tersebut dikirimkan ke setiap UPBJJ-UT di bawah koordinasi Pusat Distribusi UT.

Seperti hanya pengembangan bahan ujian, pemrosesan bahan ujian pun dikontrol secara berlapis dengan prosedur sebagai berikut.

- a. Pengiriman kartu soal oleh petugas khusus Unit Pengembangan Soal Fakultas ke Pusat Pengujian.
- b. Pengetikan naskah ujian oleh petugas yang ditunjuk dengan kode akses yang hanya diketahui oleh petugas yang ditunjuk.
- c. Penyuntingan dan finalisasi naskah ujian dilakukan oleh pengampu mata kuliah di ruangan khusus di Pusat Pengujian.

- d. Pengepakan soal dilakukan dalam paket-paket tertutup dan dibubuhi dengan segel, di bawah pengawasan petugas khusus.

Diharapkan melalui serangkaian prosedur tersebut, mutu dan kerahasiaan bahan ujian akan tetap terjaga.

5. *Pelaksanaan Ujian*

Hingga saat ini, ujian dilaksanakan empat kali dalam setahun, dengan tempat ujian sebanyak 424 yang tersebar di seluruh Indonesia dan 24 di luar negeri. Pelaksanaan ujian di daerah dilakukan di bawah koordinasi masing-masing UPBJJ-UT, dengan petugas ujian yang direkrut dari dalam dan luar UT. Sedangkan ujian di luar negeri dilakukan di bawah koordinasi masing-masing Atase Pendidikan.

Untuk menjaga ketertiban ujian, di samping telah tersedia pedoman ujian, UT pun menetapkan penanggung jawab lokasi ujian, serta pengawas ujian dan pengawas keliling pada masing-masing tempat ujian. Pada beberapa daerah, UT pun mengirimkan pemantau khusus. Mahasiswa yang terdeteksi melakukan kecurangan dikenakan sanksi. Sanksi itu dapat berupa peringatan, pembatalan nilai hasil ujian, pemberian nilai E, hingga pencabutan status kemahasiswaan. Sementara itu, bagi petugas yang tidak melakukan fungsinya dengan baik, apalagi melakukan pelanggaran, sanksi diberikan dalam bentuk surat peringatan, tidak digunakan lagi sebagai petugas ujian, hingga pemecatan jika dilakukan oleh pegawai UT.

6. *Pengolahan Hasil Ujian*

Mutu proses pengolahan hasil ujian dilakukan dengan cara:

1. komputerisasi pengolahan hasil ujian,
2. kalibrasi butir soal, dan

3. pengolahan hasil ujian uraian oleh dua orang pemeriksa. Sebelum dilakukan pengolahan secara komputerisasi, terlebih dahulu hasil ujian mahasiswa diperiksa oleh staf akademik. Untuk menghindari unsur subyektivitas, pemeriksaan dilakukan oleh dua orang dengan berpedoman pada rambu-rambu jawaban ujian.

Berbagai kegiatan tersebut dipayungi oleh perangkat sistem jaminan kualitas yang berkenaan dengan ujian.

Hingga tahun 1990, UT hanya menyelenggarakan ujian dua kali dalam setahun, yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Namun, setelah itu waktu ujian pun bertambah menjadi empat kali dalam satu tahun. Dua kali ujian untuk program-program reguler, dan dua kali untuk program-program nonreguler. Selain menyelenggarakan ujian untuk mahasiswa UT sendiri, UT pun pernah ditugasi untuk melaksanakan ujian negara dalam skala nasional, seperti ujian nasional Pancasila.

Walaupun UT telah menerbitkan Panduan Pelaksanaan Ujian dan Tata Tertib Ujian, penyimpangan penyelenggaraan dan kecurangan ujian masih terdengar. Untuk itu, pemantauan ujian dari Pusat dilakukan di tempat-tempat yang dinilai rawan kecurangan. Berdasarkan hasil pemantauan, UT telah melakukan tindakan dalam bentuk teguran kepada Kepala UPBJJ-UT yang bertindak salah, penutupan tempat ujian perluasan yang bermasalah, pengupayaan tempat ujian di ruang/gedung yang dapat menampung peserta ujian dalam jumlah yang banyak, serta melakukan kerja sama dengan PTN atau instansi lain untuk peminjaman ruang dan pengawas penyelenggaraan ujian. Selain itu, upaya lain yang dilakukan untuk menangkal penyimpangan dan kecurangan tersebut adalah dengan memberlakukan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan kecurangan berdasarkan pemeriksaan pola jawaban melalui

komputer. Hingga saat ini, UT terus berupaya untuk mencari pendekatan yang lebih baik lagi agar pelaksanaan ujian dapat berlangsung tanpa cacat.

Pengolahan hasil ujian dilakukan tersentralisasi di UT Pusat oleh Pusat Pengujian bersama dengan Fakultas dan Pusat Komputer sampai diperoleh nilai akhir mahasiswa. Pada awalnya, pemrosesan ujian mengalami keterlambatan, karena UT masih meminjam alat pemrosesan di Universitas Indonesia dan tenaga pemrosesnya pun belum terlatih. Mahasiswa mendapat hasil ujian setelah lebih dari dua bulan. Pada tahun 1985/1986 UT sudah membeli komputer untuk memproses hasil ujian. Namun, alat pembaca optik masih dari PUSILKOM – UI. Penyelenggaraan ujian pertama dengan sistem operasional baru berjalan relatif aman, meskipun jauh lebih rumit. Kecepatan pemrosesan hasil ujian juga mengalami kemajuan. Hasil ujian sudah dapat diumumkan dalam dua bulan setelah ujian dilaksanakan. Sejak tahun 2001, UT sudah dapat mengumumkan hasil ujian delapan minggu setelah hari terakhir ujian.

Sebelum tahun 2002, pengumuman nilai ujian mahasiswa dilakukan oleh UT Pusat dengan mengirimkan Daftar Nilai Ujian (DNU) kepada setiap mahasiswa. Namun, pada tahun 2002 pengiriman DNU kepada mahasiswa dilakukan oleh UPBJJ-UT. Pusat Pengujian hanya mengirimkan disket nilai kepada UPBJJ-UT dan selanjutnya UPBJJ-UT melakukan pencetakan dan pengiriman DNU kepada mahasiswa. Selain melalui DNU, mulai semester 2004.2 mahasiswa dapat melihat hasil ujian secara *online*, dan mulai semester 2004.1 nilai ujian dapat dilihat mahasiswa melalui *Short Message System* (SMS).

Seperti yang telah dikemukakan, ujian merupakan alat untuk mengukur kualitas lulusan. Kualitas lulusan hanya dapat dikatakan baik, jika mereka dibuktikan baik berdasarkan alat ukur yang sah

dan dapat dipercaya. Dalam hal ini, peningkatan kualitas alat ukur meliputi jenis butir soal, validitas perangkat ujian, jenis ujian. Dsamping itu, kemungkinan pelaksanaan *individualized examination by computer* akan diupayakan UT pada masa menda-tang. UT juga berusaha untuk dapat melaksanakan ujian secara *online*. Dengan penerapan ujian *online* ini, mahasiswa yang tidak mengikuti ujian pada jadwal yang telah ditentukan atau akan mengikuti ujian ulang dapat mengikuti ujian tanpa harus menunggu pelaksanaan ujian pada semester berikutnya.

Ujian akhir program dengan menggunakan skripsi belum dapat dilakukan, walaupun di dalam kurikulum mahasiswa sudah dimungkinkan memilih jalur utama. Dalam hal ini ada kendala yang secara teknis masih belum dapat diatasi, yaitu pembimbingan penulisan dan ujian sidang skripsi.

Upaya peningkatan kualitas ujian merupakan upaya yang harus terjadi secara terus menerus dan menjadi prioritas bagi kegiatan pengembangan UT. Kredibilitas UT sebagai lembaga pendidikan tinggi sangat tergantung kepada kesahihan dan keterpercayaan sistem ujiannya.

Simpulan

Sistem pengelolaan termasuk registrasi, distribusi dan evaluasi, serta subsistem bahan ajar dan ujian sepenuhnya berada di bawah kontrol UT karena ditangani oleh unit-unit dan sumber daya manusia yang secara langsung dapat dikendalikan oleh UT sendiri. Namun, untuk subsistem proses pembelajaran, UT tidak dapat mengontrol sepenuhnya pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Dalam konteks SBJJ yang menuntut kemandirian belajar mahasiswa, mahasiswa sepenuhnya menentukan dan melakukan sendiri aktivitas

belajar yang dilakukannya —mulai dari mempelajari modul, mengerjakan tugas-tugas, memecahkan masalah dan kesulitan belajar, membentuk kelompok belajar, hingga mengatur waktu dan tempat serta menetapkan gaya belajar— dengan mengacu pada bahan ajar yang telah dirancang dan disiapkan secara khusus oleh UT. Namun demikian, kemandirian tidak berarti melepaskan mahasiswa untuk menghadapi proses belajarnya sendiri. UT menyediakan bantuan dan layanan belajar yang diperlukan mahasiswa seperti tutorial dalam berbagai modus, konseling, bimbingan akademik, dan pemberian balikan kemajuan belajar mahasiswa.

Seiring dengan visi UT tahun 2010 sebagai salah satu pusat unggulan di Asia dalam penyelenggaraan, penelitian dan pengembangan, serta penyebaran informasi tentang pendidikan tinggi jarak jauh, UT pun melakukan penataan dan pembenahan sistem dan subsistemnya secara terus menerus untuk mencapai visi yang telah ditetapkannya. Standardisasi mutu penataan itu dikawal dengan seperangkat pedoman dan panduan yang berada di bawah payung Sistem Jaminan Kualitas UT, yang pada tahun 2004 diresmikan Rektor dalam tema kerja *Universitas Terbuka Memasuki Era Gelora Simintas Tahun 2004*. □

BIODATA PENULIS

BIODATA

Agus Saryadi adalah Kepala Subbag Umum pada Lembaga Penelitian Universitas Terbuka. Di samping itu, ia juga menjadi editor majalah *Suara Terbuka* dan editor pelaksana majalah *Komunika* (majalah komunikasi sivitas akademika Universitas Terbuka). Ia menyelesaikan pendidikan S-1 dalam bidang Sastra Indonesia dari Universitas Nasional, dan Sarjana Muda dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia jurusan Sastra Indonesia. Sejak mahasiswa, aktif menulis di berbagai media.

Aminudin Zuhairi adalah Lektor dalam pendidikan dan Kepala Pusat Jaminan Kualitas (Pusmintas) Universitas Terbuka. Program Doktor di University of New England Australia, dalam bidang pendidikan diraihinya pada tahun 1995. Ia memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan jarak jauh selama lebih dari 18 tahun. Minat penelitiannya adalah bidang pendidikan tinggi jarak jauh, manajemen

kualitas, dan pengembangan sumber daya manusia. Obsesinya adalah membantu menciptakan masyarakat yang sejahtera, damai dan lestari di planet bumi.

Anak Agung Made Sastrawan Putra adalah Kepala Pusat Distribusi Universitas Terbuka, di samping jabatannya sebagai Lektor pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Terbuka. Sebelumnya pernah menjadi Kepala Bidang Penyiapan dan Penggandaan Naskah Ujian, Pusat Pengujian Universitas Terbuka (1996-2003), Asisten Pembantu Rektor III Bidang Operasional (1993-1996), staf Pembantu Rektor III (1989-1990), Koordinator Registrasi untuk mahasiswa FISIP (1988-1989), dan Kepala Unit Pelayanan Mahasiswa (1987-1988). Pendidikan S-1 diperoleh dari IPB dalam bidang perikanan, dan S-2 dari University of Victoria, Canada (1990-1993).

Atwi Suparman adalah Guru Besar Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka dan pengajar Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Saat ini beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Terbuka.

Bambang Sutjiatmo adalah Guru Besar Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Deputi Menteri Negara Riset dan Teknologi Program Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ia menjadi Rektor Universitas Terbuka periode 1996-2000. Sarjana Teknik Mesin diperoleh dari ITB pada tahun 1972, *Diplom-Ingenieure* di Technische Universitaet, Hannover pada tahun 1976, dan Doktor Ilmu Teknik di ITB pada tahun 1989.

Benny Suprpto Brotosiswojo adalah Guru Besar Ilmu Fisika Institut Teknologi Bandung (ITB). Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pasti dan Ilmu Alam dari ITB pada tahun 1960, dan Doctor of Philosophy dari Purdue University, Amerika Serikat pada tahun 1964. Pernah menjadi Direktur Pendidikan Menengah Umum (1976-1988), Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan (1988-1992), Rektor Universitas Terbuka (1992-1996), dan kemudian Rektor Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

C. Supartomo adalah Kepala Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Terbuka (1997-sekarang) di samping sebagai Lektor Kepala pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Sebelum bekerja di Universitas Terbuka, ia bekerja di Departemen Pekerjaan Umum (1978-1986). Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1978. Pendidikan S-2-nya diselesaikan pada tahun 1994 dalam bidang ilmu dan universitas yang sama.

Dewi Juliah Ratnaningsih adalah Lektor pada Jurusan Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dan staf Peneliti pada Pusat Penelitian Kelembagaan Lembaga Penelitian Universitas Terbuka. Gelar Sarjana Statistiknya diperoleh dari Institut Pertanian Bogor.

Durri Andriani adalah Lektor Kepala pada FKIP UT dan saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Indonesia, Universitas Terbuka. Pendidikan master pada bidang Manajemen Pendidikan Jarak Jauh diselesaikannya tahun 1989 dari *Simon Fraser University*-Kanada. Kemudian pendidikan doktor diselesaikannya di *University of*

Victoria-Kanada, pada tahun 1995. Pendidikan jarak jauh, terutama aspek manajemen, menjadi fokus dari penelitian dan pengembangan yang dilakukannya sejak bekerja di UT tahun 1985.

Effendi Wahyono adalah Lektor Kepala di jurusan Sosiologi, FISIP-UT. Ia dilahirkan di Tegal, 21 Mei 1960. Gelar sarjana (S-1) dan master Humaniora didapatkannya di Universitas Indonesia, jurusan Sejarah. Kepala Perpustakaan UT sejak tahun 1996 hingga tahun 2003 ini, sedang mengikuti pendidikan S-3 jurusan Sejarah, Universitas Indonesia.

Mohamad Muzammil adalah staf edukatif Fakultas Ekonomi UT. Spesialisasi kajiannya mencakup bidang Manajemen Pemasaran dan Manajemen Strategik. Saat ini bekerja pada Pusat Jaminan Kualitas (Pusmintas) UT. Sering menulis berbagai artikel, makalah dan selain itu juga telah menulis beberapa buku atau bahan ajar, diantaranya adalah: Strategi Pemasaran, Pemasaran Sosial, Teknik Penulisan Laporan dan Pengantar Bisnis.

Mohamad Yunus adalah Lektor dalam pendidikan bahasa Indonesia pada FKIP-UT sejak tahun 1989. Ia lahir di Cirebon pada tanggal 10 November 1965. Kesarjanaannya diraih pada tahun 1988 dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Program Master diselesaikannya pada tahun 1996 di Fakultas Pendidikan, *The Ohio State University*, Columbus, dalam bidang Pendidikan Sekolah Dasar. Pada awal kariernya sebagai dosen, ia menunjukkan minatnya dalam linguistik terapan. Namun, tugas dan lingkungan yang digeluti mengarahkan minatnya pada masalah kurikulum dan pembelajaran. Di samping jabatannya sebagai Pembantu Dekan Bidang

Akademik pada FKIP-UT, ia pun aktif memberikan pelatihan dalam bidang pembelajaran.

Setijadi adalah pensiunan Guru Besar UT, Rektor UT (1984-1992), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (1974-1980), Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (1970-1974), Pembantu Rektor I IKIP Malang (1966-1969) di samping sebagai pengajar pada lembaga yang sama. Pendidikan tertinggi adalah Doctor of Philosophy yang diperoleh dari Cornell University Amerika Serikat pada tahun 1964. Keterlibatannya dalam pendidikan tinggi dimulai sejak tahun 1954 sebagai asisten dosen dan diakhiri pada tahun 1994 sebagai Guru Besar pada Universitas Terbuka. Saat ini ia masih bekerja sebagai tenaga lepas di Universitas Terbuka dengan tugas membimbing dosen muda, dan menjadi editor majalah dan buku terbitan Universitas Terbuka.

Siti Juliaeha adalah Lektor pada FKIP dan Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan, FKIP Universitas Terbuka. Ia menyelesaikan program sarjana tahun 1988 di IKIP Bandung dalam bidang Kurikulum dan Teknologi Pendidikan serta memperoleh gelar *Master of Arts* dari *University of Victoria*-Kanada dalam bidang Psikologi Pendidikan pada tahun 1995.

Sri Suharmini Wahyuningsih adalah Kepala Bidang Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka, Perpustakaan Universitas Terbuka di samping jabatannya sebagai Lektor pada Jurusan Komunikasi FISIP Universitas Terbuka. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi D-II Perpustakaan Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP, dan Kepala

Bidang Pelayanan Bahan Pustaka Perpustakaan Universitas Terbuka. Memperoleh gelar sarjana sejarah dari Jurusan Sejarah Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo, dan sarjana perpustakaan dari Jurusan Perpustakaan Universitas Indonesia.

Sugilar adalah Lektor pada Jurusan Matematika FMIPA UT. Pendidikan doktor diselesaikannya di Universitas Negeri Jakarta pada bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan pada tahun 1999. Saat ini, ia menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Kelembagaan di Lembaga Penelitian Universitas Terbuka.

Sulaiman adalah Kepala Bagian Pendidikan dan Kerja Sama pada Biro Administrasi Akademik, Perencanaan, dan Sistem Informasi (1996-sekarang). Ia menjabat sebagai Kepala Bidang Penyiapan dan Penggandaan Bahan Ujian, Pusat Pengujian Universitas Terbuka (1992-1996). Sebelum bekerja di Universitas Terbuka, ia bekerja di Pusat Inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (1983-1984). Pendidikan S-1 dari IKIP Malang Jurusan Administrasi Pendidikan (lulus tahun 1982), dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari STIE Jakarta (1997).

Tina Ratnawati adalah Kepala Hubungan Masyarakat Universitas Terbuka (2001-sekarang). Sebelumnya ia pernah menjadi Sekretaris Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (2000-2001), dan Pengelola Bank Soal pada fakultas yang sama. Ia juga terlibat aktif dalam pengembangan Program Studi Penyuluhan, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Terbuka. Memperoleh gelar Sarjana Biologi dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah (1986),

dan gelar Master of Science (MSc) dalam bidang Environmental Management dari Griffith University, Queensland, Australia.

Udin S. Winataputra adalah Guru Besar pada FKIP, yang kini menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Terbuka. Ia menyelesaikan pendidikan *Master of Arts (MA)* di *Macquarie University*, Australia pada tahun 1979 dalam bidang *Curriculum Development* dan Doktor Pendidikan dalam bidang *Pendidikan IPS* pada *Universitas Pendidikan Indonesia* tahun 2001. Ia juga aktif pada berbagai organisasi profesi, di antaranya sebagai Sekretaris Jenderal *Center for Indonesian Civic Education (CICED)* dan anggota *Civitas International* dan *National Council for the Social Studies*, dan sebagai sekretaris *ISPI* (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia), serta *Dewan Pakar Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Sosial Indonesia (HISPISI)*. Sejak memulai kariernya sebagai dosen, ia memusatkan perhatian utama pada perkembangan dan permasalahan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan IPS, kurikulum dan pembelajaran, serta pendidikan jarak jauh.

Yulia Budiwati adalah Lektor dalam bidang Antropologi dan Sosiologi pada Jurusan Sosiologi FISIP UT, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Jurusan Sosiologi pada fakultas yang sama. Pendidikan S-1 diselesaikan di Universitas Gadjah Mada dalam bidang antropologi, sedangkan S-2 dalam bidang yang sama dari Universitas Indonesia. Saat ini ia aktif dalam kegiatan pengembangan program studi dan berbagai kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan masalah pendidikan dan sosial.

PANITIA

**PANITIA PENYUSUNAN BUKU 20 TAHUN
UNIVERSITAS TERBUKA**

Pelindung	: Rektor
Pengarah	: 1. Para Pembantu Rektor 2. Para Dekan
Penanggungjawab	: Ketua Lembaga Penelitian
Wakil Penanggungjawab	: Sekretaris Lembaga Penelitian
Ketua	: Effendi Wahyono
Sekretaris	: Sardjijo
Anggota	: 1. A. P. Hardhono 2. Aminuddin Zuhairi 3. Dewi Julia R. 4. Durri Andriani 5. Moh. Muzammli 6. Moh. Yunus 7. Siti Julaeha 8. Sri Kurniati Handayani 9. Sri Suharmini W. 10. Sugilar 11. Suryo Prabowo 12. Tina Ratnawati 13. Yulia Budiwati
Pengumpul Data	: 1. Asnah Said 2. Prayekti 3. Sardjijo
Sekretariat	: Mulyadi Nasir

